RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

RAKYAT LAMPUNG BERJAYA

(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2019

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ILampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumenperencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD Tahun 2019-2024, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a. PD dalam menyusun Renstra-PD:

b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD,

c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	:	Gambaran Umum Keuangan Daerah
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX	:	Penutup

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

(2) Pengendaliandan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehKepala Bappeda.

(3) Tindaklanjut hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi masukan untuk perbaikan atau perubahan RPJMD

(4) Perubahan RPJMD yang tidak merubah target indikator sasaran terakhir periode dan nomenklatur Program Prioritas, dilakukan melalui Peraturan Gubernur yang mengatur tentang RKPD

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAHPROVINSI LAMPUNGNOMOR (13-330/2019)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah langkah strategis itu kemudian di tuangkan dalam sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah: (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.dan merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.

Memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, dijelaskan bahwa tahapan pembangunan 2020-2025 ditujukan pada "upaya mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan". Kondisi yang diproyeksikan pada periode ini mengisyaratkan perlunya keadaan dimana tingkat kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah dan pelayanan kesehatan tersebar merata dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial yang semakin dinamis dan stabil, serta mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas dan seni budaya. Demikian halnya dengan perekonomian daerah yang semakin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di tingkat global.

Proyeksi kondisi Infrastruktur pada dokumen RPJPD 2005-2025 adalah infrastruktur yang makin mantap dengan daya dukung yang tinggi serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Berikutnya kondisi yang diinginkan adalah terkait keanekaragaman hayati bukan hanya dapat dilestarikan tapi menjadi keunikan daerah yang merupakan ikon pariwisata dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air terkelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Seiring dengan hal tersebut, penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Untuk menjaga momentum tersebut, banyak hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya (RPJMD 2005-2009, RPJMD 2010-2014, dan RPJMD 2015-2019) serta perlu disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang ingin diraih.

Selanjutnya dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 500

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.3.1. Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah I-9
1.3.2. Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD I-11
1.3.3. Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan RTRW Provinsi Lampung I-12
1.3.4. RPJMD dan RPJM Nasional I-9
1.4. Maksud dan Tujuan I-15
1.5. Sistematika Penulisan I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-1
2.1.1. Kondisi Geografi Daerah II-1
2.1.2. Kondisi Topografi II-4
2.1.3. Kondisi Geologi II-6
2.1.4. Kondisi Hidrologi II-9
2.1.5. Kondisi Klimatologi II-15
2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah II-17
2.1.7. Wilayah Rawan Bencana II-22
2.1.8. Daerah Tertinggal II-33
2.1.9. Kondisi Demografi II-44
2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah II-46
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-46
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi II-46
2.2.1.2. Inflasi Daerah II-51
2.2.1.3. PDRB per Kapita II-52
2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan Penduduk II-54
2.2.1.5. Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson). II-56

2.2.1.6. Kemiskinan II-57
2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia II-64
2.2.1.8. Indeks Pembangunan Gender II-66
2.2.1.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) II-68
2.2.1.10. Ketenagakerjaan II-71
2.2.1.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka II-72
2.2.1.12. Penduduk Bekerja di Sektor Formal-Informal II-74
2.2.1.13. Persentase PAD terhadap Pendapatan II-75
2.2.1.14. Opini BPK II-76
2.2.1.15. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) II-76
2.2.1.16. Penguatan Cadangan Pangan II-77
2.2.2. Aspek Daya Saing Daerah II-78
2.2.2.1. Nilai Tukar Petani II-78
2.2.2.2. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Perbankan II-80
2.2.2.3. Angka Kriminalitas II-81
2.2.3. Aspek Pelayanan Umum II-82
2.2.3.1 Pendidikan II-82
2.2.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar II-82
2.2.3.1.2. Angka Partisipasi Murni II-86
2.2.3.1.3. Angka Partisipasi Sekolah II-88
2.2.3.1.4. Angka Putus Sekolah II-90
2.2.3.1.5. Angka Melek Huruf II-91
2.2.3.1.6. Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah II-93
2.2.3.1.7. Standar Nasional Pendidikan II-97
2.2.3.1.8. Sarana Dan Prasarana II-98
2.2.3.1.9. Infrastruktur Bangunan II-100
2.2.3.1.10. Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK II-101
2.2.3.1.11. Rasio Guru Terhadap Siswa II-103
2.2.3.1.12. Akreditasi Sekolah II-103
2.2.3.2. Kesehatan II-105
2.2.3.2.1. Angka Kematian Bayi II-105
2.2.3.2.2. Angka Kematian Balita II-109
2.2.3.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI) II-111
2.2.3.2.4. Angka Harapan Hidup II-113
2.2.3.2.5. Komponen Kesehatan II-115

2.2.3.2.6. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) II-116
2.2.3.2.7. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah sakit).....II-118
2.2.3.2.8. Tenaga Kesehatan.....II-121
2.2.3.2.9. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak.....II-124
2.2.3.2.10. Angka Penemuan TB semua jenis (Case Notification Rate/CNR) II-128
2.2.3.2.11. Angka Kesakitan DBD.....II-129
2.2.3.2.12. Angka Kesakitan HIV/AIDs.....II-132
2.2.3.2.13. Angka Kesakitan Malaria.....II-134
2.2.3.2.14. Penyakit Tidak Menular.....II-137
2.2.3.2.15. Cakupan Puskesmas.....II-138
2.2.3.2.16. Cakupan Jaminan Kesehatan II-139
2.2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....II-140
2.2.3.4. Perumahan dan Permukiman.....II-145
2.2.3.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (tambahkan data NAPZA, Status Penanganan Konflik Sosial dan Korban Trafficking).....II-148
2.2.3.6. Sosial.....II-157
2.2.3.6.1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....II-157
2.2.3.6.2. Korban Bencana II-166
2.2.3.6.3. Tuna Sosial, Gelandangan, Pemulung, BWLP, ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA II-166
2.2.3.6.4. Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran.....II-167
2.2.3.6.5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial....II-168
2.2.3.7. Tenaga Kerja II-170
2.2.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .II-173
2.2.3.9. Pangan.....II-178
2.2.3.10. Pertanahan.....II-185
2.2.3.11. Lingkungan Hidup.....II-186
2.2.3.12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil II-197
2.2.3.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....II-198
2.2.3.14. Penanggulangan Bencana Daerah II-202
2.2.3.15. Pengendalian Penduduk.....II-217
2.2.3.16. Perhubungan.....II-221

2.2.3.17. Kominfo dan Statistik II-222
2.2.3.18. Koperasi dan UMKM II-228
2.2.3.19. Fokus Iklim Berinvestasi II-230
2.2.3.20. Pemuda dan Olah Raga II-232
2.2.3.21. Kebudayaan II-235
2.2.3.22. Perpustakaan dan Kearsipan II-236
2.2.3.23. Kearsipan II-238
2.2.3.24. Pariwisata II-239
2.2.3.25. Transmigrasi II-241
2.2.3.26. Perikanan II-242
2.2.3.27. Energi II-247
2.2.3.28. Kepegawaian II-247
2.2.3.29. Pendidikan dan Pelatihan II-248
2.2.3.30. Penelitian dan Pengembangan II-250
2.2.3.31. Pengawasan II-251
2.2.4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) II-253
2.2.5. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II-262
2.3. Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2015-2017 ..... II-272
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.1.1 Pendapatan Daerah III-7
3.1.1.2 Belanja Daerah III-7
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah III-9
3.1.2. Neraca Daerah III-10
3.1.2.1. Aset III-10
3.1.2.2. Kewajiban III-11
3.1.3. Ekuitas Dana III-11
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-17
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah III-17
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-18
3.3. Kerangka Pendanaan III-20
3.3.1. Proyeksi Pendapatan III-20
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah III-31
3.3.2.1. Proyeksi Belanja Tidak Langsung III-31
3.3.2.2. Proyeksi Belanja Langsung III-31

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah III-31
3.3.4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah III-35
3.3.5. Kebijakan Alokasi Anggaran..... III-35
3.3.6. Costing/Kebutuhan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal III-37
3.3.7. Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Skema Pembiayaan di Provinsi Lampung III-46
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DAERAH IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan.....IV-1
4.2. Isu Strategis IV-7
4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah IV-7
4.2.2. Isu Isu Strategis Kewilayahan IV-13
4.2.2.1. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Lampung. IV-13
4.2.2.2. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis di Provinsi Lampung.....IV-14
4.2.2.3. Percepatan Pengembangan Kawasan Industri.....IV-14
4.2.2.4. Permasalahan Kewilayahan Kota Bandar Lampung....IV-15
4.2.2.5. Daerah Rawan Bencana dan Penanganan SPM Kebencanaan di Provinsi Lampung.....IV-15
4.2.2.6. Pengembangan Komoditi unggulan Provinsi Lampung IV-17
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1. Tinjauan terhadap RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025..... V-1
5.1.1. Visi dan Misi RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025.....V-1
5.1.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 .....V-2
5.1.3. Tahapan dan skala prioritas pembangunan 2005-2025 .....V-3
5.2. Visi Pembangunan Daerah 2019-2024..... V-3
5.3. Misi Pembangunan Daerah 2019-2024..... V-4
5.3.1. Misi 1 .....V-5
5.3.2. Misi 2 .....V-6
5.3.3. Misi 3 .....V-7
5.3.4. Misi 4 .....V-8
5.3.5. Misi 5 .....V-9
5.3.6. Misi 6 .....V-10
5.4. Agenda Kerja Utama V-11
5.5. Tujuan dan Sasaran.....V-23

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....VI-1
6.1. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah VI-1
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif.....VI-11
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial.....VI-1
6.3.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang.....VI-44
6.3.2 Rencana Kawasan Strategis VI-48
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
BAB IX PENUTUP.....IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan.....IX-1
9.2. Pedoman Transisi IX-2

DAFTAR TABEL

TABEL 2- 1 Luas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung II-2
TABEL 2- 2 Nama Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung II-10
TABEL 2- 3 Sepuluh DAS Terbesar di Provinsi Lampung II-12
TABEL 2- 4 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung II-13
TABEL 2- 5 Jenis Tanah Provinsi Lampung II-15
TABEL 2- 6 Curah Hujan Rata-Rata Pertahun (Mm) II-16
TABEL 2- 7 Luas Kawasan Lindung II-22
TABEL 2- 8 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung II-25
TABEL 2- 9 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi II-26
TABEL 2- 10 Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Lampung II-26
TABEL 2- 11 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Prov. Lampung II-27
TABEL 2- 12 Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung II-28
TABEL 2- 13 Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung II-28
TABEL 2- 14 Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Prov Lampung II-29
TABEL 2- 15 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung Krakatau di Prov. Lampung II-30
TABEL 2- 16 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung II-30
TABEL 2- 17 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung II-31
TABEL 2- 18 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung II-32
TABEL 2- 19 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung II-32
TABEL 2- 20 Luasan Lahan Kritis Provinsi Lampung II-35
TABEL 2- 21 Kemampuan Keuangan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung 2017 ..... II-39
TABEL 2- 22 Pengeluaran Konsumsi Per kapita II-40
TABEL 2- 23 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten/Kota, 2017 ..... II-41
TABEL 2- 24 Jumlah desa berdasarkan jenis jalan, 2018 ..... II-42
TABEL 2- 25 Jumlah desa berdasarkan jenis transportasi yang dimiliki, 2018 ..... II-42
TABEL 2- 26 Jumlah desa berdasarkan Base Transceiver Station (BTS), 2018 ..... II-43
TABEL 2- 27 Jumlah desa berdasarkan kepemilikan alat mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana, 2018 ..... II-43
TABEL 2- 28 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014-2017 ..... II-45
TABEL 2- 29 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2012 - 2018 ..... II-48
TABEL 2- 30 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2012 -2018 ..... II-49
TABEL 2- 31 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017 (Persen) II-50
TABEL 2- 32 Inflasi se-Sumatera Tahun 2014-2018 ..... II-52
TABEL 2- 33 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah) II-53
TABEL 2- 34 Indeks Gini se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018 ..... II-55
TABEL 2- 35 Persentase Penduduk Miskin Lingkup Regional Sumatera II-57
TABEL 2- 36 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) se-Sumatera Tahun 2014-2018 ..... II-60
TABEL 2- 37 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) se-Sumatera Tahun 2014-2018 ..... II-62
TABEL 2- 38 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2014-2018 ..... II-63
TABEL 2- 39 Jumlah Rumah Tangga/Individu Miskin Berdasarkan *data by name by address* Basis Data Terpadu Tahun 2015 ..... II-64

TABEL 2- 40 Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera Tahun II-65
TABEL 2- 41 Indeks Pembangunan Gender se-Sumatera Tahun 2014-2018 ....II-68
TABEL 2- 42 Indeks Pemberdayaan Gender se-Sumatera II-71
TABEL 2- 43 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, 2014-2018 ....II-72
TABEL 2- 44 Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera II-73
TABEL 2- 45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja se-Sumatera Tahun 2014-2018....II-73
TABEL 2- 46 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ....II-75
TABEL 2- 47 Score PPH Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ....II-76
TABEL 2- 48 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2014-2017 ....II-77
TABEL 2- 49 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung 2014-2018....II-78
TABEL 2- 50 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2014-2018 ....II-79
TABEL 2- 51 Nilai Tukar Petani antara Provinsi Lampung dan Indonesia II-80
TABEL 2- 52 Tabel Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Perbankan Tahun 2014-2018 ....II-81
TABEL 2- 53 Angka Kriminalitas di Kab/Kota se-Provinsi Lampung....II-82
TABEL 2- 54 Pelayanan Pendidikan SD Sederajat....II-83
TABEL 2- 55 Pelayanan Pendidikan SMP Sederajat II-83
TABEL 2- 56 Pelayanan Pendidikan SMA Sederajat....II-84
TABEL 2- 57 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, 2014-2018....II-85
TABEL 2- 58 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA/K se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018 ....II-85
TABEL 2- 59 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan, 2014-2018....II-86
TABEL 2- 60 Angka Partisipasi Murni se-Sumatera Tahun 2014-2018 ....II-87
TABEL 2- 61 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Tahun 2014-2018....II-89
TABEL 2- 62 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia II-89
TABEL 2- 63 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tahun 2014-2018 ....II-91
TABEL 2- 64 Angka Melek Huruf se-Sumatera dan Nasional....II-92
TABEL 2- 65 Harapan Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018....II-94
TABEL 2- 66 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional II-95
TABEL 2- 67 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2014-2018 ....II-96
TABEL 2- 68 Capaian Standar Nasional pendidikan Jenjang SMA....II-97
TABEL 2- 69 Sekolah Luar Biasa Tahun 2018....II-100
TABEL 2- 70 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Kab/Kota, 2017 ....II-101
TABEL 2- 71 Jumlah Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung 2014-2019....II-101
TABEL 2- 72 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung 2014-2019 ....II-102
TABEL 2- 73 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2015-2017....II-103
TABEL 2- 74 Angka Harapan Hidup Provinsi se Sumatera II-115
TABEL 2- 75 Capaian AHH, AKB, AKI, Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Kurang Gizi Tahun 2017 di Provinsi Lampung....II-116
TABEL 2- 76 Rasio Puskesmas, Pustu Terhadap Penduduk di Propinsi Lampung Tahun 2014-2017 ....II-116
TABEL 2- 77 Jumlah Puskesmas se-Sumatera Tahun 2014-2018....II-117
TABEL 2- 78 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung....II-118
TABEL 2- 79 Jumlah Rumah Sakit se-Sumatera Tahun 2014-2018....II-120

TABEL 2- 80 Rasio Dokter Terhadap 100.000 Penduduk se-Sumatera Tahun 2014-2016 ..... II-122
TABEL 2- 81 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018 ..... II-131
TABEL 2- 82 Jumlah Kasus HIV Baru se-Sumatera dan Nasional II-133
TABEL 2- 83 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk II-136
TABEL 2- 84 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2017 ..... II-141
TABEL 2- 85 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2013 – 2018 ..... II-141
TABEL 2- 86 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2016 ..... II-143
TABEL 2- 87 Persentase Penduduk yag Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018 ..... II-145
TABEL 2- 88 Jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung Tahun 2018 ..... II-147
TABEL 2- 89 Jumlah Rumah Bencana Alam Tsunami Provinsi Lampung Tahun 2018 ..... II-148
TABEL 2- 90 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia se-Sumatera II-150
TABEL 2- 91 Jumlah Peraturan Daerah yang Dilanggar II-152
TABEL 2- 92 OPD Provinsi, Jumlah PPNS dan Urusan Pemerintahan yang Dikawal Tahun 2017 ..... II-153
TABEL 2- 93 Rekapitulasi Kasus Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2018 ..... II-155
TABEL 2- 94 Jumlah PMKS di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-157
TABEL 2- 95 Data PMKS yang Sudah Ditangani di Provinsi Lampung II-158
TABEL 2- 96 Data Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Lampung II-159
TABEL 2- 97 Data Jumlah KSM Yang Menerima Bantuan PKH Tahun 2014-2018 ..... II-165
TABEL 2- 98 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018 ..... II-168
TABEL 2- 99 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2017 ..... II-170
TABEL 2- 100 Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Setengah Penganggur di Provinsi Lampung, 2016-2017 ..... II-171
TABEL 2- 101 Perkembangan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 172
TABEL 2- 102 Perkembangan Produksi Padi - Jagung – Ubikayu 180
TABEL 2- 103 Kinerja Luas Padi - Jagung – Ubikayu se-Sumatera 181
TABEL 2- 104 Produktivitas Padi, Jagung dan Ubi Kayu Lampung dan Indonesia 182
TABEL 2- 105 Produktivitas Padi - Jagung – Ubikayu se-Sumatera 182
TABEL 2- 106 Produksi Daging Sapi se-Sumatera Tahun 2014-2018 183
TABEL 2- 107 Produksi Daging Ayam Ras Petelur dan Pedaging II-184
TABEL 2- 108 Produksi Daging Ayam Buras se-Sumatera II-184
TABEL 2- 109 Data Akses Pelayanan Persampahan Provinsi Lampung II-186
TABEL 2- 110 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung II-187
TABEL 2- 111 Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kinerja Perusahaan di Provinsi Lampung Peserta Proper KLHK Tahun 2014-2018 ..... II-190
TABEL 2- 112 Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kinerja Perusahaan di Provinsi Lampung Peserta Proper KLHK Tahun 2014-2018 ..... II-194
TABEL 2- 113 Persentasi Penduduk Melakukan Perekaman E-KTP dan Memiliki E-KTP Tahun 2015-2018 ..... II-198
TABEL 2- 114 Rekap Jumlah Status Desa Membangun (IDM) 2015- 2017 ..... II-199
TABEL 2- 115 Data Kejadian Bencana se-Sumatera Tahun 2014-2018 ..... II-203
TABEL 2- 116 Data Bencana Kebakaran Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-205

TABEL 2- 117 Data Bencana Puting Beliung Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-207
TABEL 2- 118 Data Bencana Gempa Bumi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ..... II-209
TABEL 2- 119 Data Bencana Tanah Longsor Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-211
TABEL 2- 120 Data Bencana Banjir Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-213
TABEL 2- 121 Data Kejadian Banjir se-Sumatera Tahun 2014-2018 ..... II-214
TABEL 2- 122 Persentase Peserta KB se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018 ..... II-219
TABEL 2- 123 Penilaian PeGI Provinsi Lampung Tahun 2014-2015 ..... II-223
TABEL 2- 124 Persentase Layanan Pengaduan Secara Online yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu II-226
TABEL 2- 125 Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2017 ..... II-228
TABEL 2- 126 Data Koperasi Berdasarkan Jenis Tahun 2018 ..... II-229
TABEL 2- 127 Data UKM Unggulan Di Provinsi Lampung II-229
TABEL 2- 128 Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui UPT Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 ..... II-230
TABEL 2- 129 Tabel Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2013-2018 ..... II-231
TABEL 2- 130 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Di Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2018 ..... II-232
TABEL 2- 131 Prestasi Olah Raga Provinsi Lampung 2014-2017 ..... II-233
TABEL 2- 132 Pengunjung Perpustakaan Di Provinsi Lampung II-237
TABEL 2- 133 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya II-241
TABEL 2- 134 Perkembangan Produksi Perikanan 2014-2018 ..... II-242
TABEL 2- 135 Sebaran Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Laut Lampung 2018 II-243
TABEL 2- 136 Persentase Pegawai ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tahun 2015-2018 ..... II-248
TABEL 2- 137 Persentase Aparatur Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Dengan Ketentuan Predikat Minimal Memuaskan Dan Hasil Post Test Minimal 70 ..... II-249
TABEL 2- 138 Nilai Kualifikasi Akreditasi BPSDM Provinsi Lampung II-250
TABEL 2- 139 Kinerja Kelitbangan Provinsi Lampung II-251
TABEL 2- 140 JENIS LAYANAN SPM PROVINSI II-256
TABEL 2- 141 Integrasi Indikator SDGs ke Dalam RPJMD II-262
TABEL 2- 142 Indikator Kinerja dan Target Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015-2017 ..... II-272
TABEL 3- 1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 - 2018 ..... III-4
TABEL 3- 2 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018 ..... III-7
TABEL 3- 3 Target dan Realisasi Belanja Daerah III-8
TABEL 3- 4 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2014-2018 ..... III-9
TABEL 3- 5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah 2014-2017 ..... III-12
TABEL 3- 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2015-2017 ..... III-17
TABEL 3- 7 Defisit Riil Anggaran 2015-2017 ..... III-19
TABEL 3- 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran 2015-2017 ..... III-20
TABEL 3- 9 Proyeksi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ..... III-30

TABEL 3- 10 Target dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2024 ..... III-33
TABEL 3- 11 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 ..... III-35
TABEL 3- 12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 ..... III-36
TABEL 3- 13 Model Perhitungan Target Penanganan SPM Pendidikan III-38
TABEL 3- 14 Target Group SPM Pendidikan di Provinsi Lampung III-38
TABEL 3- 15 Penghitungan SPM Bidang Pendidikan Khusus III-39
TABEL 3- 16 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi III-40
TABEL 3- 17 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa/KLB Provinsi III-41
TABEL 3- 18 Rekapitulasi Rumah Terdampak Bencana Tsunami di Prov Lampung Tahun 2018 ..... III-42
TABEL 3- 19 Besaran Dana Tak Terduga Provinsi Lampung 2019-2024 ..... III-43
TABEL 3- 20 Skema Perhitungan Kebutuhan Pendanaan SPM Bidang Sosial III-44
TABEL 4- 1 Permasalahan dan Indikator Penanganan Masalah IV-3
TABEL 4- 2 Penanganan SPM Kebencanaan di Provinsi Lampung IV-16
TABEL 5- 1 Agenda Kerja Utama berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan ..V-20
TABEL 5- 2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung V-25
TABEL 6- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Provinsi Lampung VI-2
TABEL 6- 2 Prioritas Pembangunan Jangka Menengah VI-11
TABEL 6- 3 Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama VI-32
TABEL 6- 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Lampung VI-55
TABEL 7- 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung VII-2
TABEL 7- 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ..... VII-3
TABEL 8- 1Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-1
TABEL 8- 2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VIII-4

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1- 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan I-9
GAMBAR 1- 2 Visi Indonesia 2020-2025 ..... I-10
GAMBAR 2- 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung II-3
GAMBAR 2- 2 Peta Topografi Provinsi Lampung II-5
GAMBAR 2- 3 Peta Geologi Provinsi Lampung II-9
GAMBAR 2- 4 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung II-13
GAMBAR 2- 5 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung II-14
GAMBAR 2- 6 Peta Hidrologi Provinsi Lampung II-15
GAMBAR 2- 7 Peta Klimatologi Provinsi Lampung II-17
GAMBAR 2- 8 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung II-24
GAMBAR 2- 9 Peta Sebaran Fauna di Provinsi Lampung II-34
GAMBAR 2- 10 Peta Kawasan Pemanfaatan Umum II-36
GAMBAR 2- 11 Peta Kawasan Pemanfaatan Umum II-36
GAMBAR 2- 12 Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu II-37
GAMBAR 2- 13 Peta Alur Laut II-38
GAMBAR 2- 14 Presentasi Penduduk Miskin Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2017 ..... II-40
GAMBAR 2- 15 Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 2017 ..... II-46
GAMBAR 2- 16 Proyeksi Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 2034 (Bonus Demografi) II-46
GAMBAR 2- 17 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018 ..... II-47
GAMBAR 2- 18 Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014 – 2018 (Persen) II-51
GAMBAR 2- 19 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014 – 2018 (Rp. Juta) II-53
GAMBAR 2- 20 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018 ..... II-55
GAMBAR 2- 21 Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 ..... II- 56
GAMBAR 2- 22 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia II-57
GAMBAR 2- 23 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2014–2018 (Ribu Jiwa) II-59
GAMBAR 2- 24 *Trend* Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ..... II-59
GAMBAR 2- 25 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018 ..... II-61
GAMBAR 2- 26 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ..... II-61
GAMBAR 2- 27 Perbandingan Indeks Keparahan Kemikinan (P2) antara Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018 ..... II-62
GAMBAR 2- 28 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014 – 2018 ..... II-65
GAMBAR 2- 29 Peta IPM Provinsi di Indonesia 2017 ..... II-65
GAMBAR 2- 30 IPM Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2018 ..... II-66
GAMBAR 2- 31 IPG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018 ..... II-67
GAMBAR 2- 32 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung II-67
GAMBAR 2- 33 *Trend* IDG Provinsi Lampung dan Indonesia II-69
GAMBAR 2- 34 Komposit IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2017 ..... II-70
GAMBAR 2- 35 Trend IDG Provinsi Lampung dan Indonesia II-70

GAMBAR 2- 36 Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal Tahun 2014-2018 ....II-74
GAMBAR 2- 37 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ....II-75
GAMBAR 2- 38 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018 ....II-86
GAMBAR 2- 39 Perbandingan Angka Partisipasi Murni Antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018 ....II-88
GAMBAR 2- 40 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah antara Provinsi Lampung dan NasionalTahun 2014-2018 ....II-90
GAMBAR 2- 41 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA II-91
GAMBAR 2- 42 Perbandingan Angka Melek Huruf antara Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018 ....II-92
GAMBAR 2- 43 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, 2014-2018 ....II-93
GAMBAR 2- 44 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, Tahun 2014-2018 ....II-94
GAMBAR 2- 45 Ratio Sarana dan Prasarana SMA 2015-2017 ....II-99
GAMBAR 2- 46 Ratio Sarana dan Prasarana 2015-2017 ....II-99
GAMBAR 2- 47 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 2015-2017 ....II-100
GAMBAR 2- 48 Jumlah Murid dan Guru SMA/SMK Tahun 2014-2018 ....II-102
GAMBAR 2- 49 Akreditasi Sekolah SMA 2015-2017 ....II-104
GAMBAR 2- 50 Akreditasi Sekolah SMK 2015-2017 ....II-105
GAMBAR 2- 51 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan 2018 ....II-105
GAMBAR 2- 52 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2013 & 2018 (RISKESDAS) II-106
GAMBAR 2- 53 *Trend* Angka Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2002–2012 ....II-107
GAMBAR 2- 54 Kematian Bayi Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ....II-108
GAMBAR 2- 55 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2017 ....II-109
GAMBAR 2- 56 Trend Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung II-109
GAMBAR 2- 57 Trand Kasus Kematian Balita di Provinsi Lampung II-110
GAMBAR 2- 58 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017 ....II-110
GAMBAR 2- 59 Penyebab Kematian Balita Tahun 2017 ....II-111
GAMBAR 2- 60 Angka Kematian Ibu Menurut SDKI Tahun 1991-2012 ....II-111
GAMBAR 2- 61 Kasus Kematian Ibu Tahun 2014-2017 ....II-112
GAMBAR 2- 62 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung II-112
GAMBAR 2- 63 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2017 ....II-113
GAMBAR 2- 64 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia II-113
GAMBAR 2- 65 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota II-114
GAMBAR 2- 66 AHH Perempuan dan Laki-Laki di Provinsi Lampung II-114
GAMBAR 2- 67 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018 ....II-118
GAMBAR 2- 68 Jenis Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di Provinsi Lampung Tahun 2017 ....II-119
GAMBAR 2- 69 Jumlah Rumah Sakit Provinsi Lampung dan Nasional II-120
GAMBAR 2- 70 *Trend* Ratio Dokter Per satuan Penduduk II-121

GAMBAR 2- 71 Rasio Dokter Terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung dan Nasional 2014-2016 ..... II-122
GAMBAR 2- 72 *Trend* Ratio Dokter spesialis Per satuan Penduduk II-123
GAMBAR 2- 73 *Trend* Ratio Bidan Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-124
GAMBAR 2- 74 *Trend* Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-125
GAMBAR 2- 75 *Trend* Cakupan Pelayanan Neonatal Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-126
GAMBAR 2- 76 *Trend* Cakupan Neonatal Resti Ditangani Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-126
GAMBAR 2- 77 *Trend* Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak (Cakupan kunjungan Bayi dan balita) Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-127
GAMBAR 2-78 *Trend* Cakupan Desa/Kelurahan UCI Di Provinsi Lampung 128
GAMBAR 2- 79 Angka Penemuan Tuberkolosis (CNR TB) per 100.000 Penduduk Provinsi Lampung 2014-2017 ..... II-128
GAMBAR 2- 80 Case Notification Rate (CNR) Per Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2017 ..... II-129
GAMBAR 2- 81 Angka Kesakitan DBD, penanganan dan kematian (CFR) II-130
GAMBAR 2- 82 Distribusi Angka Kesakitan DBD (IR) Per 100.000 Penduduk Di Provinsi Lampung Per Kab/Kota, Tahun 2017 ..... II-130
GAMBAR 2- 83 Angka Kesakitan DBD antara Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018 ..... II-131
GAMBAR 2- 84 *Trend* Prevalensi HIV/AIDS Provinsi Lampung II-132
GAMBAR 2- 85 Jumlah Kasus HIV Baru Lampung dan Nasional ..... II- 133
GAMBAR 2- 86 Kecenderungan Angka Kejadian, Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk dan Kematian akibat malaria Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-134
GAMBAR 2- 87 Angka Kesakitan Malaria Positif (API) per 1000 penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 ..... II-135
GAMBAR 2- 88 Trend Angka Kesakitan Malaria di II-137
GAMBAR 2- 89 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Provinsi Lampung Tahun 2015 sd 2017 ..... II-137
GAMBAR 2- 90 Jumlah Puskesmas dengan Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2017 ..... II-138
GAMBAR 2- 91 Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2017 ..... II-139
GAMBAR 2- 92 Cakupan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Di Provinsi Lampung Tahun 2016 ..... II-140
GAMBAR 2- 93 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2014–2018 ..... II-142
GAMBAR 2- 94 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, ... II-142
GAMBAR 2- 95 Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik II-143
GAMBAR 2- 96 Kondisi Jaringan Irigasi Kondisi Baik (meter) II-144
GAMBAR 2- 97 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015–2018 ..... II-146
GAMBAR 2- 98 Luas Kawasan Kumuh (Ha) menurut Kabupaten/Kota, 2018 ..... II-146
GAMBAR 2- 99 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2009-2017 ..... II-150
GAMBAR 2- 100 Perbandingan Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2017 ..... II-151
GAMBAR 2- 101 Jumlah Kasus Kriminalitas Provinsi Lampung II-156

GAMBAR 2- 102 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Provinsi Lampung Tahun 2015-2016 ..... II-156
GAMBAR 2- 103 Data Panti Sosial dan Anak Terlantar Non Pemerintah ..... II- 161
GAMBAR 2- 104 Persentase Anak Terlantar, Anak Jalanan, ABH yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya II-162
GAMBAR 2- 105 Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2014-2018 ..... II-163
GAMBAR 2- 106 Persentase Penyandang Disabilitas Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2014-2018..... II- 164
GAMBAR 2- 107 Persentase Keluarga Miskin yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosial Tahun 2014-2017 ..... II-164
GAMBAR 2- 108 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2018 ..... II-166
GAMBAR 2- 109 Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, Pemulung, BWLP, ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2014-2018 ..... II-167
GAMBAR 2- 110 Persentase Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran yang dapat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2014-2018 ..... II-167
GAMBAR 2- 111 Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial II-169
GAMBAR 2- 112 *Trend* Persentase PSM, Karang Taruna. WKBSM, TKSK yang Telah Dibina Dan Menyelenggarakan Pelayanan Kesos Tahun 2014-2018 169
GAMBAR 2- 113 Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018 ..... II-173
GAMBAR 2- 114 Pertisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-174
GAMBAR 2- 115 Persentasi Kekerasan Perempuan Provinsi Lampung II-174
GAMBAR 2- 116 *Trend* Persentase Kekerasan Anak Provinsi Lampung II-175
GAMBAR 2- 117 Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2015 ..... II-175
GAMBAR 2- 118 Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Anak Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2015 ..... II-176
GAMBAR 2- 119 Jumlah Anggaran Responsif Gender Di Pemprov Lampung II-176
GAMBAR 2- 120 Jumlah OPD yang memiliki ARG Di Pemprov Lampung II-177
GAMBAR 2- 121 Jumlah Kab/Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung II-178
GAMBAR 2- 122 Jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018 ..... II-178
GAMBAR 2- 123 Persentase Produksi Padi - Jagung – Ubikayu Provinsi Lampung Tahun 2014 -2018 ..... II-179
GAMBAR 2- 124 Persentase Kinerja Luas Panen Padi, Jagung dan Ubi Kayu Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018 (Ribu Ha) II-180
GAMBAR 2- 125 Produksi Daging Sapi 2014-2019 ..... II-183
GAMBAR 2- 126 Retribusi Tanah Provinsi Lampung, 2015-2017 ..... II-185
GAMBAR 2- 127 Sertifikat Atas Tanah, 2016 – 2017 ..... II-186
GAMBAR 2- 128 Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018 ..... II-197
GAMBAR 2- 129 Data Jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Lampung II-200
GAMBAR 2- 130 Jumlah BumDes Per Kabupaten Per Oktober 2018 ..... II-201
GAMBAR 2- 131 Jumlah Desa yang sudah dan belum Siskeudes per Kabupaten II-202

GAMBAR 2- 132 Jumlah Dana Desa Per Kabupaten II-202
GAMBAR 2- 133 Data Kejadian Bencana di Provinsi Lampung Tahun 2018 ..... II-203
GAMBAR 2- 134 Kejadian Kebakaran di Provinsi Lampung II-204
GAMBAR 2- 135 Kejadian Puting Beliung di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ..... II-206
GAMBAR 2- 136 Kejadian Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ..... II-208
GAMBAR 2- 137 Kejadian Bencana Tanah Longsor di Provinsi Lampung II-210
GAMBAR 2- 138 Kejadian Bencana Banjir di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 ... II-213
GAMBAR 2- 139 Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung II-216
GAMBAR 2- 140 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014-2017 ..... II-217
GAMBAR 2- 141 Perkembangan Total Fertility Rate Provinsi ..... II- 218
GAMBAR 2- 142 Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 ..... II-218
GAMBAR 2- 143 Perbandingan Persentase Peserta KB Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018 ..... II-219
GAMBAR 2- 144 Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun Provinsi Lampung 2015-2016 ..... II-220
GAMBAR 2- 145 Persentase Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Provinsi Lampung 2015-2016 ..... II-220
GAMBAR 2- 146 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan *E-Government* II-224
GAMBAR 2- 147 Persentase Jumlah Penyebaran Informasi melalui II-224
GAMBAR 2- 148 Persentase Jumlah Keterbukaan Informasi II-225
GAMBAR 2- 149 Jumlah Penyelesaian Sengketa Infromasi oleh KI II-225
GAMBAR 2- 150 Persentase Informasi Pembangunan yang Disampaikan II-226
GAMBAR 2- 151 Jumlah Pengamanan Ruang Pimpinan dan Tempat Strategis II-226
GAMBAR 2- 152 Jumlah Penerimaan dan Pengiriman Berita Provinsi Lampung . II-227
GAMBAR 2- 153 Persentase Berita Sandi yang Diamankan ..... II- 227
GAMBAR 2- 154 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2014–2018 (Rp. Juta) II-231
GAMBAR 2- 155 Persentasi Organisasi Pemuda yang Aktif Dalam Pembangunan Di-Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-232
GAMBAR 2- 156 Kelompok Pemuda Yang dibina dan dilatih Kewirausahaan muda Di Provinsi Lampung tahun 2014-2017 ..... II-233
GAMBAR 2- 157 Cakupan Pembinaan Olahraga II-234
GAMBAR 2- 158 Pelatih Yang Bersertifikasi II-235
GAMBAR 2- 159 Pensertifikatan WBTB Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 ..... II-236
GAMBAR 2- 160 Situs Cagar Budaya II-236
GAMBAR 2- 161 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Tahun 2014-2017 ..... II-237
GAMBAR 2- 162 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2014-2017 ..... II-238
GAMBAR 2- 163 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2014-2017 ..... II-238
GAMBAR 2- 164 Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 II-239
GAMBAR 2- 165 Jumlah dan Pertumbuhan Hotel/Jasa Akomodasi Lainnya di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 ..... II-240
GAMBAR 2- 166 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya Provinsi Lampung (%)Tahun 2014-2018 ..... II-240
GAMBAR 2- 167 Jumlah Transmigran Per-KK yang Dikirim Ke Luar Lampung Tahun 2014-2018 ..... II-242

Gambar 3- 1 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014-2018 ..... III-9
GAMBAR 3- 2 Proporsi Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan 2015-2017 ..... III-18
GAMBAR 3- 3 Surplus/Defisit Riil 2015-2017 ..... III-19
GAMBAR 3- 4 SKEMA PRIORITAS PENANGANAN SPM BID PENDIDIKAN III-38
GAMBAR 3- 5 Proyek Infrastruktur Strategis Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024 ..... III-48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah langkah strategis itu kemudian di tuangkan dalam sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah: (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.dan merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.

Memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, dijelaskan bahwa tahapan pembangunan 2020-2025 ditujukan pada "upaya mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan". Kondisi yang diproyeksikan pada periode ini mengisyaratkan perlunya keadaan dimana tingkat kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah dan pelayanan kesehatan tersebar merata dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial yang semakin dinamis dan stabil, serta mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas dan seni budaya. Demikian halnya dengan perekonomian daerah yang semakin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di tingkat global. Proyeksi kondisi Infrastruktur pada dokumen RPJPD 2005-2025 adalah infrastruktur yang makin mantap dengan daya dukung yang tinggi serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Berikutnya kondisi yang diinginkan adalah terkait keanekaragaman hayati bukan hanya dapat dilestarikan tapi menjadi keunikan daerah yang merupakan ikon pariwisata dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air terkelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi. Pada akhirnya beberapa kondisi Pemerintahan yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan daerah yang dipercaya masyarakat, memiliki kinerja yang baik, produktif, inovatif, bersih dan berorientasi pada pelayanan, dengan Birokrasi yang simple serta adaftif akan

perubahan jaman, yang didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, dengan aparatur yang berkualitas dan berdisiplin tinggi.

Seiring dengan hal tersebut, penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Untuk menjaga momentum tersebut, banyak hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya (RPJMD 2005-2009, RPJMD 2010-2014, dan RPJMD 2015-2019) serta perlu disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang ingin diraih. Kondisi ini tentu saja membutuhkan pembaruan dan penyegaran metode dalam rangka menjaga semangat dan momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya. Oleh karenanya, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi dimasa-masa mendatang. Sementara itu, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah maka RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, termasuk didalamnya adalah perwujudan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada saat masa kampanye lalu, diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Begitu juga halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa substansi penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 harus diintegrasikan juga dengan dokumen RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 (yang saat ini juga sedang dalam tahap akhir proses revisi), Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan pemerintah provinsi, serta penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Lampung. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan RPJMD Provinsi Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah **Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019,** sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan, telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD pada tahun 2018 lalu, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam

Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selanjutnya dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 memperhatikan Tahapan Penyusunan RPJMN yang hingga kini sudah disusun Rancangan Teknokratik Dokumen RPJMN 2020-2025 oleh Bappenas R.I. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Provinsi Lampung dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi maupun karakteristik daerah.

GAMBAR 1- 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

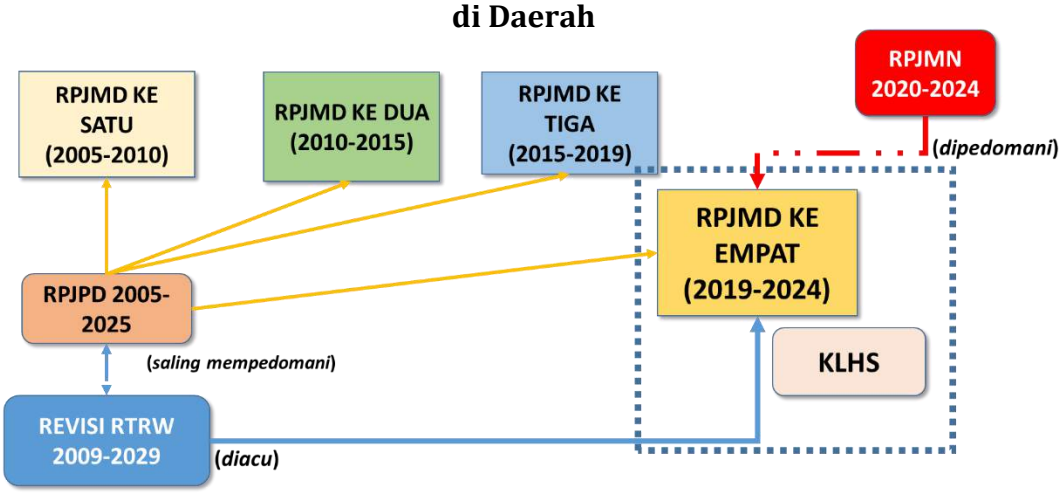

1.3.1. RPJMD dan RPJM Nasional serta Visi Misi Presiden-Wakil Terpilih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman dan memperhatikan RPJMN Nasional. Mengingat periodesasi RPJMN 2015-2019 sudah akan berakhir pada saat dokumen RPJMD ini diberlakukan, maka penyusunan dokumen RPJMD

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, akan mengacu pada proses penyusunan RPJMN 2020-2025 yang saat ini juga sedang berproses di Bappenas R.I.

Memperhatikan penyampaian Visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden tanggal 15 Juli 2019 di *Sentul International Convention Center* (SICC) Bogor, maka RPJMD Provinsi Lampung akan mengacu visi tersebut dengan rincian sebagaimana gambar berikut:

GAMBAR 1- 2 Visi Indonesia 2020-2025

Sedangkan untuk Visi-Misi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah :

Visi :

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"

Misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

1.3.2. Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD tahap ke-4 (tahap akhir) dari rangkaian periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Dengan demikian maka proses Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 harus mengacu pada dokumen RPJPD 2005-2025.

Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, dimana penetapan sasaran, indikator sasaran dan target haruslah mengacu pada sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD serta menjadi indikator kinerja utama Kepala Daerah. Sasaran dan indikator pada dokumen Renstra OPD akan menjadi indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan pada Program, Outcome Program, Kegiatan dan Output Kegiatan beserta targetnya yang menjadi indikator kinerja Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra OPD ini mutlak untuk dilakukannya proses cascading dari Tujuan, sasaran, indikator, target, dan program dalam dokumen RPJMD kedalam sasaran, indikator sasaran, target, program, outcome program, kegiatan dan output kegiatan dalam dokumen renstra perangkat daerah.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3. Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan RTRW Provinsi Lampung

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mengacu pada Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung dengan pola ruang, struktur ruang, indikasi arahan zonasi serta indikasi program dalam RTRW Provinsi Lampung 2009-2029.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Lampung, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Lampung disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

A. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui:
   1. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
   2. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
   3. penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;

4. percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisoliran wilayah yang memiliki potensi unggulan;
5. peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
6. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
7. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
8. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.

B. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui:

1. penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
2. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
3. pencegahan perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
4. pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
5. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
6. pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.

C. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui:
   1. pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
   2. pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
   3. pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
   4. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
   5. pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.

D. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui:
   1. perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
   2. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
   3. peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
   4. peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
   5. pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
   6. pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
   7. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

E. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui:

1. peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
2. pengembangan kawasan-kawasan.

F. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung 5 (lima) tahun kedepan, serta menjadi acuan dan pedoman para pemangku kepentingan, dalam upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi instrumen dalam pencapaian visi, misi dan sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025.
b. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan , melalui penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci di Provinsi Lampung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
d. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2014 disajikan dalam 9 Bab sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, keterkaitan antardokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Membahas gambaran kondisi umum daerah Provinsi Lampung dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD 2015-2019, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta hasil-hasil rekomendasi dalam KLHS RPJMD Provinsi Lampung.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang tinjauan kinerja keuangan daerah, dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; serta kebijakan pokok keuangan daerah pada periode lima tahun terakhir. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan kapasitas/kemampuan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, bab ini membahas pula tentang proyeksi dan

kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh pada periode lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dengan merujuk pada uraian pada bab-bab sebelumnya, bab ini mengulas tentang hasil rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masih dan akan menjadi pokok perhatian dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah pada periode lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Lampung.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunann sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Provinsi Lampung, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan tahun 2024

BAB IX PENUTUP

Memuat ikhtisar keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang dilengkapi dengan pokok-pokok saran/masukan dan atau rekomendasi yang perlu ditempuh dalam penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $3^0$45' sampai $6^0$45' Lintang Selatan dan $103^0$40' sampai $105^0$50' Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km^2 (Lampung dalam angka, BPS,2018) termasuk 188 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km^2 dan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km (atlas Sumber daya Pesisir Lampung, 1999). Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

TABEL 2- 1 Luas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Tulangbawang	309.109
2	Kabupaten Lampung Tengah	454.400
3	Kabupaten Tulangbawang Barat	128.574
4	Kabupaten Lampung Timur	386.459
5	Kabupaten Lampung Utara	252.954

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
6	Kota Metro	7.315
7	Kabupaten Pesawaran	127.821
8	Kabupaten Pringsewu	61.448
9	Kota Bandar Lampung	18.331
10	Kabupaten Lampung Selatan	221.946
11	Kabupaten Tanggamus	290.029
12	Kabupaten Lampung Barat	211.876
13	Kabupaten Pesisir Barat	298.807
14	Kabupaten Waykanan	365.749
15	Kabupaten Mesuji	220.527
	Provinsi Lampung	**3.355.355**

Sumber: Luas wilayah diukur di atas Peta Rupa Bumi Indonesia (BIG) skala 1:25.000, tahun 2016

Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi lampung dapat dilihat pada Gambar 2-1.

GAMBAR 2- 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

2.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu:

1. Daerah topografis berbukit sampai bergunung.

   Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, serta Sekincau yang terdapat di bagian Utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.

2. Daerah topografis berombak sampai bergelombang.

   Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah-daerah; Kedaton di wilayah Kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus serta Kalirejo dan Bangunrejo di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Daerah dataran alluvial

   Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*downstream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan

kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.

4. Daerah dataran rawa pasang surut

   Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.

5. Daerah River Basin

   Daerah Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin, yaitu River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian dan perumahan.

GAMBAR 2- 2 Peta Topografi Provinsi Lampung

Sumber: Peta RBI yang telah disesuaikan dengan batas definitif Permendagri

2.1.3. Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra–Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km). Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukan umur bagian tersebut tersingkap di jalur Bukit Barisan dan bersentuhan secara tektonik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan mesozoik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan Mesozoik akhir yang berumur 88 juta tahun yang lalu (kapur akhir, Katili, 1973). Batuan malihan terdapat pula secara setempat dan terbatas di sekitar batuan terobosan.

Breksi dan konglomerat aneka bahan yang mengandung rombakan Formasi Menanga dan Kompleks Gunungkasih dipetakan sebagai Formasi Sabu (Tpos) dan Formasi Campang (Tpoc). Umur kedua formasi ini belum diketahui, berdasarkan posisi stratigrafi diperkirakan berumur Paleosen-Oligosen Awal. Litologi formasi campang ini terdiri dari perselingan batu lempung, serpih, kalkarenit, tuf dan breksi dengan ketebalan 1.000 sd 1.500 meter. Diendapkan di lingkungan turbidit di laut, di tepi pantai sampai daerah kegiatan gunung api. Terlipat kuat dengan sumbu barat laut-tenggara, kemiringan berkisar 250 – 700. Ditafsirkan diendapkan bersamaan waktu dengan formasi tarahan dan termasuk Satuan Gunung Berapi Efusiva.

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah–Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara

regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman (subduction) di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. Formasi Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan Granit– Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan.

Tektonik yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), kegiatan gunung api di jalur Bukit Barisan yang dicerminkan oleh *Formasi Bal (Tmba)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan dasit, tufa dasitan dan sisipan batupasir dan sedimentasi vulkanik klastik laut dangkal di jalur Bengkulu yang dicerminkan oleh *Formasi Lemau (Tml)* terdiri dari Batu pasir tufaan gampingan, batu lempung gampingan dengan sisipan tipis atau bintal batu gamping, mengandung foram dan moluska. Aktivitas gunung api di jalur

Bukit Barisan menerus pada Miosen Akhir–Pliosen yang membentuk *Formasi Lakitan (Tmpl)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan andesitik/basaltik, epalistik sedikit dasitan, tufa dan batu pasir tufaan dan menindih secara tak selaras *Formasi Bal*, sedang di jalur Bengkulu terbentuk *Formasi Simpangaur (Tmps)* terdiri dari batu pasir tufaan, tufa, batu lempung tufaan, batu gamping, konglomerat aneka batuan, mengandung moluska dan cangkang karang, yang menindih secara selaras *Formasi Lemau*.

Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi–Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkersikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasiran, betu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai*, Ranau, Lampung selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 2- 3 Peta Geologi Provinsi Lampung

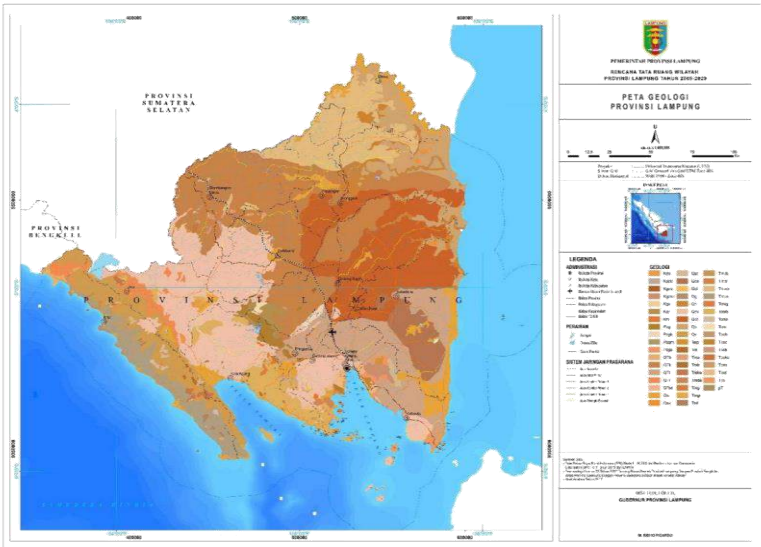

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

2.1.4. Kondisi Hidrologi

Provinsi Lampung memiliki empat (4) wilayah sungai. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung meliputi Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan. Wilayah Sungai Musi-Sugohan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten Lampung Barat. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi WS Semangka dan WS Seputih-Sekampung. Wilayah Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Wilayah Sungai Seputih-Sekampung melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi keempat wilayah sungai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2- 2 Nama Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung

Nama DAS		
A.Malsano	Tamiang 1	Way Mengkudu
Anak Selanak	Tamiang 2	Way Muaratando
Anak Selanakduo	Tanjung Belimbing	Way Napal
Batu Balai 1	Tanjung Tikus	Way Napaliut
Batubalai 2	Tanjungcina	Way Narta
Batujajar	Tanjungjati	Way Ngambur 1
Batumenyan	Teluk Sebuku	Way Ngambur 2
Baturanji	Teluk Tampang	Way Ngaras
Batuserampok	Telukbaru	Way Nibung
Batutajem	Telukberak	Way Nipah
Bawang	Telukbuduk	Way Nipahbesar
Betung	Telukmahnai	Way Nipahduo
Buahberak	Tengkuyuh	Way Nipahkanan
Cantik	Tulang Bawang	Way Nipahkecil
Cintigi	Umbarioh	Way Nipahkiri
Condonglaut	Way Andeng	Way Nipoh
Curup	Way Asahan	Way Paku
Gunung Sebesi	Way Atau	Way Panago
Gunung Sebuku	Way Babuta	Way Panagonhilir
Gununglegundi	Way Babutakanan	Way Panjang 1
Kandang Balak	Way Badak	Way Panjang 2
Karangbuah	Way Badakecil	Way Panorama
Karupan	Way Badakkanan	Way Paya
Kelawi	Way Bagiik	Way Pemerihan 1
Kesugihan	Way Bagiikkiri	Way Pemerihan 2
Ketapangdua	Way Bakauheni	Way Pemerihanhilir
Kotaguring	Way Bakauhenikecil	Way Pidada
Legundi	Way Balak	Way Punduh
Legundi Timur	Way Balam	Way Putih
Legundi Utara	Way Balau	Way Putihkecil
Lempasing	Way Bambang	Way Ratai
Maja	Way Batang	Way Ruapampang
Manula	Way Batulawang	Way Ruguk
Mesuji	Way Baturaja	Way Rugukhilir
Musi	Way Bayuk	Way Sarubalak
Paguran	Way Belambang	Way Sarubalakhilir

Nama DAS		
Panjurit	Way Belimbing	Way Sebalam
Pasirsakti	Way Betung	Way Seka
Pedada	Way Buatan	Way Sekopong
Pekonsusuk	Way Bulok	Way Selayan
Pekonunggak	Way Bulokkiri	Way Selayangduo
Puhawang	Way Cangi	Way Seleman
Puhawang Kanan	Way Ceringin	Way Serat
Puhawangkecil	Way Coyung	Way Simpangbalak
Pulau Legunditua	Way Cumu	Way Siring
Pulau Lelengalunik	Way Doh	Way Siringrebang
Pulau Mundu	Way Garuntang	Way Slemanhilir
Pulau Pisang	Way Gebang	Way Srengsem
Pulau Sebesi	Way Gedau	Way Suak
Pulau Sebiji	Way Gerabak	Way Suakbesar
Pulau Seram	Way Gubak	Way Suakkecil
Pulau Siuncal	Way Guring	Way Sukabanjar
Pulau Sulah	Way Gusung	Way Sukamaju
Pulau Tangkil	Way Halami	Way Sukapandang
Pulau Tiga	Way Hanuan	Way Sukarja
Pulau Tiga	Way Haru	Way Sumur
Pulau Tiga	Way Heni	Way Sumurbatu
Pulaubalak	Way Henikiri	Way Tabakah
Pulaubaru	Way Isom	Way Tampang
Pulau kelagian Besar	Way Jambu 1	Way Tampangkanan
Pulau kelagian Kecil	Way Jambu 2	Way Tanjungan
Pulaulelengga	Way Jelai	Way Tanjungbatang
Pulaulunik	Way Jepara	Way Tanjungheni
Purworejo	Way Kabuduk	Way Tanjungwalur
Rajabasa	Way Kabuduktunggal	Way Tarahan 1
Rawakambas	Way Kambas	Way Tarahan 2
Rawapenet	Way Kapuk	Way Tarahanbesar
Rimau Balak	Way Karwi	Way Tarahankiri
Rimaubalak Kecil	Way Karyatani	Way Telukpandan
Rusaba	Way Kaurgading	Way Temuli
Sawangbalak	Way Kawat	Way Tenubang
Sawangcemerlang	Way Kawatkecil	Way Terusan
Sebesi Kanan	Way Kawatkiri	Way Terusan Hilir

Nama DAS		
Sebesi Kiri	Way Kejadian	Way Tirompedada
Sebesi Selatan	Way Ketapang 2	Way Titan
Sebesi Utara	Way Keteguhan	Way Titankanan
Sebuku Kanan	Way Krui	Way Tridarmayuga
Sebuku Kiri	Way Kuripan	Way Tunggal
Sebukubesar	Way Laay	Way Tunggaldua
Sebukukecil	Way Lalaan	Way Tuolunik
Sekampung	Way Lalaankanan	Way Umbar
Semanak	Way Lubuk	Way Urang
Semangka	Way Lunik	Way Walur
Seputih	Way Mahnai	Waycukuhbalak
Sumberagung	Way Maja	Waykarwidua
Sumur	Way Menangkanan	
Tabuhan	Way Menangkiri	

Sumber: BNPB, 2016

Dari sejumlah DAS di Provinsi Lampung di tabel di atas, berikut 10 (sepuluh) DAS yang memiliki luas terbesar di Provinsi Lampung. Berikut dibawah ini disajikan tabel dan gambar DAS Provinsi Lampung.

TABEL 2- 3 Sepuluh DAS Terbesar di Provinsi Lampung

No.	Nama DAS	Luas (hektar)
1	Tulang Bawang	979.818,78
2	Seputih	751.526,73
3	Mesuji	723.714,52
4	Sekampung	482.316,03
5	Semangka	161.448,33
6	Way Jepara	76.187,28
7	Way Kambas	48.750,40
8	Way Ratai	32.477,47
9	Way Tenubang	28.943,08
10	Manula	25.396,62
JUMLAH		**3.310.579,24**

Sumber: BNPB, 2016

Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat *7* (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang,

cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing – masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini:

TABEL 2- 4 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

NO	NAMA CAT	Luas Cat (Ha)	Lokasi Cat
1	CAT Bandar Lampung	44.381,32	Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan,Tanggamus
2	CAT Talang Padang	60.964,60	Pringsewu, Tanggamus
3	CAT Kalianda	23.543,92	Lampung Selatan
4	CAT Baturaja	43.019,06	Way Kanan
5	CAT Metro-Kotabumi	2.040.169,77	Tulang Bawang, Lampung Tengah,Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan
6	CAT Kota Agung	279.955,88	Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat
7	CAT Danau Ranau	78.893,68	Lampung Barat, Pesisir Barat

Sumber: Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, diukur di atas Peta RBI, 2016

GAMBAR 2- 4 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

GAMBAR 2- 5 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung

Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan, yaitu:

a. Zona Aman Potensi Tinggi *(ZONA I)*
b. Zona Aman Potensi Sedang *(ZONA II)*
c. Zona Aman Potensi Kecil *(ZONA III)*
d. Zona Imbuh / Resapan *(ZONA IV)*
e. Zona Bukan CAT

GAMBAR 2- 6 Peta Hidrologi Provinsi Lampung

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

Jenis tanah di Provinsi Lampung terdiri dari dari 6 jenis tanah yaitu *Aluvial, Andosol, Gambut,Granit,Kuarsit*danLaterit.Denganjenistanahyangdominanyaitu *Aluvial* sekitar 190.667,86 Ha dan jenis tanah paling kecil adalah *Gambut* dengan luas sekitar 9.167,22 Ha. Berikut tabel luas masing-masing jenis tanah yang ada di Provinsi Lampung.

TABEL 2- 5 Jenis Tanah Provinsi Lampung

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1.	Aluvial	190.667,86
2.	Andosol	11.148,36
3.	Gambut	9.167,22
4.	Granit	182.380,42
5.	Kuarsit	30.817,11
6.	Laterit	91.619,95
Total		515.900,92

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera

Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm, sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2- 6 Curah Hujan Rata-Rata Pertahun (Mm)

No	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata – Rata Pertahun (Mm)				
		<1.500	2.000-2.500	2.500-3.000	3.000-3.500	>3.500
1	Bandar	-	809,92	1.023,00	-	-
2	Lampung Barat	-	151,90	151.900,00	9.383,00	7.811,00
3	Lampung	-	13.979,00	7.517,80	-	-
4	Lampung	6.629,00	21.711,00	17.095,00	-	-
5	Lampung Timur	-	15.378,00	23.271,80	-	-
6	Lampung Utara	0,76	10.179,00	13.196,00	1.919,00	-
7	Mesuji	-	19.560,00	2.362,40	-	-
8	Metro	-	0,03	731,50	-	-
9	Pesawaran	-	6.996,37	5.545,42	-	-
10	Pesisir Barat	-	14,80	11.160,00	18.510,01	309,70

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2019-2024

GAMBAR 2- 7 Peta Klimatologi Provinsi Lampung

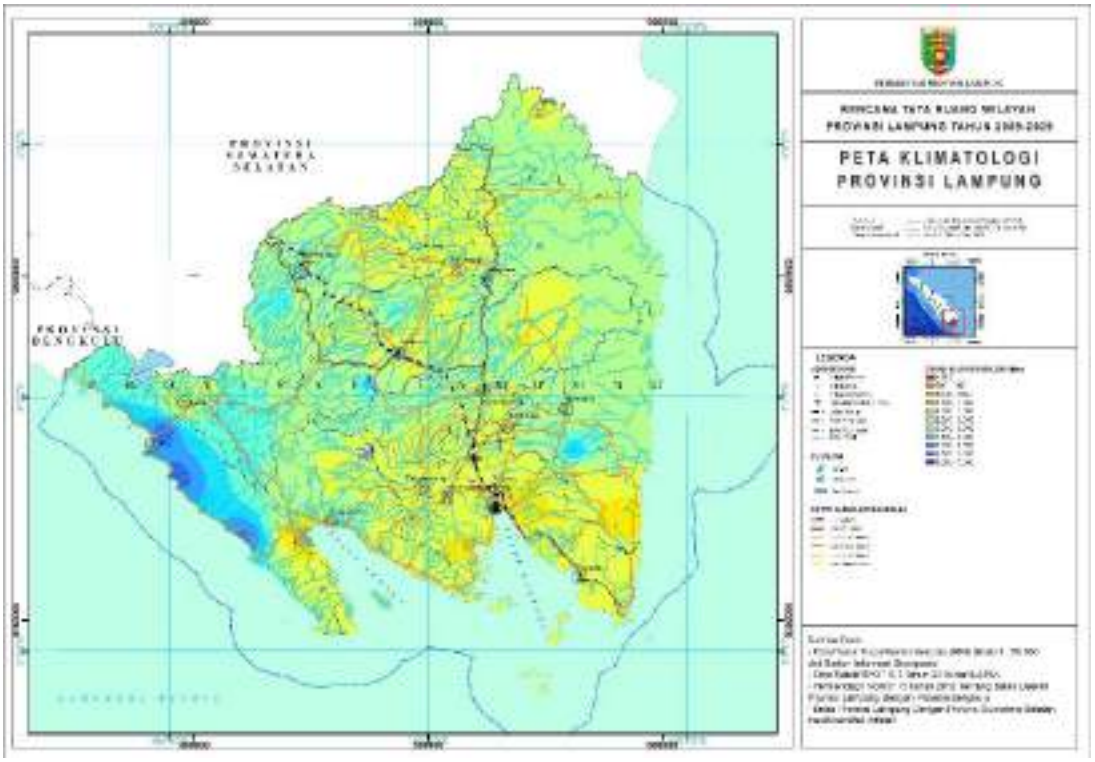

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan proses revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan revisi RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, Liwa-Krui dan Laut Krakatau;

2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
   a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
   b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
   c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
   d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu,

Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).

e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.

f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
   a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
   b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
   c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
   d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
   e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
   f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
   g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:

a. Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.

c. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

d. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

e. Arahan rencana kawasan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

f. Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu

pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

g. Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

h. Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.

3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

2.1.7. Kawasan Lindung

Pembangunan dan keberlanjutan lingkungan selalu menjadi dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi suatu wilayah membutuhkan pembangunan untuk menggerakkan perekonomian dan memajukan wilayah namun di satu sisi lingkungan harus dipertahankan secara berkelanjutan. Dalam proses pembangunan program-program sebagai upaya pengembangan wilayah melalui penataan ruang yang terrencana harus dapat terkontrol keberlangsungannya. Paling utama adalah proses pembangunan tidak mengganggu keberlanjutan alam salah satunya adalah kawasan lindung di Provinsi Lampung, Kawasan lindung merupakan kawasan yang sangat terbatas bahkan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan. Berikut luasan dari sebaran kawasan lindung di Provinsi Lampung berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009 - 2029.

TABEL 2- 7 Luas Kawasan Lindung

Kawasan	Luas (Hektar)	Persentase terhadap Luas Provinsi Lampung
Kawasan Ekosistem Mangrove	**6648.531159**	**0.20%**
Kawasan Ekosistem Mangrove	6648.531159	0.20%
Kawasan Konservasi	**408573.137**	**12.18%**
Kawasan Pelestarian Alam	401549.8851	11.97%
Kawasan Suaka Alam	7023.251878	0.21%
Kawasan Perlindungan Setempat	**53250.83303**	**1.59%**
Sempadan Danau/Bendung/Bendungan	6972.937791	0.21%
Sempadan Pantai	3339.290829	0.10%
Sempadan Sungai	42938.60441	1.28%
Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	**612114.6097**	**18.24%**
Kawasan Hutan Lindung	320391.5726	9.55%
Kawasan Resapan Air	291723.037	8.69%
Jumlah	**1080587.111**	**32.20%**

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan bencana tersebut meliputi:

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, Pesisir Barat dan Lampung Selatan.
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir wilayah Provinsi Lampung.
4. Banjir tersebar di Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
5. Gempa Bumi tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung.
6. Puting Beliung tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung.

GAMBAR 2- 8 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung

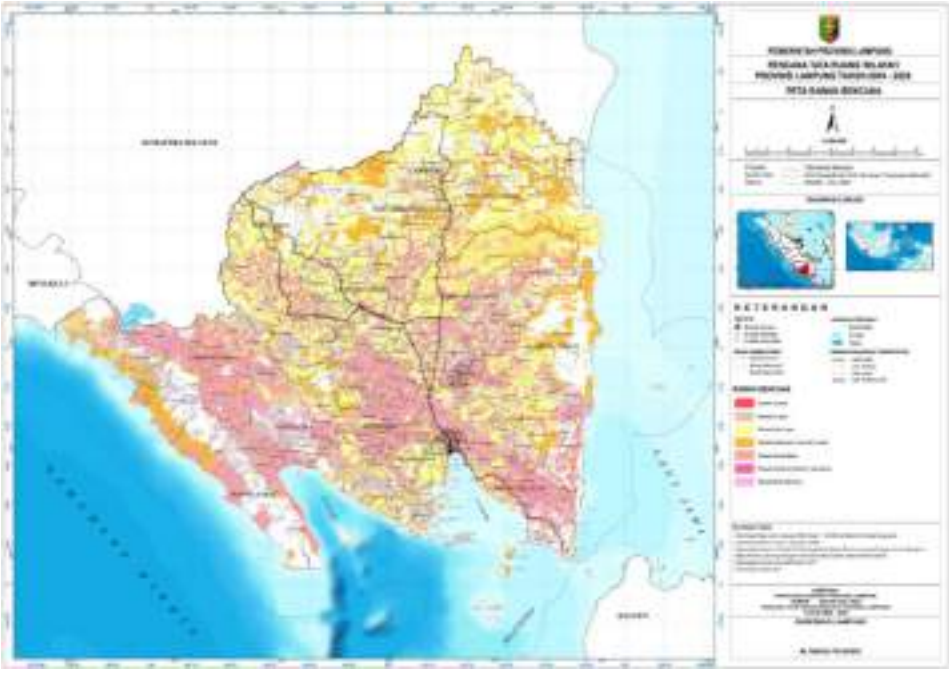

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Potensi bencana disebabkan oleh bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Bencana yang berpotensi tersebut dikaji berdasarkan yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Berdasarkan DIBI, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Pengelompokkan potensi bencana di Provinsi Lampung disesuaikan dengan kondisi daerah serta sejarah kejadian yang pernah terjadi. Berdasarkan kedua hal tersebut, diperoleh potensi bencana di Provinsi Lampung sebagai berikut.

1. Banjir

   Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang gersang dengan daya serap tanah terhadap air yang rendah dan jumlah curah hujan melebihi kapasitas serapan air.

TABEL 2- 8 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	26.326	TINGGI
2	TANGGAMUS	42.033	SEDANG
3	LAMPUNG SELATAN	70.032	TINGGI
4	LAMPUNG TIMUR	255.051	TINGGI
5	LAMPUNG TENGAH	380.268	TINGGI
6	LAMPUNG UTARA	188.770	SEDANG
7	WAY KANAN	264.609	SEDANG
8	TULANG BAWANG	307.150	TINGGI
9	PESAWARAN	49.171	SEDANG
10	PRINGSEWU	34.822	SEDANG
11	MESUJI	202.391	TINGGI
12	TULANG BAWANG BARAT	126.726	TINGGI
13	PESISIR BARAT	55.070	SEDANG
14	BANDAR LAMPUNG	10.092	SEDANG
15	METRO	6.179	SEDANG
PROVINSI LAMPUNG		**2.018.690**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

2. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

   Pada umumnya gelombang ekstrim dan abrasi terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transpor sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan

abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai.

TABEL 2- 9 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	196	TINGGI
2	TANGGAMUS	4.775	SEDANG
3	LAMPUNG SELATAN	5.302	SEDANG
4	LAMPUNG TIMUR	2.564	SEDANG
5	TULANGBAWANG	1.796	SEDANG
6	PESAWARAN	3.940	SEDANG
7	PESISIR BARAT	4.786	TINGGI
8	BANDAR LAMPUNG	515	SEDANG
PROVINSI LAMPUNG		**23.874**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

3. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Perhitungan potensi bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter dasar pengkajian. Parameter tersebut antara lain kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan.

TABEL 2- 10 Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	214.278	TINGGI
2	TANGGAMUS	279.859	TINGGI
3	LAMPUNG SELATAN	70.032	SEDANG
4	LAMPUNG TIMUR	394.580	TINGGI
5	LAMPUNG TENGAH	380.268	SEDANG
6	LAMPUNG UTARA	257.047	TINGGI
7	WAY KANAN	367.375	TINGGI
8	TULANGBAWANG	311.079	TINGGI
9	PESAWARAN	136.949	SEDANG
10	PRINGSEWU	60.899	SEDANG
11	MESUJI	218.400	TINGGI

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
12	TULANGBAWANG BARAT	120.100	TINGGI
13	PESISIR BARAT	270.265	TINGGI
14	BANDAR LAMPUNG	17.660	SEDANG
15	METRO	8.854	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**3.107.645**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

TABEL 2- 11 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Prov. Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	58.780	TINGGI
2	TANGGAMUS	40.923	TINGGI
3	LAMPUNG SELATAN	20.859	TINGGI
4	LAMPUNG TIMUR	134.246	TINGGI
5	LAMPUNG TENGAH	69.619	TINGGI
6	LAMPUNG UTARA	27.712	TINGGI
7	WAY KANAN	135.733	SEDANG
8	TULANGBAWANG	131.045	TINGGI
9	PESAWARAN	17.088	TINGGI
10	PRINGSEWU	6.092	TINGGI
11	MESUJI	109.123	TINGGI
12	TULANG BAWANG BARAT	34.655	SEDANG
13	PESISIR BARAT	203.990	TINGGI
14	BANDAR LAMPUNG	136	TINGGI
15	METRO	36	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**990.037**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

5. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penghitungan indeks bahaya kegagalan teknologi mengacu kepada beberapa parameter. Parameter tersebut adalah kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia.

TABEL 2- 12 Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG SELATAN	2.633	TINGGI
2	LAMPUNG TENGAH	11.620	TINGGI
3	LAMPUNG UTARA	334	SEDANG
4	BANDAR LAMPUNG	1.915	TINGGI
5	METRO	519	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**17.021**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

6. Kekeringan

Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan.

TABEL 2- 13 Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	214.278	TINGGI
2	TANGGAMUS	279.861	SEDANG
3	LAMPUNG SELATAN	70.032	SEDANG
4	LAMPUNG TIMUR	394.580	TINGGI
5	LAMPUNG TENGAH	380.268	TINGGI
6	LAMPUNG UTARA	257.047	TINGGI

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
7	WAY KANAN	367.375	TINGGI
8	TULANGBAWANG	311.082	TINGGI
9	PESAWARAN	136.959	SEDANG
10	PRINGSEWU	60.899	SEDANG
11	MESUJI	218.400	TINGGI
12	TULANG BAWANG BARAT	120.100	TINGGI
13	PESISIR BARAT	270.264	SEDANG
14	BANDAR LAMPUNG	17.660	SEDANG
15	METRO	8.854	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**3.107.659**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

7. Epidemi dan Wabah Penyakit

Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemi atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa.

TABEL 2- 14 Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Prov Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)
1	TANGGAMUS	2.036	SEDANG
2	LAMPUNG SELATAN	11.936	TINGGI
3	LAMPUNG TIMUR	17	TINGGI
4	LAMPUNG TENGAH	16.988	TINGGI
5	WAY KANAN	205	TINGGI
6	PESAWARAN	3.879	TINGGI
7	PRINGSEWU	10.520	TINGGI
8	MESUJI	2	TINGGI
9	BANDAR LAMPUNG	3.782	TINGGI
10	METRO	12	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**49.377**	**SEDANG**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

8. Letusan Gunung Api

Hampir semua kegiatan gunungapi berkaitan dengan zona kegempaan aktif dan disebabkan berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan- rekahan mendekati permukaan bumi. Perhitungan potensi bahaya letusan gunungapi dilihat berdasarkan parameter zona aliran dan zona jatuhan.

TABEL 2- 15 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung Krakatau di Prov. Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG SELATAN	2.651	RENDAH
PROVINSI LAMPUNG		**2.651**	**RENDAH**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

9. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Perhitungan potensi bahaya letusan cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

TABEL 2- 16 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	184.611	SEDANG
2	TANGGAMUS	172.770	SEDANG
3	LAMPUNG SELATAN	69.906	SEDANG
4	LAMPUNG TIMUR	265.094	SEDANG
5	LAMPUNG TENGAH	380.268	SEDANG
6	LAMPUNG UTARA	247.253	SEDANG

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
7	WAY KANAN	362.516	SEDANG
8	TULANGBAWANG	303.472	SEDANG
9	PESAWARAN	99.087	SEDANG
10	PRINGSEWU	60.555	SEDANG
11	MESUJI	179.934	SEDANG
12	TULANG BAWANG BARAT	120.100	SEDANG
13	PESISIR BARAT	130.353	SEDANG
14	BANDAR LAMPUNG	17.601	SEDANG
15	METRO	9.568	SEDANG
PROVINSI LAMPUNG		**2.603.088**	**SEDANG**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

10. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Perhitungan potensi bahaya letusan tanah longsor dilihat berdasarkan parameter zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng (diatas 15%).

TABEL 2- 17 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	116.197	TINGGI
2	TANGGAMUS	131.727	TINGGI
3	LAMPUNG SELATAN	17.721	TINGGI
4	LAMPUNG TIMUR	343	TINGGI
5	LAMPUNG TENGAH	19.269	TINGGI
6	LAMPUNG UTARA	26.405	TINGGI
7	WAY KANAN	23.942	TINGGI
8	PESAWARAN	52.103	TINGGI
9	PRINGSEWU	10.676	TINGGI
10	PESISIR BARAT	88.781	TINGGI
11	BANDAR LAMPUNG	3.223	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**490.387**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

11. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

TABEL 2- 18 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	2.515	TINGGI
2	TANGGAMUS	2.060	TINGGI
3	LAMPUNG TENGAH	6.808	TINGGI
4	LAMPUNG UTARA	30	TINGGI
5	WAY KANAN	13.888	TINGGI
6	PESISIR BARAT	4.015	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**29.316**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

12. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempabumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitude lebih dari 7 SR. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Perhitungan potensi bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan.

TABEL 2- 19 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG BARAT	202	TINGGI
2	TANGGAMUS	2.791	TINGGI
3	LAMPUNG SELATAN	4.596	TINGGI
4	LAMPUNG TIMUR	1	TINGGI

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
5	PESAWARAN	926	TINGGI
6	PESISIR BARAT	2.639	TINGGI
7	BANDAR LAMPUNG	198	TINGGI
PROVINSI LAMPUNG		**11.353**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

2.1.9. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung sangat melimpah, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Lampung banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup banyak jenisnya, baik dikawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh tanaman khas Provinsi Lampung yaitu bunga bangkai, rafflesia arnoldi, kopi robusta, dan bunga ashar. Selain itu Provinsi Lampung juga memiliki fauna khas yang dilindungi. Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Lampung tersebar di berbagai habitat yang merupakan wilayah TN Way Kambas, TN Bukit Barisan Selatan, hutan lindung di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, hutan pantai, hutan rawa serta di perairan laut. Jenis fauna khas Sumatera yang dapat dipetakan sebarannya di Provinsi Lampung adalah *Capricornis sumatraensis* (kambing hutan sumatera), *Elephas maximus* (gajah sumatera) dan *Muntiacus montanus* (kijang sumatera). Peta sebaran fauna Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah :

GAMBAR 2- 9 Peta Sebaran Fauna di Provinsi Lampung

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung *2009-2029*

2.1.10. Lahan Kritis Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil review Rencana teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk RHL) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung, jumlah lahan Kritis di Provinsi Lampung tahun 2013 seluas 662.879 ha. Dilaksanakan rehabilitasi melalui sumber dana APBN dan APBD Provisi Lampung pada :

- Tahun 2014 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 17.309 ha
- Tahun 2015 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 25.290 ha
- Tahun 2016 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 869 ha
- Tahun 2017 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 2.508 ha
- Tahun 2018 : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.559

Adapun jumlah luasan lahan kritis dari di tahun 2018 adalah sebesar 615.343 ha dengan pembagian sebagai berikut :

TABEL 2- 20 Luasan Lahan Kritis Provinsi Lampung

No.	LAHAN KRITIS	TAHUN (Ha)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Di dalam Kawasan Hutan	496.733	494.983	488.565	487.952	487.182	486.700
2.	Di luar Kawasan Hutan	166.146	150.587	131.715	131.459	129.721	128.642
JUMLAH		662.879	645.570	620.280	619.411	616.903	615.343

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2009-2029

2.1.11. Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, Luas Perairan Laut (12 mil) seluas 24.820,0 Km^2 dengan luas wilayah pesisir 440.010 Ha dan total luas daerah tangkapan perairan air tawar seluas 17.807 Km^2. Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai sepanjang 1.105 Km dan 132 pulau-pulau kecil. Selain itu Provinsi Lampung memiliki dua teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi meliputi satu Kota dan enam Kabupaten yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. **Kawasan Pemanfaatan Umum**
   a. Zona Pariwisata (KPU-W)
   b. Zona Permukiman (KPU-PM)
   c. Zona Pelabuhan (KPU-PL)
   d. Zona Pertambangan (KPU-TB)
   e. Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)
   f. Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)
   g. Zona Industri (KPU-ID)

GAMBAR 2- 10 Peta Kawasan Pemanfaatan Umum

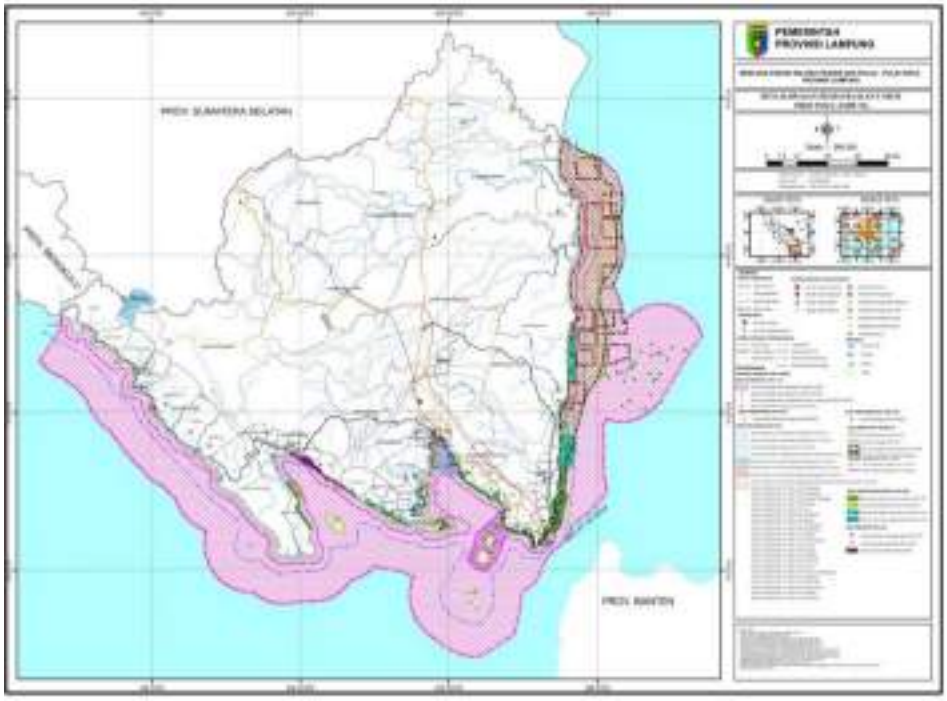

Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

2. **Kawasan Konservasi**

   a. Kawasan Konservasi Perairan; dan
   b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

GAMBAR 2- 11 Peta Kawasan Pemanfaatan Umum

Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

3. **Kawasan Strategis Nasional Tertentu**
   a. KSN Tertentu berupa pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Betuah di Kabupaten Pesisir Barat;
   b. Daerah latihan militer Teluk Lampung di Kabupaten Pesawaran (KSN-TL-1); dan
   c. Kawasan Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan (KSN-KSS-2).

GAMBAR 2- 12 Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

4. **Alur Laut**
   a. Alur Pelayaran: alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional, alur pelayaran regional, alur pelayaran local, alur pelayaran khusus, dan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
   b. Pipa/Kabel Bawah Laut: alur kabel Optik PT Telkom, alur Jaringan Pipa Gas, dan alur PLN/Transmisi Listrik 500 kV serta rencana alur kabel PLN; dan
   c. Migrasi Biota Laut : Alur Migrasi Mamalia Laut dan Alur Migrasi Penyu.

GAMBAR 2- 13 Peta Alur Laut

Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

2.1.12. Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Namun demikian, sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor: 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung hanya memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, mengingat Kabupaten Lampung Barat telah terentaskan menjadi tidak tertinggal. Dalam penentuan dan penetapan daerah tertinggal ini, terdapat 6 (enam) indikator utama yang dipakai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Untuk Kabupaten Pesisir sendiri terdapat 3 (tiga) indikator utama penyebab ketertinggalan, yaitu kemampuan keuangan daerah, ekonomi dan sarana prasarana.

a. Indikator kemampuan keuangan daerah

Kabupaten Pesisir Barat memiliki kemampuan fiskal yang cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Hal ini terlihat dari Proporsi pendapatan daerah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kemampuan belanjanya di tahun 2017.

TABEL 2- 21 Kemampuan Keuangan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung 2017

Kemampuan Keuangan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung 2017							
No.	Kab	Pendapatan Daerah (Rp.000)			Belanja (Rp.000)		Selisih
		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Langsung	Tidak Langsung	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pesisir Barat	42.895.150,22	628.776,506	141.441.507,664	323.026,153	488.712.155,791	1.374.855,464

b. Indikator ekonomi

Kriteria perekonomian masyarakat menjadi salah satu penyebab utama ketertinggalan di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Kriteria ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu persentase penduduk miskin dan pengeluaran konsumsi per kapita.

GAMBAR 2- 14 Presentasi Penduduk Miskin Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2017

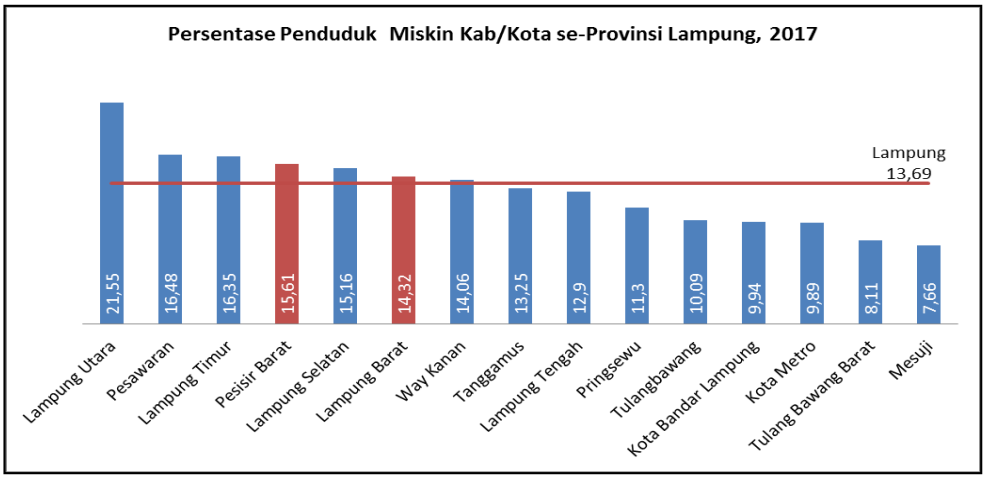

Jika ditinjau dari Grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah presentasi kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Lampung, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut butuh dukungan penuh serta penanganan yang serius dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat baik terlebih di bidang pariwisata. Selanjutnya pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Pesisir Barat dari data di tabel di bawah, menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran konsumsinya terbilang rendah, untuk lebih rinci total pengeluaran konsumsi per-bulannya hanya berkisar 700.000. Sehingga dari kedua indikator tersebut baik indikator persentase penduduk miskin maupun indikator pengeluaran konsumsi per kapita dapat dipastikan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang tertinggal meskipun memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.

TABEL 2- 22 Pengeluaran Konsumsi Per kapita

Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan (RP), 2018			
KAB/KOTA	**MAKANAN**	**BUKAN MAKANAN**	**TOTAL**
Metro	574.035	699.569	1.273.604
Bandar Lampung	655.038	758.765	1.413.803
Mesuji	501.569	459.872	961.441
Pringsewu	431.081	379.724	810.804
Lampung Tengah	432.555	378.715	811.270

Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan (RP), 2018			
KAB/KOTA	**MAKANAN**	**BUKAN MAKANAN**	**TOTAL**
Lampung Barat	**502.791**	**454.323**	**957.114**
Tulang Bawang	488.476	500.943	989.419
Pesisir Barat	**489.765**	**381.492**	**871.257**
Lampung Selatan	477.044	418.090	895.134
Lampung Utara	413.665	314.060	727.725
Tulang Bawang Barat	389.265	358.110	747.374
Lampung Timur	437.527	421.568	859.095
Way Kanan	484.764	379.516	864.280
Tanggamus	456.214	364.885	821.099
Pesawaran	431.574	328.871	760 445
Lampung	**478.452**	**444.186**	**922.638**

Sumber: Buku Pola Konsumsi Provinsi Lampung, 2018

c. Indikator sarana prasarana

Indikator sarana prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan di suatu daerah, terutama di daerah yang dikategorikan tertinggal. Berikut adalah kondisi sarana prasarana di 2 (dua) kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung.

TABEL 2- 23 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten/Kota, 2017

Kab/Kota	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskes	Posyandu	Klinik Balai Kesehatan	Polindes
Lampung Barat	2	1	12	255	5	3
Tanggamus	2	2	13	672	16	0
Lampung Selatan	2	0	26	1.004	1	0
Lampung Timur	1	0	34	1.262	21	0
Lampung Tengah	9	1	38	1.408	36	0
Lampung Utara	3	8	27	610	48	23
Way Kanan	4	0	19	420	19	0
Tulang Bawang	3	6	18	284	5	0
Pesawaran	2	0	12	444	18	0

Pringsewu	6	0	11	391	11	0
Mesuji	0	0	12	173	8	0
Tulang Bawang Barat	2	1	10	196	16	0
Pesisir Barat	0	0	9	169	2	27
Bandar Lampung	21	6	30	694	50	0
Metro	7	0	11	156	12	0
LAMPUNG	**64**	**25**	**292**	**8.138**	**268**	**53**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017

TABEL 2- 24 Jumlah desa berdasarkan jenis jalan, 2018

Kabupaten/Kota	Aspal/Beton	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll)	Tanah
Lampung Barat	91	9	36
Tanggamus	235	48	19
Lampung Selatan	230	26	3
Lampung Timur	164	99	1
Lampung Tengah	209	91	14
Lampung Utara	219	27	1
Way Kanan	135	65	27
Tulang Bawang	53	70	27
Pesawaran	131	14	1
Pringsewu	105	13	13
Mesuji	9	66	30
Tulang Bawang Barat	76	24	3
Pesisir Barat	88	21	9
Kota Bandar Lampung	126	-	-
Kota Metro	22	-	-
LAMPUNG	**1.893**	**573**	**184**

Sumber: Data Potensi Desa, 2018

TABEL 2- 25 Jumlah desa berdasarkan jenis transportasi yang dimiliki, 2018

Kabupaten/Kota	Darat	Air	Darat dan Air
Lampung Barat	135	-	1
Tanggamus	290	-	12
Lampung Selatan	258	1	1
Lampung Timur	262	-	2
Lampung Tengah	302	-	5
Lampung Utara	247	-	-
Way Kanan	222	-	5
Tulang Bawang	130	1	20
Pesawaran	144	2	2
Pringsewu	131	-	-

Kabupaten/Kota	Darat	Air	Darat dan Air
Mesuji	89	-	16
Tulang Bawang Barat	103	-	-
Pesisir Barat	108	-	10
Kota Bandar Lampung	126	-	-
Kota Metro	22	-	-
LAMPUNG	**2.581**	**4**	**69**

Sumber: Data Potensi Desa, 2018

TABEL 2- 26 Jumlah desa berdasarkan Base Transceiver Station (BTS), 2018

Kabupaten/Kota	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler		
	Ada	Tidak	Kuat	Lemah	Tidak Ada
Lampung Barat	48	88	77	58	-
Tanggamus	84	218	218	84	-
Lampung Selatan	144	116	210	40	-
Lampung Timur	152	112	214	50	-
Lampung Tengah	164	150	235	79	-
Lampung Utara	103	144	230	17	-
Way Kanan	79	148	111	116	-
Tulang Bawang	63	88	90	61	-
Pesawaran	68	80	111	37	-
Pringsewu	49	82	107	24	-
Mesuji	38	67	55	50	-
Tulang Bawang Barat	45	58	78	25	-
Pesisir Barat	35	83	80	38	-
Kota Bandar Lampung	101	25	126	-	-
Kota Metro	16	6	9	13	-
LAMPUNG	1.189	1.465	1.975	679	-

Sumber: Data Potensi Desa, 2018

TABEL 2- 27 Jumlah desa berdasarkan kepemilikan alat mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana, 2018

Kabupaten/Kota	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan dini Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Jalur Evakuasi
Lampung Barat	11	-	6	2
Tanggamus	49	2	4	17
Lampung Selatan	9	1	2	39

Kabupaten/Kota	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan dini Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Jalur Evakuasi
Lampung Timur	26	-	5	2
Lampung Tengah	4	-	1	1
Lampung Utara	-	-	-	-
Way Kanan	14	-	3	-
Tulang Bawang	10	-	4	-
Pesawaran	5	1	-	-
Pringsewu	-	-	-	-
Mesuji	17	-	-	1
Tulang Bawang Barat	5	-	-	-
Pesisir Barat	12	6	1	51
Kota Bandar Lampung	4	-	-	8
Kota Metro	5	-	-	-
LAMPUNG	171	26	12	120

Sumber: Data Potensi Desa, 2018

Dari data-data sebelumnya yang terdiri dari sarana prasarana bidang Pendidikan, kesehatan. Infastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan mitigasi bencana terlihat bahwa kondisi di Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya memadai, sehingga masih butuh dukungan penuh baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, terlebih 2 kabupaten tersebut memiliki potensi ekonomi pariwisata yang baik.

2.1.13. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2010, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 7.634.005 jiwa sedangkan proyeksi penduduk yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, jumlah Penduduk meningkat menjadi 8,2 Juta jiwa tahun 2017. Dilihat dari distribusi antar-kabupaten/kota, di tahun 2017 maka ada tiga wilayah yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur tercatat sebagai daerah dengan penduduk di atas 1 Juta Jiwa. Adapun sebaran penduduk di Provinsi Lampung setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

TABEL 2- 28 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014-2017

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Persentase Penduduk Tahun 2017	Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2017
		2014	2015	2016	2017	2016-2017		
1	Lampung Tengah	1.227.185	1.239.096	1.250.486	1.261.498	0,88	15,22	332
2	Lampung Timur	998.720	1.008.797	1.018.424	1.027.476	0,89	12,39	193
3	Bandar Lampung	960.695	979.287	997.728	1.015.910	1,82	12,26	3.432
4	Lampung Selatan	961.897	972.579	982.885	992.763	1,01	11,98	1.418
5	Lampung Utara	602.727	606.092	609.304	612.100	0,46	7,38	225
6	Tanggamus	567.172	573.904	580.383	586.624	1,08	7,08	194
7	Way Kanan	428.097	432.914	437.530	441.922	1.00	5,33	113
8	Tulang Bawang	423.710	429.515	435.125	440.511	1,24	5,31	127
9	Pesawaran	421.497	426.389	431.198	435.827	1,07	5,26	194
10	Pringsewu	383.101	386.891	390.486	393.901	0,87	4,75	630
11	Lampung Barat	290.388	293.105	295.689	298.286	0,88	3,6	139
12	Tulang Bawang Barat	262.316	264.712	266.973	269.162	0,82	3,25	224
13	Mesuji	194.282	195.682	196.913	198.092	0,6	2,39	91
14	Metro	155.992	158.415	160.729	162.976	1,59	1,97	2.638
15	Pesisir Barat	148.412	149.890	151.288	152.529	0,82	1,84	52
Provinsi Lampung		**8.026.191**	**8.117.268**	**8.205.141**	**8.289.577**	**1,03**	**100**	**239**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Pada tahun 2017 piramida penduduk Provinsi Lampung masih mencirikan piramida stasioner dimana angka kelahiran masih tinggi dan kelompok terbesar adalah penduduk usia produktif. Juga dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki.

GAMBAR 2- 15 Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 2017

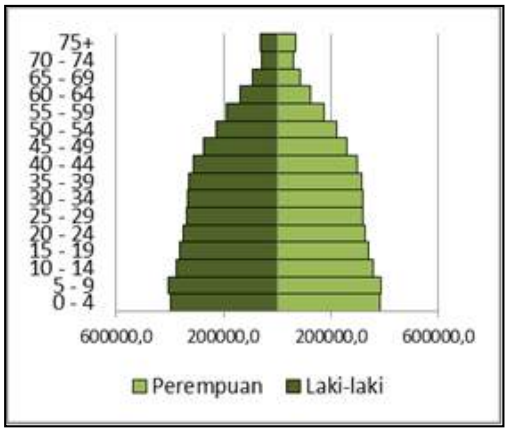

GAMBAR 2- 16 Proyeksi Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 2034 (Bonus Demografi)

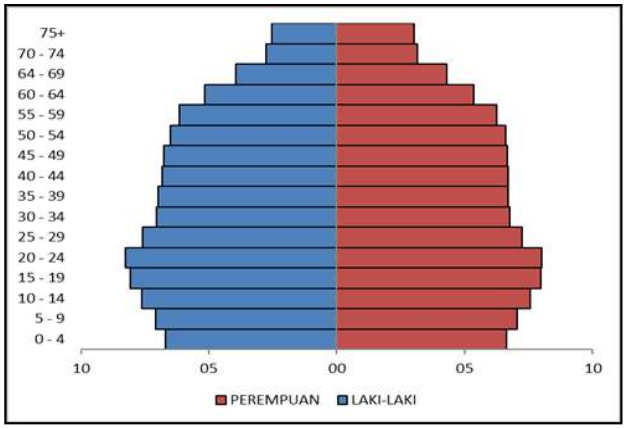

Sumber : BPS,2018

Pada tahun 2034 piramida penduduk Provinsi Lampung menunjukkan adanya perubahan komposisi dimana jumlah penduduk usia produktif semakin bertambah. Ini merupakan pertanda bahwa Provinsi Lampung mengalami bonus demografi. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dari piramida ekspansif ke piramida stasioner dimana angka kelahiran dan kematian relatif seimbang dan jumlah penduduk usia muda dan tua seimbang.

Bonus demografi memberikan keuntungan bagi Provinsi Lampung karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik dan tingkat pengangguran terbuka bisa ditekan. Selain itu bonus demografi juga mampu mengurangi rasio ketergantungan (*depedency ratio*).

2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sempat turun tajam sebesar 5,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,78 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan faktor esternal (ekonomi global), seperti menguatnya dolar, ketidakstabilan harga minyak mentah dunia, naiknya

harga pangan dunia, dan krisis utang Yunani yang berimbas pada Uni Eropa hingga Amerika, dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian Lampung secara umum terus bergerak ke arah perbaikan. Tahun 2015 perekonomian Provinsi Lampung terlihat mengalami peningkatan. Pemulihan ekonomi global yang masih berjalan membawa dampak positif terhadap ekonomi nasional. Meski belum secepat ekspektasi, ekonomi Lampung terus menguat sehingga pada tahun 2018 mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,25 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,54 persen dan 5,17 persen. Peningkatan ini mencerminkan bahwa perekonomian daerah Lampung tumbuh positif ditengah lesunya perekonomian global dan nasional.

GAMBAR 2- 17 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018

Sumber: BPS, 2018

Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Sektor dominan penopang pertumbuhan ekonomi Lampung dikuasai tiga sektor yaitu: Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Selain itu, sektor Konstruksi dan sektor Pertambangan juga turut andil dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan Sektor Pertanian adalah sebesar 4,63 persen. Tetapi angka ini terus menurun sehingga tahun 2017 hanya mampu tumbuh 0,83 persen. Selain cuaca, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, pelemahan harga komoditas dunia pada beberapa

komoditas unggulan Lampung, serta kurangnya kapasitas produksi pabrik untuk menyerap hasil panen yang berlimpah merupakan beberapa faktor penyebab menurunnya kinerja sektor Pertanian.

Mengamati pertumbuhan tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha terbesar adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,49 persen, diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,32 persen, Industi Pengolahan sebesar 9,08 dan Jasa Pendidikan sebesar 9,07.

TABEL 2- 29 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2012 - 2018

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	3,93	4,63	3,39	3,66	3,16	0,83	1,01	2,94
Pertambangan dan Penggalian	5,61	11,47	0,93	4,2	4,36	6,46	2,04	5,01
Industri Pengolahan	9,32	7,74	4,51	7,48	3,89	6,18	9,08	6,89
Pengadaan Listrik dan Gas	15,15	10,97	8,78	3,6	22,49	38,43	6,54	15,14
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	4,82	-1,57	7,49	2,47	3,57	7,15	3,59	3,93
Konstruksi	6,44	3,58	7,7	2,29	8,53	10,96	8,35	6,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,24	2,97	5,98	1,98	6,65	6,57	6,87	5,18
Transportasi dan Pergudangan	10,35	7,35	7,65	11,67	7,87	6,6	5,96	8,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,47	5,82	7,73	8,96	6,84	8,08	10,49	8,20
Informasi dan Komunikasi	13,38	9,37	8,84	10,84	10,63	10,74	8,14	10,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,7	7,18	2,18	3,56	8,02	4,5	2,27	5,63
Real Estat	8,29	9,97	7,7	4,49	7,73	6,02	3,50	6,81
Jasa Perusahaan	13,9	11,99	8,05	7,97	4,19	5,87	2,19	7,74
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,16	2,49	8,23	9,79	0,52	4,19	5,95	5,33
Jasa Pendidikan	4,5	5,21	11,07	6,65	6,75	5,06	9,07	6,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,62	7,36	5,11	6,81	6,14	4,75	6,27	6,87
Jasa Lainnya	1,79	3,42	8,13	8,51	4,45	8,92	9,32	6,36
Pertumbuhan PDRB	**6,44**	**5,78**	**5,08**	**5,13**	**5,15**	**5,17**	**5,25**	**5,43**

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2019, diolah

Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) rata-rata tumbuh sebesar 7,23 persen, pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT rata-rata tumbuh sebesar 7,99 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi rumah tangga rata-rata tumbuh sebesar 5,87 persen, komponen Konsumsi Pemerintah rata-rata tumbuh sebesar 4,41 persen sedangkan pada komponen ekspor dan impor masing-masing tumbuh dengan rata-rata sebesar 6,08 persen dan 7,77 persen.

Di tahun 2018, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran penyumbang terbesar dari sektor Konsumsi LNPRT sebesar 15,84 persen; diikuti Impor sebesar 14,48 persen; Ekspor sebesar 11,53 persen PMTB sebesar 9,04 persen; dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,68 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami perlambatan pertumbuhan yang secara umum dipengaruhi oleh adanya kebijakan penghematan anggaran yang menyebabkan terbatasnya ekspansi belanja pemerintah.

TABEL 2- 30 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2012 -2018

KOMPONEN PENGELUARAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Konsumsi Rumah Tangga	6.32	5.81	6.16	5.59	5.72	5.78	5.68	5.87
Konsumsi LNPRT	5.84	3.88	6.57	7.05	5.56	11.19	15.84	7.99
Konsumsi Pemerintah	6.18	4.2	2.51	11.78	3.13	0.25	2.85	4.41
PMTB	9.35	3.81	5.66	5.43	9.26	8.07	9.04	7.23
Perubahan Inventori	-3.34	49.93	52.19	21.01	56.56	-	-	35.27
Ekspor	25.71	6.75	2.41	-5.31	-4.65	6.09	11.53	6.08
Impor	27.83	4.57	3.34	-3.47	-0.93	8.57	14.48	7.77
Pertumbuhan PDRB	**6.44**	**5.78**	**5.08**	**5.13**	**5.15**	**5.17**	**5.25**	5.43

Sumber:BPS Provinsi Lampung, 2019 diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ditengah kondisi ekonomi yang cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi

rumah tangga dan PMTB masih tumbuh secara fluktuatif. Kinerja ekspor dan impor pada tiga tahun terakhir periode pengamatan mengalami pertumbuhan pada arah yang positif. Pada sisi ekspor, meskipun terdapat faktor eksternal yang berpengaruh, namun setidaknya keadaan tersebut dapat memberi sinyal kepada pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan daya saing produk lokal agarterus dapat berkompetisi dalam kancah global. Pada sisi impor, nilai positif pertumbuhan kegiatan impor dapat mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kegiatan ekonomi lokal yang kembali menggeliat, mengingat bahwa masih terdapat kegiatan ekonomi daerah yang menggunakan bahan baku ataupun peralatan yang diperoleh dari luar negeri.

Untuk data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas provinsi, kecuali Kabupaten Lampung Timur dan Pesisir Barat. Pada tahun 2017 Kota Bandar Lampung memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 6,28 persen, diikuti Kota Metro sebesar 5,66 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 2- 31 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017 (Persen)

Wilayah Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	6.87	5.56	5.32	5.01	5.03
Tanggamus	6.76	5.90	5.50	5.18	5.21
Lampung Selatan	6.41	5.80	5.38	5.22	5.46
Lampung Timur	8.96	2.87	4.58	4.23	4.64
Lampung Tengah	6.46	5.68	5.38	5.61	5.29
Lampung Utara	6.46	5.80	5.43	5.10	5.21
Way Kanan	5.28	5.67	5.27	5.12	5.11
Tulang Bawang	6.75	5.54	5.02	5.42	5.45
Pesawaran	6.20	5.59	5.03	5.07	5.10
Pringsewu	6.43	5.75	5.22	5.04	5.00
Mesuji	6.18	5.69	5.23	5.10	5.20
Tuba Barat	6.37	5.50	5.35	5.27	5.64
Pesisir Barat	5.54	5.10	4.94	5.31	5.34
Bandar Lampung	6.77	7.05	6.33	6.43	6.28
Metro	6.89	6.13	5.87	5.90	5.66
Provinsi	5.77	5.08	5.13	5.15	5.17

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 diolah

2.2.1.2. Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut. Berdasarkan data BPS, tercatat inflasi Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah sebesar 2,73 % di bawah inflasi Sumatera dan Nasional yang mencapai 3,13 %. Faktor yang mendorong inflasi di Provinsi Lampung adalah Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga serta Makanan Jadi, Rokok & Tembakau.

GAMBAR 2- 18 Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014 – 2018 (Persen)

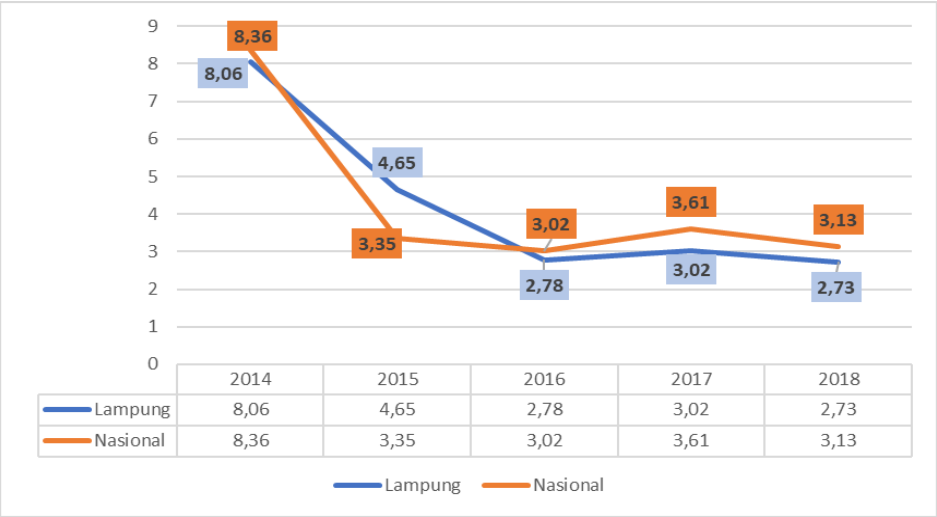

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Untuk perbandingan antara Lampung dan Nasional terlihat bahwa Lampung pernah mengalami inflasi tinggi dari nasional pada tahun 2015 dan berada dibawah Nasional sampai tahun 2018.

TABEL 2- 32 Inflasi se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	8,1	1,53	3,95	3,71	1,84
Bengkulu	10,85	3,25	5	3,56	2,35
Jambi	8,7	1,37	4,39	3,39	2,97
Kepulauan Bangka Belitung	9	3,27	6,75	2,37	3,19
Kepulauan Riau	7,6	4,4	3,53	4,2	3,47
Lampung	8,06	4,65	2,78	3,02	2,73
Riau	8,65	2,65	4,04	3,28	2,45
Sumatera Barat	11,6	1,08	4,89	1,96	2,6
Sumatera Selatan	8,5	3,10	3,58	3,03	2,74
Sumatera Utara	8,36	3,24	6,34	3,45	1,22
Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Untuk beberapa tahun terakhir ini pun laju inflasi terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 dan 2018 di Provinsi Lampung masing-masing sebesar 3,48 persen dan 2,73 persen, menyebabkan peningkatan inflasi di Provinsi Lampung lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 3,61 persen dan 3,13 persen. Akan tetapi untuk selisih peningkatan inflasi tahun 2017-2018, di Lampung tetap lebih tinggi yaitu sebesar 0,75 persen jika dibandingkan dengan selisih peningkatan inflasi Nasional sebesar 0,48 hanya dalam kurun waktu 1 tahun.

2.2.1.3. PDRB per Kapita

Peningkatan nilai PDRB Provinsi Lampung diikuti dengan peningkatan PDRB perkapita. Meskipun nilai PDRB per kapita masih dianggap lemah dalam menunjukkan peningkatan yang sebenarnya dari daya beli masyarakat, tapi lazim digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi rata-rata PDRB per kapita suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

GAMBAR 2- 19 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014 – 2018 (Rp. Juta)

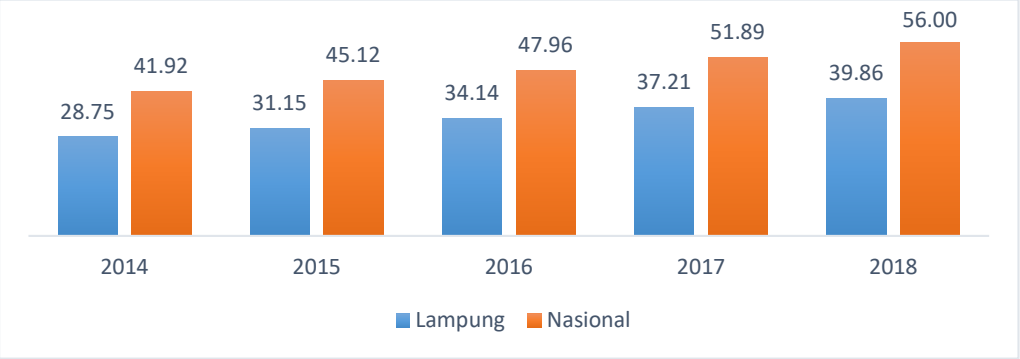

Sumber : BPS RI, 2019 diolah

PDRB per kapita Provinsi Lampung tahun 2018 mencapai Rp 39,86 juta meningkat 7,12 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp 37,21 juta. Meskipun nilainya lebih rendah dari Nasional, tetapi jika dihitung laju pertumbuhan rata-rata PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 8,52 persen, lebih besar dari pertumbuhan rata-rata Nasional yang sebesar 7,51 persen.

TABEL 2- 33 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Lampung Barat	14,45	16,04	17,49	19,04	20,62	9,3
Tanggamus	16,13	17,99	19,39	21,24	22,96	9,24
Lampung Selatan	26,55	29,39	32,3	35,52	38,85	9,99
Lampung Timur	27,09	29,57	30,38	32,2	35,32	6,89
Lampung Tengah	32,58	36,14	39,45	44,12	48,59	10,51
Lampung Utara	22,77	25,54	27,79	30,77	33,7	10,31
Way Kanan	19,16	21,39	23,24	25,28	27,52	9,48
Tulang Bawang	31,75	35,26	37,7	41,35	45,17	9,22
Pesawaran	23,22	25,66	27,48	29,82	32,12	8,46
Pringsewu	17,03	19,21	20,77	22,78	25,15	10,25
Mesuji	30,25	34	37,37	41,21	45,21	10,57
Tubabar	25,56	28,22	30,71	33,87	36,73	9,49
Pesisir Barat	17,66	19,68	21,56	23,81	25,99	10,15
Bandar Lampung	32,77	36,77	40,26	44,84	50,04	11,17
Metro	23,01	25,64	28,01	31,09	33,65	9,98
Lampung	**25,77**	**28,75**	**31,15**	**34,14**	**37,21**	**9,63**

Sumber : BPS 2018, diolah

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kota Bandar Lampung mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,17 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Mesuji dan Lampung Tengah masing-masing sebesar 10,57 persen dan 10,51 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Timur dan Pesawaran, masing-masing 6,89 persen dan 8,46 persen.

2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Pada periode tahun 2013 – 2017, Indeks Gini Provinsi Lampung secara umum menunjukkan trend yang menurun dari tahun ke tahun. Disisi teori, Indeks Gini Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 0,33 di tahun 2017 menunjukkan tingkat ketimpangan yang masih rendah (kurang dari 0,4). Membandingkan dengan nilai Indeks Gini nasional, maka Indeks Gini Provinsi Lampung masih berada dibawah nilai Indeks Gini secara nasional yang tercatat sebesar 0,39.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

GAMBAR 2- 20 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018

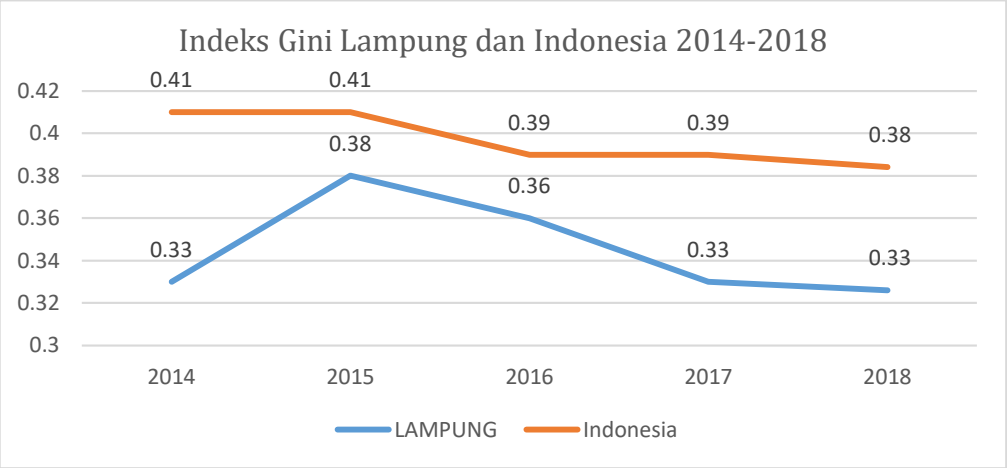

Sumber : BPS 2018, diolah

Untuk Indeks Gini Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan nasional masih lebih rendah, dan pada lingkup regional Sumatera, tingkat indeks Gini Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2018 berada pada peringkat ke-6 terendah, sebesar 0,33. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2- 34 Indeks Gini se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	0.34	0.33	0.34	0.33	0.32
SUMATERA UTARA	0.31	0.34	0.31	0.34	0.31
SUMATERA BARAT	0.33	0.34	0.31	0.31	0.31
RIAU	0.38	0.36	0.35	0.33	0.35
JAMBI	0.34	0.36	0.35	0.33	0.34
SUMATERA SELATAN	0.38	0.36	0.36	0.37	0.34
BENGKULU	0.36	0.38	0.35	0.35	0.36
LAMPUNG	0.33	0.38	0.36	0.33	0.33
KEP. BANGKA BELITUNG	0.3	0.28	0.29	0.28	0.27
KEP. RIAU	0.44	0.36	0.35	0.36	0.34
Indonesia	0.41	0.41	0.39	0.39	0.38

Sumber : BPS 2018, diolah

2.2.1.5. Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).

GAMBAR 2- 21 Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

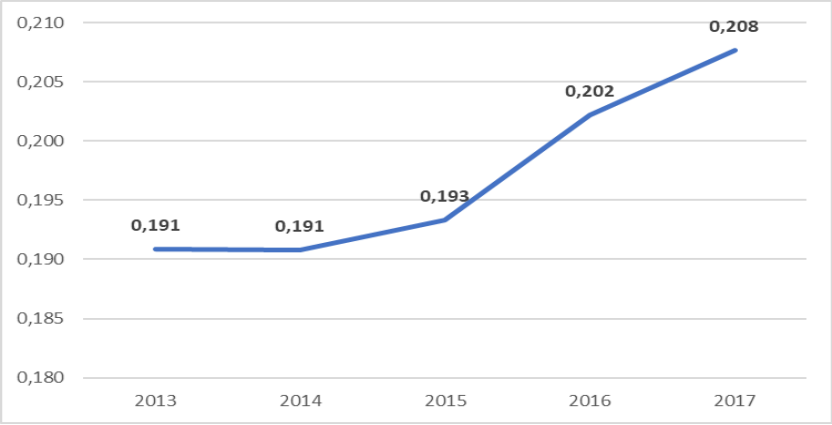

Sumber : BPS, 2018 data diolah

Indeks Williamson Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2013-2017 cenderung stabil. Nilai indeks pada tahun 2013 sampai 2015 berada diisaran 0,19 dan meningkat menjadi 0,208 di tahun 2017. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

2.2.1.6. Kemiskinan

Memperhatikan Gambar berikut, penduduk miskin Provinsi Lampung menurun dari 13,01 persen pada 2017 menjadi 12,62 persen pada Maret 2019, data statistik menunjukkan bahwa angka tersebut masih berada di atas persentase penduduk miskin secara nasional. Di lingkup regional Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2018 bisa dilihat pada tabel menunjukkan bahwa Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 ter-banyak persentasi penduduk miskinnya.

GAMBAR 2- 22 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2019

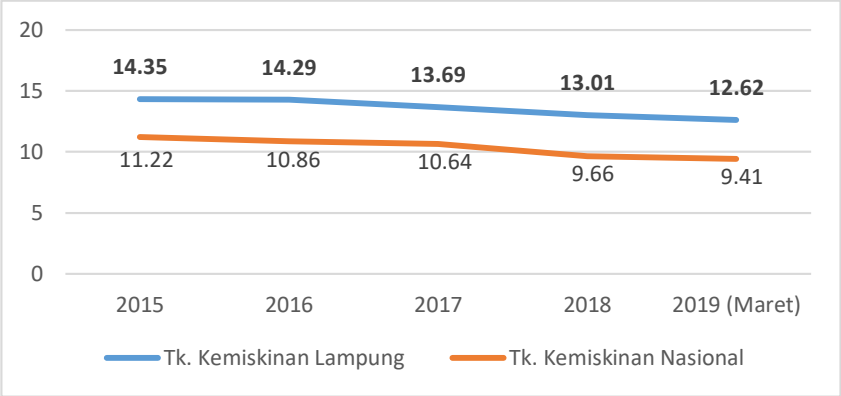

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Di lingkup regional Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera sampai dengan tahun 2018 bisa dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa Provinsi Lampung berada di peringkat ke-3 ter-banyak persentasi penduduk miskin.

TABEL 2- 35 Persentase Penduduk Miskin Lingkup Regional Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Persentase Kemiskinan se-Sumatera 2014-2018				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	16,98	17,11	16,43	15,92	15,68
Bengkulu	17,09	17,16	17,03	15,59	15,41
Jambi	8,39	9,12	8,37	7,90	7,85
Kep.Bangka Belitung	4,97	4,83	5,04	5,30	4,77

Provinsi	Persentase Kemiskinan se-Sumatera 2014-2018				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kep.Riau	6,40	5,78	5,84	6,13	5,83
Lampung	14,21	13,53	13,86	13,04	13,01
Riau	7,99	8,82	7,67	7,41	7,21
Sumatera Barat	6,89	6,71	7,14	6,75	6,55
Sumatera Selatan	13,62	13,77	13,39	13,10	12,82
Sumatera Utara	9,85	10,79	10,27	9,28	8,94

Sumber : BPS, 2018

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli.

Disisi ekonomi, untuk dapat keluar dari status kemiskinan tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu dikendalikan oleh pemerintah. Pertama, menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus stabilitas harganya agar dapat terjangkau oleh masyarakat, seperti: pengendalian pasokan sembako dan beberapa komoditas pertanian pokok, efisiensi dan pengawasan jalur distribusi barang/jasa ; hal-hal tersebut merupakan bagian yang terkait pula dengan upaya pengendalian inflasi. Kedua, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tingkat penghasilan masyarakat secara umum.

GAMBAR 2- 23 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2014–2018 (Ribu Jiwa)

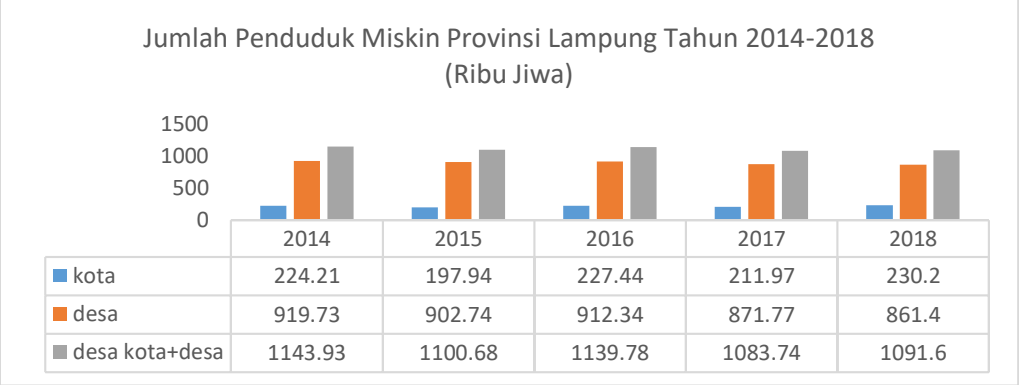

	2014	2015	2016	2017	2018
kota	224.21	197.94	227.44	211.97	230.2
desa	919.73	902.74	912.34	871.77	861.4
desa kota+desa	1143.93	1100.68	1139.78	1083.74	1091.6

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan Gambar di atas, penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih banyak berada di wilayah perdesaan yang tercatat pada tahun 2018 sebesar 861,4 ribu jiwa menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 871,77 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2018 untuk perkotaan tercatat sebesar 230,2 ribu jiwa meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 211,97 ribu jiwa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka program-program penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada kegiatan di wilayah perdesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur perdesaan maupun aktifitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

GAMBAR 2- 24 *Trend* Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

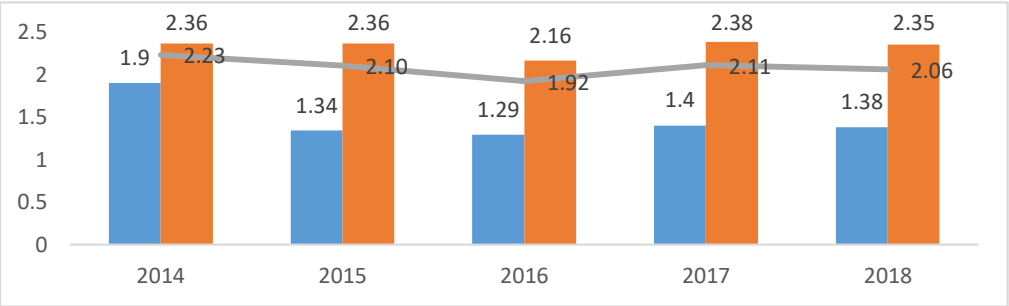

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan Grafik diatas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang digambarkan oleh garis hijau muda yang jika diartikan bahwa kedalaman kemiskinan kota dan desa Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 2017 sebesar 2,11 menjadi 2,06 pada 2018. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati garis kemiskinan.

Di lingkup regional Sumatera, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung bersama Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September tahun 2018 berada pada peringkat ke-3 paling tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 2- 36 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	3.14	3.11	3.06	2.92	2.8
Sumatera Utara	1.71	1.89	1.96	1.5	1.46
Sumatera Barat	0.75	1.26	1.12	0.99	0.96
Riau	1.2	1.45	1.36	0.96	1.05
Jambi	1.12	1.6	1.42	0.99	1.26
Sumatera Selatan	2.41	1.88	1.96	2.4	2.06
Bengkulu	2.85	3.63	2.79	2.76	2.35
Lampung	2.3	2.36	1.92	2.11	2.06
Kepulauan Bangka Belitung	0.6	0.9	0.75	0.56	0.73
Kepulauan Riau	0.74	0.86	0.71	1.18	0.59
Indonesia	1.75	1.84	1.74	1.79	1.63

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari Grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Lampung lebih besar daripada Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang bermukim di desa belum diperdayakan dengan optimal.

GAMBAR 2- 25 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

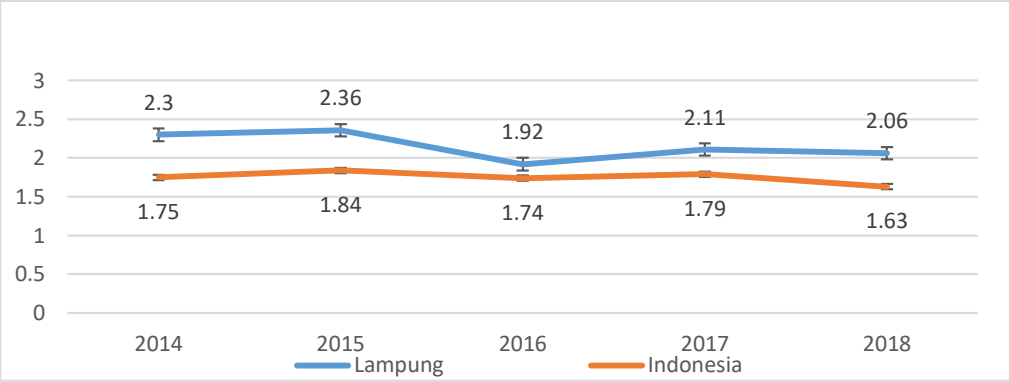

Sumber: BPS, R.I, 2019 diolah

GAMBAR 2- 26 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

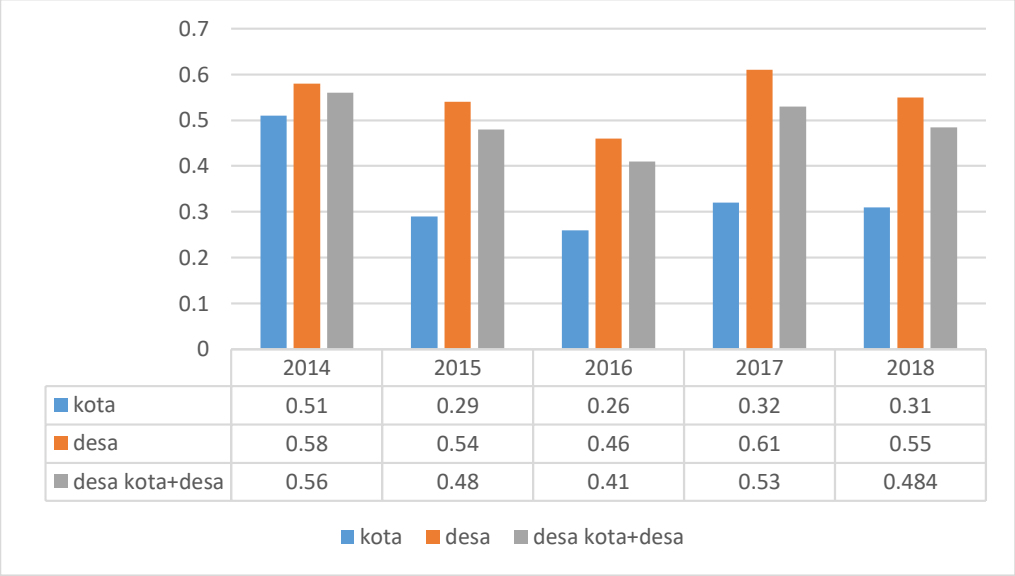

	2014	2015	2016	2017	2018
kota	0.51	0.29	0.26	0.32	0.31
desa	0.58	0.54	0.46	0.61	0.55
desa kota+desa	0.56	0.48	0.41	0.53	0.484

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018 diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 2017 sebesar 0,53 menjadi 0,484 pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa adanya variasi pengeluaran penduduk miskin yang menurun atau pengeluaran antara penduduk miskin cenderung menurun.

Di lingkup regional Sumatera, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung sampai dengan September tahun 2017 berada pada peringkat ke-7 paling tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 2- 37 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	0.86	0.84	0.87	0.78	0.72
Sumatera Utara	0.45	0.52	0.56	0.37	0.33
Sumatera Barat	0.15	0.29	0.28	0.23	0.21
Riau	0.29	0.45	0.4	0.19	0.24
Jambi	0.23	0.44	0.36	0.19	0.31
Sumatera Selatan	0.62	0.44	0.48	0.63	0.5
Bengkulu	0.75	1.16	0.64	0.71	0.51
Lampung	0.56	0.6	0.41	0.53	0.48
Kepulauan Bangka Belitung	0.12	0.22	0.16	0.11	0.15
Kepulauan Riau	0.18	0.23	0.15	0.31	0.11
Indonesia	0.44	0.51	0.44	0.46	0.41

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Berikutnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Lampung lebih besar daripada Indonesia, hal ini dikarenakan saat ini masih kurang efektifnya dalam penanganan masalah kemiskinan untuk itu kedepannya diharapkan semua pihak baik Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat agar bisa menanganinya dengan lebih baik lagi.

GAMBAR 2- 27 Perbandingan Indeks Keparahan Kemikinan (P2) antara Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

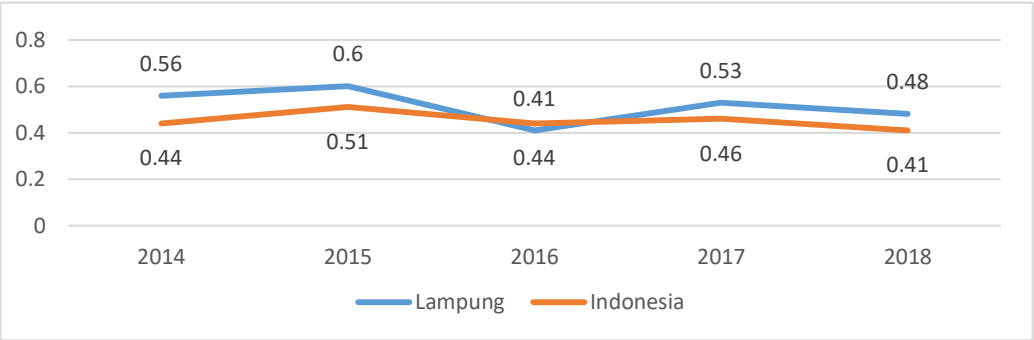

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Selanjutnya, kondisi kemiskinan kabupaten/kota juga patut menjadi perhatian. Beberapa kabupaten dengan kondisi kemiskinan tertinggi di tahun 2017 adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

TABEL 2- 38 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Lampung Utara	23.32	23.2	22.92	21.55	20.85
Pesawaran	17.51	17.61	17.31	16.48	15.97
Lampung Timur	17.05	16.91	16.98	16.35	15.76
Lampung Selatan	16.77	16.27	16.16	15.16	14.86
Pesisir Barat	-	15.81	15.91	15.61	14.98
Lampung Barat	13.7	14.18	15.06	14.32	13.54
Way Kanan	15.03	14.61	14.58	14.06	13.52
Tanggamus	14.95	14.26	14.05	13.25	12.48
Lampung Tengah	13.13	13.3	13.28	12.9	12.62
Pringsewu	9.83	11.8	11.73	11.3	10.5
Tulang Bawang	8.66	10.25	10.2	10.09	9.7
Bandar Lampung	10.6	10.33	10.15	9.94	9.04
Metro	10.82	10.29	10.15	9.89	9.14
Tulang Bawang Barat	7.12	8.23	8.4	8.11	8.1
Mesuji	6.57	8.2	8	7.66	7.55
Provinsi	14.21	14.35	14.29	13.04	13.14

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung. Beberapa penyebab tingginya persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan kondisi lapangan kerja, tingkat Pendidikan yang rendah sehingga sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, serta distribusi penduduk yang tidak merata dikarenakan selalu berpindah ke wilayah/daerah potensial yang dianggap bisa memperbaiki kondisi ekonomi masing-masing individu/keluarga.

Dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, telah diperoleh data Basis Data Terpadu 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan rincian pada tabel di bawah:

TABEL 2- 39 Jumlah Rumah Tangga/Individu Miskin Berdasarkan *data by name by address* Basis Data Terpadu Tahun 2015

No.	Kab/Kota	Desil I		Desil II		Desil III		Desil IV	
		Rumah Tangga	Individu	Rumah Tangga	Individu	Rumah Tangga	Individu	Rumah Tangga	Individu
1	Lampung Barat	12.821	58.144	13.323	44.122	6.070	15.096	1.252	2.703
2	Lampung Selatan	38.225	164.963	38.699	136.201	32.700	10.3738	22.587	71.453
3	Lampung Tengah	48.965	193.003	42.492	133.688	27.055	80.197	4.398	14.266
4	Lampung Timur	37.652	155.519	41.720	132.995	19.708	55.658	10.059	29.597
5	Lampung Utara	36.649	150.149	26.126	87.053	7.010	24.833	3.677	13.587
6	Mesuji	8.986	35.131	8.806	27.099	3.529	9.729	904	2.510
7	Pesawaran	21.777	96.941	22.625	78.516	14.808	44.600	2.258	7.545
8	Pesisir Barat	9.361	47.942	6.877	24.112	2.770	7.278	629	1.423
9	Pringsewu	16.068	71.008	14.377	46.928	3.520	9.473	2.530	6.715
10	Tanggamus	27.990	123.768	26.101	93.214	6.670	23.655	5.357	19.136
11	Tulang Bawang Barat	6.967	28.013	8.911	29.002	4.355	13.539	2.513	8.018
12	Tulang Bawang	7.188	35.284	11.580	45.157	15.279	49.467	7.811	21.808
13	Way Kanan	7.771	37.815	13.634	52.601	18.863	60.679	6.778	19.526
14	Bandar Lampung	37.564	171.105	29.612	109.448	9.991	35.268	3.482	12.723
15	Metro	1.545	8.368	2.003	8.943	2.536	9.450	2.431	6.367
Provinsi Lampung		**319.529**	**1.377.153**	**306.886**	**1.049.079**	**174.864**	**542.660**	**76.666**	**237.377**

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2015

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode tahun 2014 - 2018 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 66,42 di tahun 2014 menjadi 69,02 di tahun 2018. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional dan masuk kategori sedang sama dengan 5 Provinsi lain di wilayah Sumatera. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

GAMBAR 2- 28 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014 – 2018

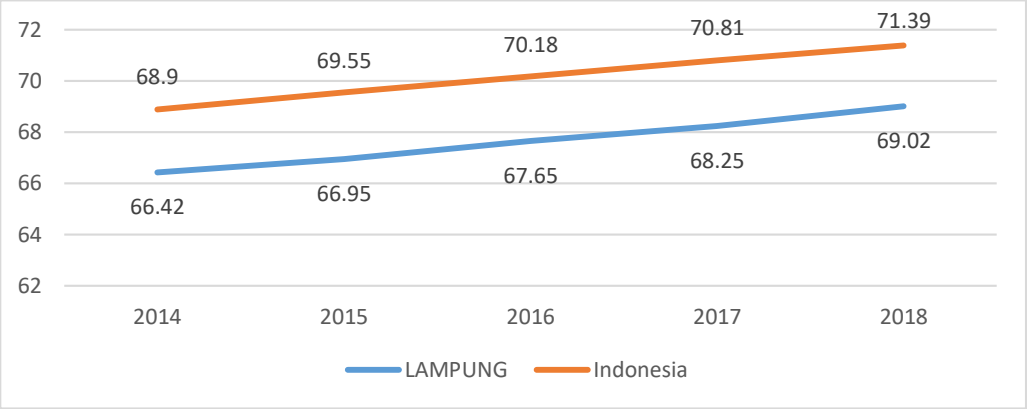

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

GAMBAR 2- 29 Peta IPM Provinsi di Indonesia 2017

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2018 berada pada peringkat ter-akhir sehingga butuh perhatian dan penanganan yang amat serius baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

TABEL 2- 40 Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19
SUMATERA UTARA	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18
SUMATERA BARAT	69,36	69,98	70,73	71,24	71,73

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
RIAU	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44
JAMBI	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65
SUMATERA SELATAN	66,75	67,46	68,24	68,86	69,39
BENGKULU	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64
LAMPUNG	66,42	66,95	67,65	68,25	69,02
KEP. BANGKA BELITUNG	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67
KEP. RIAU	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84
INDONESIA	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber :BPS R.I, diolah, 2019

GAMBAR 2- 30 IPM Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2018

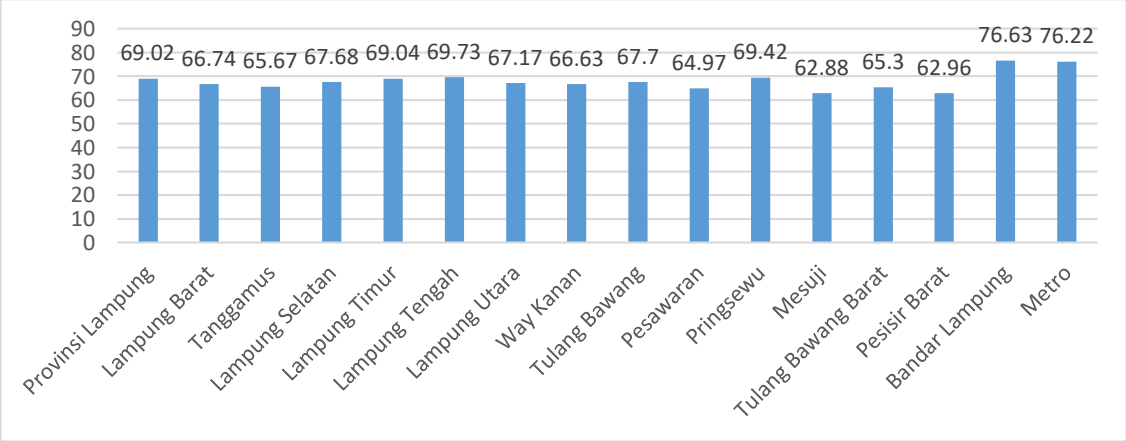

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir berada dibawah nasional dan pada tahun 2018 bernilai 90,57 sedangkan nasional bernilai 90,99.

GAMBAR 2- 31 IPG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018

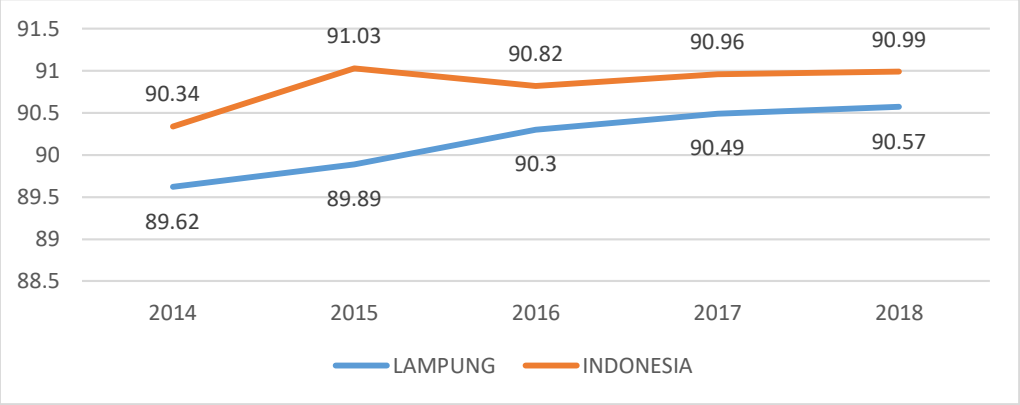

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Berdasarkan Grafik II-17 berikutnya, persentase IPG menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2014 dan 2015 tingkat IPG tertinggi terdapat pada Kota Metro, sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji.

GAMBAR 2- 32 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

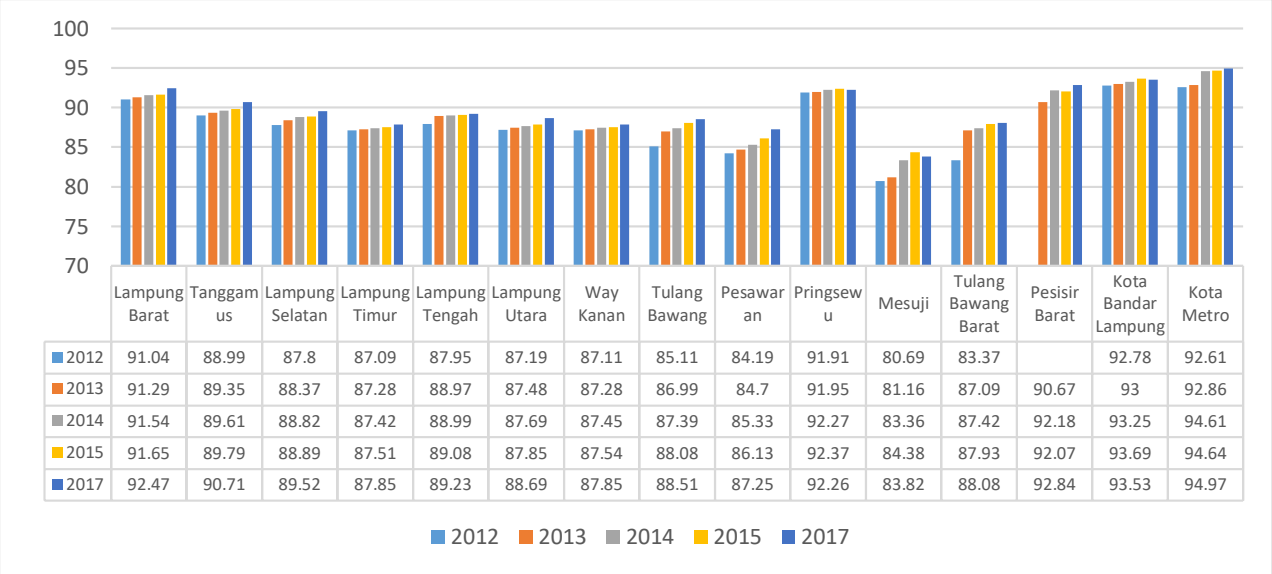

	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Way Kanan	Tulang Bawang	Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Kota Bandar Lampung	Kota Metro
2012	91.04	88.99	87.8	87.09	87.95	87.19	87.11	85.11	84.19	91.91	80.69	83.37		92.78	92.61
2013	91.29	89.35	88.37	87.28	88.97	87.48	87.28	86.99	84.7	91.95	81.16	87.09	90.67	93	92.86
2014	91.54	89.61	88.82	87.42	88.99	87.69	87.45	87.39	85.33	92.27	83.36	87.42	92.18	93.25	94.61
2015	91.65	89.79	88.89	87.51	89.08	87.85	87.54	88.08	86.13	92.37	84.38	87.93	92.07	93.69	94.64
2017	92.47	90.71	89.52	87.85	89.23	88.69	87.85	88.51	87.25	92.26	83.82	88.08	92.84	93.53	94.97

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Dalam Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung, persentase IPG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2017, wilayah dengan IPG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 94,97, diikuti oleh Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat yang masing-masing sebesar

93,53 dan 92,84. Sedangkan wilayah tingkat IPG terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 83,82.

TABEL 2- 41 Indeks Pembangunan Gender se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Nilai IPG				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	91.5	92.07	91.89	91.67	91.67
SUMATERA UTARA	90.26	90.96	90.82	90.65	90.66
SUMATERA BARAT	94.04	94.74	94.42	94.16	94.17
RIAU	87.62	87.75	88.04	88.17	88.37
JAMBI	87.88	88.44	88.29	88.13	88.44
SUMATERA SELATAN	91.64	92.22	92.08	92.43	92.62
BENGKULU	91.02	91.38	91.06	91.34	91.37
LAMPUNG	89.62	89.89	90.3	90.49	90.57
KEP. BANGKA BELITUNG	87.74	88.37	88.9	88.93	89.15
KEP. RIAU	93.2	93.22	93.13	92.96	92.97
INDONESIA	90.34	91.03	90.82	90.96	90.99

Sumber: BPS,diolah 2019

Indeks Pembangunan Gender selama periode 2014 sampai 2018 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terakhir berada pada posisi 90,57 di tahun 2018. Dimana setiap tahunnya IPG Provinsi Lampung mengalami kenaikan walau sedikit.

2.2.1.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Provinsi Lampung tahun 2018 adalah 63,82 yang berada di bawah IDG Nasional (72,1). Pada tahun 2015 dan 2016 IDG Provinsi Lampung mengalami penurunan, akan tetapi kembali naik pada tahun 2017 dan 2018. Trend IDG Provinsi Lampung tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar berikut.

GAMBAR 2- 33 *Trend* IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018

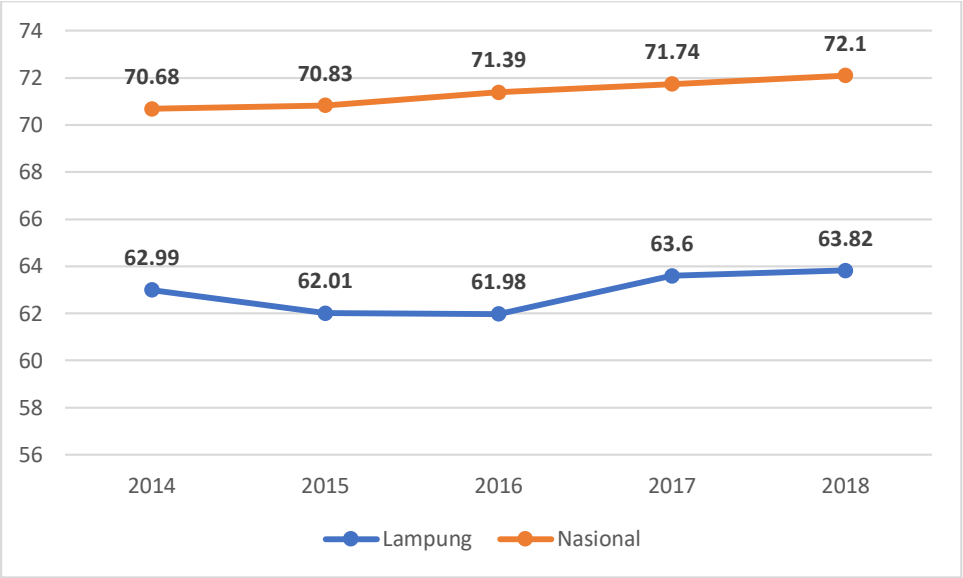

Sumber : BPS Provinsi Lampung,2018

Komposit pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan, sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Rasio keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Lampung tahun 2017 adalah 14,12, angka ini masih berada di bawah angka nasional (17,32). Pada tahun 2015 dan 2016, Rasio keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Lampung mengalami penurunan, akan tetapi kembali naik di tahun 2017. Selanjutnya untuk rasio sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2017 yaitu 29,23 lebih rendah bila dibandingkan angka nasional (36,62). Trend Sumbangan Pendapatan Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 hanya mengalami sedikit peningkatan. Trend Komposit Pembentuk IDG Tahun 2014-2017 dapat dilihat kedua rasio pada gambar berikut.

GAMBAR 2- 34 Komposit IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2017

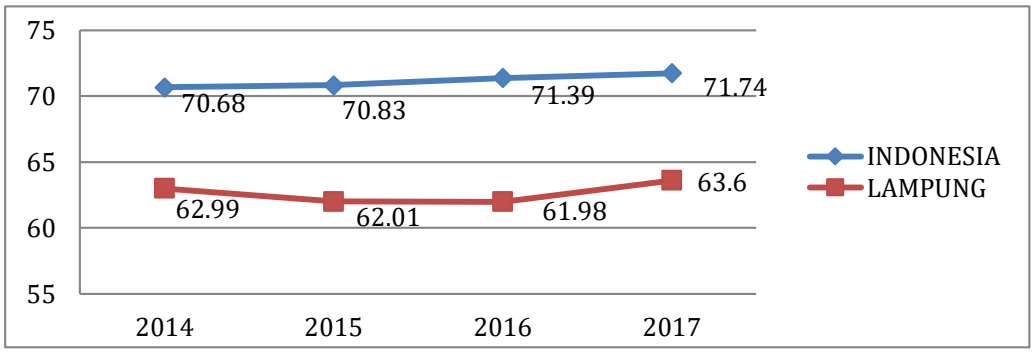

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Berbeda dengan rasio perempuan sebagai tenaga profesional baik di Provinsi Lampung dan Nasional keduanya memiliki kecendrungan data yang mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 mengalami penurunan kemudian naik kembali pada tahun 2016 dan turun kembali pada tahun 2017.

GAMBAR 2- 35 Trend IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2017

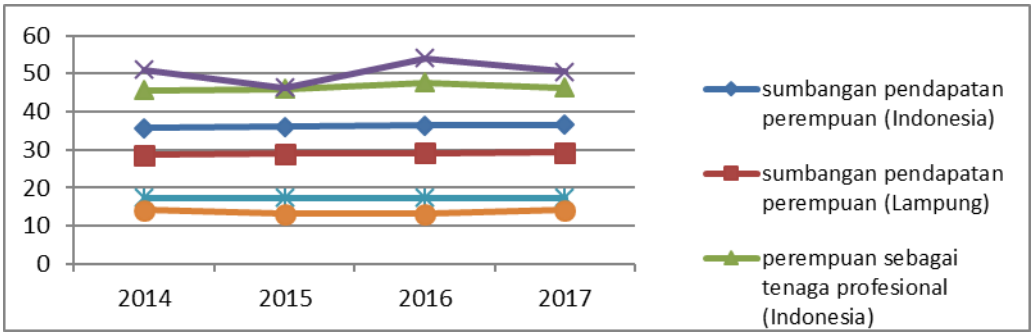

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Secara umum IDG baik di Provinsi Lampung dan Nasional keduanya memiliki kecendrungan data yang positif, maksudnya diakhir tahun penilaian (2017) keduanya sama-sama memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti yang ditampilkan pada Gambar di atas.

Adapun jika ditinjau secara lokal (lingkup regional Sumatera) tingkat IDG Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2017 berada pada peringkat ke-9, yaitu sebesar 63,6 %. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 2- 42 Indeks Pemberdayaan Gender se-Sumatera Tahun 2014-2017

Provinsi	Nilai IDG			
	2014	2015	2016	2017
Aceh	65.12	65.57	67.4	66.28
Sumatera Utara	66.69	67.81	69.07	69.29
Sumatera Barat	61.86	62.42	64.51	65.01
Riau	74.11	74.59	75.19	75.36
Jambi	61.93	62.43	63.14	65.32
Sumatera Selatan	70.2	70.36	70.69	73.53
Bengkulu	68.76	68.86	71.09	71.4
Lampung	62.99	62.01	61.98	63.6
Kep. Bangka Belitung	56.12	56.29	51.69	54.91
Kep. Riau	60.54	62.15	65.6	66.96

Sumber : BPS, 2018

2.2.1.10. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data pada table dibawah, TPAK Lampung pada lima terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sedangkan dalam empat tahun terakhir persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 94,86 persen, pada tahun 2016 meningkat sebesar

95,38 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 95,67 persen dan pada tahun 2018 menjadi 95,94 persen.

TABEL 2- 43 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, 2014-2018

STATUS KETENAGAKERJAAN	2014	2015	2016	2017	2018
Penduduk 15+ (000)	5.759,2	5.842,1	5.921,1	6.003,7	6.074,7
Angkatan Kerja (000)	3.857,9	3.832.1	4.121,7	4.072,5	4.232,1
Bekerja	3.673,2	3.635.3	3.931,3	3.896,2	4.060,4
Penganggur	184,8	196,9	190,3	176,3	171,7
Bukan angkatan Kerja	1.901,2	2.009,9	1.799,5	1.931,2	1.842,6
Persentase angkatan kerja yang bekerja	95.21	94.86	95.38	95.67	95.94
TPAK	66.99	65.59	69.61	67.83	69.67

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

2.2.1.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi TPAK semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan TPAK diiringi dengan penurunan partisipasi penduduk yang bekerja, ini pertanda bahwa pemicu tingginya TPAK adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan dengan kata lain bertambahnya pengangguran. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, hal tersebut mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Di lingkup regional Sumatera, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung pada tahun 2018 berada di peringkat ke 4 ter-kecil di Sumatera hal ini

menunjukkan bahwa suksesnya program pemerintah daerah Lampung dalam mengurangi masalah pengangguran. Hal ini dapat dilihat detailnya pada tabel berikut :

TABEL 2- 44 Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	9.02	9.93	7.57	6.57	6.36
Sumatera Utara	6.23	6.71	5.84	5.60	5.56
Sumatera Barat	6.50	6.89	5.09	5.58	5.55
Riau	6.56	7.83	7.43	6.22	6.20
Jambi	5.08	4.34	4.00	3.87	3.86
Sumatera Selatan	4.96	6.07	4.31	4.39	4.23
Bengkulu	3.47	4.91	3.30	3.74	3.51
Lampung	4.79	5.14	4.62	4.33	4.06
Kepulauan Bangka Belitung	5.14	6.29	2.60	3.78	3.65
Kepulauan Riau	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12
Indonesia	5.94	6.18	5.61	5.50	5.34

Sumber : Badan Pusat Statistik R.I, diolah, 2019

Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Lampung pada tahun 2018 berada di peringkat 4 besar di Sumatera hal ini menunjukkan bahwa suksesnya program pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam memberdayakan masyarakat . Hal ini dapat dilihat detailnya pada tabel ini.

TABEL 2- 45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	65.32	66.37	64.24	65.59	64.98
Sumatera Utara	67.07	63.44	68.87	69.13	73.36
Sumatera Barat	70.58	68.73	70.34	70.42	72.80
Riau	63.31	63.22	67.01	68.42	70.07
Jambi	66.51	69.92	68.53	70.84	71.26
Sumatera Selatan	71.96	70.54	70.01	72.12	73.04
Bengkulu	74.38	73.24	73.59	74.59	73.12
Lampung	70.55	69.95	68.63	71.63	72.84
Kepulauan Bangka Belitung	66.84	70.20	68.06	70.35	71.34
Kepulauan Riau	63.31	63.22	65.58	73.47	71.85
Indonesia	69.17	69.5	68.06	69.02	69.20

Sumber: Badan Pusat Statistik R.I, diolah, 2019

2.2.1.12. Penduduk Bekerja di Sektor Formal-Informal

Kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasikan berdasarkan dari beberapa status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Dalam setahun terkahir pekerja informal secara absolut bertambah, tetapi secara persentase pekerja informal berkurang. Kenaikan secara absolut ini berasal dari hampir seluruh komponen pekerja informal, kecuali penduduk bekerja berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja bebas di pertanian.

Selanjutnya persentase pekerja informal dari 2014-2018 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, yaitu dari 70.7% menjadi 70,8%, begitu juga dengan pekerja formal dari 2014-2018 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, yaitu dari 29,3 % menjadi 29,2%,

GAMBAR 2- 36 Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal Tahun 2014-2018

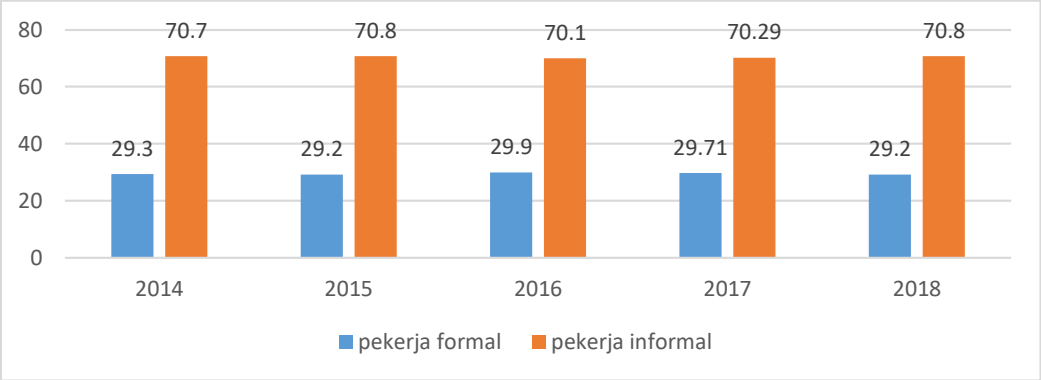

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

2.2.1.13. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan didapat dari PAD dibagi jumlah pendapatan. Rasio Target PAD terhadap target APBD dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi, diawali 49,34% di tahun 2014 terus menurun hingga 39,88% di tahun 2017 dan akhirnya meningkat menjadi 44,93% di tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut.

TABEL 2- 46 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

NO.	TAHUN	TARGET APBD %	TARGET PAD (Rp.)	RASIO TARGET PAD terhadap TARGET APBD %	REALISASI APBD (Rp.)	REALISASI PAD (Rp.)	RASIO REALISASI PAD terhadap REALISASI APBD %
1	2014	4,576,791,050,793	2,258,133,103,022	49.34%	4,559,503,293,152	2,307,904,100,056	50.62%
2	2015	4,987,226,142,596	2,363,789,222,943	47.40%	4,789,035,573,578	2,247,288,679,813	46.93%
3	2016	5,825,907,142,160	2,739,699,673,189	47.03%	5,585,023,474,025	2,365,097,213,971	42.35%
4	2017	7,725,116,345,282	3,080,908,289,668	39.88%	6,822,818,640,215	2,759,859,176,654	40.45%
5	2018	7,935,916,843,959	3,565,784,165,917	44.93%	7,137,049,975,851	2,902,313,507,327	40.67%

Sumber: Bank Indonesia, 2018

Sama halnya dengan Rasio Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi, diawali 50,62% di tahun 2014 terus menurun hingga 40,45% di tahun 2017 dan akhirnya mengalami pelambatan peningkatan menjadi 40,67% di tahun 2018.

GAMBAR 2- 37 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

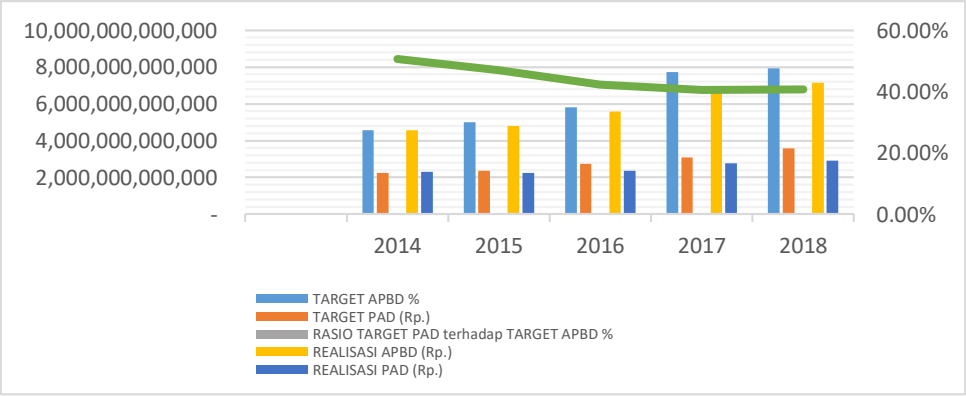

Sumber: Bank Indonesia, diolah, 2019

2.2.1.14. Opini BPK dan Capaian SAKIP

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perUndang-Undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Capaian SAKIP Provinsi Lampung pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2015, yaitu dari predikat CC tahun 2015 menjadi predikat B pada tahun 2016. Sedangkan untuk hasil penilaian Sakip tahun 2017 akan disampaikan oleh Kementerian PAN RB pada akhir Januari 2019.

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari 21,37 (D) pada tahun 2015 menjadi 56,13 (CC) pada tahun 2016. Sedangkan untuk hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2017 akan disampaikan oleh Kementerian PAN RB bersamaan dengan hasil penilaian SAKIP pada akhir Januari 2019.

2.2.1.15. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kualitas konsumsi pangan dijabarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sangat tergantung oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Skor PPH ini digunakan sebagai perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

TABEL 2- 47 Score PPH Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

Keterangan	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017
Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hr)	2228	2155,9	2062,4	1841,5	1856,5	1942
Persen AKE	111,4	107,8	103,1	92,1	92,8	97,1

Keterangan	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017
Angka Kecukupan Protein (Gram/kap/hr)	59,5	57,3	54,6	49,6	50,3	54,46
Persen AKP	114,4	110,2	105,0	95,4	96,7	104,7
Skor PPH	86,5	84,3	83,4	79,3	78	90,6

Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung 2018, diolah

Data menunjukkan, skor PPH Lampung tahun 2012 mendapatkan nilai yang baik sebesar 86,5, namun terus menurun hingga menjadi 78 di tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat sehingga mencapai 90,6. Skor PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Lampung.

2.2.1.16. Penguatan Cadangan Pangan

Pada tahun 2014, 2016, dan 2017, produksi terbesar terdapat pada komoditas buah-buahan yaitu sebanyak 23.403.470, 18.403. 470, dan 12.503.670 buah , sedangkan pada tahun 2015, produksi terbesar terdapat pada komoditas ubi kayu, yaitu sebanyak 7.387.084 batang ubi kayu.

TABEL 2- 48 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2014-2017

No.	Komoditas	2014		2015		2016		2017	
		Produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus
1	Beras	1.945.106,00	873.97	2.133.655	1.020.287	2.355.419,00	1.467.655	2.489.323	1.588.733
2	Jagung	1.719.386	1.509.246	1.502.800	1.315.733	1.720.196,00	1.525.040	2.518.895	2.235.882
3	Kedelai	13.777	-80.59	9.815	-87.702	9.960,00	-92.41	8.027	-101.7
4	Kc. Tanah	9.951	7.257	4.963	2.44	4.842,00	1.633	4.401	1.016
5	Kc. Hijau	2.352	-9	2.445	-1	1.347,00	264	1.265	187
6	Ubi Kayu	8.034.016	6.657.508	7.387.084	6.101.486	6.481.382,00	5.457.744	5.451.312	4.582.184
7	Ubi Jalar	42	14.042	28.494	1.337	23.603,00	3.957	22.78	-3.691
8	Buah-buahan	23.403.470	20.764.046	2.009.398	20.764.046	18.403.470	16.264.046	12.503.670	10.954.226
9	Daging Sapi	13.074	-3.159	12.337	6.897	12.609,00	6.177	12.991	11.409
10	Daging Ayam ras/buras	13.813	-32.69	57.203	7.157	47.303,00	6.656	50.045	5.735
11	Telur (ayam, itik)	62.168	-15.94	79.377	2.231	51.893,00	59.937	79.783	9.559
12	Ikan	231.859,00	7.913	240.85	15.555	242.122,00	16.636	328.409	89980
13	Susu	-	-	78.19	-362.71	669.33	-24.06	681	-24.05
14	Gula Pasir	-	-	723.711	531.24	788.783,00	35.915	788.783	700.76
15	Bawang Merah	-	-	319.865	2.658	2.567,00	-314.6	2.821	-314.4

No.	Komoditas	2014		2015		2016		2017	
		Produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus
16	Minyak Goreng	-	-	132.443	3.668	130187	1412	129.167	392
17	Cabe Merah			32.723	4.122	47.883,00	20.732	50.203	23052

Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampun 2017, diolah

2.2.2. Aspek Daya Saing Daerah

2.2.2.1. Nilai Tukar Petani

NTP rata-rata Provinsi Lampung Pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 104,18 (2014) menjadi 103,17. Namun seiring dengan peningkatan daya beli petani pada tahun 2018 NTP Lampung meningkat signifikan mencapai angka 105,84.

TABEL 2- 49 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung 2014-2018

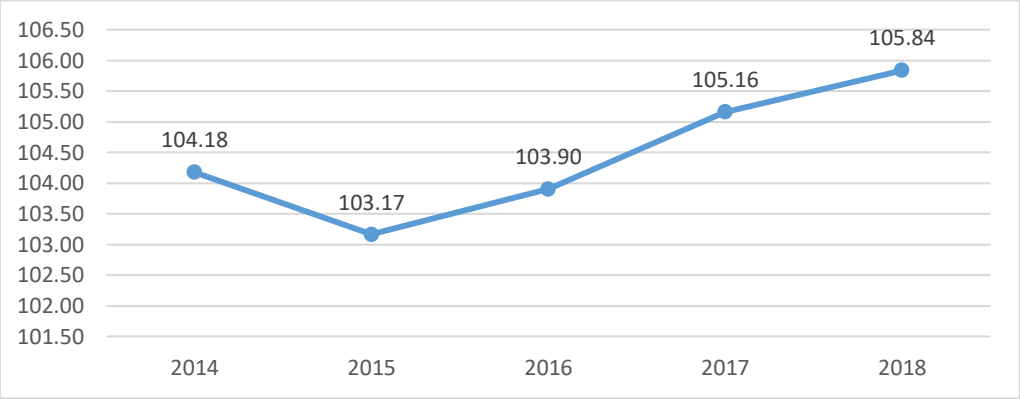

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019, diolah

NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. Sebagai respon atas kelemahan NTP, maka digunakan juga indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. NTUP Provinsi Lampung untuk seluruh sub sektor di atas nilai 100 yang menunjukkan petani mengalami surplus.

NTP Lampung pada sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan Rakyat dan Peternakan tahun 2017 berada di atas nilai 100, kecuali hortikultura 96,32 dan perikanan 94,65. Komponen terbesar dari IB yaitu Indeks Konsumsi Rumah Tangga terutama bahan makanan dan makanan jadi sedangkan pada Indeks Produksi dan Penambahan Barang Modal yang tertinggi adalah pada transportasi. Oleh karena itu, berbagai upaya sedang dilakukan pemerintah provinsi termasuk perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

Di lingkup regional Sumatera, nilai tukar petani Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat ke-1 tertinggi.

TABEL 2- 50 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Nilai Tukar Petani (NTP)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	98.15	96.64	96.27	94.74	94.73
Sumatera Utara	100.08	98.61	100.18	99.39	97.98
Sumatera Barat	100.60	97.74	98.90	96.97	95.31
Riau	96.94	95.24	98.68	102.97	97.97
Kepulauan Riau	100.93	99.45	98.16	97.54	96.5
Jambi	97.02	95.43	98.59	100.78	99.48
Sumatera Selatan	100.89	96.87	94.58	95.03	93.61
Kepulauan Bangka Belitung	101.56	104.70	101.43	95.79	86.88
Bengkulu	96.33	93.92	93.06	94.49	94.01
Lampung	104.18	103.17	103.90	105.16	105.84

Sumber: BPS, R.I, 2019, diolah

NTP Provinsi Lampung dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, sedangkan NTP di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017, NTP di Provinsi Lampung, sebesar 105,16 lebih besar daripada NTP di Indonesia. Dan pada tahun 2018 sebesar 105,84 menjadi lebih besar lagi dari Indonesia.

TABEL 2- 51 Nilai Tukar Petani antara Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018

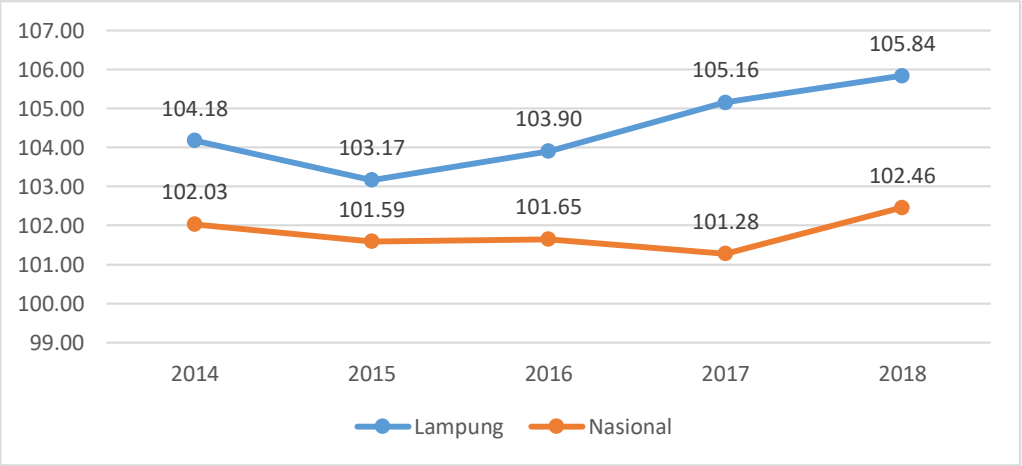

Sumber: BPS R.I, 2018 diolah

2.2.2.2. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Perbankan

Rasio pinjaman terhadap simpanan atau dalam bahas inggris disebut dengan loan to deposit rasio (LDR), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (bisa disebut dengan likuiditas) dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga. Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan pada saat menyalurkan pnjaman (kredit) kepada peminjam (debitur).

Disuatu waktu jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya jika nilai LDR terlalu rendah ini artinya perbankan memiliki likuiditas yang cukup akan tetapi profit yang didapat menjadi lebih rendah tentunya.

TABEL 2- 52 Tabel Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Perbankan Tahun 2014-2018

KET	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB - ADHB (Rp)	230,794,450,180,000	252,883,103,490,000	279,417,617,000,000	306,699,736,000,000	333,681,431,000,000
KREDIT - LOKASI PROYEK (Rp)	50,975,358,896,211	56,803,295,097,942	61,049,169,872,644	62,838,632,202,332	73,009,411,066,821
Rasio Kredit thd. PDRB (%)	22.09	22.46	21.85	20.49	21.88
KREDIT - LOKASI BANK (Rp Miliar)	47809.10	51692.19	56041.27	61341.52	64420.63
DANA PIHAK KETIGA - LOKASI BANK (Rp Miliar)	32317.64	36648.79	40017.35	43734.58	47017.05
LDR (Loan to Deposit Ratio) - (%)	147.93	141.05	140.04	140.26	137.02

Sumber: Bank Indonesia, 2018

Untuk Lampung sendiri di tahun 2014 memiliki nilai LDR sebesar 147.93% mengalami penurunan hingga 137.02% di tahun 2018 hal ini mengartikan bahwa kemampuan pihak bank sedang dalam keadaan kurang baik keuangannya, lalu untuk tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga 140.26 di tahun 2017 hal ini menunjukan perubahan keuangan yang baik.

2.2.2.3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu, lebih spesifiknya yaitu jumlah rata-rata dari berbagai jenis tindak kriminalitas yang terjadi dalam rentang satu bulan. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, maksud dari indikator ini yaitu semakin rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan di masyarakat. Angka kriminalitas di Kab/Kota di Provinsi Lampung paling banyak terjadi kegiatan kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara. Salah satu faktor utama terjadinya tingkat kriminalitas yang tinggi di kabupaten Lampung Utara yaitu faktor ekonomi dikarenakan banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah.

TABEL 2- 53 Angka Kriminalitas di Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

Kabupaten / Kota	JUMLAH KEJAHATAN PADA TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	157	100	191	183
Tanggamus	437	283	442	563
Lampung Selatan	666	793	1069	871
Lampung Timur	3580	258	582	629
Lampung Tengah	817	526	789	830
Lampung Utara	3719	1338	1282	1128
Way Kanan	445	540	558	494
Tulang Bawang	567	235	440	419
Pesawaran	-	286	-	298
Pringsewu	-	143	-	-
Mesuji	231	263	217	168
Tulang Bawang Barat	-	82	-	-
Pesisir Barat	-	129	-	-
Kota Bandar Lampung	2864	2856	3034	-
Kota Metro	431	404	447	518
Lampung	7755	8236	9051	6101

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018 diolah

Dan untuk angka kriminalitas tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yang memiliki angka kriminalitas tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Timur, sedangkan yang memiliki angka kriminalitas terendah terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat.

2.2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.2.3.1. Pendidikan

2.2.3.1.1. Data Penduduk per Usia Pelayanan Pendidikan

Sebagai gambaran pelayanan umum di bidang pendidikan, disajikan data penduduk per usia pelayanan pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2018 pada tabel-tabel berikut :

TABEL 2- 54 Pelayanan Pendidikan SD Sederajat

No.	Wilayah	Peserta Didik Keseluruhan					Peserta Didik usia 7-12 Tahun			
		P 7-12	SD	SLB *	Paket A	Jml	SD	SLB *	Paket A	Jml
1	Kab. Lampung Selatan	107,876	98,209	102	363	98,674	90,332	72	17	90,421
2	Kab. Lampung Tengah	131,721	129,258	125	74	129,457	117,317	70	4	117,391
3	Kab. Lampung Utara	69,421	64,114	67	14	64,195	59,643	41	0	59,684
4	Kab. Lampung Barat	33,764	29,705	0	49	29,754	27,064	0	1	27,065
5	Kab. Tulang Bawang	48,213	46,61	17	217	46,844	42,168	11	41	42,22
6	Kab. Tanggamus	62,83	59,444	46	158	59,648	54,385	25	2	54,412
7	Kab. Lampung Timur	104,959	92,764	75	43	92,882	83,982	37	0	84,019
8	Kab. Way Kanan	50,241	50,075	25	52	50,152	45,811	17	10	45,838
9	Kab. Pesawaran	55,445	43,85	0	9	43,859	40,382	0	0	40,382
10	Kab. Pringsewu	48,313	40,339	104	15	40,458	36,886	66	5	36,957
11	Kab. Mesuji	27,691	23,704	34	102	23,84	21,126	23	0	21,149
12	Kab. Tulang Bawang Barat	32,978	30,391	58	35	30,484	27,783	37	4	27,824
13	Kab. Pesisir Barat	21,531	18,037	0	0	18,037	16,485	0	0	16,485
14	Kota Bandar Lampung	102,698	94,192	329	247	94,768	88,184	214	42	88,44
15	Kota Metro	17,119	15,988	190	0	16,178	14,716	112	0	14,828
	Lampung	**914,800**	**836,68**	**1,172**	**1,378**	**839,23**	**766,264**	**725**	**126**	**767,115**

Sumber: Dapodik Provinsi Lampung

TABEL 2- 55 Pelayanan Pendidikan SMP Sederajat

No.	Wilayah	P 13-15	SMP	SLB *	Paket B	Jml	SMP	SLB *	Paket B	Jml
1	Kab. Lampung Selatan	52,247	33,264	19	882	34,165	27,126	28	60	27,214
2	Kab. Lampung Tengah	62,928	45,979	47	509	46,535	36,328	47	67	36,442
3	Kab. Lampung Utara	31,879	23,586	16	206	23,808	19,287	27	4	19,318
4	Kab. Lampung Barat	13,88	10,511	0	289	10,8	8,417	0	18	8,435
5	Kab. Tulang Bawang	19,756	16,005	6	695	16,706	12,309	7	50	12,366
6	Kab. Tanggamus	29,464	18,736	18	327	19,081	14,86	15	34	14,909
7	Kab. Lampung Timur	53,728	35,859	26	705	36,59	28,481	31	54	28,566
8	Kab. Way Kanan	22,226	16,392	9	569	16,97	12,967	12	56	13,035
9	Kab. Pesawaran	23,038	14,818	0	192	15,01	11,833	0	8	11,841
10	Kab. Pringsewu	22,449	16,623	47	225	16,895	13,242	40	26	13,308
11	Kab. Mesuji	9,377	7,258	0	223	7,481	5,276	4	7	5,287
12	Kab. Tulang Bawang Barat	13,73	10,975	1	367	11,343	8,648	15	33	8,696
13	Kab. Pesisir Barat	9,12	6,382	0	20	6,402	4,998	0	2	5
14	Kota Bandar Lampung	52,129	45,447	141	1,027	46,615	38,517	144	263	38,924
15	Kota Metro	11,549	9,729	81	72	9,882	8,15	73	14	8,237

No.	Wilayah	P 13-15	SMP	SLB *	Paket B	Jml	SMP	SLB *	Paket B	Jml
	Lampung	**427,5**	**311,564**	**411**	**6,308**	**318,283**	**250,439**	**443**	**696**	**251,578**

Sumber: Dapodik Provinsi Lampung

TABEL 2- 56 Pelayanan Pendidikan SMA Sederajat

No.	Wilayah	Peserta Didik Keseluruhan						Peserta Didik 16-18 Tahun				
		P 16-18	SMA	SLB *	SMK	Paket C	Jml	SMA	SLB *	SMK	Paket C	Jml
1	Kab. Lampung Selatan	53,933	15,298	13	18,169	2,626	36,106	12,65	19	14,524	506	27,699
2	Kab. Lampung Tengah	62,171	18,546	23	17,446	1,534	37,549	15,216	34	13,6	365	29,215
3	Kab. Lampung Utara	29,165	14,201	12	8,039	618	22,87	11,507	16	6,634	43	18,2
4	Kab. Lampung Barat	13,886	5,773	0	3,356	582	9,711	4,669	0	2,526	87	7,282
5	Kab. Tulang Bawang	18,641	5,857	4	5,288	1,251	12,4	4,519	5	3,934	237	8,695
6	Kab. Tanggamus	28,189	8,633	1	6,969	1,069	16,672	7,008	10	5,341	131	12,49
7	Kab. Lampung Timur	49,795	14,946	24	15,833	1,648	32,451	12,125	31	12,261	292	24,709
8	Kab. Way Kanan	21,94	8,425	7	6,076	987	15,495	6,469	4	4,611	115	11,199
9	Kab. Pesawaran	23,986	6,001	0	5,157	899	12,057	4,739	0	4,139	111	8,989
10	Kab. Pringsewu	23,198	8,676	15	12,191	659	21,541	7,403	36	9,496	157	17,092
11	Kab. Mesuji	10,194	2,887	0	2,679	535	6,101	1,987	2	1,885	35	3,909
12	Kab. Tulang Bawang Barat	12,192	4,667	0	3,532	836	9,035	3,707	4	2,692	253	6,656
13	Kab. Pesisir Barat	8,311	3,734	0	2,016	173	5,923	2,775	0	1,52	11	4,306
14	Kota Bandar Lampung	49,573	25,012	133	23,749	1,758	50,652	21,722	136	19,426	580	41,864
15	Kota Metro	16,326	7,304	62	9,513	578	17,457	6,313	78	7,749	116	14,256
	Lampung	**421,5**	**149,96**	**294**	**140,013**	**15,753**	**306,02**	**122,809**	**375**	**110,338**	**110,454**	**236,561**

Sumber: Dapodik Provinsi Lampung

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa peserta didik Sekolah Luar Biasa yang menjadi Kewenangan Provinsi Lampung terbesar berada di Pelayanan Pendidikan SD sederajat yaitu dengan jumlah 725 jiwa, dengan total peserta didik seluruh tingkatan pendidikan adalah 1.543 jiwa.

2.2.3.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Peningkatan akses pendidikan yang diikuti pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dilihat dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK).

TABEL 2- 57 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan, 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	112,74	113,38	111,44	109,77	110,11
SMP	86,76	100,83	93,58	91,04	94,18
SMA	68,49	73,9	82,98	85,16	81,56
PT	25,76	10,21	13,52	15,49	17,68

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

APK jenjang sekolah terbanyak dari tahun 2015-2017 adalah pada jenjang SD sampai dengan SMP dan menurun pada jenjang SMA dan dan PT. Upaya untuk meningkatkan APK tersebut perlu terus dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memperluas akses pendidikan SMA/SMK khususnya masyarakat Lampung yang telah menamatkan jenjang pendidikan SMP.

TABEL 2- 58 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA/K se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

Provinsi	Tahun														
	2014			2015			2016			2017			2018		
	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K
Aceh	111.66	95.87	81.53	113.36	97.88	83.33	111.26	99.15	87.47	110.31	98.74	87.52	113.85	99.3	84.8
Sumatera Utara	110.34	90.29	82.96	112.62	95.41	84.14	110.89	90.71	93.25	109.5	90.74	93.64	111.1	89.98	91.57
Sumatera Barat	110.89	88.05	80.46	113.25	90.94	81.42	110.39	91.05	84.7	110.46	90.4	88.39	110.99	90.92	83.97
Riau	109.42	90.79	76.33	110.4	94.14	76.16	110.04	93.84	78.3	108.3	92.4	85.05	106.92	94.18	83.87
Jambi	110.73	87.83	73.63	111.99	91.78	76.12	112.97	90.75	80.36	112.4	86.37	83.54	111.98	87.55	78.93
Sumatera Selatan	112.01	88.43	72.51	114.47	93.56	73.18	114.33	88.54	82.51	112.14	89.09	83.44	114.14	86.51	77.4
Bengkulu	113.95	88.23	79.49	116.16	88.79	82.79	113.13	90.38	83.56	112.71	90.52	87.1	113.53	92.08	85.57
Lampung	112.74	86.76	68.49	113.38	100.83	73.9	111.44	93.58	82.98	109.77	91.04	85.16	110.11	94.18	81.56
Kep. Bangka Belitung	113.22	82.52	75.51	111.07	87.6	76.41	111.75	84.38	79.1	110.58	84.53	82.88	111.15	85.93	82.21
Kep. Riau	108.99	91.06	81.36	108.27	92.38	93.2	108.86	90.4	89.47	106.82	90.45	95.79	107.3	92.44	90.99
Indonesia	108.87	88.63	74.26	110.5	91.17	78.02	109.31	90.12	80.89	108.5	90.23	82.84	108.61	91.52	80.68

Sumber: BPS R.I, 2019, diolah

Di lingkup regional Sumatera, angka pastisipasi kasar untuk SD Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat ke-8 di Sumatera, untuk SMP Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada pada peringkat kedua, tertinggi bersama Provinsi Riau, untuk SMA/K Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada pada peringkat 8.

GAMBAR 2- 38 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

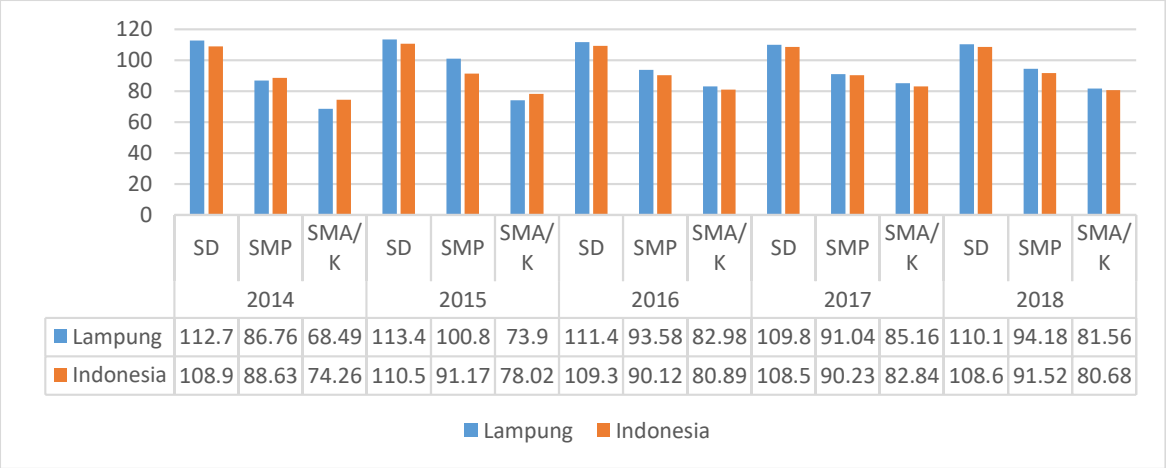

	2014 SD	2014 SMP	2014 SMA/K	2015 SD	2015 SMP	2015 SMA/K	2016 SD	2016 SMP	2016 SMA/K	2017 SD	2017 SMP	2017 SMA/K	2018 SD	2018 SMP	2018 SMA/K
Lampung	112.7	86.76	68.49	113.4	100.8	73.9	111.4	93.58	82.98	109.8	91.04	85.16	110.1	94.18	81.56
Indonesia	108.9	88.63	74.26	110.5	91.17	78.02	109.3	90.12	80.89	108.5	90.23	82.84	108.6	91.52	80.68

Sumber:BPS, 2018

Lebih spesifiknya mengenai Provinsi Lampung jika dibandingkan Nasional bisa kita bahwa pada tahun 2018 Angka Partisipasi Kasar untuk SD, SMP, dan SMA/SMK di Provinsi Lampung, yaitu 110,11; 94,18 dan 81,56 %. Secara menyeluruh Angka Partisipasi Kasar Provinsi Lampung lebih besar dari pada Angka Partisipasi Kasar Nasional sebesar SD, SMP, dan SMA/SMK, yaitu 108,61; 91,52 dan 80,68 %.

2.2.3.1.3. Angka Partisipasi Murni

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), data berikut menunjukkan capaian APM Provinsi Lampung.

TABEL 2- 59 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan, 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	97,98	98,32	98,46	99,02	99,21
SMP	77,98	78,2	78,34	79,24	80,23
SMA	57,64	58,39	58,85	58,02	59,18
PT	-	8,01	9.22	9,02	12,52

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari data di atas terlihat bahwa proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun terdapat penurunan di beberapa parameter. Seperti halnya dengan APK, APM menurut jenis kelamin mempunyai pola yang sama di semua jenjang.

TABEL 2- 60 Angka Partisipasi Murni se-Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Tahun														
	2014			2015			2016			2017			2018		
	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K
Aceh	97.8	85.2	69.2	97.99	85.55	69.82	98.16	85.73	70	98.54	86.31	70.15	99,10	86,38	70,26
Sumatera Utara	96.29	78.33	65.8	96.47	78.48	66.69	96.57	78.71	66.85	97.22	79.12	67.05	97,63	79,25	67,27
Sumatera Barat	97.92	75.61	66.52	98.12	76	66.9	98.23	76.19	67.12	98.64	76.47	67.3	98,66	77,08	67,48
Riau	96.42	77.67	62.31	96.63	78.22	62.6	96.74	78.53	62.76	97.08	78.87	63.02	97,26	79,12	63,47
Jambi	97.15	77.34	59.22	97.68	77.94	59.41	97.81	78.09	59.52	98.41	78.57	59.98	99,04	79,38	60,92
Sumatera Selatan	96.13	75.87	57.92	96.41	76.18	58.27	96.59	76.43	58.59	97.16	76.89	59.06	97,85	76,91	59,87
Bengkulu	98.03	76.44	64.61	98.1	76.88	64.97	98.22	77.02	65.29	98.6	77.85	65.33	98,63	78,03	65,45
Lampung	97.98	77.98	57.64	98.32	78.2	58.39	98.46	78.34	58.85	99.02	79.24	58.97	99,21	80,23	59,18
Kepulauan Bangka Belitung	96.49	71.83	56.93	96.66	72.42	57.02	96.75	72.75	57.22	97.42	73.06	57.69	97,71	73,96	57,86
Kepulauan Riau	98.22	83.36	70.52	98.68	98.68	71.23	98.83	84.06	71.58	98.93	84.28	71.98	99,12	84,59	72,90
Indonesia	96.45	77.53	59.35	96.7	77.82	59.71	96.82	77.95	59.95	97.19	78.4	60.37	97,58	78,84	60,67

Sumber: BPS R.I, 2019, diolah

Di lingkup regional Sumatera, angka partisipasi murni untuk SD Provinsi Lampung pada tahun 2018 berada di peringkat ke-1 tertinggi, untuk SMP Provinsi Lampung pada tahun 2018 berada pada peringkat 3 terbesar, untuk SMA/SMK Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada pada peringkat 9.

GAMBAR 2- 39 Perbandingan Angka Partisipasi Murni Antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

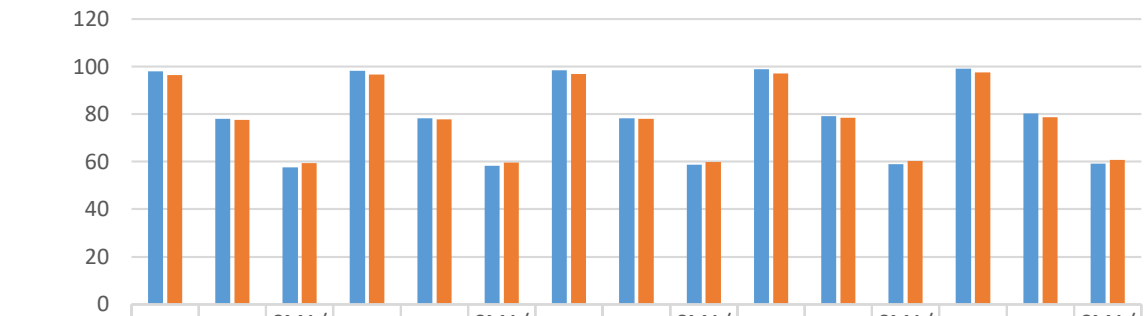

	2014			2015			2016			2017			2018		
	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K
Lampung	97.98	77.98	57.64	98.32	78.2	58.39	98.46	78.34	58.85	99.02	79.24	58.97	99.21	80.23	59.18
Indonesia	96.45	77.53	59.35	96.7	77.82	59.71	96.82	77.95	59.95	97.19	78.4	60.37	97.58	78.84	60.67

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

Lebih spesifiknya mengenai Provinsi Lampung jika dibandingkan Nasional bisa kita lihat bersama pada Gambar, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Angka Partisipasi Kasar untuk SD, SMP, dan SMA/SMK di Provinsi Lampung, yaitu 99,21; 80,23 dan 59,18 %. Secara menyeluruh Angka Partisipasi Kasar Provinsi Lampung lebih besar dari pada Angka Partisipasi Kasar Nasional kecuali pada tingkat SMA/SMK sebesar SD, SMP, dan SMA/SMK,yaitu 97,58; 78,84 dan 60,67 %.

2.2.3.1.4. Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2- 61 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Tahun 2014-2018

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
07-12	99,56	99,62	99,63	99,78	99,86
13-15	94,01	94,24	94,32	94,76	95,00
16-18	68,75	69,04	69,31	70,03	70,83
19-24	18,67	18,81	19,72	20,96	20,60

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2018 yang masih sekolah sebanyak 70,83 persen artinya masih ada 29,17 persen penduduk yang tidak sekolah. Namun demikian APS pada setiap jenjang secara perlahan telah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

TABEL 2- 62 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia se-Sumatera dan Nasional Tahun 2015-2018

Provinsi	2015				2016				2017				2018			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
												34.28	99.86	98.49	82.92	32.59
SumUt	99.4	96.34	76.23	25.16	99.4	96.48	76.43	26.62	99.5	96.6	76.76	26.8	99.5	96.75	77.41	25.31
SumBar	99.4	95.98	82.53	33.13	99.4	96.17	82.62	34.71	99.5	96.29	82.86	35.45	99.51	96.37	83.08	33.87
Riau	98.8	94.48	75.57	24.85	98.9	94.62	75.68	26.18	99	94.73	76.52	27.28	99.07	94.95	77.27	27.19
Jambi	99.6	95.06	70.75	22.22	99.6	95.35	71.2	23.86	99.6	95.89	71.54	24.12	99.67	96.14	71.94	22.16
SumSel	99.5	93.52	68.4	17	99.6	93.68	68.67	18.07	99.6	94.01	69.05	19.17	99.71	94.41	69.65	17.15
Bengkulu	99.7	96.83	78.16	28.37	99.7	96.96	78.37	28.93	99.8	97.2	79.07	29.9	99.87	97.36	79.33	29.15
Lampung	99.6	94.24	69.04	18.81	99.6	94.32	69.31	19.72	99.8	94.76	70.03	20.96	99.86	95	70.83	20.6
Kep. Babel	99.2	91.82	66.17	12.73	99.3	92.03	66.35	13.81	99.6	92.41	66.99	14.99	99.85	92.7	67.11	15.99
Kep. Riau	99.3	98.67	81.84	17.69	99.3	98.78	82.04	18.58	99.3	99.08	82.8	19.13	99.52	99.2	83.78	18.24
Indonesia	99.1	94.72	70.61	22.95	99.1	94.88	70.83	23.93	99.1	95.08	71.42	24.77	99.22	95.36	71.99	24.4

Sumber: BPS R.I, 2019 diolah

Di lingkup regional Sumatera, angka partisipasi sekolah untuk umur 7-12 tahun Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat ke-2 yaitu 99,86 sama seperti Provinsi Aceh, untuk usia 13-15 tahun Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada pada peringkat 7, untuk usia 16-18 tahun Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada pada peringkat 8 dan untuk

usia 19-24 tahun Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat 7.

GAMBAR 2- 40 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah antara Provinsi Lampung dan NasionalTahun 2014-2018

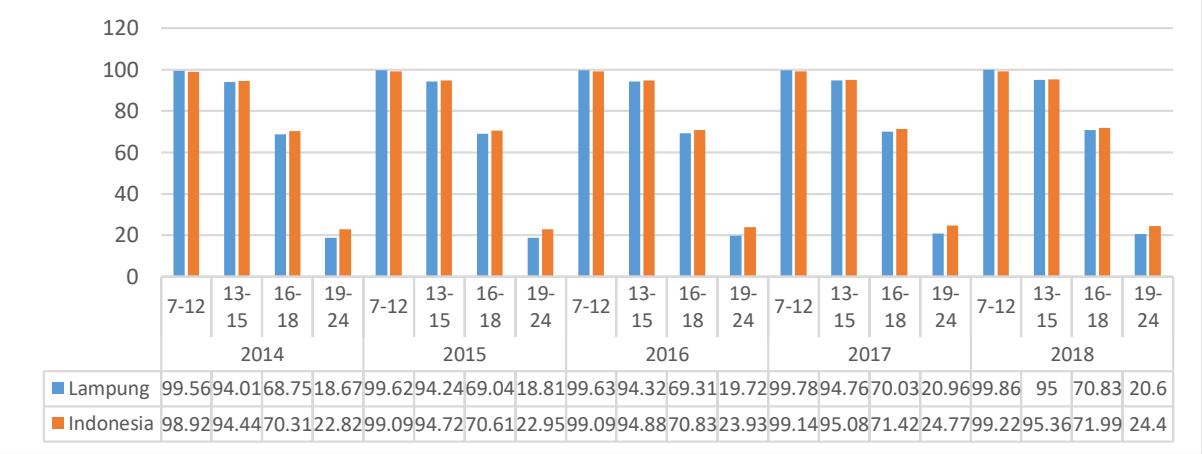

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 diolah

Jika ditinjau dari perbandingan antara Provinsi Lampung dengan Nasional, angka partisipasi sekolah untuk umur 7-12, 13-15 dan 16-18 tahun baik di Provinsi Lampung dan Nasional, secara umum mengalami penurunan seiring bertambahnya usia ini mengindikasikan bahwa semakin kecil persentase masyarakat khususnya anak-anak yang mendapatkan pendidikan tinggi.

2.2.3.1.5. Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.

GAMBAR 2- 41 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Tahun 2016-2018

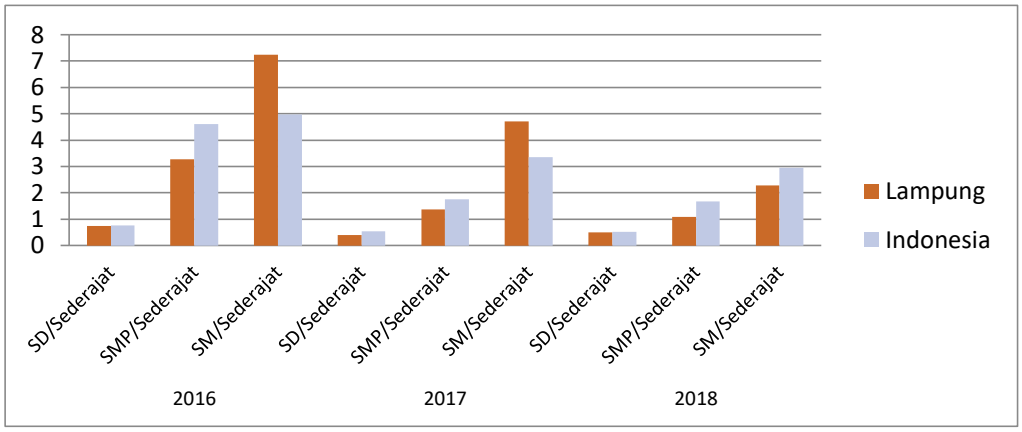

(Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2018)

Perkembangan Pada tahun 2018 peningkatan APS terjadi pada jenjang SD sederajat, yang meningkat sebesar 0,10, meski mengalami peningkatan, namun APS tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata APS Sekolah Dasar sederajat secara Nasional. Pencapaian lebih baik dibandingkan rata-rataj Nasional juga dicapai pada APS SMP dan SMA.

2.2.3.1.6. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Melihat pencapaiannya dari tahun 2014-2018 di daerah perkotaan maupun perdesaan terus menunjukkan penurunan.

TABEL 2- 63 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tahun 2014-2018

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2014	98,38	95,88	96,54
2015	98,08	96,15	96,67
2016	98,41	96,18	96,78
2017	98,55	96,69	97,21
2018	98,23	96,38	96,93

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018 diolah

Jika dilihat pada lingkup regional Sumatera, angka melek huruf Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat paling bawah akan tetapi mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam rentang waktu 2014-2018.

TABEL 2- 64 Angka Melek Huruf se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

Provinsi	Angka Melek Huruf se-Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	97.42	97.63	97.74	97.94	98.03
SUMATERA UTARA	98.57	98.68	98.88	98.89	99.07
SUMATERA BARAT	98.44	98.56	98.81	98.85	99.07
RIAU	98.75	98.87	99.07	99.17	99.2
JAMBI	97.77	97.84	98.01	98.09	98.15
SUMATERA SELATAN	98.14	98.22	98.46	98.54	98.66
BENGKULU	97.52	97.63	97.75	97.9	97.91
LAMPUNG	96.54	96.67	96.78	96.89	96.93
KEP. BANGKA BELITUNG	97.6	97.63	97.66	97.79	97.76
KEP. RIAU	98.71	98.79	98.84	98.83	98.87
Indonesia	95.12	95.22	95.38	95.50	95.66

Sumber: BPS R.I, 2019 diolah

Berdasarkan hasil dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf Provinsi Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2018 berada di angka 96.93. Dan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, angka tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dengan angka 99.2.

GAMBAR 2- 42 Perbandingan Angka Melek Huruf antara Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

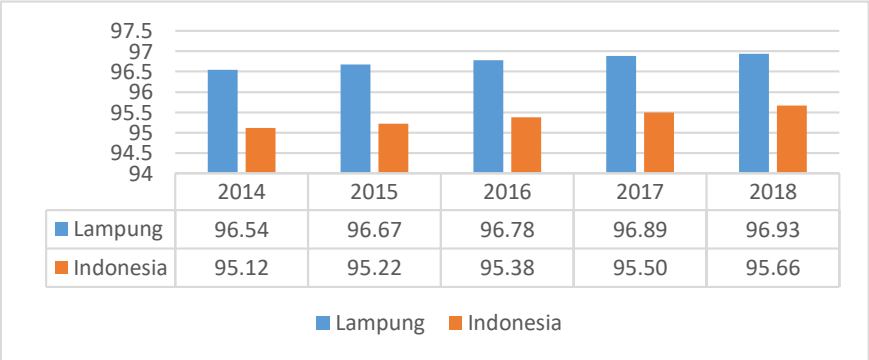

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Pada tahun 2014-2018 angka melek huruf Provinsi Lampung berada diatas angka melek huruf nasional. Dan juga Provinsi Lampung mengalami kenaikan angka setiap tahunnya dan pada tahun 2018 dengan angka 96,93.

2.2.3.1.7. Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah

Selama periode 2014 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah setiap tahun terus naik dari sebelumnya. Meskipun sangat lambat pertumbuhannya akan tetapi semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Lampung telah mencapai 12,61 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

GAMBAR 2- 43 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Lampung juga ikut naik selama periode 2014 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2018, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 7,82 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I).

GAMBAR 2- 44 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia, Tahun 2014-2018

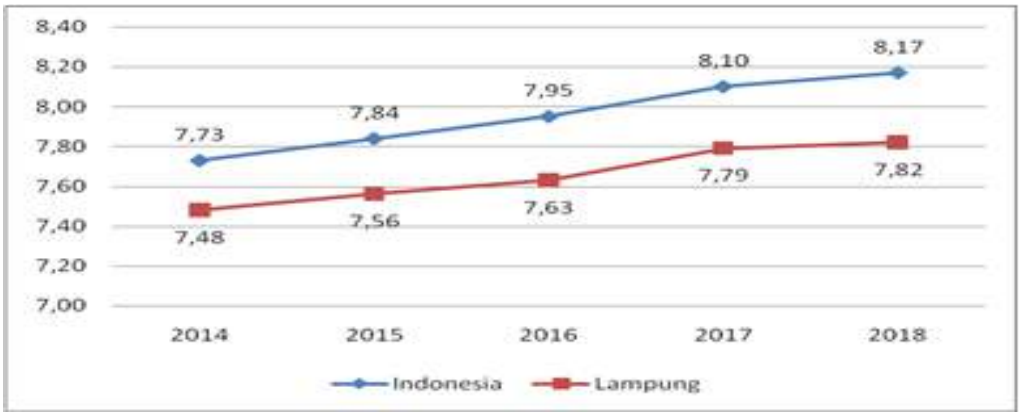

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Di lingkup regional Sumatera, persentase Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat 3 terendah di pulau Sumatera, akan tetapi setiap tahunnya data Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan.

TABEL 2- 65 Harapan Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

Provinsi	Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	13.53	13.73	13.89	14.13	14,27
SUMATERA UTARA	12.16	12.82	13	13.1	13,14
SUMATERA BARAT	13.48	13.6	13.79	13.94	13,95
RIAU	12.45	12.74	12.86	13.03	13,11
JAMBI	12.38	12.57	12.72	12.87	12,90
SUMATERA SELATAN	11.75	12.02	12.23	12.35	12,36
BENGKULU	13.01	13.18	13.38	13.57	13,58
LAMPUNG	12.24	12.25	12.35	12.46	12,61
KEP. BANGKA BELITUNG	11.18	11.6	11.71	11.83	11,87
KEP. RIAU	12.51	12.6	12.66	12.81	12,82
Indonesia	12.39	12.55	12.72	12.85	12,91

Sumber:BPS R.I, 2019, diolah

Selanjutnya untuk di lingkup regional Sumatera, persentase Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat terbawah, disamping itu Rata-rata Lama Se.kolah Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam rentang waktu 2014-2018

TABEL 2- 66 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	8.71	8.77	8.86	8.98	9,09
SUMATERA UTARA	8.93	9.03	9.12	9.25	9,34
SUMATERA BARAT	8.29	8.42	8.59	8.72	8,76
RIAU	8.47	8.49	8.59	8.76	8,92
JAMBI	7.92	7.96	8.07	8.15	8,23
SUMATERA SELATAN	7.66	7.77	7.83	7.99	8,00
BENGKULU	8.28	8.29	8.37	8.47	8,61
LAMPUNG	7.48	7.56	7.63	7.79	7,82
KEP. BANGKA BELITUNG	7.35	7.46	7.62	7.78	7,84
KEP. RIAU	9.64	9.65	9.67	9.79	9,81
Indonesia	7.73	7.84	7.95	8.10	8,17

Sumber:BPS, 2019, diolah

Selanjutnya secara umum untuk di lingkup Provinsi Lampung, persentase Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat 3 ter-bawah.

Kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara rata-rata menunjukkan anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun atau setara dengan menyelesaikan sekolah sampai dengan jenjang Diploma I. Sedangkan dari Angka Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah, pada tahun 2017 sebesar 7,71 tahun, hal ini berarti secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,71 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

TABEL 2- 67 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2014-2018

Wilayah	Harapan Lama Sekolah					Rata-rata Lama Sekolah				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Lampung Barat	11.36	11.74	12.17	12.18	12.19	7.25	7.56	7.28	7.28	7.6
Tanggamus	11.49	11.92	11.93	12.14	12.15	6.63	7.27	6.87	6.87	6.96
Lampung Selatan	10.98	11.65	11.68	12.05	12.17	7.01	6.86	7.53	7.53	7.67
Lampung Timur	12.38	12.40	12.41	12.44	12.83	7.16	-	7.55	7.55	7.57
Lampung Tengah	12.16	12.20	12.21	12.60	12.9	7.06	7.14	7.37	7.37	7.51
Lampung Utara	12.38	12.41	12.42	12.43	12.44	7.69	-	7.71	7.71	8.19
Way Kanan	11.96	11.98	12.31	12.32	12.33	6.76	7.32	7.33	7.33	7.35
Tulang Bawang	11.11	11.15	11.55	11.71	11.73	7.10	7.11	7.12	7.12	7.22
Pesawaran	11.44	12.08	12.25	12.26	12.28	7.21	7.23	7.24	7.24	7.47
Pringsewu	12.47	12.75	12.76	12.77	12.78	7.53	7.83	7.84	7.84	8.01
Mesuji	10.34	10.78	11.20	11.59	11.61	5.80	6.12	6.13	6.13	6.6
Tulang Bawang Barat	11.29	11.49	11.97	11.98	11.99	6.81	6.82	6.83	6.83	7.1
Pesisir Barat	11.12	11.53	11.85	11.95	11.97	7.36	7.47	7.48	7.48	7.59
Bandar Lampung	13.31	13.35	13.67	13.87	14.23	10.85	10.87	10.88	10.88	10.9
Metro	14.25	14.26	14.27	14.28	14.29	10.54	10.55	10.56	10.56	10.61
Provinsi Lampung	12.24	12.25	12.35	12.46	12.61	7.48	7.56	7.63	7.63	7.82

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Berdasarkan Tabel Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017, Kabupaten Mesuji ada di urutan terendah di angka 11,59, angka tersebut masih di bawah target nasional yang sebesar 12,85. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi di Provinsi Lampung yaitu Kota Metro yang sebesar 14,28, ada selisih sebesar 2,69 dengan Kabupaten Mesuji. Selanjutnya untuk Rata-Rata Lama Sekolah, Angka terendah masih terdapat juga di Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 6,13. Angka tersebut masih jauh di bawah angka nasional yang sebesar 8,1. Bandar Lampung memperoleh angka tertinggi untuk Rata-Rata Lama Sekolah yaitu sebesar 10,88. Selisih angka tersebut dibandingkan dengan Kabupaten Mesuji adalah sebesar 4,75.

Kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara rata-rata menunjukkan anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun atau setara dengan menyelesaikan sekolah sampai dengan jenjang Diploma I. Sedangkan dari Angka Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah, pada tahun 2017 sebesar 7,71 tahun, hal ini berarti secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,71 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

2.2.3.1.8. Standar Nasional Pendidikan

Mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan adanya pendekatan yang melibatkan semua komponen satuan pendidikan yang terstandar, sehingga terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas.

TABEL 2- 68 Capaian Standar Nasional pendidikan Jenjang SMA Provinsi Lampung Tahun 2017

No	Indikator	Nilai
1	Kompetensi Lulusan	5,29
2	Standar isi	4,27
3	Standar Proses	6,30
4	Standar penilaian pendidikan	5,96
5	Standar pendidikan dan tenaga pendidikan	3,08
6	Standar sarana prasarana	1,90
7	Standar pengelolaan pendidikan	5,08
8	Standar pembiayaan	5,88

Sumber : LPMP Provinsi Lampung, 2017

Analisis mutu pendidikan jenjang Sekolah menengah Atas di Provinsi Lampung memiiki nilai rendah pada indikator kompetensi kelulusan sub pengetahuan faktual, prosedural, konsepsional dan metakognitif, hal ini dikarenakan guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik. Standar isi untuk mutu sekolah yang belum melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dikarenakan efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan serta muatan lokal yang belum menjadi mata pelajaran wajib disetiap sekolah. Standar proses pendidikan memiliki nilai rendah pada sub indikator proses pembelajaran yang

dilaksanakan karena banyaknya sekolah yang mencari siswa sebanyak banyaknya dikarenakan jumlah BOS dan BOP tergantung jumlah siswa dan ruang kelas yang tersedia disekolah kuantitasnya kurang dari rasio yang ditentukan. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan memiliki nilai rendah di sub ketersedian dan kompetensi guru, hal ini dikarenakan guru kurang memahami tentang kompetensi profesional serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah.

Untuk indikator standar sarana prasarana nilai terendah pada kondisi ruang kelas yang belum terstandar, hal ini dikarenakan luas lahan yang terbatas, jumlah siswa yang melebihi kapasitas, pemeliharaan yang tidak berkala serta pengadan yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. Standar pengelolaan pendidikan memiliki nilai rendah pada kinerja kepala sekolah hal ini dikarenakan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah yang masih kurang. Nilai Standar pembiayaan masih kurang dari segi pelaporan pengelolaan dana, hal ini dikarenakan kemapuan tenaga kependidikan dalam menyusun laporan pengelolaan pendanaan terbatas dan beban kerja ganda.

2.2.3.1.9. Sarana Dan Prasarana

SMA

Keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMA dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di tahun 2017. Untuk sekolah yang berkondisi rusak berat menurun dari 254 sekolah pada tahun 2015 menjadi 232 di tahun 2017. Kondisi sarana dan prasarana SMA yang cukup fluktuatif tersebut disebabkan oleh kondisi alam dan topografi dari setiap daerah serta minimnya anggaran untuk biaya pemeliharaannya.

GAMBAR 2- 45 Ratio Sarana dan Prasarana SMA 2015-2017

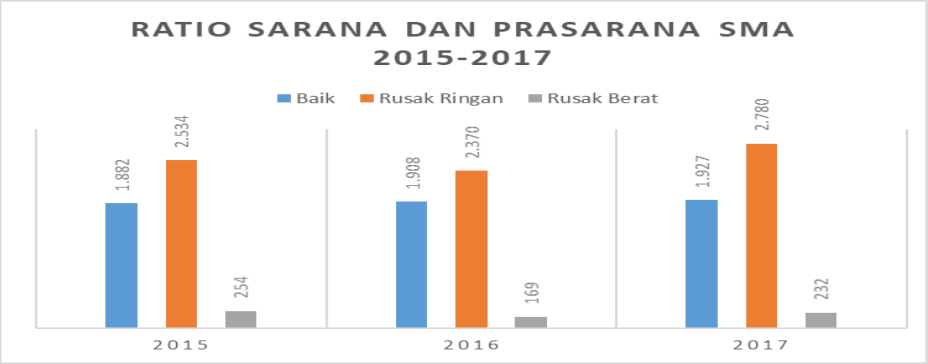

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), 2018

SMK

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK dengan kondisi baik mulai dari tahun 2015-2017 mirip dengan kondisi SMA dengan tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu di tahun 2015 terdapat 2.019 sekolah menjadi 2.372 sekolah di tahun 2017.

GAMBAR 2- 46 Ratio Sarana dan Prasarana 2015-2017

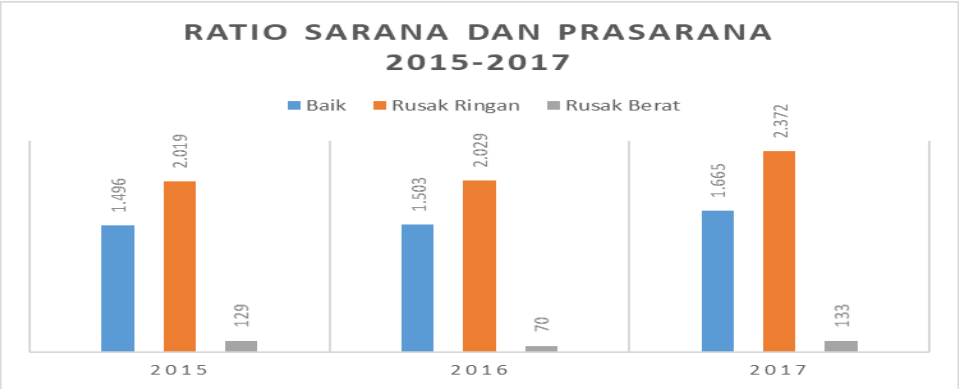

Sumber: PDSPK,2018

Sekolah Luar Biasa

Sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa dengan kondisi baik di tahun 2018 berada di tingkatan 40% dengan tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu terdapat 102 sekolah. Sedangkan untuk keadaan sekolah Rusak Sedang dan Rusak Berat masing-masing sebanyak 51 sekolah.

TABEL 2- 69 Sekolah Luar Biasa Tahun 2018

Uraian	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
RKB SLB	342	138	102	51	51	0

2.2.3.1.10. Infrastruktur Bangunan

Fasilitas sekolah menengah dengan kondisi bangunan baik meningkat dari tahun 2015 yaitu dari 6.119 sekolah (32%) menjadi 6.946 sekolah (36%) di tahun 2017. Meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, namun telah menunjukkan adanya dukungan program rehabilitasi maupun pembangunan terhadap infrastruktur sekolah menengah di Provinsi Lampung.

GAMBAR 2- 47 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 2015-2017

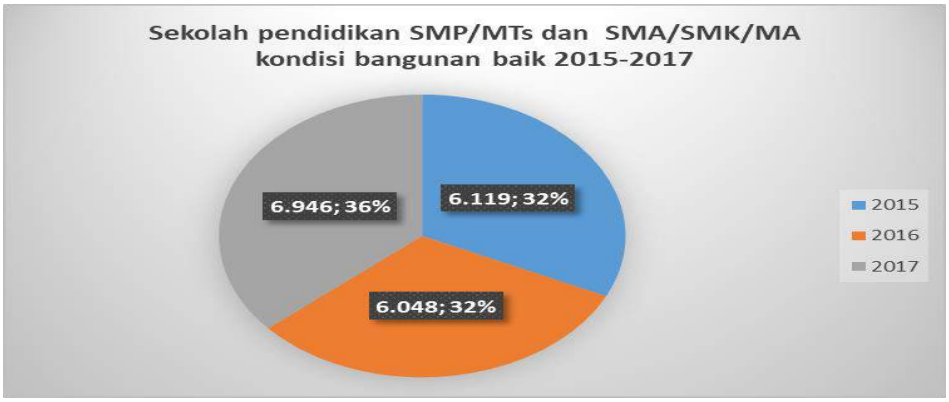

Sumber : Dapodik Kemendikbud, 2018

Selain fasilitas sekolah yang mengalami peningkatan disamping itu juga faktor jumlah peserta didik beserta guru baik di jenjang SD, SMP hingga SMA seharusnya juga mengalami peningkatan, berikut informasi pada tahun 2017 mengenai jumlah sekolah, murid dan guru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

TABEL 2- 70 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Kab/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
Lampung Barat	210	30.293	2.506	55	10.261	1.086	16	5.517	612
Tanggamus	412	59.892	4.914	78	18.856	1.596	27	7.907	921
Lampung Selatan	492	99.237	6.121	142	33.3	2.71	55	13.696	1.486
Lampung Timur	561	93.327	6.677	159	37.41	3.431	43	13.983	1.551
Lampung Tengah	723	127.942	8.895	201	47.021	4.397	63	16.658	2.08
Lampung Utara	427	66.983	5.734	101	24.189	2.427	40	13.025	1.424
Way Kanan	310	50.267	3.788	81	16.89	1.468	37	7.939	858
Tulang Bawang	208	47.701	2.96	88	16.051	1.507	23	4.893	605
Pesawaran	310	44.867	3.524	60	15.022	1.424	19	5.325	593
Pringsewu	268	40.232	3.048	59	17.693	1.448	22	7.933	852
Mesuji	121	23.18	1.473	47	7.424	683	12	2.824	251
Tulang Bawang Barat	171	29.407	2.062	51	10.884	985	14	3.999	516
Pesisir Barat	117	18.134	1.366	35	6.098	601	12	3.64	358
Kota Bandar Lampung	254	97.222	4.936	122	45.618	3.488	62	26.486	2.587
Kota Metro	57	16.114	1.085	24	9.507	773	17	6.773	754
LAMPUNG	**4.641**	**844.798**	**59.089**	**1.248**	**316.224**	**28.024**	**462**	**140.598**	**15.448**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2017

Untuk jumlah sekolah SLB dari tahun 2014 sejumlah 15 sekolah, tahun 2015 dan 2016 sejumlah 26 sekolah dan tahun 2019 meningkat menjadi 27 sekolah.

TABEL 2- 71 Jumlah Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung 2014-2019

SLB		TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sekolah	Negeri	9	9	9	11	11	11
	Swasta	14	14	14	14	14	16

2.2.3.1.11. Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK/SLB

Berdasarkan data Jumlah Guru dan Murid SMA Tahun 2014 berjumlah 9.901 guru dengan jumlah murid 126.141, pada tahun 2015 berjumlah 12.851 guru dengan jumlah murid 134.904 orang , pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah guru dan peningkatan jumlah murid yaitu 9.466 orang dengan jumlah murid 137.159 orang, pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah guru dan jumlah murid yaitu 9.696 rang dengan jumlah murid 149.141

orang, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah guru yaitu 10.325 orang dan jumlah murid 152.625 orang.

GAMBAR 2- 48 Jumlah Murid dan Guru SMA/SMK Tahun 2014-2018

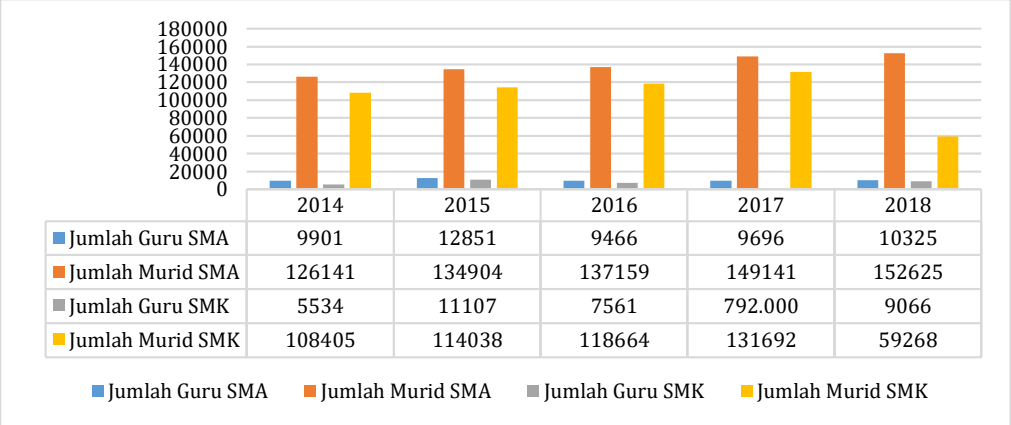

Sumber: Kemendikbud,2018

Berbanding terbalik dengan perbandingan di tingkat SMK yang selalu bertambah ditiap tahunnya seperti pada tahun 2014 jumlah guru 5.534 orang sedangkan jumlah murid 108.405 orang, tahun 2015 jumlah guru 11.107 orang sedangkan jumlah murid 114.038 orang, tahun 2016 jumlah guru 7.561 orang sedangkan jumlah murid 118.664 orang, tahun 2017 jumlah guru 7.920 orang sedangkan jumlah murid 131.692, dan pada tahun 2018 jumlah guru 9.066 orang sedangkan jumlah murid 59.268 orang.

TABEL 2- 72 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung 2014-2019

SLB		TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Siswa	Negeri	659	672	687	698	701	735
	Swasta	945	954	968	977	965	1012
Guru	PNS	160	159	159	159	158	185
	Non PNS	238	242	245	249	298	342

Jumlah guru PNS meningkat di tahun 2019 menjadi 185 orang dari 160 di tahun 2016, sedangkan untuk guru Non PNS dari tahun 2016 sebanyak 238 orang meningkat menjadi 342 orang di tahun 2019. Untuk jumlah siswa di tahun 2019 terdapat 1.747 orang terdaftar, dimana pada tahun 2018 secara umum terjadi penurunan jumlah peserta didik pada sekolah luar biasa di Provinsi Lampung.

2.2.3.1.12. Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan jumlah guru per jumlah siswa untuk jenjang SMA pada Tahun 2015 1:13, Tahun 2016 1:14 dan Tahun 2017 1:15. Sedangkan untuk perbandingan jenjang SMK pada Tahun 2015 1:14, Tahun 2016 1:15 dan Tahun 2017 1:15. Walaupun data ini menujukan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS sehingga belum menggambarkan kondisi riil.

TABEL 2- 73 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2015-2017

Keterangan	2015	2016	2017
Guru: Siswa SMA	1:13	1:14	1:15
Guru: Siswa SMK	1:14	1:15	1:15

Sumber:PDSPK,2018

2.2.3.1.13. Akreditasi Sekolah

SMA

Peringkat akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi sekolah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi A (unggul) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 (91≤NA≤100).
2. Peringkat Akreditasi B (baik) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 81 sampai dengan 90 (81≤NA≤90).
3. Peringkat Akreditasi C (cukup) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir

Akreditasi (NA) sebesar 71 sampai dengan 80 (71≤NA≤80).

Sekolah Tidak Terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

1. Nilai akhir 61 sampai dengan 70 (61≤NA≤70) dengan peringkat akreditasi D (kurang)
2. Nilai akhir 0 sampai dengan 60 (0≤NA≤60) dengan peringkat akreditasi E (sangat kurang).

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk tahun 2015, sekolah SMA yang berakreditasi A sebanyak 14,40%, sekolah akreditasi B sebanyak 41,30%, sekolah akreditasi C sebanyak 23,60%, sekolah yang belum terakreditasi sebanyak 20,07%. Untuk tahun 2016, sekolah SMA yang berakreditasi A sebanyak 13%, sekolah akreditasi B sebanyak 34%, sekolah akreditasi C sebanyak 21%, sekolah yang belum terakreditasi sebanyak 32%. Untuk tahun 2017, sekolah SMA yang berakreditasi A sebanyak 21,40%, sekolah akreditasi B sebanyak 33,50%, sekolah akreditasi C sebanyak 21,60%, sekolah yang belum terakreditasi sebanyak 23,40%.

GAMBAR 2- 49 Akreditasi Sekolah SMA 2015-2017

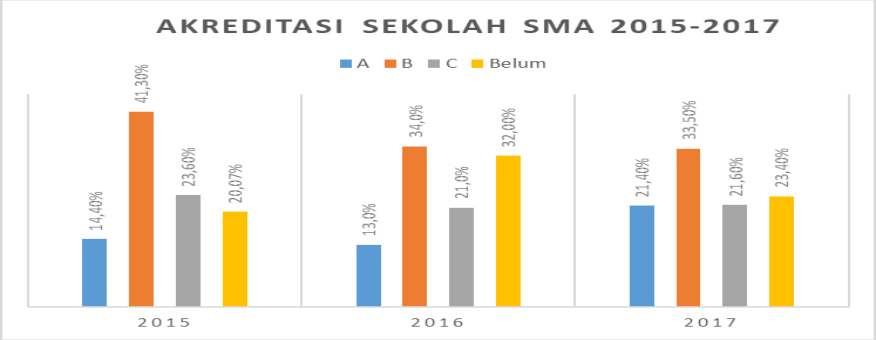

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), 2018

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk tahun 2015, sekolah SMK yang berakreditasi A sebanyak 6,90%, sekolah akreditasi B sebanyak 36,30%, sekolah akreditasi C sebanyak 13,30%, sekolah yang belum terakreditasi sebanyak 43,50%. Untuk tahun 2016, sekolah SMK yang berakreditasi A sebanyak 17,5%, sekolah akreditasi B sebanyak 61,90%, sekolah akreditasi C sebanyak 20,6%, sekolah yang belum terakreditasi sebanyak 0%. Untuk tahun

2017, sekolah SMK yang berakreditasi A sebanyak 7,50%, sekolah akreditasi B sebanyak 20,90%, sekolah akreditasi C sebanyak 7,20%, sekolah yang belum terakreditasi sebanyak 64,30%.

GAMBAR 2- 50 Akreditasi Sekolah SMK 2015-2017

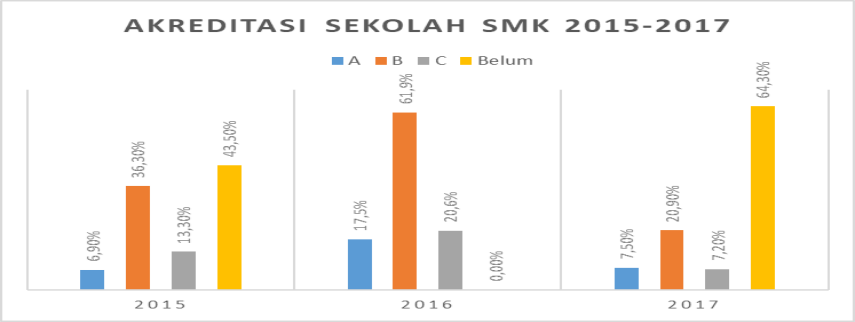

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), 2018

2.2.3.2. Kesehatan

2.2.3.2.1. Stunting

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting di Provinsi Lampung berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018 cenderung menurun dari 42,6 % di tahun 2013 menjadi 27,3 % di tahun 2018, begitu juga dengan angka nasional yang turun dari angka 37,2 % di tahun 2013 menjadi 30,8 % di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan nasional yang turun sebesar 6,4 %, penurunan angka stunting di Lampung lebih besar yaitu 15,3 %, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

GAMBAR 2- 51 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan 2018

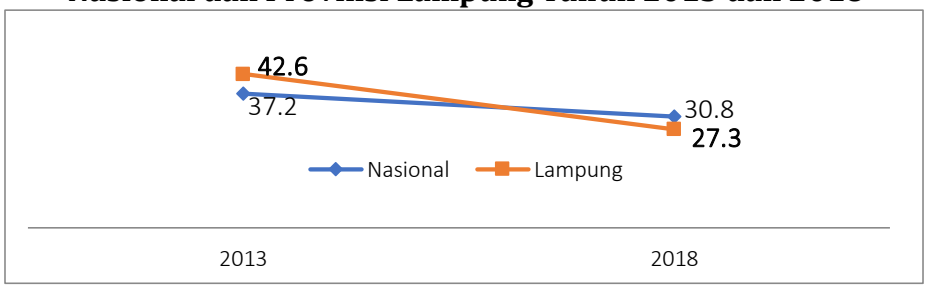

Sumber: Riskesdas 2018

Hal ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih fokus dalam menangani stunting dan dapat mencapai target yang diharapkan dengan kegiatan stunting terintegrasi dengan seluruh OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pencegahan stunting penting dilakukan agar tidak terjadi *lost generation* dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Berikut grafik prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung:

GAMBAR 2- 52 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2013 & 2018 (RISKESDAS)

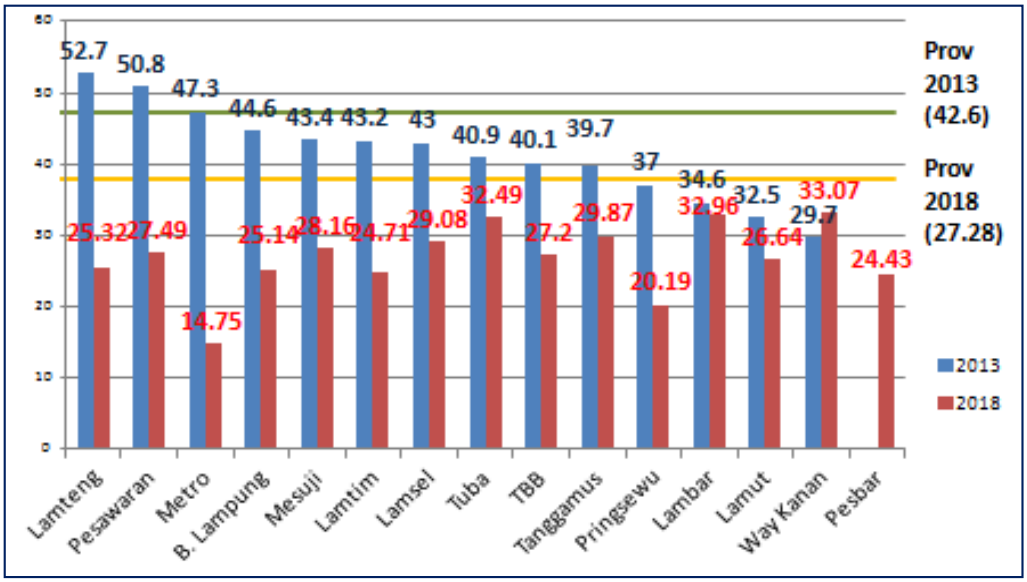

Sumber: Riskesdas 2018

Intervensi stunting di Provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan lokus 3 kabupaten prioritas, yaitu: Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Kemudian di tahun 2019 ini terdapat penambahan lokus Kabupaten Tanggamus, dan tahun 2020 nanti ada perluasan lokus kembali dengan penambahan Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran, sehingga kabupaten prioritas stunting di Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 6 kabupaten.

Berbagai program pemerintah terkait penanganan stunting telah banyak dilakukan baik dalam intervensi gizi spesifik (bidang kesehatan) dan intervensi sensitive (non kesehatan) namun angka prevalensi stunting masih tinggi. Hal ini dikarenakan belum adanya konvergensi program.

Untuk itu, OPD yang terlibat dalam penanganan stunting baik lingkup Pemerintah Provinsi Lampung maupun KabupatenKota diluar Bappeda dan Dinas Kesehatan, seperti: Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Sosial, Dinas PMD, serta DInas Kependudukan dan Capil, diharapkan untuk berperan aktif dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penanganan stunting.

2.2.3.2.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 – 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun). Angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Lampung berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002 – 2012, trenddnya menunjukkan kecenderungan menurun, tampak pada grafik berikut ini:

GAMBAR 2- 53 *Trend* Angka Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2002 – 2012

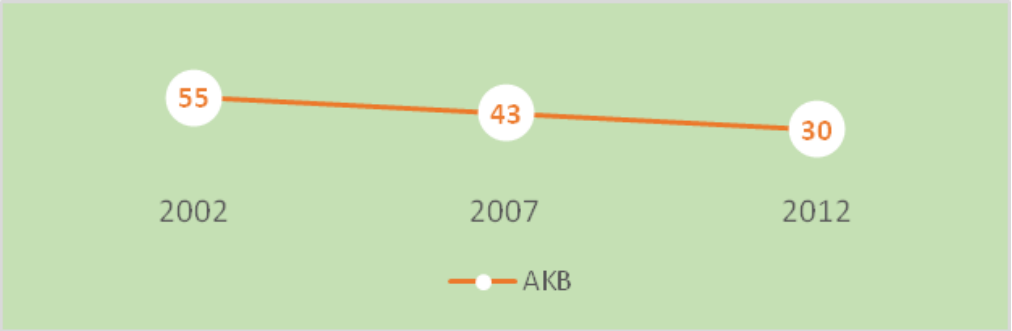

Sumber : SDKI 2002-2012

Angka Kematian Bayi berdasarkan perhitungan matematik dari laporan yang masuk dari fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2017 menunjukkan angka 3,89 per 1000 kelahiran hidup. Bila data AKB hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan AKB hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 30 per 1000 kelahiran hidup maka AKB hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya menggambarkan seperenam dari AKB sesungguhnya dipopulasi.

Bila melihat kematian bayi berdasarkan jumlah kasusnya, selama empat tahun terakhir tampak telah terjadi penurunan jumlah kasus, tampak pada grafik berikut :

GAMBAR 2- 54 Kematian Bayi Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Masa Perinatal	773	595	463	448
Masa Neonatal	101	64	69	62
Masa Post Neonatal	128	110	94	68
Jumlah Kasus Kematian Bayi	1002	769	626	578

Sumber : Laporan Rutin Dinkes, 2018

Pada tahun 2017 kematian bayi sebagian besar terjadi pada masa perinatal. Untuk penyebab kematian pada masa perinatal terbanyak disebakan oleh BBLR (33%), masa neonatal disebabkan oleh BBLR (37%) dan masa post neonatal disebabkan oleh lain-lain (44%). Kematian yang disebabkan oleh BBLR dan penyebab lain-lain menandakan bahwa adanya masalah pada masa kehamilan terutama status gizi ibu, deteksi kelaian janin dan kualitas layanan (ANC) serta penatalaksanaan BBLR yang masih rendah.

Kasus kematian Bayi terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Timur (82 Kasus), Tanggamus (73 kasus) dan Lampung Tengah (63 kasus), seperti Grafik berikut :

GAMBAR 2- 55 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2017

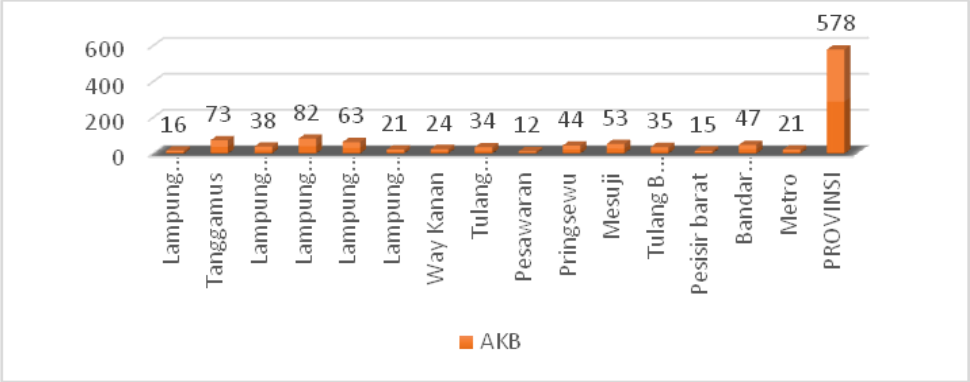

Sumber : Laporan Rutin Dinkes, 2019 diolah

2.2.3.2.3. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak umur 0- <5 tahun per 1000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan.

Angka kematian balita (AKABA) di Provinsi Lampung berdasarkan hasil Sensus Penduduk dan SDKI dari tahun 1990 – 2007 terlihat cenderung menurun yaitu dari 86 per 1000 kelahiran hidup tahun 1990 menurun menjadi 38 per 1000 Kelahiran Hidup tahun 2012, seperti terlihat pada Grafik berikut

GAMBAR 2- 56 Trend Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2002 – 2012

Sumber : Laporan Rutin Dinkes, 2019 diolah

Berdasarkan jumlah kasus, kematian balita di Provinsi Lampung dari tahun 2014-2017 tampak menurun.

GAMBAR 2- 57 Trand Kasus Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

Sumber : Laporan Rutin Dinkes, 2018 diolah

Kasus kematian Anak Balita di Provinsi Lampung tahun 2017 terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Timur (6 Kasus), Pringsewu (5 kasus) dan Bandar Lampung (4 kasus), sebagaimana tersaji dalam gambar berikut

GAMBAR 2- 58 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017

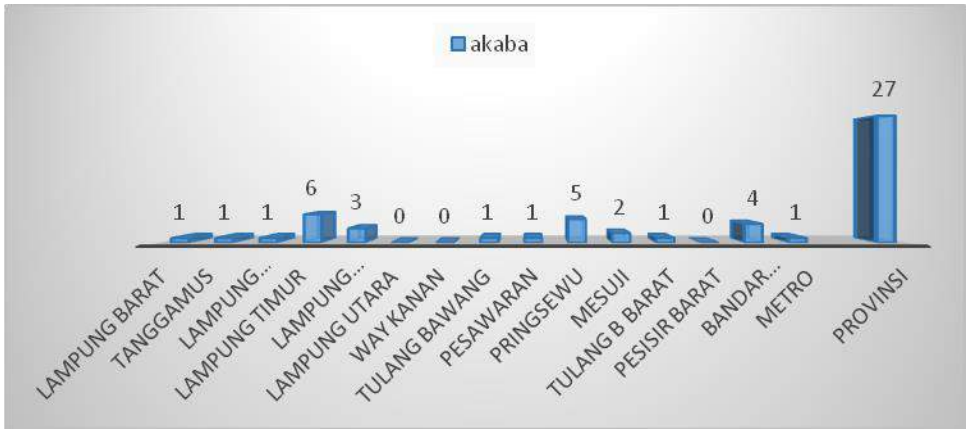

Sumber : SDKI, 2018

Untuk penyebab kematian terbanyak dikarenakan sebab lain-lain (17 kasus), diare (4 Kasus), Pnemoni (2 kasus), demam (2 kasus) infeksi (1 Kasus).

GAMBAR 2- 59 Penyebab Kematian Balita Tahun 2017

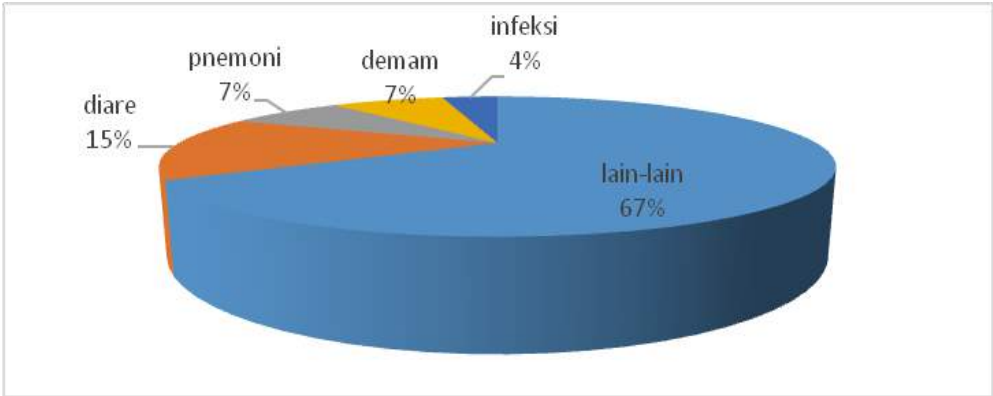

Sumber Laporan Rutin Dinkes 2018

2.2.3.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan status kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Berdasarkan Suvey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI selama tahun 1991–2007 cenderung turun, namun meningkat kembali ditahun 2012.

GAMBAR 2- 60 Angka Kematian Ibu Menurut SDKI Tahun 1991-2012

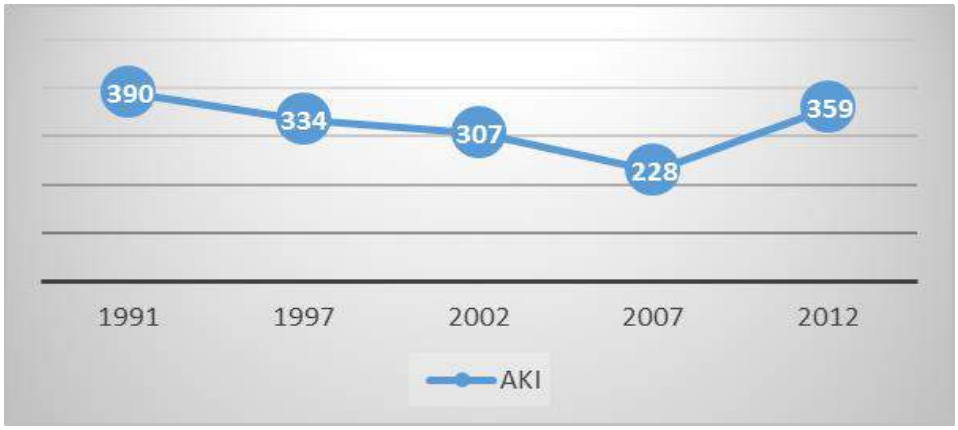

Sumber : SDKI, 2017

AKI yang dihasilkan dari SDKI diatas hanya menggambarkan angka nasional, tidak dirancang untuk mengukur angka kematian ibu menurut Provinsi (karena memerlukan sampel dan biaya yang sangat besar). Saat ini

Gambaran Kematian Ibu di Provinsi Lampung diperoleh berdasarkan jumlah kasus kematian yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan.

Bila dilihat berdasarkan Jumlah kasus, Kasus Kematian Ibu cenderung menurun di tiga tahun kebelakang, seperti terlihat pada Gambar berikut.

GAMBAR 2- 61 Kasus Kematian Ibu Tahun 2014-2017

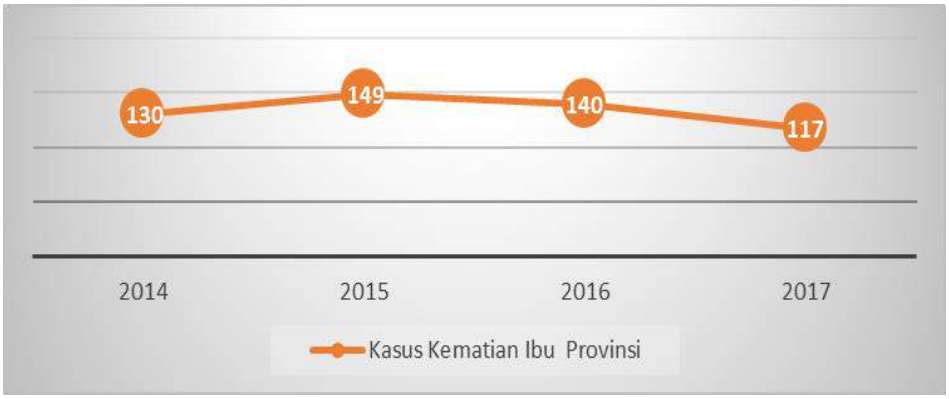

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Kota Bandar Lampung (15 kasus), Lampung Timur (14 kasus) dan Lampung Selatan (11kasus), terlihat pada Gambar berikut

GAMBAR 2- 62 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Untuk penyebab kematian ibu di Provinsi Lampung tahun 2017 terbanyak disebabkan oleh perdarahan (45 kasus), hipertensi (22 kasus),

infeksi (3 kasus), ganguan sistem peredaran darah (18 kasus), gangguan metabolik (26 kasus) dan lain-lain (45 kasus),

GAMBAR 2- 63 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2017

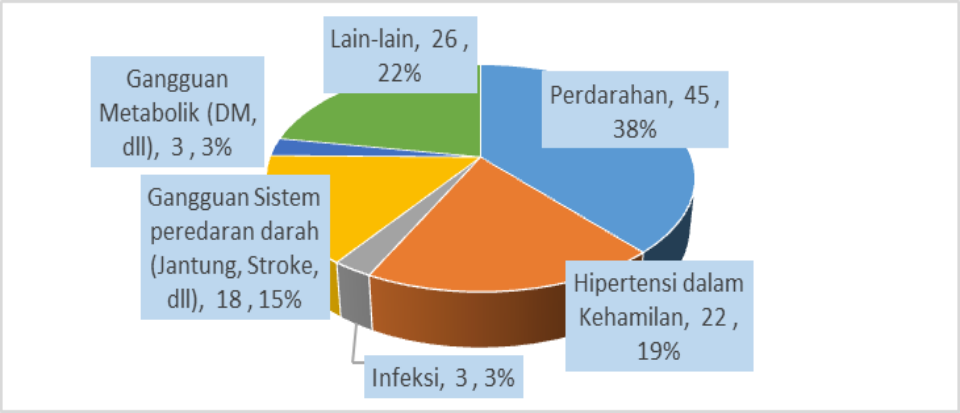

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan sangat erat hubungannnya dengan anemia pada masa kehamilan (kualitas ANC), penanganan komplikasi (pelayanan faskes) dan proses rujukan.

2.2.3.2.5. Angka Harapan Hidup

Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung telah meningkat dari 69,66 di tahun 2015 menjadi 70,18 di tahun 2018.

GAMBAR 2- 64 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018

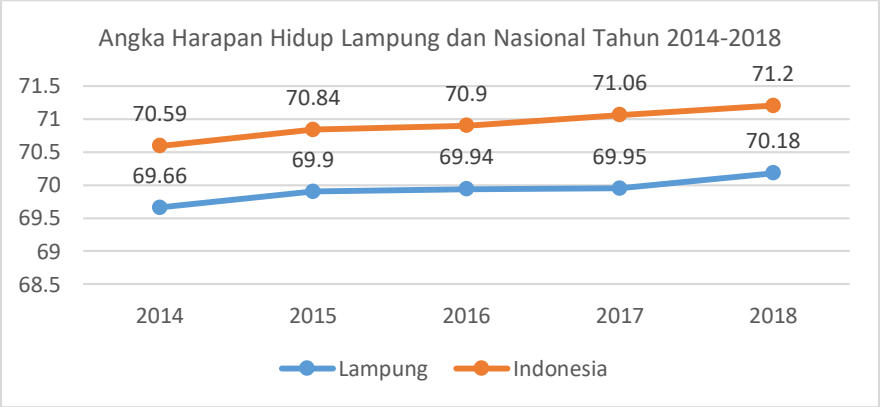

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Peningkatan Berdasarkan AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2017, Kota Metro (71,13), Kota Bandar Lampung (70,75) dan Kabupaten Lampung Timur (70,11), AHH ketiga wilayah tersebut berada diatas AHH Provinsi. Sedangkan untuk 3 wilayah dengan AHH terkecil di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Pesisir Barat (62,54), Kabupaten Lampung Barat (66,86) dan Kabupaten Mesuji (67,49).

GAMBAR 2- 65 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2017

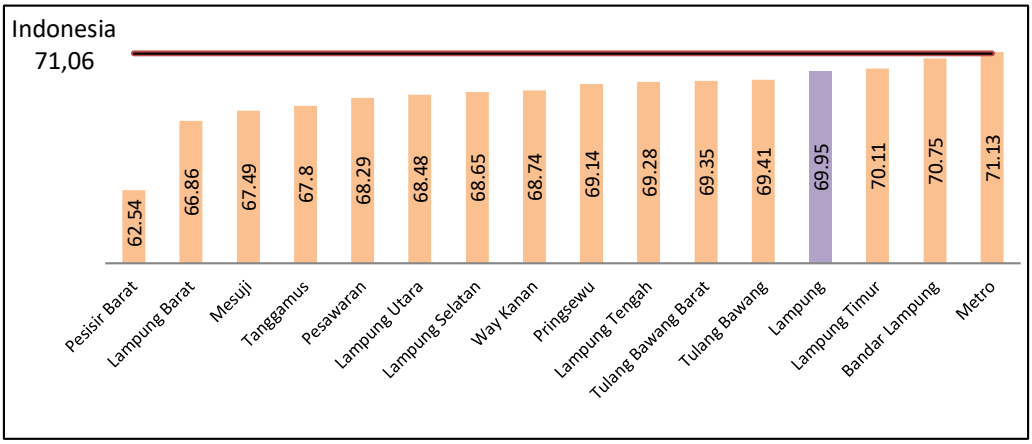

Pada tahun 2017 AHH untuk perempuan lebih tinggi bila di bandingkan AHH laki-laki, yaitu 71,91 untuk perempuan dan 68,04 untuk laki-laki. Pola yang sama juga terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Trend AHH Perempuan dan Laki-Laki dapat dilihat pada Grafik berikut.

GAMBAR 2- 66 AHH Perempuan dan Laki-Laki di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

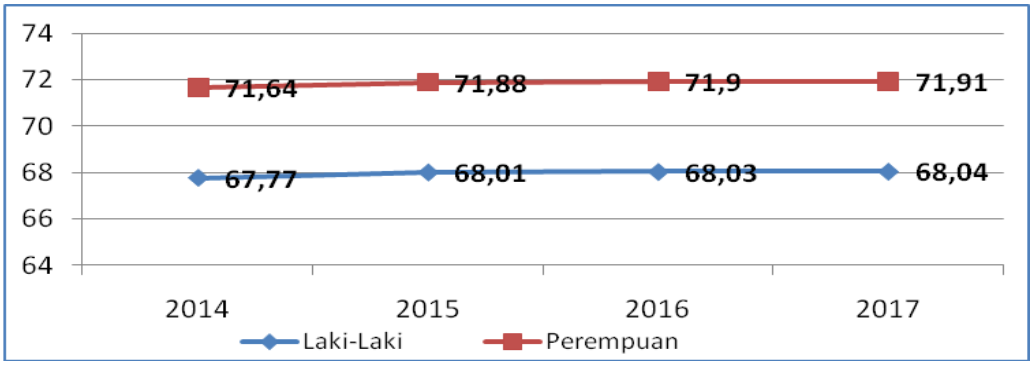

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari grafik di atas terlihat bahwa AHH perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan AHH laki-laki, hal ini dikarenakan pola hidup perempuan yang lebih baik dibandingkan laki-laki sehingga umur perempuan menjadi lebih panjang bila dibandingkan umur laki-laki.

Di lingkup regional Sumatera, Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung sampai pada tahun 2018 berada di peringkat 4 tertinggi. Sebagaimana dapat dilihat di tabel dibawah ini:

TABEL 2- 74 Angka Harapan Hidup Provinsi se Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	69.35	69.5	69.51	69.52	69,64
SUMATERA UTARA	68.04	69.29	68.33	68.37	68,61
SUMATERA BARAT	68.32	68.66	68.73	68.78	69,01
RIAU	70.76	70.93	70.97	70.99	71,19
JAMBI	70.43	70.56	70.71	70.76	70,89
SUMATERA SELATAN	68.93	69.14	69.16	69.18	69,41
BENGKULU	68.37	68.5	68.56	68.59	68,84
LAMPUNG	69.66	69.9	69.94	69.95	70,18
KEP. BANGKA BELITUNG	69.72	69.88	69.92	69.95	70,18
KEP. RIAU	69.15	69.41	69.45	69.48	69,64
Indonesia	70.59	70.84	70.9	71.06	71,20

Sumber: Profil Kesehatan, 2019

2.2.3.2.6. Komponen Kesehatan

Komponen kesehatan didekati dengan Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Kurang Gizi. Pada tahun 2017, pencapaian indikator tersebut sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.

TABEL 2- 75 Capaian AHH, AKB, AKI, Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Kurang Gizi Tahun 2017 di Provinsi Lampung

No	Indikator Kesehatan	Capaian Tahun 2017
1	Angka Harapan Hidup	69,95
2	Angka Kematian Bayi(/1000 KH)	3,89
3	Angka Kematian Ibu (/100000 KH)	78,78
4	Angka Kematian Balita	4,07
5	Prevalensi Balita Gizi Kurang	18,5

Sumber: BPS Lampung, 2018

2.2.3.2.7. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut didukung oleh sarana puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta jaringannya baik bidan di desa, posyandu dan poskesdes. Rasio Puskesmas dan Pustu selama tahun 2014-2017 tampak cendrung menetap, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

TABEL 2- 76 Rasio Puskesmas, Pustu Terhadap Penduduk di Propinsi Lampung Tahun 2014-2017

No	Ratio	Target	Pencapaian			
			2014	2015	2016	2017
1	Ratio PKM thd Pddk	1:20.000	1:27.677	1:27.894	1:28.100	1:28.400
2	Ratio Pustu thd pddk	1:6000	1:9.933	1:10.046	1:10.244	1:10.455

Angka ini dapat diartikan bahwa dari tahun 2014-2017 sasaran penduduk yang dilayani satu puskesmas adalah sekitar 27.000 orang sehingga rasio Puskesmas untuk 100.000 penduduk adalah 3-4 Puskesmas, bila melihat konsep wilayah kerja Puskesmas, hal ini belum mencapai target yang ditetapkan (5 Puskesmas untuk 100.000 penduduk).

Jumlah Puskesmas Pembantu selama 4 tahun kebelakang juga cenderung menetap. Rata-rata Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk tahun 2014-2017 sebesar 10 per 100.000 penduduk, artinya 10 Pustu untuk melayani 100.000 penduduk dan angka ini belum mencapai standar yaitu setiap 100.000 penduduk seharusnya memiliki 17 puskesmas pembantu.

Selain rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk, mulai tahun 2015 Puskesmas juga sudah harus terakreditas dengan minimal 5 jenis tenaga kesehatan tersedia di Puskesmas sehingga mutu layanan Puskesmas terus meningkat dengan target kinerja minimal satu kecamatan memiliki satu Puskesmas terakreditasi. Untuk tahun 2017 capaian puskesmas yang terakreditasi baru mencapai 95,33% atau baru 143 kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi. Dari Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2018 sebanyak 302 unit puskesmas, peringkat 4 se-Sumatera.

TABEL 2- 77 Jumlah Puskesmas se-Sumatera Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	337	339	340	341	348
2	Sumatera Utara	570	571	571	571	581
3	Sumatera Barat	264	264	264	269	275
4	Riau	211	212	213	215	216
5	Jambi	176	176	183	186	195
6	Sumatera Selatan	321	322	322	322	332
7	Bengkulu	180	180	180	180	180
8	Lampung	290	291	292	297	302
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	62	62	63	64
10	Kepulauan Riau	73	72	73	74	83
11	Indonesia	9.731	9.754	9.767	9.825	9.993

Sumber: Profil Kesehatan, 2019

Berdasarkan hasil dari tabel di atas dapat dikatakan Provinsi Lampung urutan ke 4 terbanyak yang memiliki akses sarana kesehatan yakni Puskesmas di Pulau Sumatera. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1 Puskesmas menanggani 1 Kecamatan. Seiring dengan

penambahan jumlah Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga terus meningkat setiap tahunnya dan telah memenuhi rasio ideal, namun demikan rasio Puskesmas terhadap Kecamatan di Provinsi lampung masih dibawah rata-rata Nasional.

GAMBAR 2- 67 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018

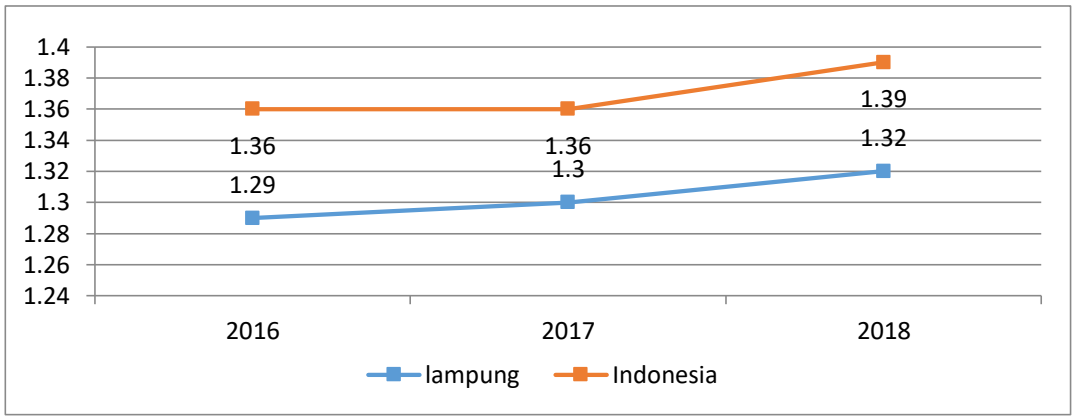

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Lampung, 2018

2.2.3.2.8. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah sakit)

Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan masyarakat, dan pembangunan rumah sakit di Provinsi Lampung berkembang dengan pesat dari tahun 2013 hingga 2017.

TABEL 2- 78 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

No	Parameter	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Rumah Sakit Pemerintah**	**15**	**16**	**19**	**19**	**20**
	a RSUD Provinsi	1	1	2	2	2
	b RSUD Kabupaten/Kota	11	12	14	14	15
	c RS. Khusus Provinsi	1	1	1	1	1
	d RS. Polri	1	1	1	1	1
	e RS. Tentara	1	1	1	1	1
2	**Rumah Sakit Swasta**	**37**	**43**	**46**	**46**	**57**
	a RS. Umum	26	31	31	31	36
	b RS. Khusus	11	12	15	15	21

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

GAMBAR 2- 68 Jenis Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di Provinsi Lampung Tahun 2017

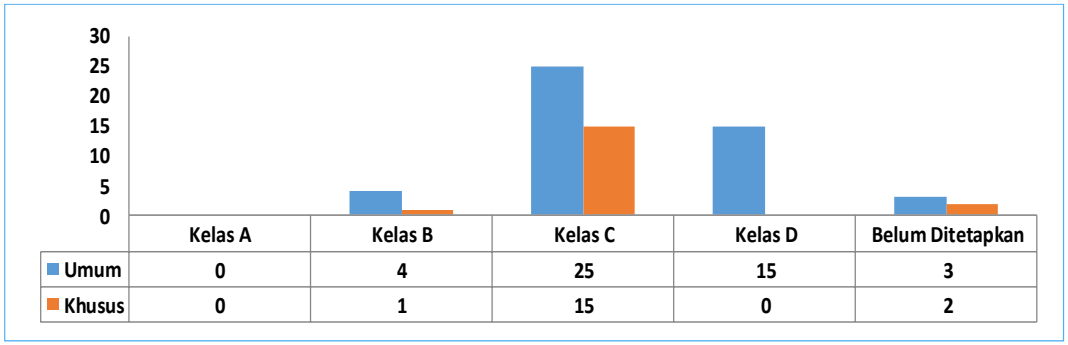

	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D	Belum Ditetapkan
Umum	0	4	25	15	3
Khusus	0	1	15	0	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Indikator pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari persentase cakupan rawat jalan, rawat inap, kemampuan gawat darurat, pelayanan laboratorium sesuai standar, pelayanan gangguan jiwa dan 4 spesialis pelayanan kesehatan dasar. Cakupan RSUD dengan kemampuan Laboratorium kesehatan sederhana sampai tahun 2016 telah mencapai 100% artinya semua RS pemerintah dan swasta telah memiliki laboratorium kesehatan.

Laboratorium merupakan sarana sangat penting karena merupakan penunjang diagnosa. Persentase RSU memiliki 4 spesialis dasar (bedah, internal, anak dan kandungan/obgyne) cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir tetapi belum mencapai target. Pada tahun 2017 RSUD Pemerintah yang memiliki empat pelayanan spesialis dasar mencapai 100 %.

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diikuti dengan jumlah RS dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Jumlah seluruh Rumah sakit (Pemerintah dan Swasta baik umum dan khusus) di Provinsi Lampung sampai tahun 2017 sebesar 65 RS (Pemerintah & Swasta, Umum & Khusus).

TABEL 2- 79 Jumlah Rumah Sakit se-Sumatera Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit se-Sumatera				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	64	66	68	70	67
2	Sumatera Utara	177	184	195	220	211
3	Sumatera Barat	62	65	67	78	77
4	Riau	62	68	72	72	73
5	Jambi	33	34	34	35	41
6	Sumatera Selatan	55	63	65	69	78
7	Bengkulu	19	20	21	22	23
8	Lampung	53	61	64	71	77
9	Kepulauan Bangka Belitung	16	17	17	19	24
10	Kepulauan Riau	25	25	28	31	33
11	Indonesia	2,406	2,488	2,601	2,776	2,813

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019

Dan sedangkan untuk Lampung dan Nasional, sama-sama mengalami kenaikan jumlah rumah sakit setiap tahunnya. Untuk Provinsi Lampung jumlah rumah sakit yakni 77 rumah sakit dan nasional berjumlah 2.813 rumah sakit.

GAMBAR 2- 69 Jumlah Rumah Sakit Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

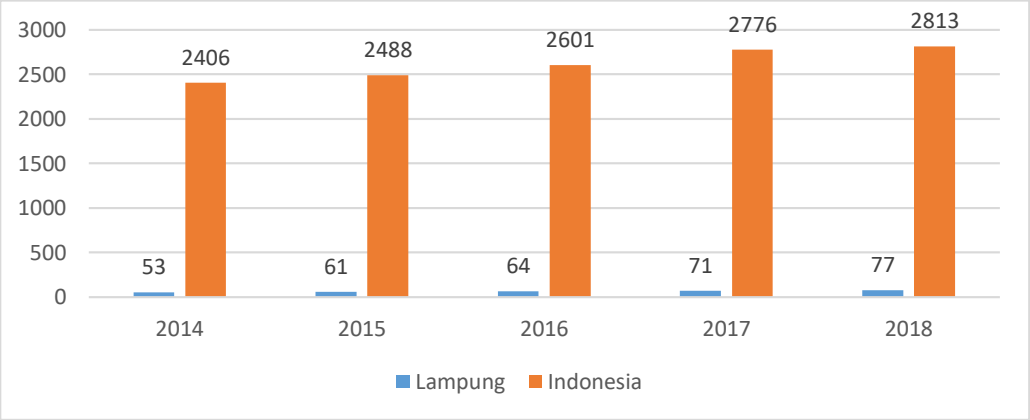

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 diolah

2.2.3.2.9. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam pelaksanaan program kesehatan.

Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk

Target Nasional mengharapkan bahwa rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk adalah 40 dokter umum (1 dokter umum untuk 2.500 penduduk). Tahun 2017, rasio Dokter umum terhadap 100.000 penduduk baru mencapai 12,35 dokter umum per 100.000 penduduk (belum mencapai target nasional yang diharapkan yaitu 40 per 100.000). Angka ini juga belum mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (target 2017 rasio dokter umum 15 per 100.000). Dalam perkembangannya rasio dokter umum semakin meningkat.

GAMBAR 2- 70 *Trend* Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

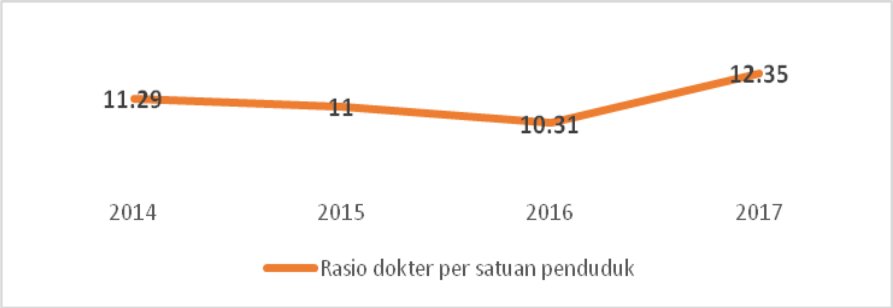

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Selain melihat rasio dokter umum dengan 100.000 penduduk perlu juga dilihat rasio dokter umum terhadap sarana puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas tahun 2017 yaitu 1,65 artinya setiap puskesmas memiliki rata-rata satu dokter dan ada beberapa yang memiliki lebih dari dua dokter.

Di lingkup regional Sumatera, Rasio Dokter terhadap 100.000 penduduk Provinsi Lampung sampai pada tahun 2017 berada di peringkat 8.

TABEL 2- 80 Rasio Dokter Terhadap 100.000 Penduduk se-Sumatera Tahun 2014-2016

Provinsi	Rasio Dokter Terhadap 100.000 Penduduk se-Sumatera		
	2014	2015	2016
ACEH	30.69	30.99	31.43
SUMATERA UTARA	22.49	23.85	20.36
SUMATERA BARAT	21.24	19.53	19.72
RIAU	18.62	16.96	20.61
JAMBI	21.19	18.78	19.69
SUMATERA SELATAN	13.91	14.89	14.8
BENGKULU	23.30	20.11	22.15
LAMPUNG	12.57	13.23	10.44
KEP. BANGKA BELITUNG	23.97	24.40	28.75
KEP. RIAU	24.02	26.76	20.07
Indonesia	16.18	16.06	16.2

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2017

Antara Lampung dan Nasional secara umum, rasio Lampung selalu di bawah Nasional dari tshun 2014-2016. Oleh karena itu perlu diupayakan dokter baik yang baru lulus studi maupun yang sudah mengambil pendidikan spesialis untuk bersedia tugas di Provinsi Lampung guna mengisi kekurangan tersebut. Untuk lebih rincinya bisa dilihat pada grafik di bawah.

GAMBAR 2- 71 Rasio Dokter Terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung dan Nasional 2014-2016

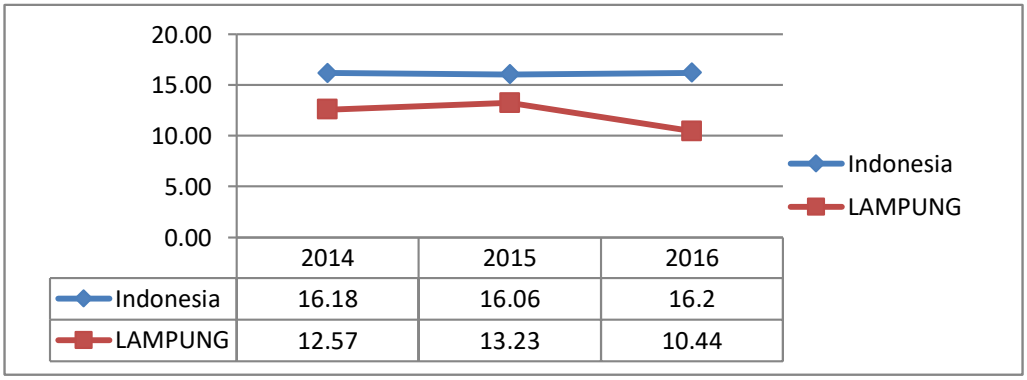

Sumber: BPS R.I, 2017, diolah

Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk

Target nasional mengharapkan bahwa rasio dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk adalah 6 dokter spesialis (1 dokter spesialis untuk 14.191 penduduk). Sampai tahun 2017 Rasio Dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk baru mencapai 7,06 dokter spesialis per 100.000 penduduk (belum mencapai target Nasional yang diharapkan). Angka ini telah mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yaitu 4,5 per 100.000. Perkembangan rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk selama tahun 2005-2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 2- 72 *Trend* Ratio Dokter spesialis Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

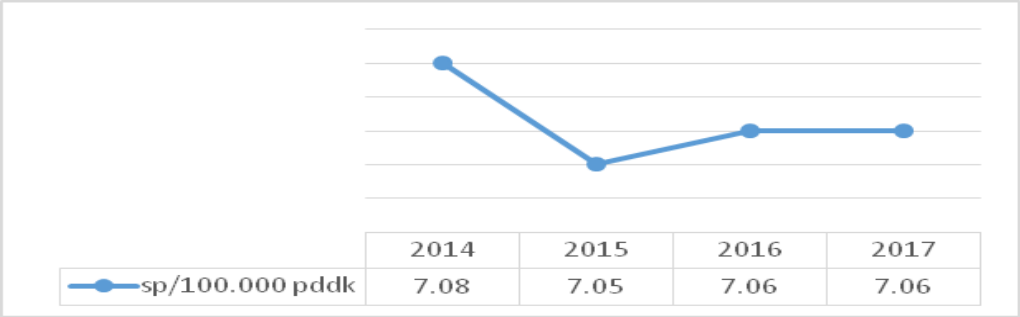

Sumber:Profil Kesehatan Provinsi Lampung

Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Target nasional mengharapkan bahwa rasio bidan terhadap 100.000 penduduk adalah 100 bidan (1 bidan untuk 1000 penduduk). Tahun 2017 rasio bidan terhadap 100.000 penduduk baru mencapai 82,00 bidan per 100.000 penduduk (belum mencapai target nasional yang diharapkan). Angka ini telah mencapai target (43%) dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Perkembangan rasio bidan per 100.000 penduduk selama tahun 2010 – 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah :

GAMBAR 2- 73 *Trend* Ratio Bidan Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Rasio Bidan terhadap penduduk selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat, rasio pada tahun 201 adalah 82,0% artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 82 bidan. Angka ini dianggap cukup, namun karena distribusi yang tidak merata dan mobilitas yang cukup tinggi sehingga dirasa masih kurang.

2.2.3.2.10.Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

Upaya kesehatan di Provinsi Lampung diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang mungkin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya pada kelompok rentan yaitu Bumil, Bulin dan Busui, bayi, anak Balita. Pelayanan Kesehatan Ibu meliputi pelayanan antenatal care (kehamilan), persalinan dan Postnatal care (Nifas) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga yang memiliki kompetensi/profesional (Dokter spesialis kebidanan, Dokter umum dan bidan) untuk ibu selama masa kehamilannya, persalinan Dan nifas. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dari tahun 2014-2017 cendrung meningkat.

GAMBAR 2- 74 *Trend* Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

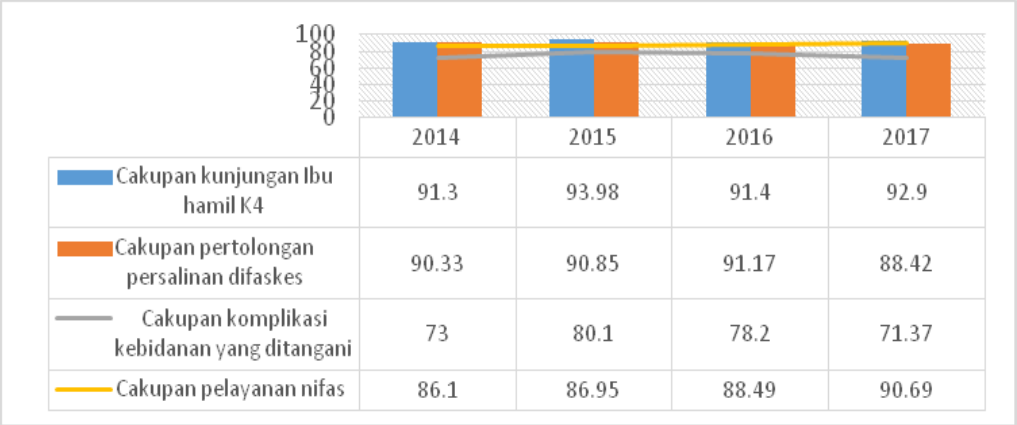

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Namun bila dilihat dari Gambar tampak grafik yang timpang, yaitu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, hal ini menunjukan kemungkinan adanya masalah pada fasilitas kesehatan (SDM, kompetesi petugas ataupun ketersedian alat). Pelayanan kesehatan anak meliputi kunjungan bayi dan balita. Indikator untuk melihat keberhasilan pelayanan anak tersebut dengan melihat Cakupan Kunjungan bayi dan balita.

Cakupan Kunjungan neonatal adalah cakupan bayi usia persentase neonatal yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal 2 kali dari tenaga kesehatan; satu kali pada umur 0-7 hari dan satu kali pada umur 8-28 hari. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi), pemberian vitamin K, manajemen terpadu balita muda (MTBM) dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan buku KIA.

Pada Tahun 2017 cakupan pelayanan Neonatal pertama (KN1) mencapai 95,64% sedangkan cakupan kunjungan KN3 92,64 %, terjadi penurunan dikarenakan banyaknya neonatal yang tidak dilakukan pemeriksaan ketiga karena larangan keluar rumah sebelum 40 hari dan kurangnya kunjungan rumah oleh petugas.

GAMBAR 2- 75 *Trend* Cakupan Pelayanan Neonatal Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

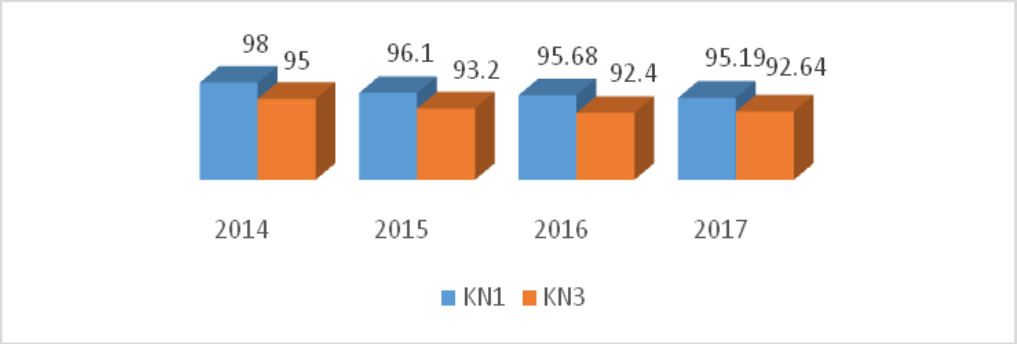

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Untuk cakupan Neonatal Resiko tinggi yang ditangani, pada tahun 2017 baru mencapai 41,72%, angka ini tampak menurun dibanding dengan cakupan tahun-tahun sebelumnya.

GAMBAR 2- 76 *Trend* Cakupan Neonatal Resti Ditangani Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

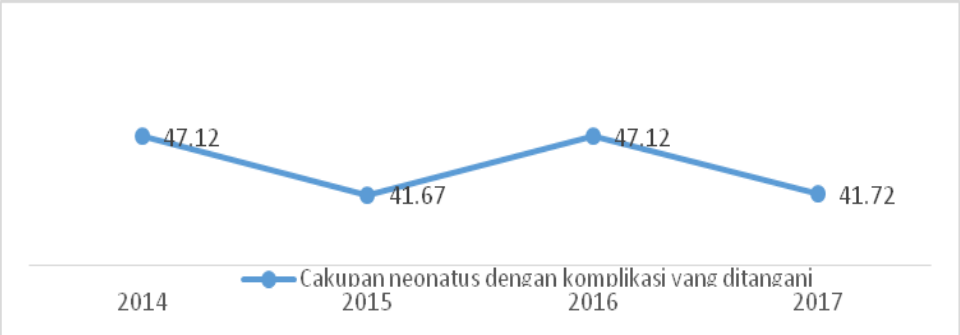

Data Dinas Kesehatan, 2018

Menurunnya angka neonatal resti ditangani dimungkinkan karena kurangnya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan dan SDM yang kompeten dalam penanganan Neonatal resiko tinggi. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi usia 1-12 bulan disarana pelayanan kesehatan maupun rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan tempat lainnya oleh dokter, bidan ataupun perawat paling sedikit 4 kali disuatu wilayah tertentu sesuai dengan standar. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi deteksi tumbuh

kembang (SDIDTK), MTBM/S, penyuluhan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 94,12%.

Cakupan kunjungan anak balita adalah cakupan kunjungan anak usia 1 th-59 bulan dengan minimal kunjungan 8 kali sesuai strandar oleh tenaga kesehatan. Pelayanannya meliputi pengukuruan tumbang, MTBS dan penyuluhan kesehatan. Di Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 83,7%, dimana angka ini masih dibawah target 90%, seperti pada gambar di bawah ini

GAMBAR 2- 77 *Trend* Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak (Cakupan kunjungan Bayi dan balita) Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

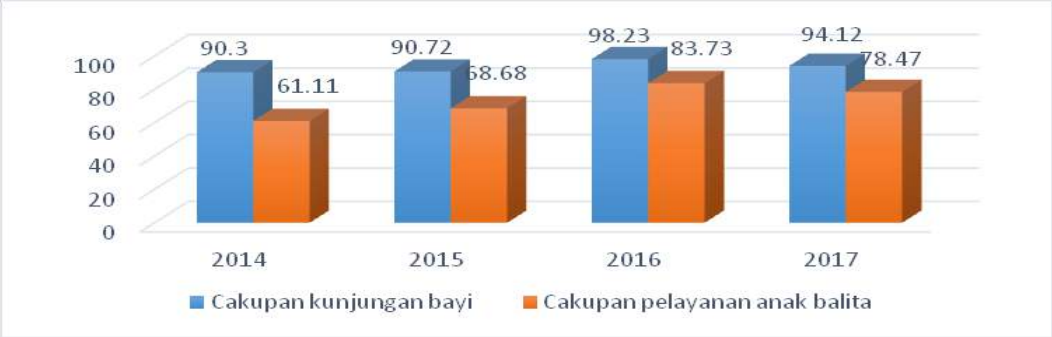

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017

Bila melihat trend cakupan diatas tampak bahwa adanya ketimpangan antara kunjungan bayi dan kunjungan balita, hal ini dimungkinkan karena kurangnya kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, informasi kemasyarakat tentang pemantauan tumbang yang kurang serta rendahnya kunjungan balita keposyandu terkait sudah selesainya pemberian imunisasi dasar.

Didalam pelayanan kunjungan bayi, terdapat pelayanan imunisasi. Salah satu indikator pelayanan imunisasi adalah cakupan desa/kelurahan UCI dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis Hep. B, 1 dosis campak). Cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 88,4% dan belum mencapai target (100%).

GAMBAR 2-78 *Trend* Cakupan Desa/Kelurahan UCI Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

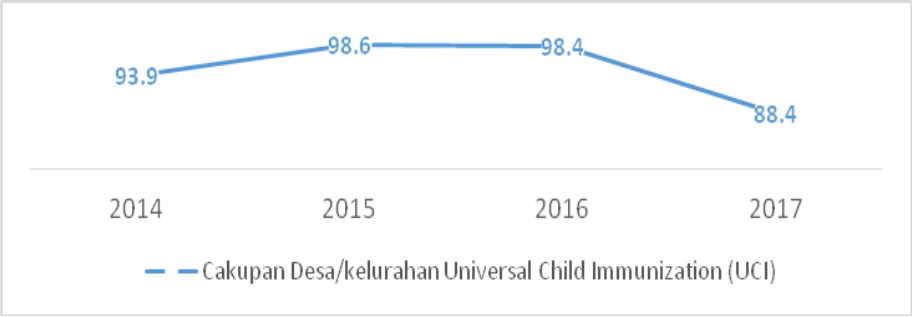

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.2.11. Angka Penemuan TB Semua Jenis (Case Notification Rate/CNR)

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (Mycobacterium tuberculosis), sebagian besar kuman menyerang ke paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Di tahun 2017 penemuan kasus (CNR) provinsi Lampung baru mencapai 79,9% dan jumlah BTA+ sebanyak 6536 penderita dengan Cure rate 73% dan angka kesembuhannya sebesar 93%, Angka CNR diatas bila dibandingkan dengan indikator kinerja program (IKP) Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung periode 2015 – 2019 sebesar 123 per 100.000 penduduk maka angkanya belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan ada penurunan penemuan dan pencatatan kasus TB di tahun 2017. Trend penemuan kasus cenderung menurun dan sedikit meningkat pada tahun 2017.

GAMBAR 2- 79 Angka Penemuan Tuberkolosis (CNR TB) per 100.000 Penduduk Provinsi Lampung 2014-2017

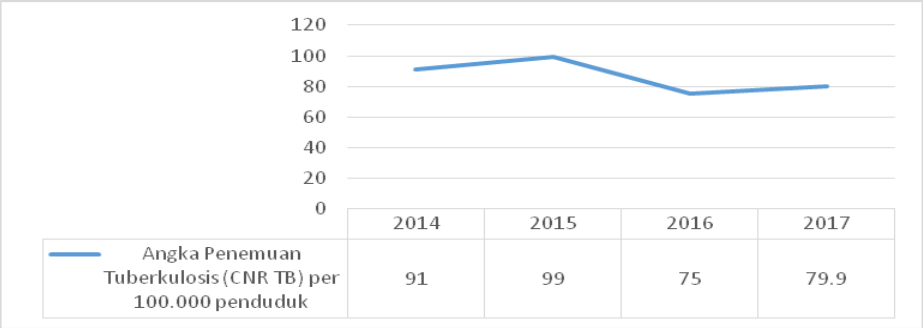

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Jika di lihat per kab/kota dari 15 kab/kota yang telah mencapai target 123/100.0000 penduduk hanya kota Bandar Lampung, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

GAMBAR 2- 80 Case Notification Rate (CNR) Per Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2017

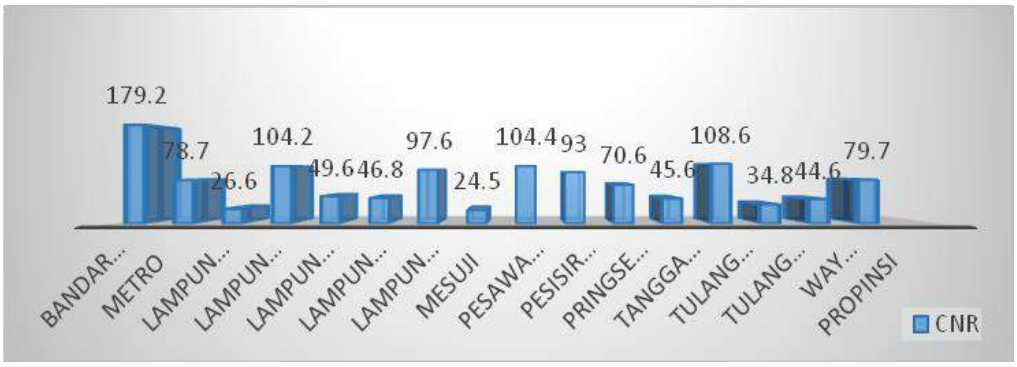

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.2.12.Angka Kesakitan DBD

Angka kesakitan Demam Berdarah atau DBD merupakan indikator yang menggambarkan angka kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 35,08 per 100.000 peduduk yang artinya ada 35-36 kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk dengan jumlah CFR sebesar 0,31% . Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung dan nasional sebesar kurang dari 48 per 100.000 penduduk maka angkanya sudah sesuai target yang ditetapkan, namun bila dianalisis berdasarkan data trand dari tahun 2014 - 2017, maka dapat dilihat bahwa pola atau kecenderungan penyakit DBD di Provinsi Lampung memiliki kecenderungan untuk meningkat dari tahun ke tahun namun terjadi penurunan pada tahun 2017, sedangkan untuk Angka Kematian (CFR) menunjukkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun.

GAMBAR 2- 81 Angka Kesakitan DBD, penanganan dan kematian (CFR) Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

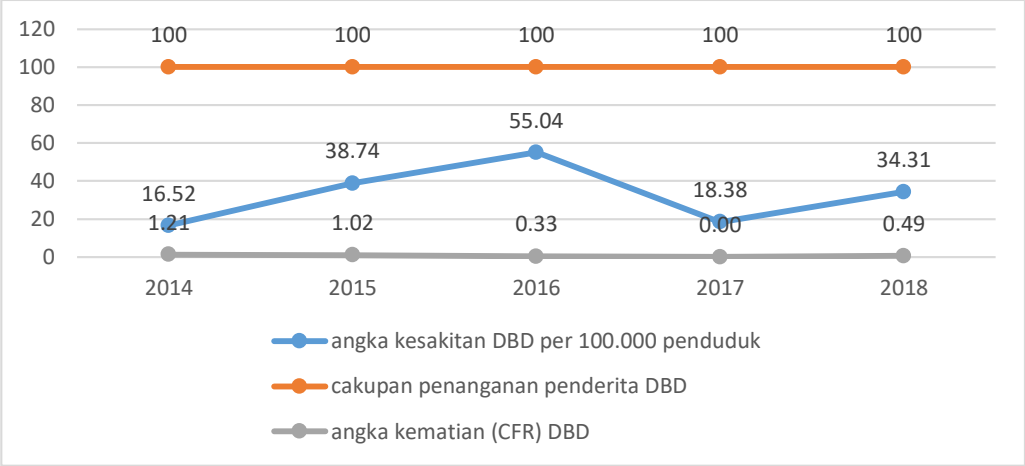

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2019

Dilihat dari distribusi angka Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk, maka masih ada 3 (tiga) Kabupaten Kota yang Angka kesakitan DBD per 100.000 lebih dari 48 per 100.000 penduduk yaitu Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung (merupakan daerah endemis DBD).

GAMBAR 2- 82 Distribusi Angka Kesakitan DBD (IR) Per 100.000 Penduduk Di Provinsi Lampung Per Kab/Kota, Tahun 2017

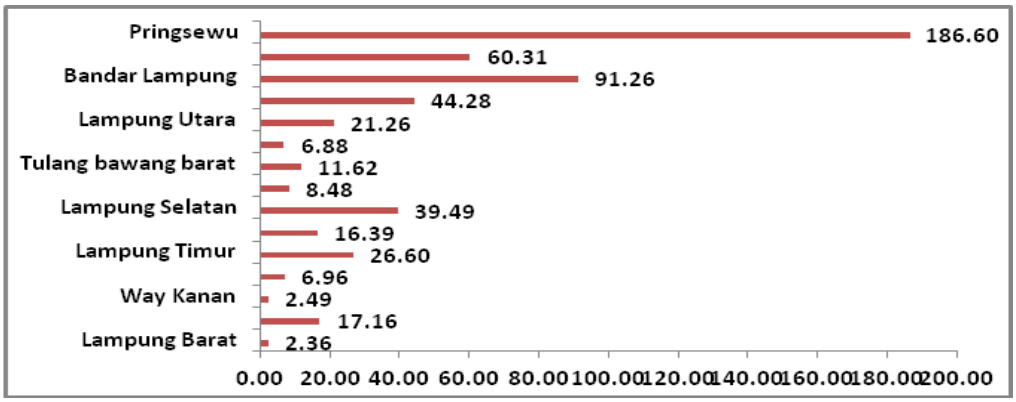

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Di lingkup regional Sumatera, Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2014 berada di peringkat 10 dan pada sampai tahun 2018 berada pada peringkat 6 di Sumatera, seperti yang dapat dilihat di Tabel dibawah ini.

TABEL 2- 81 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

Provinsi	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	46.66	30.17	52.02	49.93	29.03
SUMATERA UTARA	39.75	37.84	61.11	37.75	39.01
SUMATERA BARAT	45.66	73.24	75.75	46.42	40.93
RIAU	36.83	51.40	64.14	28.96	13.47
JAMBI	38.33	39.80	44.90	39.95	20.17
SUMATERA SELATAN	18.76	42.17	47.19	14.94	28.72
BENGKULU	25.38	53.49	91.66	17.53	72.28
LAMPUNG	16.52	38.74	55.04	18.38	34.31
KEP. BANGKA BELITUNG	23.25	45.38	34.95	31.95	52.06
KEP. RIAU	92.62	90.98	97.77	35.08	56.35
Indonesia	39.80	50.75	78.85	26.10	24.73

Sumber: Badan Pusat Statistik R.I, 2019, diolah

Dari Grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2016 baik Lampung maupun nasional mengalami kenaikan Angka Kesakitan DBD dan juga pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sampai 24,73 untuk Lampung dan 34,31 untuk Nasional pada tahun 2018.

GAMBAR 2- 83 Angka Kesakitan DBD antara Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018

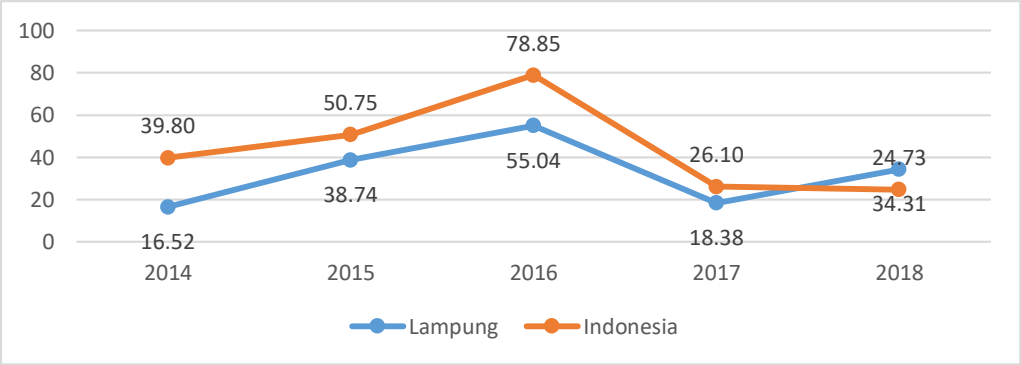

Sumber: BPS R.I, 2019, diolah

2.2.3.2.13.Angka Kesakitan HIV/AIDs

Kasus HIV/AIDS di Lampung seperti fenomena gunung es, dimana terlihat sedikit kasusnya dipermukaan namun sesungguhnya kasusnya banyak dibawah permukaan. Hal ini dibuktikan dengan orang yang bersedia untuk mengetahui status HIV nya sangat kecil sekali. Pada tahun 2017 orang yang berusia 15-49 tahun sebesar 5.907.267 jiwa dan jumlah orang yang datang memeriksakan kelayanan VCT hanya sebesar 7.449 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan status HIV terhadap 7.449 orang yang datang memeriksa VCT maka diketahui yang positif HIV sejumlah 486 orang (6,52%). Prevalensi HIV per 100 penduduk (%) usia >15 tahun di Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 0,03%, angka ini bila dibandingkan dengan target Renstra Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 0,49% maka angkanya masih dibawah target, hal ini berarti bahwa penularan HIV di Provinsi Lampung masih dapat dikendalikan.

GAMBAR 2- 84 *Trend* Prevalensi HIV/AIDS Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2017

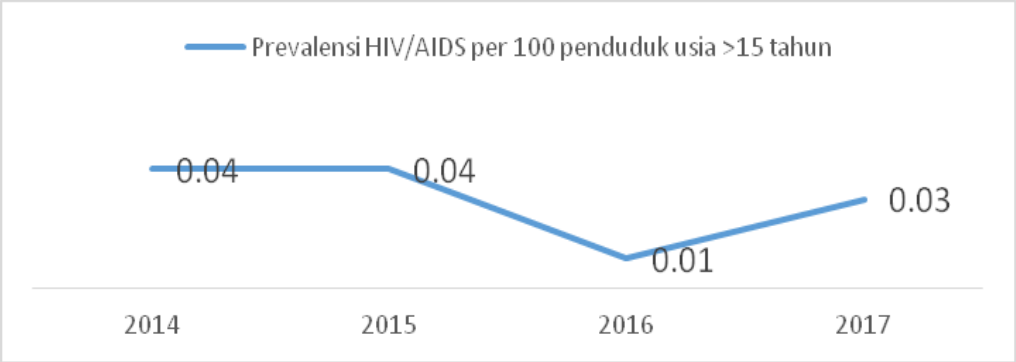

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018 diolah

TABEL 2- 82 Jumlah Kasus HIV Baru se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Jumlah Kasus HIV Baru				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	60	48	70	111	155
2	Sumatera Utara	1,628	1,491	1,891	1,914	1,999
3	Sumatera Barat	321	243	396	563	624
4	Riau	550	586	822	711	539
5	Jambi	170	148	215	278	246
6	Sumatera Selatan	252	265	346	486	508
7	Bengkulu	92	87	115	95	107
8	Lampung	256	345	381	580	524
9	Kepulauan Bangka Belitung	113	147	135	268	205
10	Kepulauan Riau	973	885	1,037	1,105	1,033
11	Indonesia	32,711	30,935	41,250	48,300	46,659

Sumber: Badan Pusat Statistik R.I, 2019 diolah

Berdasarkan tabel diatas, dalam jumlah kasus baru HIV di ruang lingkup Sumatera, Provinsi Lampung pada tahun 2014 berada pada urutan ke 5 terbanyak provinsi yang memiliki kasus HIV dan sampai pada tahun 2018 masih berada pada urutan ke 5 se-Sumatera. Dan untuk perbandingan dengan nasional, keduanya sama-sama mengalami kenaikan jumlah kasus HIV setiap tahunnya dari tahun 2014, akan tetapi pada tahun terakhir 2018 baik Lampung dan Nasional juga sama-sama mengalami penurunan menjadi 524 kasus untuk Provinsi Lampung dan 46.659 kasus untuk Nasional, dapat pada gambar berikut

GAMBAR 2- 85 Jumlah Kasus HIV Baru Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

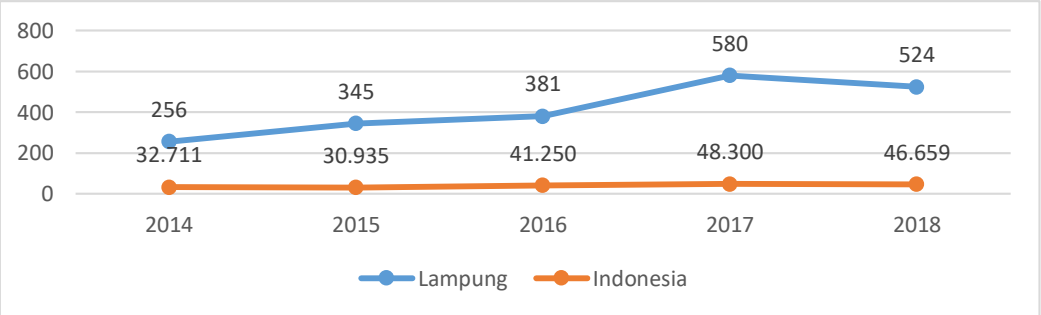

Sumber: Badan Pusat Statisik, RI, 2018

2.2.3.2.14.Angka Kesakitan Malaria

Angka kesakitan Malaria merupakan indikator yang menggambarkan angka kesakitan malaria positif diantara 1000 penduduk disuatu wilayah. Malaria secara epidemiologi merupakan penyakit menular yang lokal spesifik, pada sebagian daerah Provinsi Lampung merupakan daerah endemis yang berpotensi untuk berkembangnya penyakit malaria seperti pedesaan yang mempunyai rawa-rawa, genangan air payau di tepi laut dan tambak-tambak ikan yang tidak terurus, kecuali beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Barat yang merupakan persawahan dan perkebunan.

Angka kesakitan malaria positif (API) per 1000 penduduk di Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 0,64 per 1000 peduduk. Angka ini bila dibandingkan dengan target Renstra Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 0,25 per 1000 penduduk, angkanya terlihat diatas target yang ditetapkan dan bila melihat trand angka kejadian dan kesakitan di 2 tahun terakhir tampak terjadi peningkatan.

GAMBAR 2- 86 Kecenderungan Angka Kejadian, Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk dan Kematian akibat malaria Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

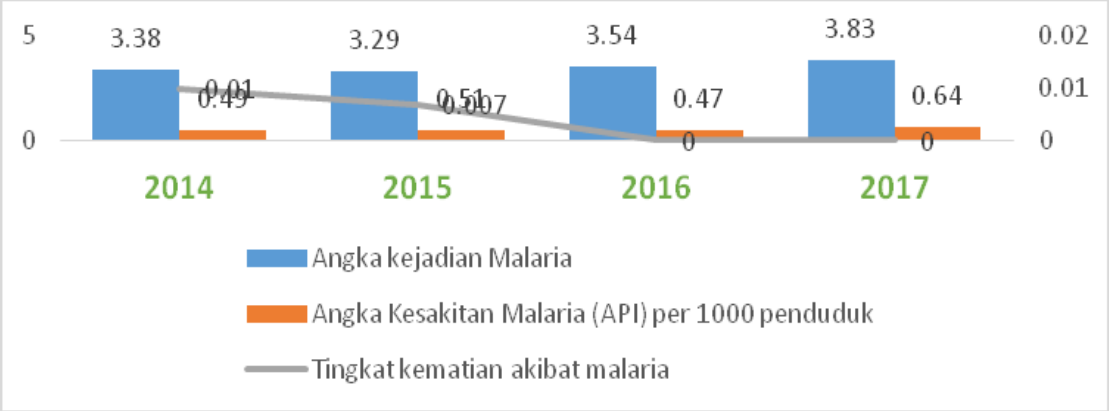

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Bila dilihat berdasarkan distribusi angka kesakitan malaria per 1000 penduduk maka masih ada tiga Kabupaten Kota pada posisi > 1 per 1000 penduduk yaitu Kabupaten Pesawaran (7,50 per 1000 penduduk) dan

Kabupaten Pesisir Barat (1,2 per 1000 penduduk), Kota Bandar Lampung (1,00 per 1000 penduduk).

GAMBAR 2- 87 Angka Kesakitan Malaria Positif (API) per 1000 penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

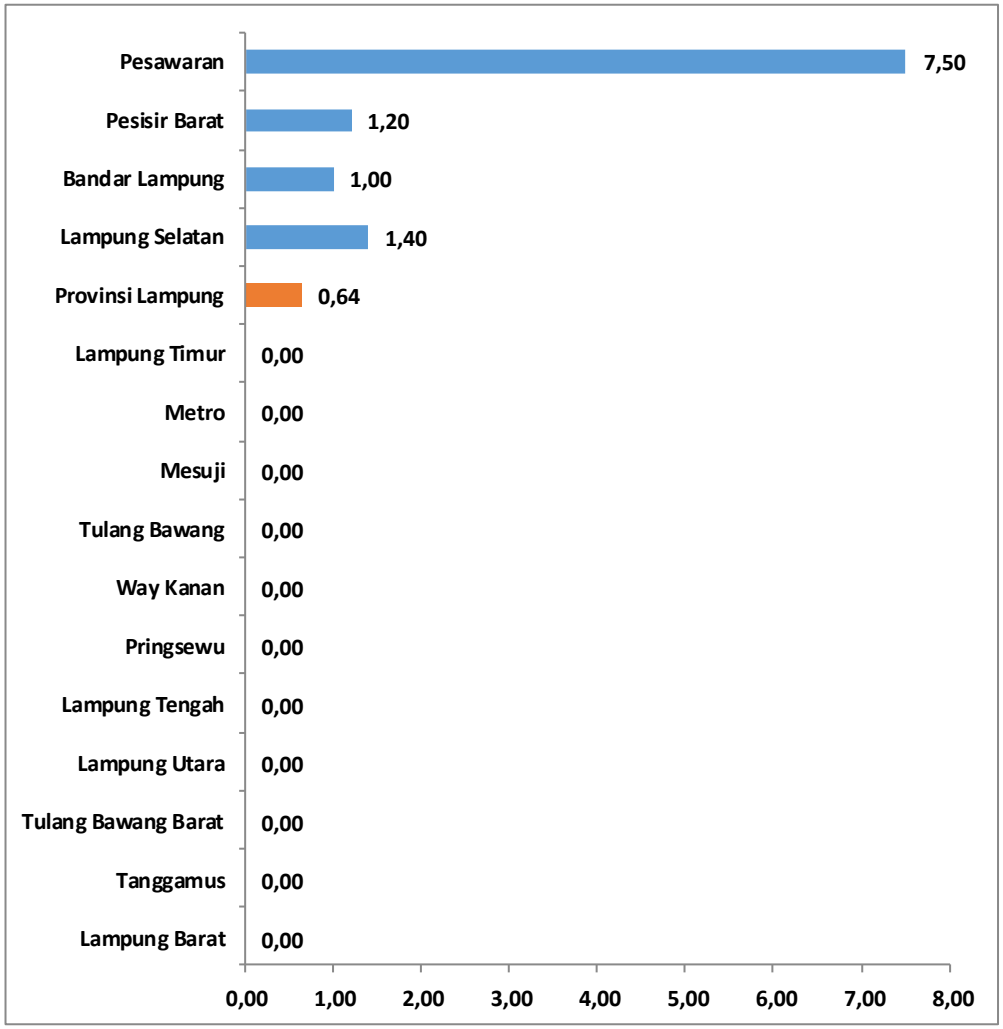

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

Masih tinggi angka kejadian malaria di Provinsi Lampung, khususnya dikabupaten Pesawaran, Pesisir Barat dan Kota Bandar Lampung berhubungan erat dengan tingginya angka gigitan nyamuk Anopheles yang diukur dengan indikator Man Biting Rate (MBR) rata-rata 40 gigitan per orang per jam dan golongan umur lebih banyak pada usia > 15 tahun, hal ini berkaitan dengan kebiasaan / aktifitas diluar rumah (survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017), namun bila dilihat dari trend cakupan diatas

tampak bahwa penanganan kasus malaria+ (kuratif dan rehabilitatif) sudah baik tampak pada Grafik II-75 yang semakin rendah, namun perlu peningkatan upaya preventif dan promotif.

Di lingkup regional Sumatera, Angka Kesakitan Malaria Provinsi Lampung pada tahun 2014 yakni 0,55 dan berada di peringkat 5 di Sumatera, sampai dengan tahun 2018 yakni 0,19 dan berada di peringkat 2 di Sumatera walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

TABEL 2- 83 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

Provinsi	Angka Kesakitan Malarian (API) per 1000 penduduk se-Sumatera				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	0.16	0.08	0.05	0.06	0.02
SUMATERA UTARA	0.69	0.49	0.27	0.17	0.08
SUMATERA BARAT	0.18	0.14	0.12	0.1	0.06
RIAU	0.18	0.10	0.03	0.03	0.01
JAMBI	0.84	0.47	0.14	0.05	0.03
SUMATERA SELATAN	0.3	0.31	0.28	0.11	0.08
BENGKULU	2.17	2.03	1.45	0.53	0.22
LAMPUNG	0.55	0.49	0.4	0.52	0.19
KEP. BANGKA BELITUNG	0.86	1.08	0.11	0.07	0.17
KEP. RIAU	0.41	0.35	0.36	0.17	0.11
Indonesia	0.99	0.85	0.84	0.99	0.68

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2019

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2016, Angka Kesakitan Malaria Provinsi Lampung dan Nasional sama-sama mengalami penurunan angka dan juga mengalami kenaikan angka pada tahun 2017 dan begitu juga 2018. Dan untuk tahun 2018 Lampung memiliki angka 0,19 dan Nasional 0,68. Dapat dilihat di Grafik dibawah ini.

GAMBAR 2- 88 Trend Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

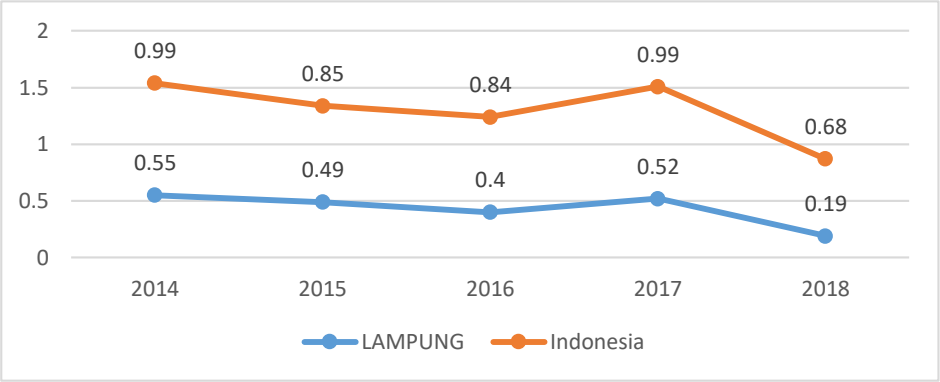

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

2.2.3.2.15.Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas 2007 menjelaskan proporsi angka kematian akibat PTM meningkat dari 41,5% ditahun 1995 mnjadi 49,9% pada tahun 2001 dan 59,5 ditahun 2007, dengan penyebab kematian tertinggi stroke (15,4%), disusul hypertensi, diabetes, kanker dan penyakit paruobstruktif kronis. Kejadian PTM terjadi diperkotaan dan pedesaan, dan sebagian besar terjadi pada usia produktif (45-54 tahun).

GAMBAR 2- 89 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Provinsi Lampung Tahun 2015 sd 2017

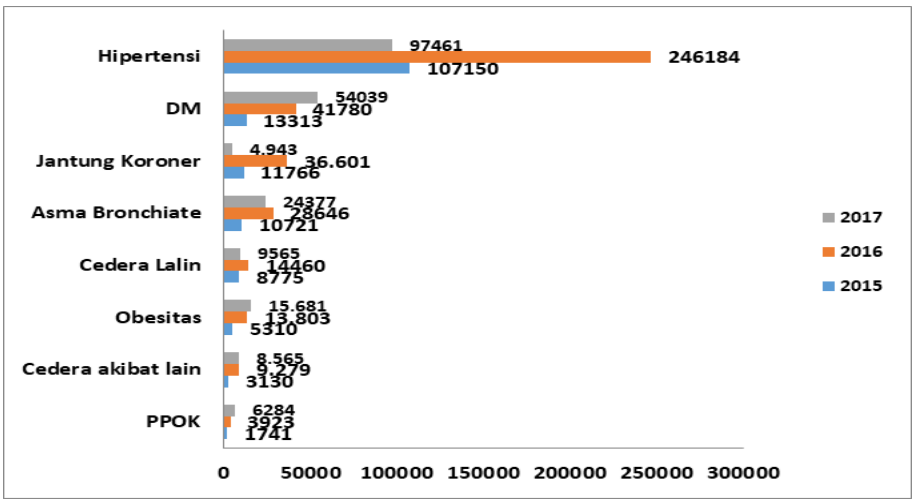

Sumber Profil Kesehatan, 2019

Di Provinsi Lampung dari tahun 2015-2017 kasus penyakit tidak menular tertinggi adalah hypertensi, disusul Diabetes melitus, jantung, asma, obesitas dan PPOK, seperti yang dilihat pada gambar di atas.

Penyakit tidak menular dipicu berbagai faktor resiko antara lain merokok, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, gaya hidup tidak sehat. Penyakit tidak menular terbanyak di Provinsi Lampung adalah penyakit Hipertensi dengan jumlah kasus terbanyak pada tahun 2016 yakni 246.184 kasus. Sedangkan kasus penyakit tidak menular terendah di Provinsi Lampung adalah pada penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) pada 2015 sebanyak 1741 kasus.

2.2.3.2.16.Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas dengan minimal 5 jenis tenaga kesehatan di Provinsi Lampung mencapai 128 puskesmas pada tahun 2017. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 46 unit puskesmas pada tahun 2015 dan kemudian total 80 unit di tahun 2016. Laju pertumbuhan jumlah puskesmas dengan minimal 5 jenis tenaga kesehatan ini cenderung lambat apabila dibandingkan dengan percepatan di tingkat nasional yang pertumbuhannya mencapai 60% selama tahun 2016-2017.

GAMBAR 2- 90 Jumlah Puskesmas dengan Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2017

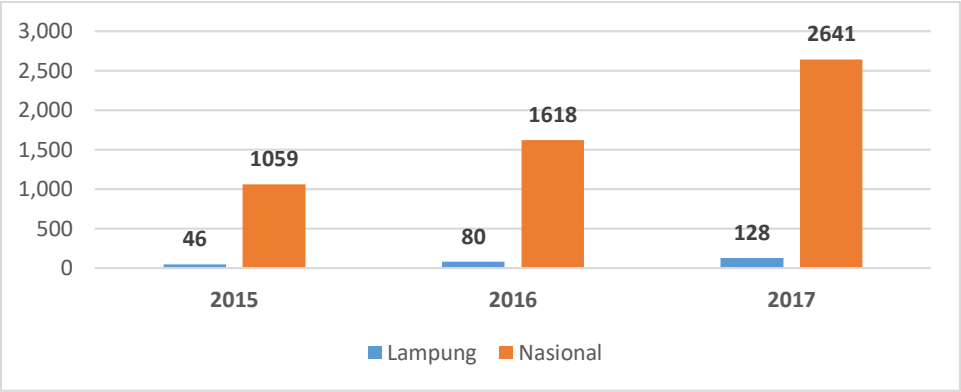

Sumber:Profil Kesehatan Indonesia 2018

Sedangkan jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung total sebanyak 303 buah, dengan jumlah Puskesmas terakreditasi sebanyak 299 buah. Jumlah Puskesmas terbanyak ada di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan tingginya jumlah penduduk di ketiga daerah tersebut.

GAMBAR 2- 91 Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2017

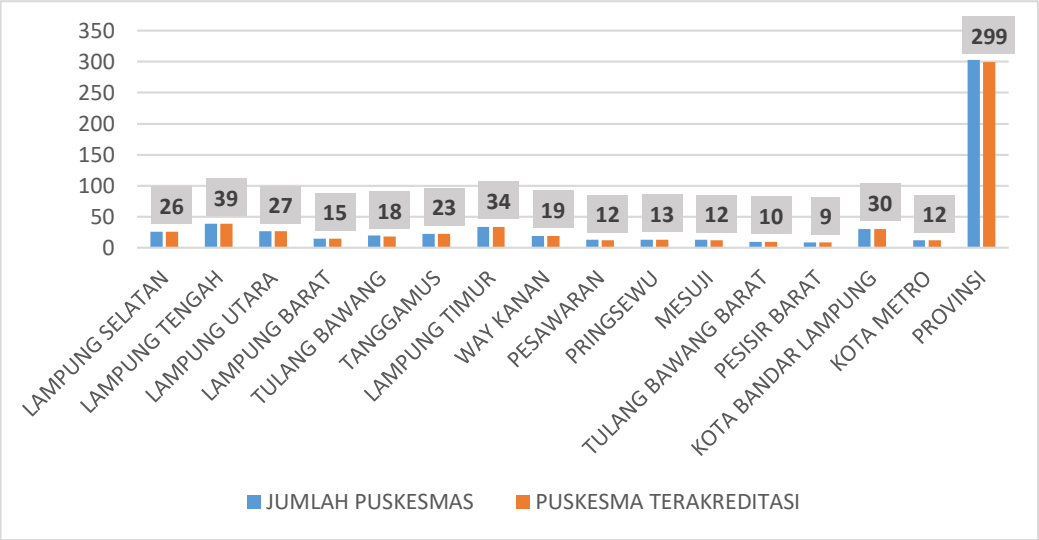

2.2.3.2.17.Cakupan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya khususnya kebutuhan kesehatan yang layak (akses dan mutu pelayanan kesehatan). Jaminan kesehatan antara lain: jaminan kesehatan nasional, jamkesda, asuransi swasta dan asuransi perusahaan.

Di provinsi Lampung sampai dengan tahun 2017, masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan baru mencapai 59,01%, berarti terdapat 49,99 % penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk cakupan jaminan kesehatan menurut Jenis kepesertaannya Di Provinsi Lampung Tahun 2017 yaitu penerima bantuan iuran APBN 70%, PPU 18%, PBPU/perorangan 5%, bukan pekerja 2%, penerima bantuan iuran APBD 5%,

GAMBAR 2- 92 Cakupan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Di Provinsi Lampung Tahun 2016

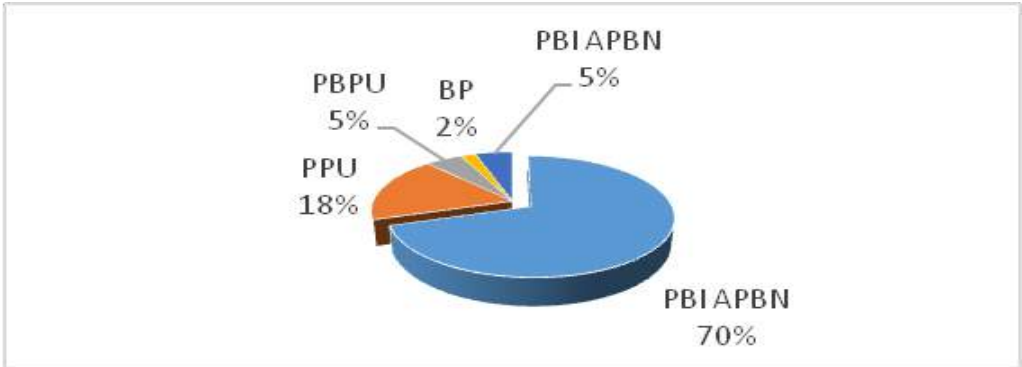

Sumber : Seksi PJK Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2018

Saat ini pemerintah menargetkan Indonesia untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakat. Dan target dari pemerintah terkait tercapainya UHC di Indonesia pada 1 januari 2019 mendatang.

2.2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastrutur Jalan

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mancapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relative terbatas, sehingga

pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2015-2018 adalah sebagaimana tabel berikut

TABEL 2- 84 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2017

Indikator	Capaian 2017	2017			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019
		Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
Kemantapan Jalan Provinsi	77,04 %	75,00 %	77,04 %	102,7 %	85,00 %	90,65 %

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Lampung, 2019 diolah

Dari hasil analisis capaian kinerja pada tabel diatas, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan telah sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari capaian kinerja indikator kemantapan jalan provinsi mencapai 102,7%. Peningkatan kondisi jalan ruas provinsi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2013 – 2017.

TABEL 2- 85 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2013 – 2018

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2013	62,00	38,00	-
2014	65,05	34,95	3,05
2015	67,02	32,98	1,97
2016	70,02	29,96	3,00
2017	77,04	22,96	7,02
2018	79,89	20,11	2,85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

Perbandingan kondisi mantap dan tidak mantap jalan ruas provinsi kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut.

GAMBAR 2- 93 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2014–2018

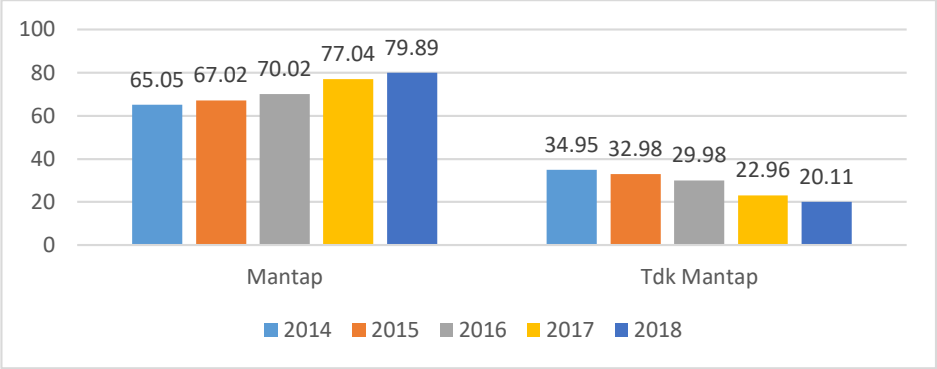

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

Jumlah persentasi mengenai jumlah kondisi jalan mantap tahun 2017 dengan jumlah total sebesar 77,04%, sedangkan jumlah komdisi jalan tidak mantap sebesar 22,96%. Sehingga secara umum dari grafik diatas menunjukkan bahwa kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sebaliknya untuk kondisi jalan tidak mantap mengalami penurunan, ini mengindikasikan makin banyaknya jalan-jalan di Provinsi Lampung sudah mengalami perbaikan.

GAMBAR 2- 94 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2014-2018

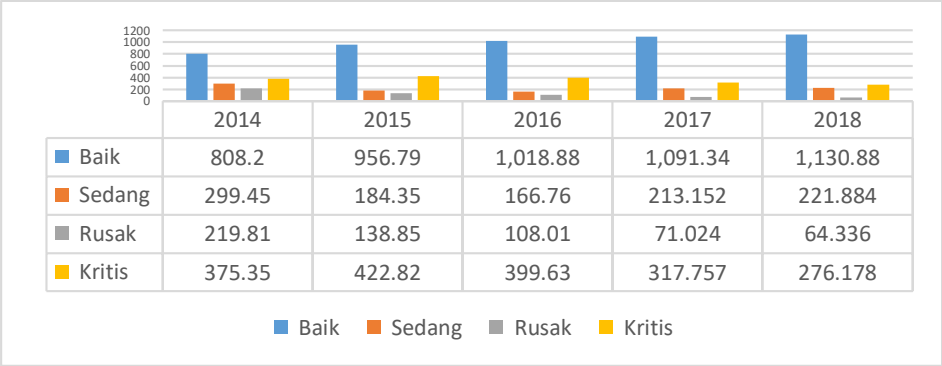

	2014	2015	2016	2017	2018
Baik	808.2	956.79	1,018.88	1,091.34	1,130.88
Sedang	299.45	184.35	166.76	213.152	221.884
Rusak	219.81	138.85	108.01	71.024	64.336
Kritis	375.35	422.82	399.63	317.757	276.178

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

Berdasarkan analisa capaian kinerja dan hasil survei kondisi lapangan sesuai dengan data tersebut diatas, peningkatan kondisi jalan mantap (baik dan sedang) pada tahun 2017 telah mencapai 77,04%. Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara tahun 2016 mencapai 89,90% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.292,25 km. Perbandingan kondisi jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2- 86 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2016

Tahun	Panjang Ruas Nasional (km)	Kondisi							
		Mantap				Tidak Mantap			
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2016	1,292.25	811.08	62,77	350.57	27,13	63.91	4,94	66.65	5,16
% Mantap		89.90							
% Tidak Mantap						10,10			

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

Infrastruktur Irigasi

Provinsi Lampung memiliki 19 Daerah Irigasi dengan luas baku sawah yang dialiri 21.045 Ha, panjang saluran primer 75.102 M & panjang saluran sekunder 96.009 M. Berikut perkembangan kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi Lampung:

GAMBAR 2- 95 Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

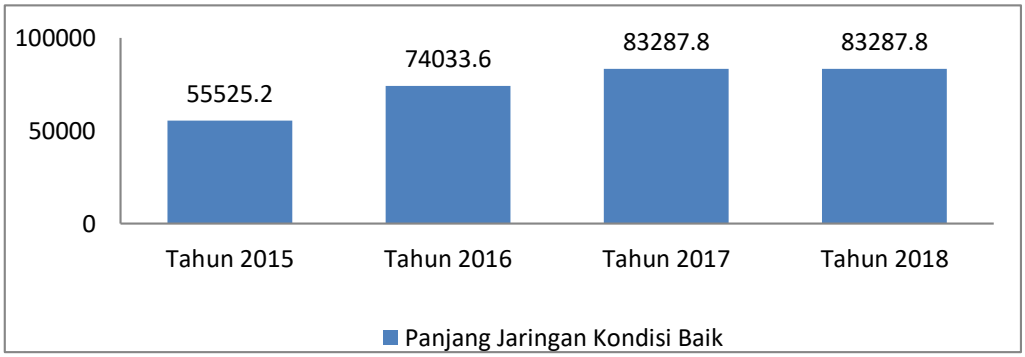

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA Prov Lampung, 2019 diolah

GAMBAR 2- 96 Kondisi Jaringan Irigasi Kondisi Baik (meter) Provinsi Lampung

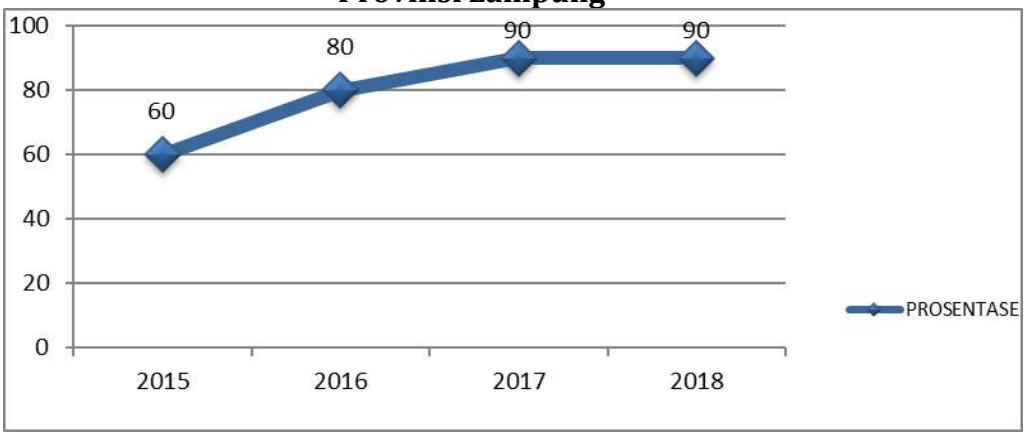

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA Prov Lampung, 2019 diolah

Untuk mempertahankan kondisi 90% BAIK, Pemerintah Provinsi melakukan upaya:

- Pada Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan *ground breaking* Pembangunan Bendung Way Tatayan di Kabupaten Lampung Tengah. Bendung ini mampu mengairi sawah lebih dari 1000 Ha.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 19 Daerah irigasi, yaitu DI Way Srikaton, DI Way Semaka, DI Way Sulan, DI Way Tipo Balak, DI Way Ketibung, DI Way Kandis I, DI Way Ngarip, DI Way Ngison, DI Way Padang Ratu, DI Way Napal, DI Way Kali Pasir, DI Way Pujo Rahayu, DI Way Negara Ratu I, DI Way Biha, DI Way Manak I, DI Way Bulok Sukamara III, DI Way Mincang IV, DI Way Tatayan IV, dan DI Way Guring,
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap Lainnya pada 19 DI termasuk beberapa usulan dari Daerah Irigasi yang diusulkan oleh kabupaten untuk dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan karena kurangnya pendanaan pemerintah kabupaten,
- Pembangunan Embung di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang serta Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Untuk menanggulangi banjir, Pemerintah Provinsi melakukan: Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Way Semangka Kab. Tanggamus dan kawasan wisata Tahura Wan Abdul Rahman.
- Pengerukan sungai di Kab. Lampung Timur, serta pembangunan pengaman pantai di Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Lampung Selatan. Kemudian membangun tanggul penahan tanah di Desa Braja Kencana Kab. Lampung Timur.

2.2.3.4. Perumahan dan Permukiman

Kondisi Perumahan mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi masyarakat baik. Kinerja di bidang perumahan pada tahun 2015-2018 di Provinsi Lampung dapat dilihat dalam grafik sebagi berikut:

TABEL 2- 87 Persentase Penduduk yag Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum	%
2015	8.117.268,00	5.311.881,61	63,77
2016	8.205.141,00	5.463.558,47	66,59
2017	8.289.577,00	5.738.756,48	69,23
2018	8.370.485,00	5.959.359,00	71,19

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, 2019

Di Tahun 2018, persentase penduduk Provinsi Lampung yang memiliki Akses Air Minum Layak mengalami peningkatan menjadi 71,19% dari 63,77% di Tahun 2015.

GAMBAR 2- 97 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2015–2018

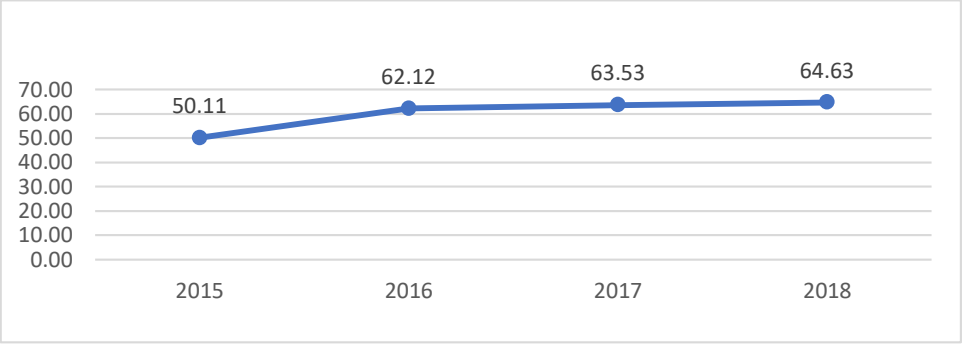

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, 2019

Untuk persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Lampung dari tahun 2015 s.d 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2015 hanya 50,11% penduduk Provinsi Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 64,63% di Tahun 2018.

Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas urusan Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah :

a. Perumahan di lintas Kabupaten/kota
b. Pada kawasan strategis
c. Pada kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10-15 Hektar)
d. Pada desa miskin dan desa Stunting

GAMBAR 2- 98 Luas Kawasan Kumuh (Ha) menurut Kabupaten/Kota, 2018

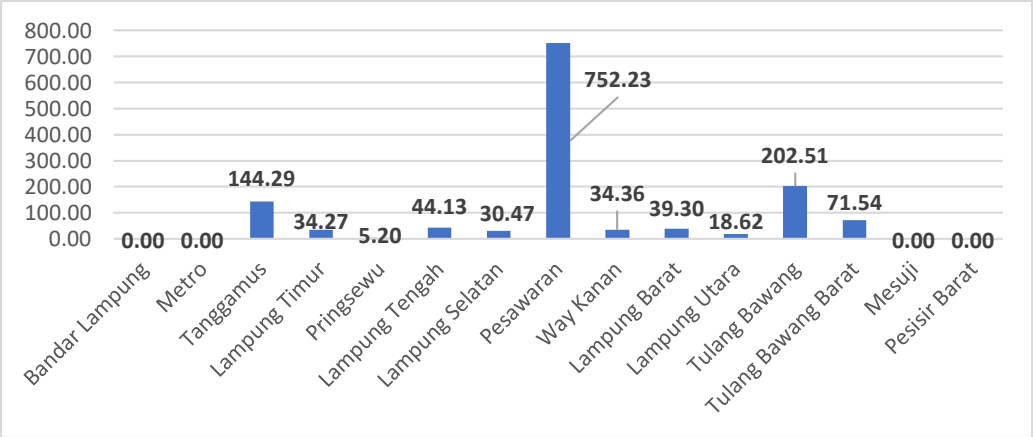

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, 2019

Pada Grafik diatas, dapat dilihat bahwa di akhir Tahun 2018 Kabupaten Pesawaran menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki Kawasan Kumuh terluas di Provinsi Lampung dengan luasan 752,23 Ha. Sedangkan Kota Bandar Lampung dan Metro juga Kabupaten Mesuji serta Pesisir Barat di Tahun 2018 tidak memiliki Kawasan Kumuh sama sekali.

Di Tahun 2019, Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Lampung sebesar 1.187,12 Ha (verifikasi Pusat) atau sebesar 1.376,93 Ha (SK Bupati/Walikota). Dari jumlah tersebut, rencana Pengurangan Kawasan Kumuh sebesar 844,18 Ha dimana Porsi Penangan Provinsi Lampung adalah sebesar 190 Ha.

Untuk jumlah Rumah Layak Huni di Tahun 2018 Provinsi Lampung secara keseluruhan memiliki sebesar 1.496.566 unit dengan jumlah terbesar secara berurutan berada di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Lampung Utara. Sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni sebesar 93.752 unit dengan Tanggamus sebagai daerah yang memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni terbanyak sebesar 17.084 unit.

TABEL 2- 88 Jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung Tahun 2018

No	Kab/Kota	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal				Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
			Milik Sendiri	Sewa/ Kontrak	Menum pang	Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Bandar Lampung	211.633	152.043	24.763	33.398	1.429	149.948	2.095
2	Kota Metro	36.648	31.965	1.237	3.175	271	31.794	171
3	Lampung Barat	64.221	56.427	1.179	5.578	1.037	47.993	8.434
4	Lampung Selatan	243.265	211.694	3.948	25.867	1.756	201.931	9.763
5	Lampung Tengah	253.219	228.740	1.307	16.979	6.193	222.179	6.561
6	Lampung Timur	198.757	181.417	1.098	13.227	3.015	176.274	5.143
7	Lampung Utara	138.795	116.470	3.257	18.265	803	107.222	9.248
8	Mesuji	58.310	52.246	623	5.087	354	49.645	2.601
9	Pesawaran	105.305	90.630	1.317	12.264	1.094	81.976	8.654
10	Pesisir Barat	32.788	28.457	444	3.551	336	22.398	6.077
11	Pringsewu	100.576	89.629	1.082	9.304	561	86.649	2.980
12	Tanggamus	131.738	116.076	1.276	13.617	769	98.992	17.084

No	Kab/Kota	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal				Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
			Milik Sendiri	Sewa/ Kontrak	Menum pang	Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Tulang Bawang Barat	65.943	58.105	635	4.929	2.274	55.390	2.715
14	Tulang Bawang	92.073	81.179	1.511	8.069	1.314	77.186	3.993
15	Way Kanan	104.313	95.240	554	7.888	631	86.989	8.251
	Provinsi	**1.837.584**	**1.590.318**	**44.231**	**181.198**	**21.837**	**1.496.566**	**93.752**

Sumber: Dinas Perumahan dan KP Prov Lampung, 2019

Tanggal 22 Desember 2018 terjadi bencana alam Tsunami yang disebabkan oleh meletusnya gunung Anak Krakatau. Berikut data kondisi dan potensi menurut SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

TABEL 2- 89 Jumlah Rumah Bencana Alam Tsunami Provinsi Lampung Tahun 2018

NO	KRITERIA KERUSAKAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Rusak Ringan	139	Unit	Tersebar di Kab Lampung Selatan
2.	Rusak Sedang	146	Unit	Tersebar di Kab Lampung Selatan
3.	Rusak Berat	532	Unit	Tersebar di Kab Lampung Selatan

Sumber: Dinas Perumahan dan KP Prov Lampung, 2019

Kemungkinan terjadi kerusakan rumah dikarenakan tidak mematuhi Perpres No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. GSP yang dimaksud diukur dari tinggi gelombang dari muka air laut sebelum tsunami datang dan tinggi genangan pada lokasi dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Umumnya lokasi rumah tersebut kurang dari 100 meter dari titik pasang tertinggi.

2.2.3.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (tambahkan data NAPZA, Status Penanganan Konflik Sosial dan Korban Trafficking)

Capaian kinerja penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tergambar dari capaian penanganan konflik sosial dan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masing-masing provinsi. Capaian pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik mengindikasikan tingkat keberhasilan

daerah dalam mengantisipasi dan mengatasi gejala konflik serta membangun keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, dengan kriteria antara lain terpetakannya potensi konflik di daerah, tersedianya Peta Batas Daerah, dan tersusunnya blue print penanganan radikalisme dan terorisme. Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di suatu daerah.

Kriteria capaian pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Lampung berhasil meraih peringkat 1 (pertama) dari 10 (sepuluh) provinsi (Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, DI Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan) yang meraih penghargaan tersebut di tahun 2017, dan meningkat drastis dari capaian di tahun 2015 yang menempati peringkat 5 (lima) se Indonesia.

Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2017 mencapai 72,01 dari skala 0 sampai 100, angka ini meningkat 12,01 % dibandingkan dengan IDI Lampung 2016 (sebesar 72,01). Angka IDI periode 2016-2017 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang mengalami peningkatan sebesar 12,69 % dari 64,31 menjadi 77,00, Hak-Hak Politik (Political Rights) juga mengalami peningkatan 7,88 % dari 59,32 menjadi 67,20, serta Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) mengalami kenaikan 13,73 % dari 74,22 menjadi 60,49. Angka 72,01 ini menandakan perilaku demokrasi di Lampung pada tingkat SEDANG.

Mengamati pola IDI selama periode 2009-2017 (9 tahun) menunjukkan pola fluktuatif yang menegaskan bahwa perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi di Lampung masih belum matang. Namun

sebagai catatan penting, sebagai alat ukur perkembangan demokrasi, IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

GAMBAR 2- 99 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2009-2017

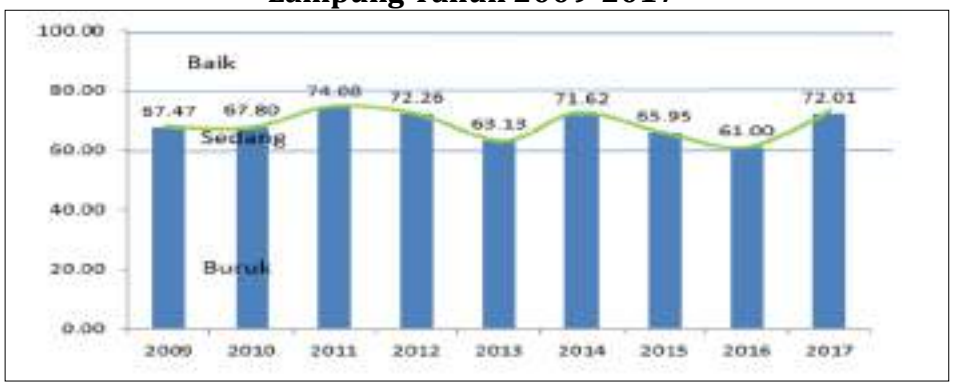

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari tabel di bawah, dapat kita lihat bahwa perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia se-Sumatera mengalami peningkatan yang terjadi pada Kepulauan Riau, sedangkan provinsi lainnya mengalami naik turun. Lampung menduduki peringkat 7 se-Sumatera.

TABEL 2- 90 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia se-Sumatera Tahun 2014-2017

No.	Provinsi	IDI se-Sumatera			
		2014	2015	2016	2017
1	Aceh	72.29	67.78	72.48	70.93
2	Sumatera Utara	68.02	69.01	67.37	68.08
3	Sumatera Barat	63.99	67.46	54.41	69.5
4	Riau	68.4	65.83	71.89	73.41
5	Jambi	71.15	70.68	68.89	74.12
6	Sumatera Selatan	74.82	79.81	80.95	74.04
7	Bengkulu	71.7	73.6	74.23	72.73
8	Lampung	71.62	65.95	61	72.01
9	Kepulauan Bangka Belitung	75.32	72.31	83	80.11
10	Kepulauan Riau	68.39	70.26	72.84	76.33
11	Indonesia	73.04	72.82	70.09	72.11

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018 diolah

GAMBAR 2- 100 Perbandingan Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2017

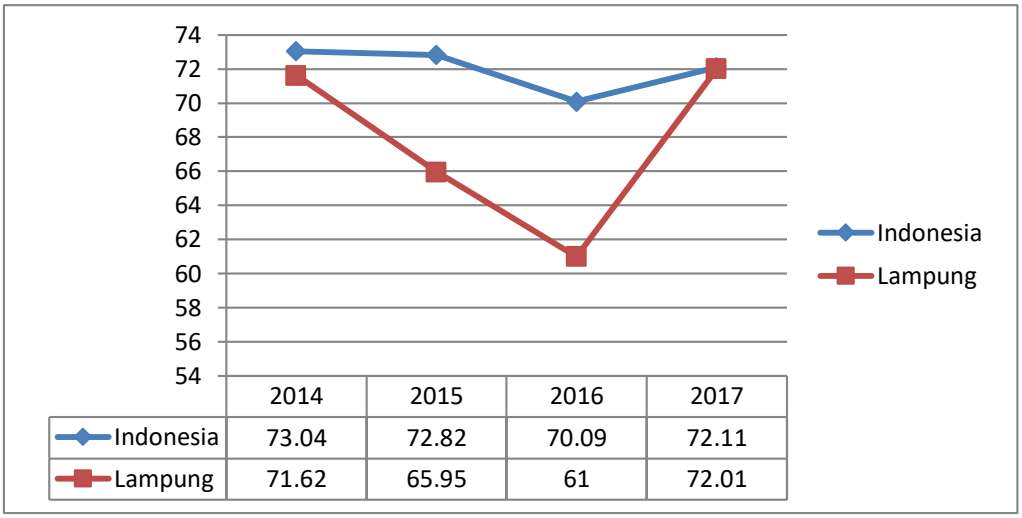

	2014	2015	2016	2017
Indonesia	73.04	72.82	70.09	72.11
Lampung	71.62	65.95	61	72.01

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 5,67 pada tahun 2015 dan penurunan sebesar 4,69 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung mengalami kenaikan menjadi 72,01 melewati angka capaian pada tahun 2014 dan hanya memiliki selisih 0,1 jika dibandingkan dengan angka indeks demokrasi Indonesia di Indonesia.

Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan perUndang-Undangan, seperti halnya peraturan daerah dan peraturan Gubernur. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan perUndang-Undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketenteraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran perda dan

pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan perda.

TABEL 2- 91 Jumlah Peraturan Daerah yang Dilanggar

NO	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1.	No.12 Tahun 2012	Ketenagalistrikan
2.	No.13 Tahun 2012	Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
3.	No.12 Tahun 2013	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4.	No.13 Tahun 2012	Pengelolaan Barang milik Negara
5.	No.12 Tahun 2012	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hingga tahun 2017, tercatat hanya terjadi 5 (lima) peraturan daerah yang dilanggar, baik dari laporan/aduan masyarakat maupun dari pantauan operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Minimnya jumlah pelanggaran dapat menjadi indikasi bahwa pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap hukum atau produk peraturan daerah. Namun, disisi lain juga dapat mengindikasikan ketidakpahaman masyarakat terkait sosialisasi produk hukum dimaksud dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemuinya (melalui fasilitas laporan/aduan masyarakat), dan minimnya anggaran operasional, termasuk untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai perangkat utama penegakan perda, untuk mendukung penegakan perda.

Selanjutnya dalam rangka penegakan hukum di lingkungan aparat pemerintahan, maka dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu perangkat utama dalam penegak peraturan daerah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Dalam hal perekrutan dan pelatihan PPNS Provinsi dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung. Jumlah PPNS Provinsi Lampung di Tahun 2017 berjumlah 55 orang yang tersebar di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun dari 32 urusan pemerintahan

(wajib dan pilihan) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercatat hanya 18 urusan yang dapat dikawal.

TABEL 2- 92 OPD Provinsi, Jumlah PPNS dan Urusan Pemerintahan yang Dikawal Tahun 2017

NO	OPD PROVINSI	JUMLAH PPNS (Orang)	URUSAN YANG DIKAWAL
1	Satuan Polisi Pamong Praja	11	KAMTIBLINMAS
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	Tenaga Kerja Transmigrasi
4	Dinas Kesehatan	1	Kesehatan
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Dinas Perdagangan	4	Perdagangan
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	Kelautan dan Perikanan
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air	3	Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Dinas Sosial	6	Sosial
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1	Komunikasi, Informatika Statistik Persandian
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	Pangan Pertanian
14	Biro Hukum	2	-
	JUMLAH	55	18

Keberadaan aturan PPNS (Pergub dan aturan-aturan diatasnya) merupakan bentuk adanya legitimasi hukum terhadap keberadaan, pelaksanaan tugas, dan wewenang PPNS di lingkungan pemerintah daerah, namun minimnya kuantitas, dan juga kualitas, PPNS menunjukkan adanya kebutuhan pola pelaksanaan pembinaan yang meliputi pemetaan kebutuhan dan pembinaan yang rutin dan terencana dengan baik kedepannya.

Kondisi ketentraman ketertiban dan perlindugan masyarakat tidak terlepas dari konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, masalah pertanahan di batas wilayah menjadi latar belakang terjadinya konflik yang melibatkan suku dan ras yang menimbulkan korban jiwa. Kewenangan provinsi di bidang pertanahan meliputi: 1) pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota, 2) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, 3) penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota, 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembnagunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, 6) penetapan tanah ulayat lintas Kabupaten/Kota, 7) Penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota, dan 7) perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota.

Terkait pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2017, sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/169/B.0I/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan tupoksi utama memfasilitasi dan memediasi kasus/permasalahan/konflik pertanahan di Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung membagi masalah/kasus pertanahan menjadi:

a. Masalah/kasus tanah yang menyangkut Kawasan Kehutanan, *leading sector* proses penanganannya ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
b. Masalah/kasus tanah yang menyangkut Transmigrasi, *leading sector* proses penanganannya ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

c. Masalah/kasus tanah yang menyangkut Tata Batas Kabupaten atau Provinsi, *leading sector* proses penanganannya ditangani oleh Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi.

d. Masalah/kasus tanah yang bersifat umum, *leading sector* proses penanganannya ditangani oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.

TABEL 2- 93 Rekapitulasi Kasus Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Lanjutan 2017	Baru	Kasus 2018	Selesai	Sisa
Bandar Lampung	2	0	2	0	2
Metro	0	0	0	0	0
Lampung Utara	2	0	2	0	2
Lampung Timur	1	0	1	0	1
Lampung Selatan	1	0	1	0	1
Lampung Barat	0	0	0	0	0
Lampung Tengah	2	0	2	0	2
Tanggamus	0	0	0	0	0
Tulang Bawang	1	0	1	0	1
Way Kanan	3	2	5	2	3
Pesawaran	1	0	1	0	1
Pringsewu	0	0	0	0	0
Tulang Bawang Barat	2	0	2	0	2
Mesuji	3	0	3	0	3
Pesisir Barat	1	0	1	0	1
Jumlah	19	2	21	2	19

Keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat juga erat kaitanya dengan tingkat kriminalitas. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berikut adalah data terkait kriminalitas di Provinsi Lampung.

GAMBAR 2- 101 Jumlah Kasus Kriminalitas Provinsi Lampung Tahun 2015-2016

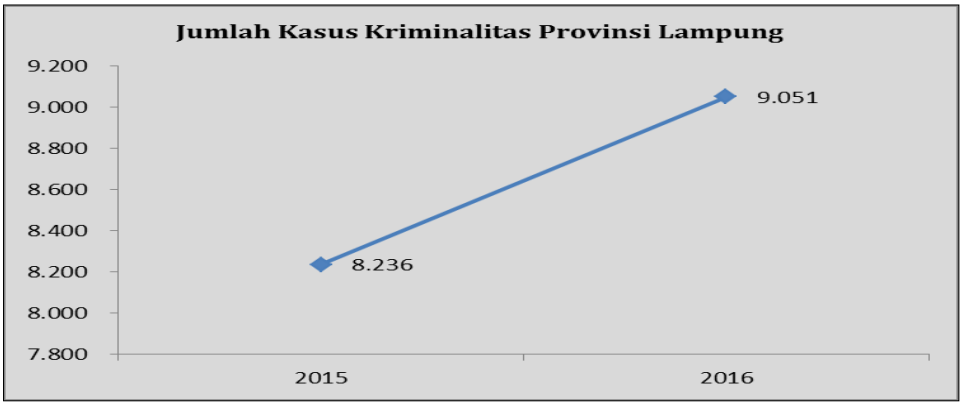

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

GAMBAR 2- 102 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Provinsi Lampung Tahun 2015-2016

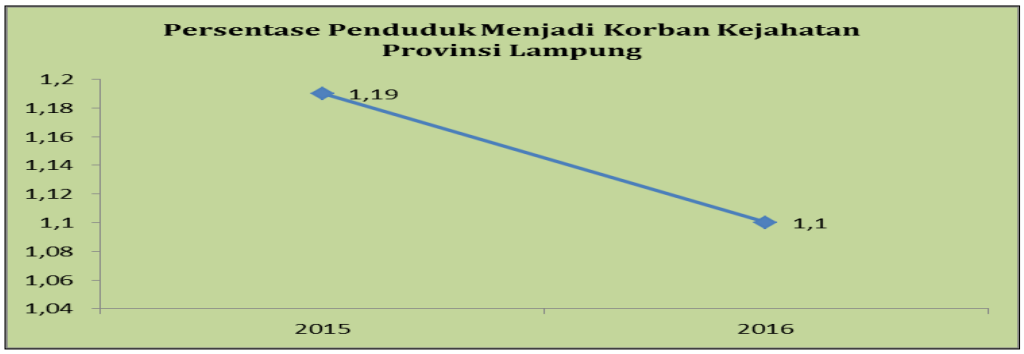

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Dari kedua grafik di atas terlihat bahwa untuk jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Lampung memang mangalami peningkatan dari tahun 2015-2016, namun hal ini berbanding terbalik dengan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan yang mengalami penurunan tahun 2015-2016. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung cukup baik dan merupakan hasil kinerja dari aparat keamanan pemerintah dibantu dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan masyarakat.

2.2.3.6. Sosial

2.2.3.6.1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PMKS yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2013– 2017 sebanyak 37.409 jiwa.

TABEL 2- 94 Jumlah PMKS di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

NO	JENIS PMKS	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
1	Anak Balita terlantar (ABT)	4.821	4.695	4.311	4.056	17.883
2	Anak terlantar (AT)	17.732	17.636	16.810	16.705	68.883
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	1.485	1.238	1.996	2.085	6.804
4	Anak Jalanan	1.011	937	1.021	727	3.696
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	4.554	4.338	4.177	3.544	16.613
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	469	399	501	432	1.801
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	299	230	151	177	857
8	Lanjut Usia terlantar	36.995	39.968	41.207	42.155	160.325
9	Penyandang Disabilitas	23.345	22.915	16.697	14.767	77.724
10	Tuna Sosial	547	499	278	268	1.592
11	Gelandangan	351	313	299	295	1.258
12	Pengemis	394	344	239	258	1.235
13	Pemulung	1.444	1.482	1.630	1.008	5.564
14	Kelompok Minoritas	56	189	180	221	646
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	2.808	1.967	1.046	707	6.528
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	173	190	154	143	660
17	Korban Penyalagunaan NAPZA	624	568	735	568	2.495
18	Korban Traficking	202	50	22	21	295
19	Korban tindak kekerasan	613	531	335	379	1.858
20	Pekerja migran Bermasalah Sosial (PMBS)	919	863	714	370	2.866
21	Korban Bencana Alam	6.290	6.891	5.283	2.840	21.304

NO	JENIS PMKS	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
22	Korban Bencana Sosial	2.181	2.198	3.394	3.224	10.997
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	70.142	70.472	55.676	27.959	224.249
24	Fakir Miskin	636.020	504.543	614.768	669.731	2.425.062
25	Keluarga masalah sosial psikologis	2.050	1.661	1.324	5.026	10.061
26	Komunitas adat terpencil	-	-	-	-	
	Jumlah Jiwa (No. 1 s/d 23)	177.455	178.913	156.856	122.909	636.133
	Jumlah KK (No. 24 & 25)	638.070	506.204	616.092	674.757	2.435.123

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Secara umum penanganan PMKS di Provinsi Lampung terlihat pada tabel diatas mengalami peningkatan dari 3,05% di tahun 2014 menjadi 5,14% di tahun 2017. Namun %tase tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PMKS yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kedepan perlu ditingkatkan lagi penanganannya sehingga PMKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya, mandiri dan meningkat kesejahteraannya.

Adapun data PMKS yang ditangani berdasarkan jenis PMKS dapat dilihat padatabel berikut yang menunjukkan jumlah PMKS di Provinsi Lampung secara keseluruhan dan terperinci:

TABEL 2- 95 Data PMKS yang Sudah Ditangani di Provinsi Lampung

NO	JENIS PMKS	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
1	Anak Balita terlantar (ABT)	-	327	259	272	858
2	Anak terlantar (AT)	3.665	4.700	5.478	5.752	19.595
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	-	25	25	26	76
4	Anak Jalanan	-	250	139	146	535
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	-	255	122	128	505
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	60	40	15	16	131
8	Lanjut Usia terlantar	981	2.355	1.655	1.738	6.729
9	Penyandang Disabilitas	328	520	458	481	1.787
10	Tuna Sosial	45	-	-	-	45
11	Gelandangan	80	-	-	-	80
12	Pengemis	-	-	-	-	-
13	Pemulung	55	150	50	53	308
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	55	20	219	230	524
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	15	15	20	21	71
17	Korban Penyalagunaan NAPZA	75	10	70	74	229
18	Korban Traficking	-	7	20	21	48

NO	JENIS PMKS	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
19	Korban tindak kekerasan	50	103	30	32	215
20	Pekerja migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	21	20	21	62
21	Korban Bencana Alam	-	-	1.578	1.657	3.235
22	Korban Bencana Sosial	-	-	255	268	523
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	-	-	300	315	615
24	Fakir Miskin	1.550	1.900	1.300	1.365	6.115
25	Keluarga masalah sosial psikologis	60	-	-	-	60
26	Komunitas adat terpencil	-	-	-	-	-
	Jumlah Jiwa	5.409	8.798	10.713	11.249	36.169
	Jumlah KK	1.610	1.900	1.300	1.365	6.175

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah PMKS yang tertangani meningkat secara signifikan, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 5.409 jiwa, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 8.798 jiwa, tahun 2016 ada 10.713 jiwa, dan di tahun 2017 meningkat sebanyak 11.249 jiwa.

Kemudian ada 1 jenis PMKS tertangani yang paling banyak tersebar di Provinsi Lampung yaitu anak terlantar yang jumlah tertangani mencapai 19.595 jiwa, kemudian lanjut usia terlantar sebanyak 6.729 jiwa dan fakir miskin yang berjumlah 6.115 jiwa. Dari Tabel juga dapat dilihat bahwa data anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pengemis, kelompok minoritas, dan komunitas adat terpencil masih kosong dikarenakan data yang belum valid sehingga belum bisa dijadikan acuan data PMKS.

Di sisi lain, jumlah panti sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung hanya 7 panti dan milik swasta sebanyak 67 panti. Panti sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung ada 6 jenis pelayanan, yakni remaja putus sekolah, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, tuna sosial, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

TABEL 2- 96 Data Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Lampung

No	UPTD	Alamat	Jenis Pelayanan	Jumlah Kelayan	
				Laki-laki	Perempuan
1	UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Raden Intan	Jl. Panglima Polim Gedong Air Bandar Lampung	Remaja Putus Sekolah	25	25
2	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang	Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung	Penyandang Disabilitas	27	23

No	UPTD	Alamat	Jenis Pelayanan	Jumlah Kelayan	
				Laki-laki	Perempuan
	Disabilitas Indera Kesuma				
3	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bakti Yuswa	Jl. Raya Natar Lampung Selatan	Lanjut Usia	45	40
4	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih	Jl. Urip Sumoharjo Gn. Sulah Bandar Lampung	Anak Terlantar	28	22
5	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna	Jl. Raya Lempasing Kab. Pesawaran	Tuna Sosial	18	17
6	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa	Kalianda, Lampung Selatan	Anak Terlantar	25	25
7	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna	Lempasing Pesawaran	Anak Berhadapan dengan Hukum	20	5

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Data di atas menunjukkan UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bakti Yuswa yang beralamat di Natar, Lampung Selatan dengan kelayan laki-laki berjumlah 45 orang dan kelayan perempuan berjumlah 40 orang merupakan panti sosial yang memiliki kelayan terbanyak dibanding panti sosial lainnya. Sedangkan panti sosial dengan jenis pelayanan anak terlantar yaitu UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih menampung kelayan laki-laki 28 orang, kelayan perempuan 22 orang dan UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa menampung kelayan laki-laki 25 orang, kelayan perempuan 25 orang.

GAMBAR 2- 103 Data Panti Sosial dan Anak Terlantar Non Pemerintah Se-Provinsi Lampung

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Panti sosial non pemerintah se-Provinsi Lampung, dimana Kabupaten Lampung Utara yang memiliki panti sosial non pemerintah terbanyak berjumlah 18 LKSA dan memiliki 740 anak terlantar. Sedangkan Kota Bandar Lampung di posisi kedua dengan panti sosial berjumlah 10 LKSA dan memiliki 660 anak terlantar.

Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

GAMBAR 2- 104 Persentase Anak Terlantar, Anak Jalanan, ABH yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Berdasarkan Grafik di atas, terlihat kenaikan yang sangat signifikan dari Tahun 2014 anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya sebesar 20,20%, naik di tahun 2015 sebesar 23,54, naik lagi di Tahun 2016 sebesar 23,86%, di tahun 2017 turun yakni 23,00% dan di tahun 2018 naik kembali menjadi 23,54%.

Lansia Terlantar

Selain anak terlantar, Provinsi Lampung juga menangani lanjut usia (lansia) terlantar hingga dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya. Ketidakberfungsian keluarga tersebut banyak dipengaruhi beberapa faktor, seperti: miskin, kesibukan dan keluarga broken home. Populasi lansia terlantar di Provinsi Lampung tahun 2017 sebanyak 42.115 orang dan baru tertangani sebanyak 5.181 orang. Adapun lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti terlihat pada gambar berikut.

GAMBAR 2- 105 Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2014-2018

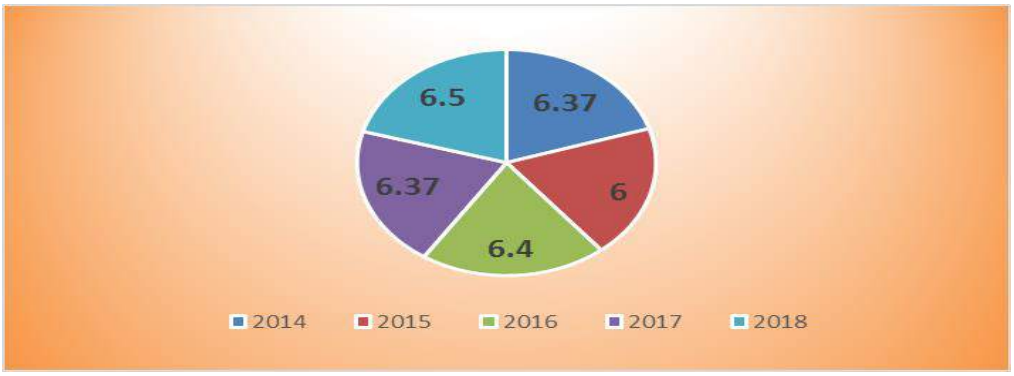

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Pada grafik di atas searah jarum jam menunjukan bahwa lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari Tahun 2014 ke Tahun 2018 mengalami penurunan dan kenaikan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Pelayanan Sosial Lansia Terlantar telah melakukan berbagai upaya di tahun 2018, antara lain: program perawatan dan pendampingan di rumah (home care) sebanyak 1.500 orang, day care sebanyak 100 orang, family support sebanyak 200 orang, Asistensi Lanjut Usia (Aslut) sebanyak 110 orang dan Rehabilitasi Kamar Lansia (Rehabsos) sebanyak 400 orang.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas fisik dan mental menurut UU No.4 Tahun 1997 adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.

GAMBAR 2- 106 Persentase Penyandang Disabilitas Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2014-2018

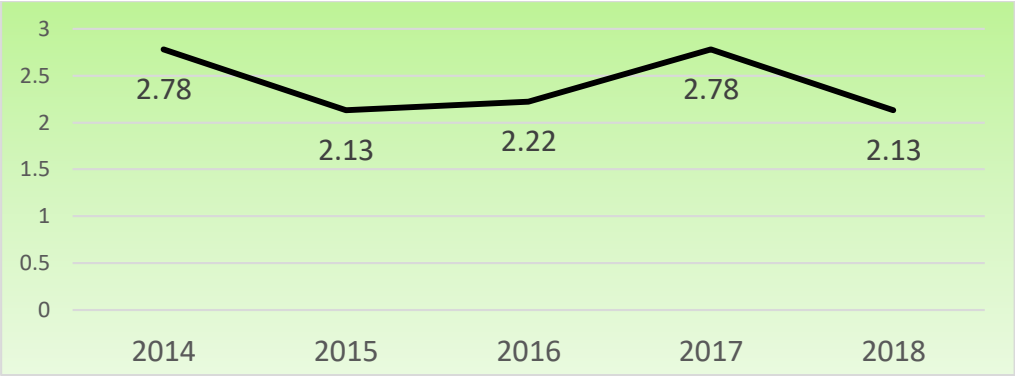

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental tahun 2014 sebesar 2,78 %, tahun 2015 menurun 2,13 %, tahun 2016 sebesar 2,22 % tetapi di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,78 % dan tahun 2018 turun kembali menjadi 2,13 %.

Fakir Miskin

Penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2017 sebanyak 871,77 ribu jiwa dan dalam kurun waktu dari tahun 2014 hingga tahun 2017 telah tertangani sebanyak 6.115 jiwa.

GAMBAR 2- 107 Persentase Keluarga Miskin yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosial Tahun 2014-2017

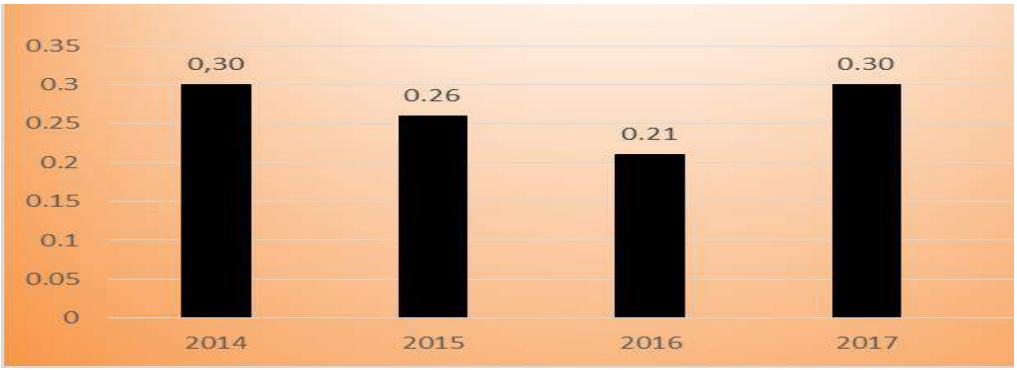

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Persentase keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, terlihat pada Tahun 2017 mengalami

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 0,30%. Peningkatan tersebut karena upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Gerbang Desa Saburai, begitu juga dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Program Keluarga Harapan yang sasarannya memang langsung ke masyarakat miskin.

Berdasarkan data pada Tabel, dapat dilihat bahwa KSM (Keluarga Sangat Miskin) yang menerima bantuan PKH di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di seluruh Kabupaten se Provinsi Lampung. Seperti dilihat contoh Kabupaten Lampung Tengah yang dari tahun 2013 berjumlah 50.631 KSM mengalami peningkatan secara signifikan sampai dengan Tahun 2018 berjumlah 80.665 KSM. Data menunjukkan Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Way Kanan tidak memiliki KSM yang menerima bantuan PKH pada Tahun 2013 dan Tahun 2014.

TABEL 2- 97 Data Jumlah KSM Yang Menerima Bantuan PKH Tahun 2014-2018

NAMA KABUPATEN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018 (tahap 1)
Bandar Lampung	34.014	37.006	63.343	75814	35268
Lampung Tengah	52.924	50.936	66.787	113504	80665
Lampung Selatan	73.504	70.079	82.047	110992	59289
Tulang Bawang Barat	13.410	13.304	14.798	19798	15205
Pringsewu	18.557	21.592	29.680	31275	16756
Tanggamus	33.968	42.561	71.851	75289	33650
Lampung Utara	63.157	70.850	100.638	109022	47948
Metro	8.155	7.812	8.368	10294	4799
Mesuji	3.574	4.412	7.039	13924	7503
Pesawaran	37.731	37.453	42.908	53021	31195
Lampung Barat	25.174	10.720	18.820	26493	14734
Lampung Timur	0	81.454	92.711	128269	73827
Pesisir Barat	0	15.355	17.036	19323	9636
Tulang Bawang	0	16.089	20.235	32548	17392
Way Kanan	0	25.224	31.459	48511	26013

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.6.2. Korban Bencana

Korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

GAMBAR 2- 108 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2018

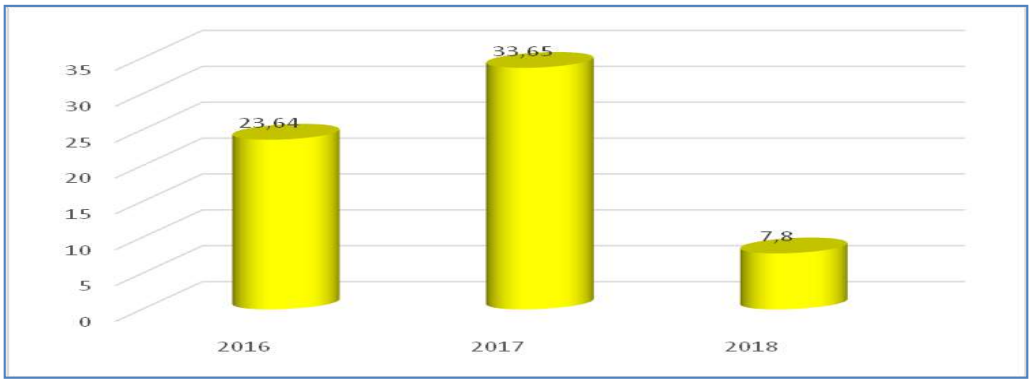

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Pada Grafik di atas menunjukan angka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yaitu di tahun 2016 sebesar 23,4%, tahun 2017 sebesar 33,65%, dan pada tahun 2018 dari Bulan Januari sampai dengan bulan Agustus sebesar 7,8% . Terbanyak korban pada tahun 2017.

2.2.3.6.3. Tuna Sosial, Gelandangan, Pemulung, BWLP, ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA

Masih maraknya tuna sosial, gelandangan, pemulung dan lainnya menjadi persoalan tersendiri yang tentunya memberikan dampak negatif, seperti munculnya ketidakteraturan sosial, yang ditandai dengan ketidaktertiban, ketidaknyamanan, serta mengganggu keindahan kota.

GAMBAR 2- 109 Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, Pemulung, BWLP, ODHA, Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2014-2018

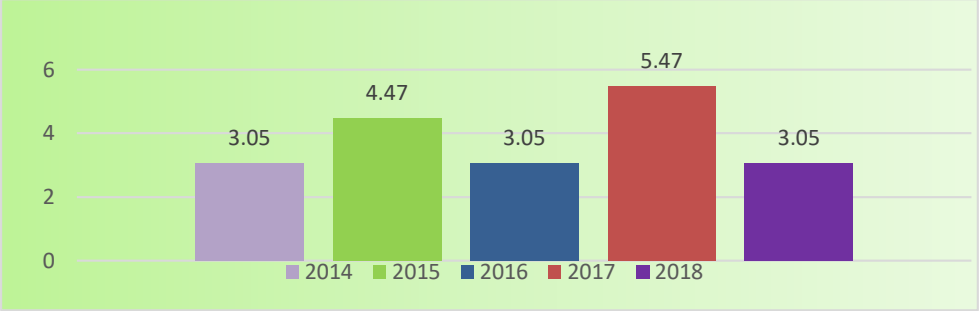

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Persentase tuna sosial, gelandangan, pemulung, BWLP, ODHA, korban penyalahgunaan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya pada Tahun 2017 adalah yang terbanyak sebanyak 5,47%, sedangkan tahun 2018 sampai dengan Bulan Oktober sebanyak 3,05%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2017 Dinas Sosial telah berupaya dengan cara pendekatan dan pembinaan rutin lewat panti sosial. Sehingga mereka semua dapat memnuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.

2.2.3.6.4. Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran

Kemudian Provinsi Lampung juga telah menangani Perdagangan Orang (human traficking) hingga korban tersebut dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya.

GAMBAR 2- 110 Persentase Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran yang dapat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2014-2018

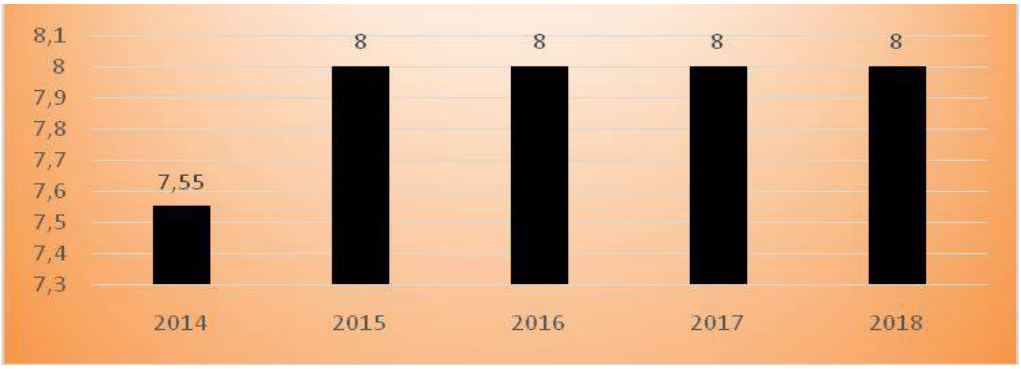

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Pada Grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2014 sebesar 7,55% kemudian naik di tahun 2015 sebesar 8% dan tetap stabil sampai dengan tahun 2018.

2.2.3.6.5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis PSKS dan sebarannya di kabupaten/kota di Provinsi Lampung terinci pada Tabel berikut :

TABEL 2- 98 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018

JENIS PSKS	BANDAR LAMPUNG	METRO	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG BARAT	TANGGAMUS	TULANG BAWANG	WAY KANAN	LAMPUNG UTARA	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	PESISIR BARAT	TUBA BARAT
Pekerja Sosial Profesional	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	13	1	19	6	2	2	5	4	9	1	8	10	14	-	19
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	152	10	40	46	41	34	52	18	26	15	35	10	9	12	8
Lembaga Kesejahteraan Sosial	74	3	7	8	-	1	1	1	4	1	19	-	1	4	6
Karang Taruna	46	22	20	10	10	20	5	10	10	15	10	10	10	20	10
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)	2	1	2	1	1	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1
Keluarga Pionir	23	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	3	-	15	2	2	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	2	-	-	-
Penyuluh Sosial	10	-	5	-	-	5	2	2	10	6	-	5	5	4	-
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	20	5	17	28	24	15	20	15	14	23	9	9	7	11	8
Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial	11	-	-	5	-	10	2	-	10	2	-	24	-	10	5
Jumlah	375	46	125	106	80	137	99	51	84	63	84	73	47	63	57

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PSKS yang sebarannya ada di setiap kabupaten/kota adalah Tagana, Karang Taruna dan TKSK, sedangkan PSKS lainnya masih banyak yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota, contohnya untuk pekerja sosial professional hanya ada di Kota Bandar Lampung dan Metro,

begitu juga dengan wanita pemimpin kesejahteraan sosial hanya ada di Kota Bandar lampung, Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu, serta PSKS lainnya.

GAMBAR 2- 111 Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

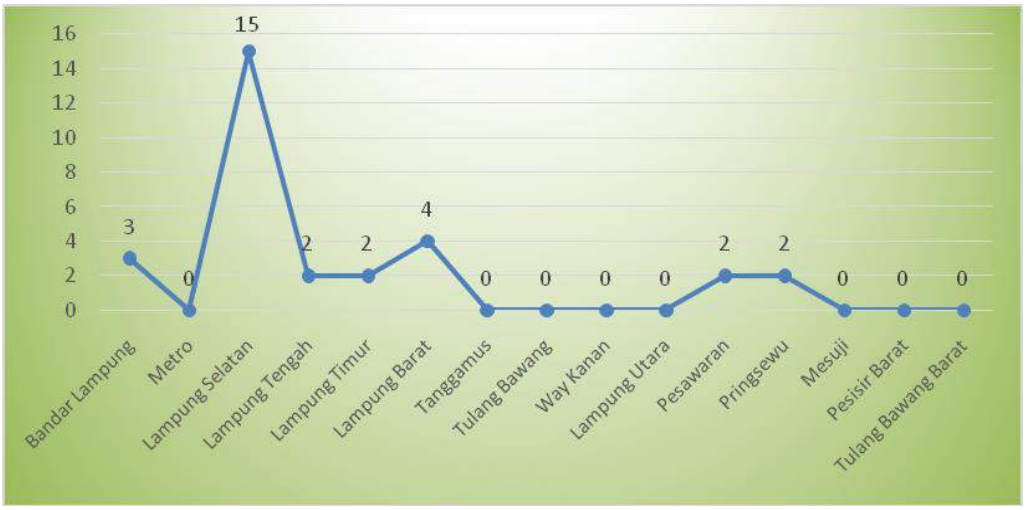

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Provinsi Lampung paling tinggi berada di Kabupaten Lampung Selatan dari seluruh Kabupaten.

GAMBAR 2- 112 *Trend* Persentase PSM, Karang Taruna. WKBSM, TKSK yang Telah Dibina Dan Menyelenggarakan Pelayanan Kesos Tahun 2014-2018

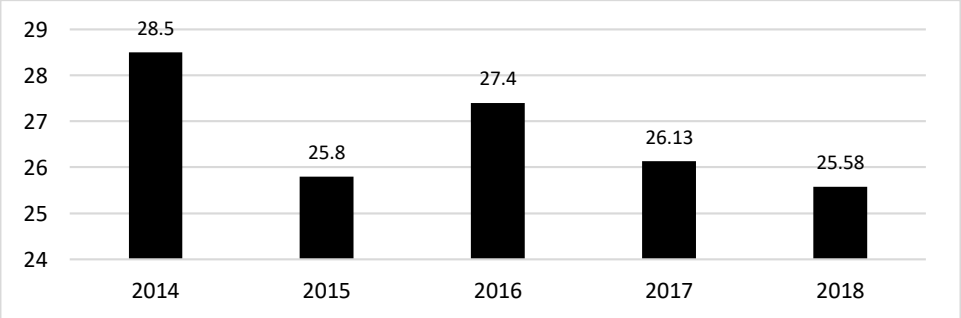

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018

Pada Grafik di atas terlihat bahwa persentase PSM, Karang Taruna, WKBSM, TKSK yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesos mengalami penurunan dari tahun 2016 yakni 27,4%, Tahun 2017 menjadi 26,13%, dan turun kembali di tahun 2018 menjadi 25,58%.

Urusan Wajib Non Layanan Dasar

2.2.3.7. Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja yang tidak pernah sekolah / tidak tamat sekolah di provinsi Lampung, baik tenaga kerja perempuan maupun laki laki di perkotaan maupun pedesaam mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Persentase tenaga kerja yang lulus sekolah dasar, SMP, SMA dan sekolah tinggi di provinsi Lampung juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2018.

TABEL 2- 99 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2017

Tingkat Pendidikan	2016	2017	
	Agustus	Februari	Agustus
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat Sekolah Dasar	**16,91**	**18,65**	**16,67**
Laki-laki	15,82	17,48	15,53
Perempuan	18,81	20,61	18,81
Perkotaan	12,08	11,93	11,76
Perdesaan	18,86	21,32	18,62
Sekolah Dasar	**28,1**	**26,96**	**26,75**
Laki-laki	28,6	28,11	27,01
Perempuan	27,24	25,03	26,25
Perkotaan	20,5	15,39	16,09
Perdesaan	31,17	31,55	30,96
Sekolah Menengah	**47,03**	**44,80**	**48,17**
Laki-laki	49,57	48,19	51,21
Perempuan	42,61	39,13	42,47
Perkotaan	52,99	51,19	53,44
Perdesaan	44,62	42,27	46,09
Sekolah Tinggi	**7,96**	**9,58**	**8,41**

Tingkat Pendidikan	2016	2017	
	Agustus	Februari	Agustus
Laki-laki	6,02	6,22	6,24
Perempuan	11,33	15,22	12,47
Perkotaan	14,43	21,49	18,71
Perdesaan	5,35	4,86	4,33

Sumber : BPS Prrovinsi Lampung, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja yang tidak pernah sekolah / tidak tamat sekolah di provinsi Lampung, baik tenaga kerja perempuan maupun laki laki di perkotaan maupun pedesaam mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Persentase tenaga kerja yang lulus sekolah dasar, SMP, SMA dan sekolah tinggi di provinsi Lampung juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2018.

Setengah Penganggur *(Underemployment)*

Tingkat setengah penganggur merupakan persentase jumlah setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja. Selain itu indikator lain yang bisa dilihat dari setengah penganggur adalah share-nya terhadap total angkatan kerja. Share setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2017 sebesar 10,04 persen yang berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 10 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

TABEL 2- 100 Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Setengah Penganggur di Provinsi Lampung, 2016-2017

Setengah Penganggur	2016	2017	
	Agustus	Februari	Agustus
Laki-laki	200.468	237.607	279.754
Perempuan	81.922	88.744	128.951
Perkotaan	82.270	66.763	62.457
Perdesaan	200.120	259.588	346.248
Total	**282.390**	**326.351**	**408.705**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Melihat tabel diatas tampak bahwa jumlah setengah penganggur di Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai dengan 2017 terus meningkat. Angka setengah pengangguran terbanyak berada dipedesaan sebanyak 346.248 orang, hal ini dikarenakan masih minimnya lahan pekerjaan di pedesaan dan persentase peningkatan pekerja setengah penganggur tersebut terbanyak pada laki-laki.

TABEL 2- 101 Perkembangan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun (Rp)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Lampung	1.581.000	1.763.000	1.908.447,50	2.074.673,27	2.240.646,84
Bandar Lampung	1.649.500	1.870.000	2.054.365,32	2.263.390,87	2.445.141,15
Lampung Selatan	1.595.000	1.800.500	1.973.798,12	2.168.702,48	2.365.835,84
Lampung Tengah	1.588.000	1.770.620	1.916.696,15	2.083.640,38	2.250.956,70
Lampung Utara	1.581.000	1.763.000	1.921.670	2.100.000	2.268.750
Lampung Timur	1.581.000	1.763.100	1.908.555,75	2.074.800	2.241.406
Lampung Barat	1.581.000	1.763.000	1.908.447,50	2.155.326	2.328.399
Way Kanan	1.590.000	1.790.000	1.950.000	2.160.000	2.333.448
Tanggamus	1.581.000	1.763.000	1.908.447,50	2.074.673,27	2.240.646,84
Kota Metro	1.582.000	1.764.000	1.909.530	2.075.850,06	2.242.540,82
Tulang Bawang	1.588.500	1.771.200	1.917.324	2.084.322,98	2.251.694,12
Pesawaran	1.581.000	1.763.000	1.908.447,50	2.074.673,27	2.240.646,84
Mesuji	1.581.000	1.763.000	1.908.447,50	2.074.673,27	2.385.874,00
Tulang Bawang Barat	1.590.000	1.792.100	1.939.948,25	2.108.917,74	2.278.263,84
Pringsewu	1.581.000	1.763.000	1.908.447,50	2.074.673,27	2.240.646,84
Pesisir Barat	1.581.000	1.763.000	1.908.447,50	2.074.673,27	2.240.646,84

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2019

2.2.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-LIP Provinsi Lampung. Jumlah Pelayanan dan Pendampingan Kasus terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016 sebanyak 127 Kasus yang terdiri Pelecehan seksual, KDRT, Pemerkosaan, dan Pencabulan, Penelantaran dan Pembunuhan. Jumlah Pelayanan dan Pendampingan Kasus terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2017 sebanyak 75 kasus yang terdiri dari 49 kasus anak dan 26 kasus perempuan, sedangkan di tahun 2018 menangani 118 kasus. Jumlah Pelayanan dan Pendampingan Kasus terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Gambar berikut.

GAMBAR 2- 113 Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018

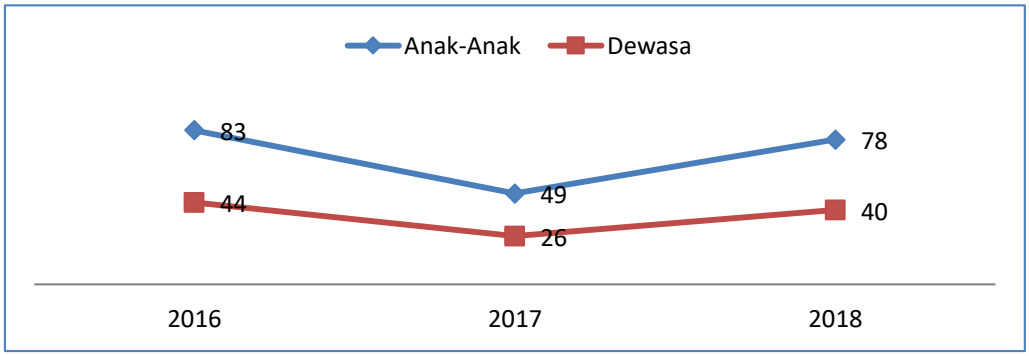

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2018

Selain penanganan tersebut, juga dilakukan penangan medis terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 75 orang di tahun 2017 dan 118 orang di tahun 2018.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2016, yaitu dari 52,17 menjadi

48,43. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

GAMBAR 2- 114 Pertisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

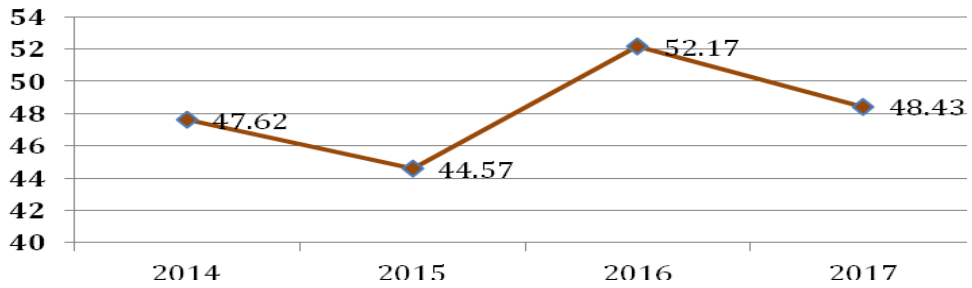

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan data BPS, persentase Kekerasan Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2016 cukup tinggi yaitu mencapai angka 22,32 walaupun angka ini masih berada di bawah angka nasional (34,68). Persentase Kekerasan Perempuan Provinsi Lampung mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kemudian turun lagi tahun 2015 dan 2016.

GAMBAR 2- 115 Persentasi Kekerasan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2013-2016

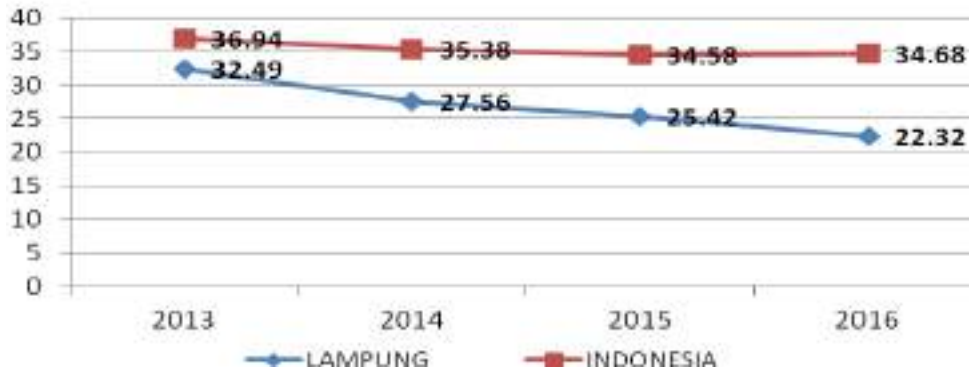

Berdasarkan data BPS, persentase Kekerasan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016 cukup tinggi yaitu mencapai angka 9,46 dan angka ini berada di atas angka nasional (6,68). Persentase Kekerasan Anak mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami kenaikan.

GAMBAR 2- 116 *Trend* Persentase Kekerasan Anak Provinsi Lampung Tahun 2013-2016

Dari data di atas terlihat bahwa Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung masih tinggi, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

GAMBAR 2- 117 Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2015

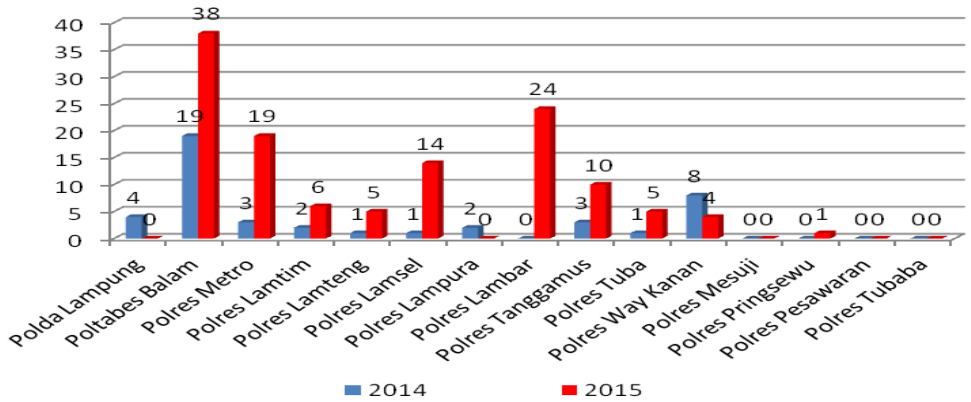

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah Kasus Kekerasan Perempuan terbanyak di laporkan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro. Sedangkan jumlah Kasus Kekerasan Anak terbanyak di laporkan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan.

GAMBAR 2- 118 Distribusi Jumlah Kasus Kekerasan Anak Per Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2015

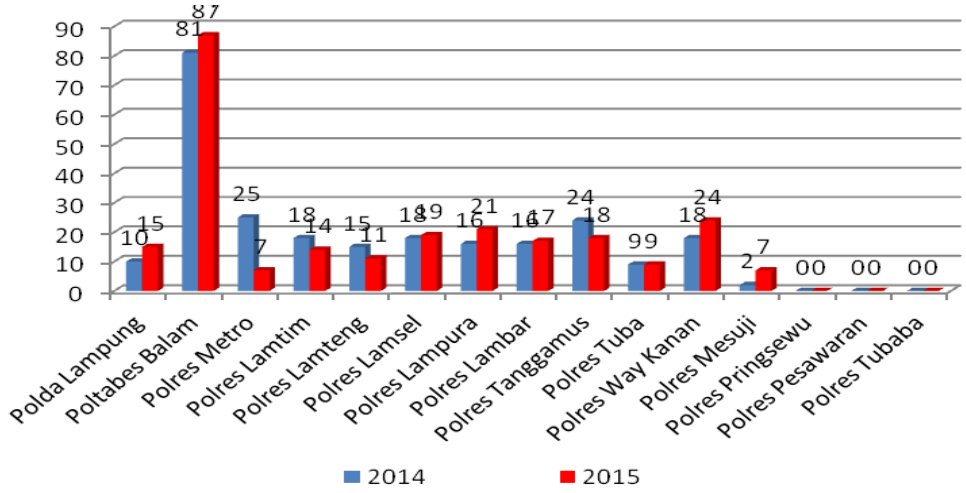

Anggaran Responsive Gender di Pemerintah Provinsi Lampung

Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) di Pemerintah Provinsi Lampung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 berjumlah Rp. 33.326.099.475 sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 26.186.772.200 dan pada tahun 2019 turun menjadi 12.739.663.456. Trend jumlah ARG di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut.

GAMBAR 2- 119 Jumlah Anggaran Responsif Gender Di Pemprov Lampung Tahun 2017-2019

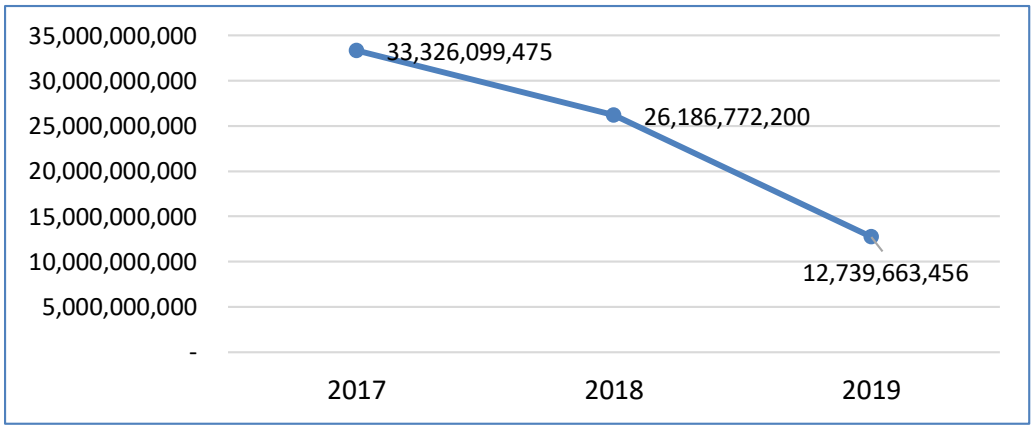

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2018

Jumlah OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2017 berjumlah 15 OPD kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 26 OPD akan tetapi turun menjadi 19 OPD pada tahun 2019. Grafik jumlah OPD yang memiliki ARG di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2- 120 Jumlah OPD yang memiliki ARG Di Pemprov Lampung Tahun 2017-2019

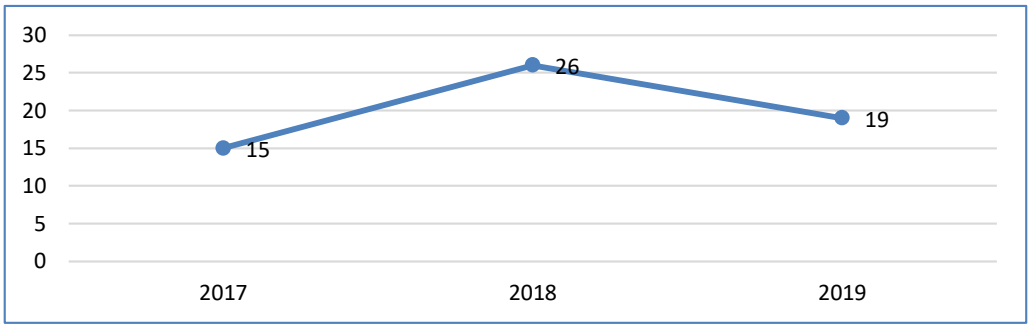

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2018

Kabupaten Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah 1 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan sedangkan pada tahun 2017 tidak ada 1 Kabupaten/Kota pun di Provinsi Lampung yang terpilih menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan, yaitu terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang terpilih yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung.

GAMBAR 2- 121 Jumlah Kab/Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018

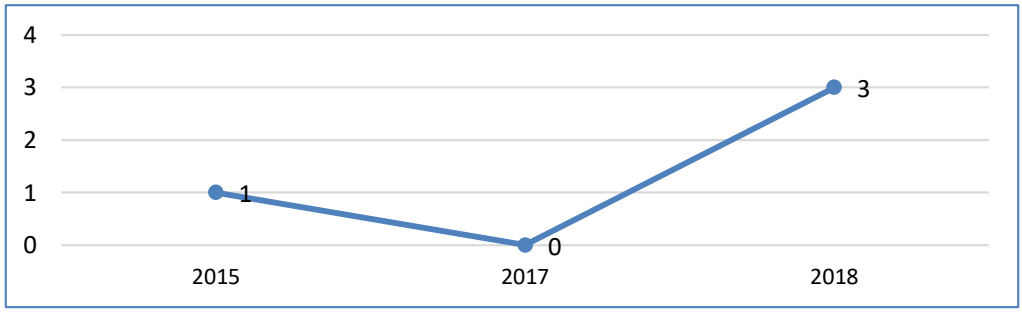

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2018

Pembinaan Ekonomi Kreatif Terhadap Perempuan Miskin Pedesaan di Provinsi Lampung

Jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan pembinan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung Tahun 2015 sebanyak 450 orang, pada tahun 2016 sebanyak 320 orang, tahun 2017 520 orang dan tahun 2018 sebanyak 150 orang. Jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan pembinan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018 sebagai berikut:

GAMBAR 2- 122 Jumlah Perempuan Miskin yang mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018

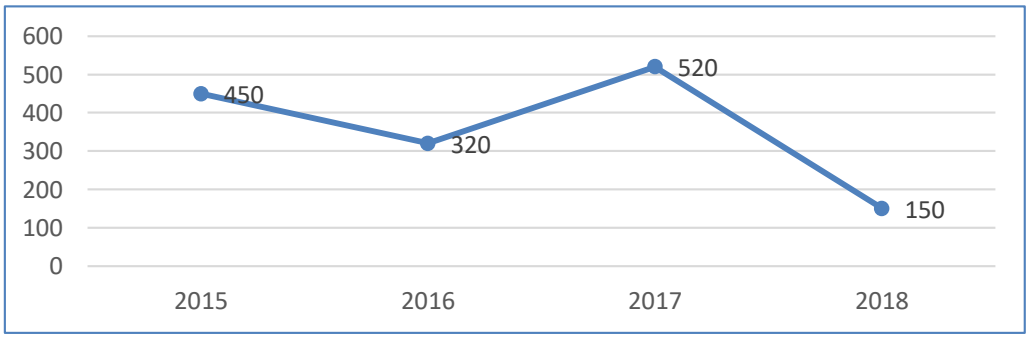

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.9. Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

Tahun 2017 produksi padi Lampung secara nasional berada pada urutan ke 7 Nasional dengan capaian produksi sebesar 4,24 Ton. Lampung memberikan kontribusinya sebesar 5,23% terhadap Nasional. Keberhasilan Provinsi

Lampung mendukung program pemerintah berswasembada beras dengan peningkatan produksi tahun 2017, mendapatkan apresiasi dari Menteri Pertanian.

GAMBAR 2- 123 Persentase Produksi Padi - Jagung – Ubikayu Provinsi Lampung Tahun 2014 -2018

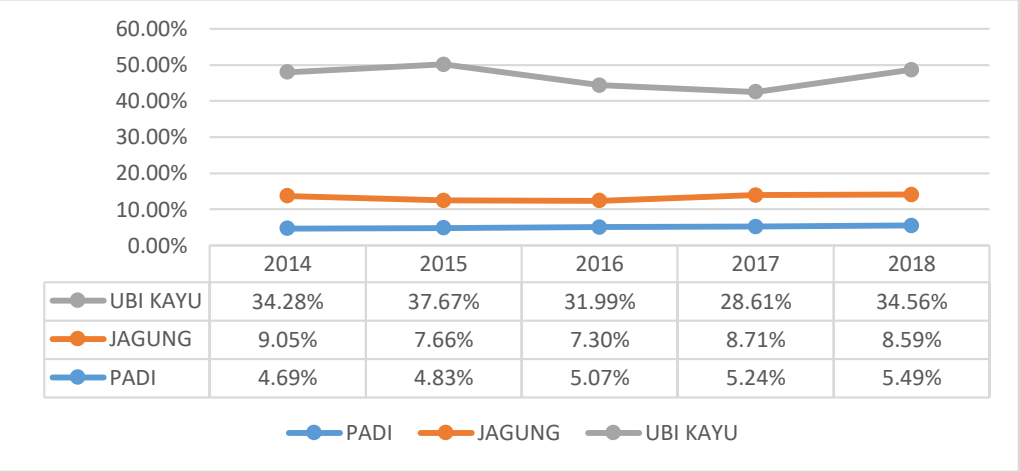

	2014	2015	2016	2017	2018
UBI KAYU	34.28%	37.67%	31.99%	28.61%	34.56%
JAGUNG	9.05%	7.66%	7.30%	8.71%	8.59%
PADI	4.69%	4.83%	5.07%	5.24%	5.49%

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019 diolah

Produksi 2 komoditas utama pangan yakni padi dan jagung selama kurun waktu 2014 -2017 menunjukan trendd yang positif sedangkan produksi ubi kayu mengalami penurunan. Dalam periode tersbut produksi padi Lampung mengalami peningkatan sebesar 27,97%. Sedangkan produksi jagung Lampung mengalami peningkatan sebesar 46,49%. Produksi jagung mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015 sebagai akibat pengaruh iklim dan fluktuasi harga yang menyebabkan terjadinya penurunan luas panen.

Sementara itu, trend negatif produksi ubi kayu Lampung lebih disebabkan fluktuasi harga ubi kayu yang menyebabkan tidak sebandingnya biaya produksi dengan margin pendapatan yang di peroleh petani, Hal ini mendorong sebagian besar petani ubi kayu beralih menanam komoditi lain.

Sejalan dengan trend produksi 3 komoditas utama pangan di maksud, ditunjukan juga dari kinerja luas panen masing-masing komoditas. Kinerja luas panen padi dan jagung selama tahun 2014 hingga 2017 mengindikasikan trendd

yang meningkat dari tahun ke tahun, meskipun untuk komoditas jagung sedikit menurun pada tahun 2015, Sementara kinerja luas panen ubi kayu, sebagaimana tingkat produksinya menunjukan trend yang negatif sejak tahun 2014 hingga 2017.

TABEL 2- 102 Perkembangan Produksi Padi - Jagung – Ubikayu se-Sumatera 2015-2018

NO	PROV	2015			2016			2017			2018		
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu
1	Sumut	4,044,829	1,519,407	1,619,495	4,609,791	1,557,463	1,228,138	5,136,186	1,741,258	980,879	5,423,154	1,757,126	803,403
2	Sumbar	2,550,609	602,549	208,386	2,503,452	711,518	201,201	2,824,509	985,847	209,115	2,754,079	1,052,408	201,833
3	Riau	393,917	30,870	103,599	373,536	32,850	105,992	365,744	30,765	124,797	391,132	25,723	133,738
4	Jambi	541,486	51,712	43,433	752,811	80,267	53,944	782,049	98,680	64,489	855,944	152,158	56,605
5	Sumsel	4,247,922	289,007	217,807	5,074,613	552,199	386,881	4,943,071	892,358	539,009	5,076,831	935,240	382,043
6	Bengkulu	578,654	52,785	80,309	641,881	133,902	70,539	731,169	148,090	64,644	699,531	111,816	73,491
7	Lampung	3,641,895	1,502,800	7,387,084	4,020,420	1,720,196	6,481,382	4,248,977	2,518,895	5,451,312	4,556,378	2,581,224	6,683,758
8	Kep. Babel	27,068	666	35,024	35,388	1,051	61,471	37,123	3,184	70,254	28,310	3,630	59,426
9	Kep. Riau	959	473	9,157	627	109	24,012	639	77	19,473	651	87	19,722
10	Nasional	75,397,841	19,612,435	21,801,415	79,354,767	23,578,413	20,260,675	81,148,594	28,924,015	19,053,748	83,037,150	30,055,623	19,341,233

Sumber: Kementerian Pertanian R.I 2019, diolah

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, perkembangan produksi pertanian Provinsi Lampung berada di urutan ke 3 pada sektor padi, ke 8 pada sektor jagung, dan pertama pada sektor ubi kayu.

GAMBAR 2- 124 Persentase Kinerja Luas Panen Padi, Jagung dan Ubi Kayu Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018 (Ribu Ha)

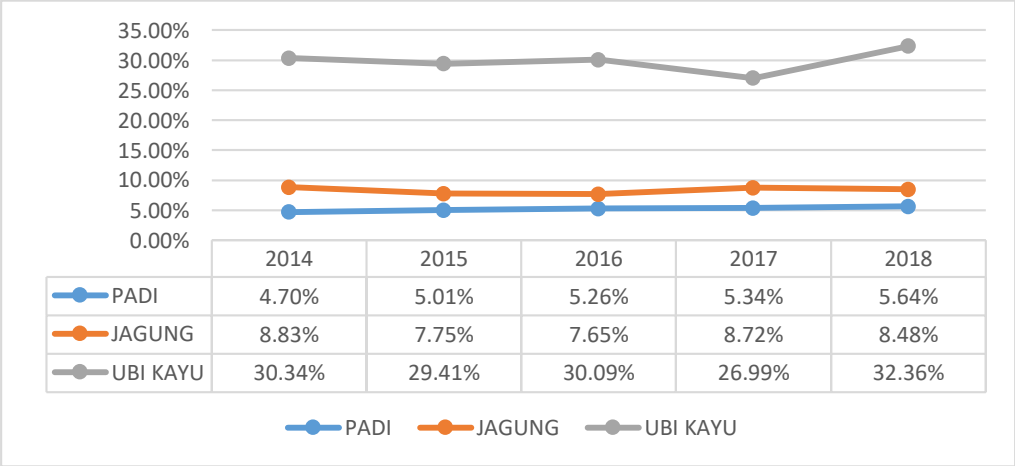

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019

Dari sisi produktivitas selama periode 2014 - 2018, dari ke tiga komoditas utama pangan tersebut hanya komoditi jagung yang menunjukan peningkatkan produktivitas sedangkan padi dan ubi kayu produktivitas nya mengalami penuruan meskipun tidak signifikan sebesar 2,3% untuk padi hanya 1% untuk Ubi kayu.

TABEL 2- 103 Kinerja Luas Padi - Jagung – Ubikayu se-Sumatera 2014-2018

No.	Prov	2015			2016			2017			2018		
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu
1	Aceh	461,060	47,967	2,226	429,486	70,024	1,898	470,351	81,552	1,452	463,485	64,157	992
2	Sumut	781,769	243,770	47,837	885,576	252,729	34,852	988,068	281,423	29,031	1,062,048	292,388	23,976
3	Sumbar	507,545	87,825	5,318	491,876	101,611	4,718	538,277	142,334	4,929	534,017	154,365	4,923
4	Riau	107,546	12,425	3,578	99,430	13,205	3,536	92,684	12,231	3,574	94,829	9,352	3,869
5	Jambi	122,214	8,486	2,018	165,207	13,209	2,116	170,092	15,508	2,687	172,854	20,768	2,324
6	Sumsel	872,737	46,315	8,801	1,014,351	87,316	12,606	999,972	138,232	13,885	1,005,203	136,210	10,552
7	Bengkulu	128,833	10,137	3,573	148,277	22,424	2,776	165,342	25,510	2,708	153,629	19,676	2,859
8	Lampung	707,266	293,521	279,337	796,768	340,200	247,571	839,750	482,607	208,662	902,338	486,313	256,632
9	Kep. Babel	11,848	181	1,423	15,530	239	2,296	16,080	823	2,228	14,645	1,128	2,093
10	Kep. Riau	263	203	708	186	61	699	197	47	594	199	43	635
11	Indonesia	14,116,638	3,787,367	949,916	15,156,166	4,444,369	822,744	15,712,015	5,533,169	772,975	15,994,512	5,734,326	792,952

Sumber: Kementerian Pertanian R.I,2018, diolah

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, kinerja luas pertanian Provinsi Lampung berada pada urutan ke 3 tertinggi pada sektor padi, 5 besar pada jagung, dan tertinggi pada sektor ubi kayu selama 5 tahun terakhir dalam lingkup Sumatera.

TABEL 2- 104 Produktivitas Padi, Jagung dan Ubi Kayu Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)

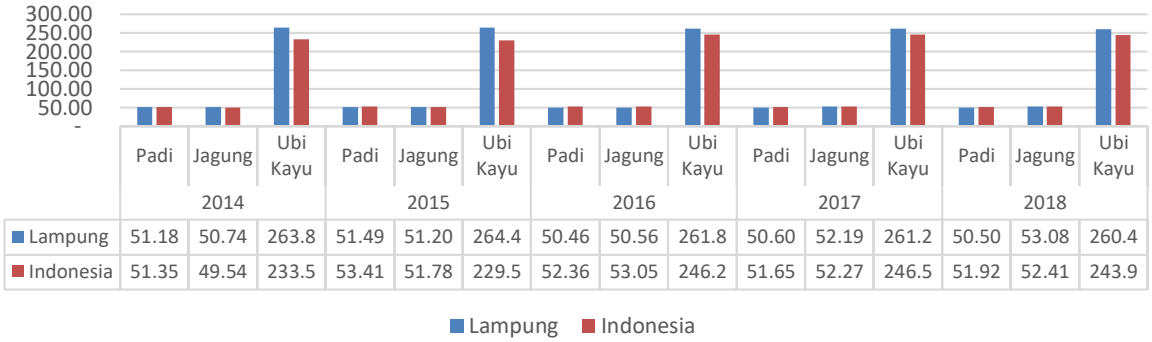

	2014 Padi	2014 Jagung	2014 Ubi Kayu	2015 Padi	2015 Jagung	2015 Ubi Kayu	2016 Padi	2016 Jagung	2016 Ubi Kayu	2017 Padi	2017 Jagung	2017 Ubi Kayu	2018 Padi	2018 Jagung	2018 Ubi Kayu
Lampung	51.18	50.74	263.8	51.49	51.20	264.4	50.46	50.56	261.8	50.60	52.19	261.2	50.50	53.08	260.4
Indonesia	51.35	49.54	233.5	53.41	51.78	229.5	52.36	53.05	246.2	51.65	52.27	246.5	51.92	52.41	243.9

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019 diolah

TABEL 2- 105 Produktivitas Padi - Jagung – Ubikayu se-Sumatera 2014-2018

No.	Provinsi	Produktivitas Padi - Jagung – Ubikayu se-Sumatera 2014-2018														
		2014			2015			2016			2017			2018		
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Padi	Jagung	Ubi Kayu
1	Aceh	48,39	42,72	130,02	50,56	42,76	130,87	51,34	45,22	129,27	53,04	47,51	163,45	54,29	54,20	158,03
2	Sumut	50,62	57,82	328,88	51,74	62,33	338,54	52,05	61,63	352,38	51,98	61,87	337,87	51,06	60,10	335,09
3	Sumbar	50,06	65,02	386,18	50,25	68,61	391,85	50,90	70,02	426,49	52,47	69,26	424,28	51,57	68,18	409,95
4	Riau	36,35	23,76	290,46	36,63	24,85	289,54	37,57	24,88	299,78	39,46	25,15	349,19	41,25	27,51	345,67
5	Jambi	45,53	54,95	156,75	44,31	60,94	215,23	45,57	60,77	254,98	45,98	63,63	240,04	49,52	73,27	243,55
6	Sumsel	45,26	60,11	201,29	48,67	62,40	247,48	50,03	63,24	306,9	49,43	64,56	388,19	50,51	68,66	362,05
7	Bengkulu	40,20	46,51	175,38	44,92	52,07	224,77	43,29	59,71	254,14	44,22	58,05	239	45,53	56,83	257,08
8	Lampung	51,18	50,74	263,87	51,49	51,20	264,45	50,46	50,56	261,80	50,60	52,19	261,25	50,50	53,08	260,44
9	Kep. Babel	23,62	33.69	185,70	22,85	36,80	246,13	22,79	43,92	267,78	23,09	38,67	315,38	19,33	32,17	283,89
10	Kep. Riau	36,44	23,36	124,19	36,46	23,30	129,34	33,80	17,84	343,42	32,45	16,42	327,61	32,73	20,14	310,63
11	Indonesia	51,35	49,54	233,55	53,41	51,78	229,51	52,36	53,05	246,26	51,65	52,27	246,50	51,92	52,41	243,91

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019 diolah

Data menunjukkan produktifitas padi, jagung dan ubikayu di Provinsi Lampung lebih tinggi dari angka produktivitas Indonesia dan menempati urutan ke 5 se-Sumatera. Sedangkan produktivitas tertinggi yakni Provinsi Sumatera Utara, dan produktivitas padi jagung dan ubikayu terendah se-Sumatera yakni Provinsi Aceh.

Tahun 2017 produksi daging sapi Lampung memiliki kontribusi sebesar 2,67 % terhadap produksi daging sapi nasional. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 (2,79%) namun meningkat jika dibandingkan tahun 2016 (2,43%).

GAMBAR 2- 125 Produksi Daging Sapi 2014-2019

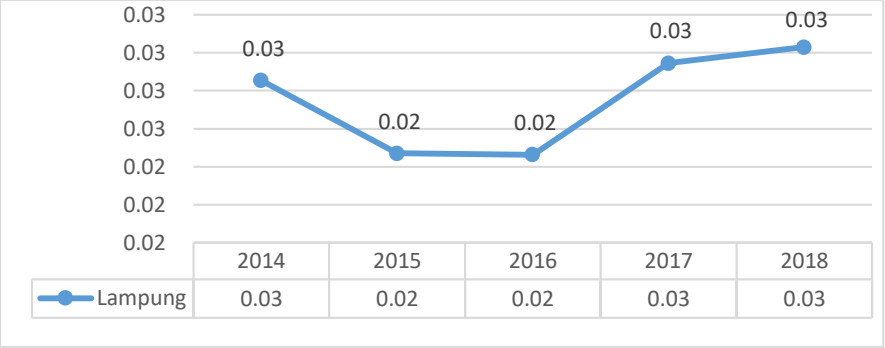

Sumber : Kementerian pertanian R.I, 2019

Terkait ketersediaan produksi daging sapi, pada tahun 2017 produksi daging sapi Lampung memiliki kontribusi sebesar 2,67 % terhadap produksi daging sapi nasional. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang berkontribusi sebesar 2,43%.

TABEL 2- 106 Produksi Daging Sapi se-Sumatera Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Produksi Daging Sapi se-Sumatera 2014-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	8,814	10,048	10,401	8,550	9,137
2	Sumatera Utara	22,656	23,408	25,571	26,298	27,498
3	Sumatera Barat	24,943	26,007	26,441	20,206	20,609
4	Riau	9,298	8,677	9,396	7,700	8,008
5	Jambi	4,329	4,654	4,386	4,085	4,690
6	Sumatera Selatan	15,281	16,689	17,879	12,666	16,306
7	Bengkulu	3,106	3,365	3,057	2,587	2,716
8	Lampung	13,074	12,337	12,609	12,999	13,475
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,427	2,539	2,317	2,601	2,705
10	Kepulauan Riau	2,663	2,661	2,669	1,470	1,585
11	Indonesia	497,670	506,661	518,484	486,320	496,302

Sumber: Kementrian Pertanian Indonesia, 2019 diolah

Berdasarkan hasil dari sebelumnya dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung berada di urutan ke 4 tertinggi kecuali pada tahun 2017 yakni di urutan ke 3 dalam lingkup Sumatera.

TABEL 2- 107 Produksi Daging Ayam Ras Petelur dan Pedaging se-Sumatera Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Produksi Daging Ayam Ras Petelur dan Pedaging se-Sumatera Tahun 2014-2018									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Petelur	Pedaging	Petelur	Pedaging	Petelur	Pedaging	Petelur	Pedaging	Petelur	Pedaging
1	Aceh	169	4,421	274	6,107	331	6,429	355	7,410	380	7,928
2	Sumatera Utara	10,463	38,752	10,724	40,902	11,135	42,815	11,527	46,286	11,944	47,765
3	Sumatera Barat	6,126	19,493	6,158	20,063	6,082	20,438	6,731	28,533	6,791	28,521
4	Riau	502	40,732	1,262	45,308	499	47,575	930	54,095	967	55,684
5	Jambi	2,098	13,793	2,118	13,075	2,192	12,599	2,010	13,013	2,421	15,674
6	Sumatera Selatan	4,537	29,997	4,610	33,318	4,647	36,357	4,857	33,348	4,881	34,355
7	Bengkulu	25	1,706	44	1,579	57	4,735	197	4,376	236	5,688
8	Lampung	2,699	32,237	1,877	33,354	2,256	33,786	2,359	39,099	2,373	39,772
9	Kep. Babel	43	16,714	75	14,838	68	15,657	76	13,034	79	14,356
10	Kep. Riau	285	8,633	352	8,586	491	8,726	438	18,116	457	18,566
11	Indonesia	97,195	1,544,379	102,804	1,628,307	110,282	1,905,497	114,900	2,046,794	116,285	2,144,013

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019

TABEL 2- 108 Produksi Daging Ayam Buras se-Sumatera Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Produksi Daging Ayam Buras se-Sumatera				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	12,452	10,870	11,235	11,739	12,561
2	Sumatera Utara	16,648	16,905	17,831	18,920	19,598
3	Sumatera Barat	6,165	6,293	6,418	4,968	5,093
4	Riau	4,044	5,614	4,179	4,137	4,303
5	Jambi	5,791	7,788	6,596	7,488	9,019
6	Sumatera Selatan	8,961	9,607	9,949	11,367	11,918
7	Bengkulu	398	394	382	3,823	4,856
8	Lampung	11,114	11,972	11,260	11,438	11,666
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,832	1,295	2,040	1,186	1,305
10	Kepulauan Riau	540	1,098	1,198	1,444	1,514
11	Indonesia	297,653	299,773	284,988	300,129	313,807

Sumber: Kementerian Pertanian R.I, 2019

2.2.3.10. Pertanahan

Capaian redistribusi tanah di Provinsi Lampung pada tahun 2016-2017 mencapai 2763 bidang (2016) dan kemudian realisasinya menurun menjadi 1000 bidang di tahun 2017. Penurunan capaian ini seiring dengan menurun drastisnya jumlah tanah yang diredistribusi secara nasional dari 109.919 bidang pada 2016, menjadi hanya 23.142 bidang di tahun 2017.

GAMBAR 2- 126 Retribusi Tanah Provinsi Lampung, 2015-2017

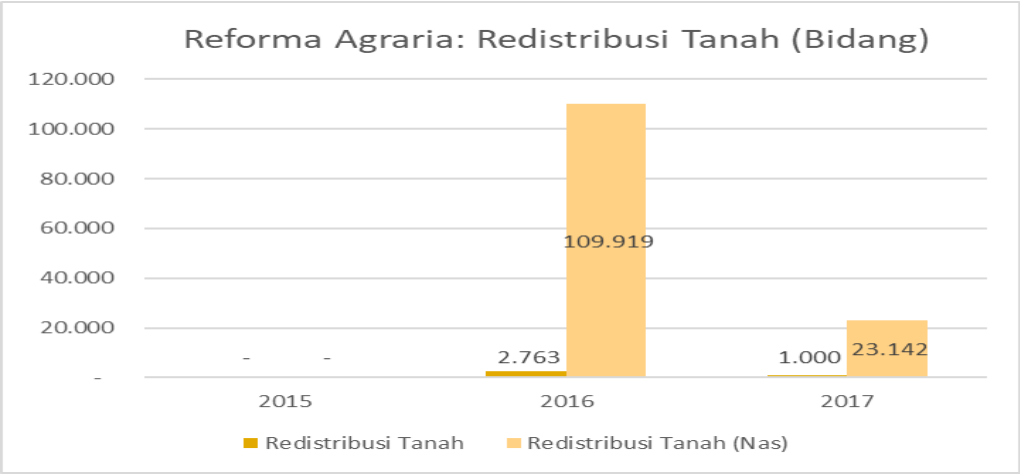

Peningkatan kepemilikan sertifikat hak atas tanah dimulai sejak tahun 2016. Peningkatan secara nasional cenderung signifikan, sementara di propinsi lampung peningkatan pada periode 2016-2017 tidak terlalu signifikan, yaitu sekitat 60.089 bidang tanah pada 2016 menjadi 201.756 bidang di tahun 2017.

GAMBAR 2- 127 Sertifikat Atas Tanah, 2016 – 2017

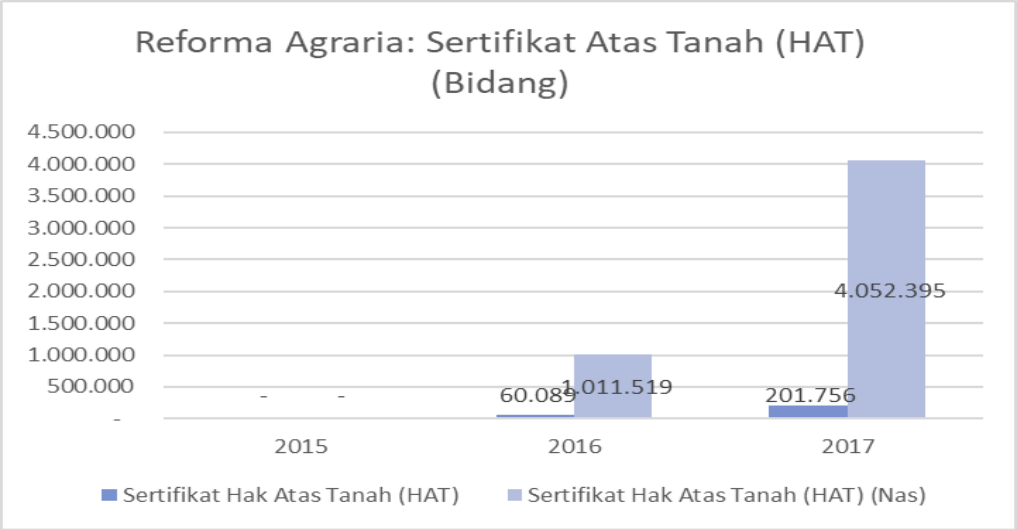

2.2.3.11. Lingkungan Hidup

Persampahan

Provinsi Lampung sejak tahun 2007 telah melakukan kegiatan terkait pendataan potensi timbulan sampah dan telah merencanakan tempat pemrosesan akhir sampah. Data-data tersebut tersedia di tabel berikut ini:

TABEL 2- 109 Data Akses Pelayanan Persampahan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			KEKURANGAN MENCAPAI TARGET 85%
		JUMLAH PENDUDUK	JIWA TERLAYANI	Akses Pelayanan Persampahan	JUMLAH PENDUDUK	JIWA TERLAYANI	Akses Pelayanan Persampahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Kota Bandar Lampung	998,775	608,548	60.93%	1,033,803	620,548	60.03%	24.97%
2	Kota Metro	160,87	90,64	56.34%	165,193	95,712	57.94%	27.06%
3	Kab. Lampung Timur	1,018,986	749,276	73.53%	1,036,193	754,296	72.79%	12.21%
4	Kab. Lampung Barat	295,86	120,756	40.82%	300,703	124,8	41.50%	43.50%
5	Kab. Lampung Utara	609,486	392,316	64.37%	614,701	399,484	64.99%	20.01%
6	Kab. Lampung Selatan	983,375	503,324	51.18%	1,002,285	513,684	51.25%	33.75%
7	Kab. Lampung Tengah	1,251,115	503,912	40.28%	1,271,566	512,048	40.27%	44.73%
8	Kab. Pesawaran	431,335	143,744	33.33%	440,192	148,744	33.79%	51.21%
9	Kab. Pringsewu	390,721	339,344	86.85%	397,219	346,392	87.20%	-2.20%
10	kab. Tanggamus	580,733	154,996	26.69%	592,603	160,12	27.02%	57.98%

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			KEKURANGAN MENCAPAI TARGET 85%
		JUMLAH PENDUDUK	JIWA TERLAYANI	Akses Pelayanan Persampahan	JUMLAH PENDUDUK	JIWA TERLAYANI	Akses Pelayanan Persampahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11	Kab. Tulang Bawang	435,399	222,904	51.20%	445,797	229,912	51.57%	33.43%
12	Kab. Tulang Bawang Barat	267,121	150,636	56.39%	271,206	154,7	57.04%	27.96%
13	Kab. Mesuji	197,091	138,428	70.24%	199,168	141,428	71.01%	13.99%
14	Kab. Way Kanan	437,806	97,38	22.24%	446,113	100,38	22.50%	62.50%
15	Kab. Pesisir Barat	151,389	121,756	80.43%	153,743	123,764	80.50%	4.50%
JUMLAH		**8,210,063**	**4,337,960**	**54.32%**	**8,370,485**	**4,426,012**	**54.63%**	**30.37%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

TABEL 2- 110 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

TAHUN	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS TUUPAN LAHAN		INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
			IKTL	IKTL*	IKLH	IKLH*
2011	62,96	87,23	30,19	-	57,13	-
2012	53,29	78,44	30,96	-	51,90	-
2013	62,00	79,19	30,92	-	54,72	-
2014	60,86	85,98	30,92	-	56,42	-
2015	53,81	77,5	30,92	-	51,69	-
2016	44,55	86,67	32,5	57,37	52,35	62,3
2017	52,40	78,89	31,58	54,6	52,02	61,19
2018	60,71	85,39	31,89	55,52	56,62	66,07

**Memperhitungkan Perkebunan dan Pertanian Lahan Kering*

Indeks Kualitas Air (IKA)

Dari tabel terlihat bahwa IKLH Provinsi Lampung tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu dari 52,02 meningkat menjadi 56,62. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 52,4 menjadi 60,71. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di 112 titik sample yang di pantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 7 (tujuh) parameter kualitas air yang di analisa parameter fecal coli dan Total Coliform sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK. Begitu juga dengan parameter BOD dan COD yang memiliki indek pencemar (IP) lebih dari 1 hal ini menunjukkan kualitas air sudah mengalami penurunan, dan penurunan tersebut dapat disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri.

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Untuk kualitas udara mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena perbaikan kualitas data yang dihasilkan dan peningkatan kualitas udara dan tambahan data passive sampler untuk 2 (dua) kabupaten yaitu Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 31,58 menjadi 31,89. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kerusakan tutupan hutan walaupun tidak terlalu besar kenaikan indeksnya. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan penanaman yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Provinsi Lampung sudah menerapkan penilaian PROPER untuk 86 perusahaan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Ada 4 perusahaan yang

mendapatkan predikat PROPER HIJAU, 77 mendapatkan p[redikat PROPER BIRU, serta 5 perusahaan mendapatkan predikat PROPER MERAH.

Perusahaan yang dinilai bergerak di sector Agro industry (Agro), manufaktur prasarana dan jasa (MPJ), serta pertambangan energi dan migas (PEM). Penilaian tersebut sudah memperhitungkan komponen limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan. Saat ini program PROPER terus dikembangkan untuk perusahaan lain yang belum tergabung, mengingat belum semua perusahaan memiliki peralatan pengelolaan limbah seperti yang dipersyaratkan.

TABEL 2- 111 Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kinerja Perusahaan di Provinsi Lampung Peserta Proper KLHK Tahun 2014-2018

No	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INDUSTRI	SEKTOR	LOKASI (Kab/Kota)	Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER 2014-2018			
					2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017- 2018
1	PT. Sweet Indo Lampung (SIL)	Gula	Agro	Tulang Bawang	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
2	PT. Pertamina (Persero) – Terminal BBM Panjang	Depo BBM	PEM	Bandar Lampung	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
3	PT. Pertamina Geothermal Energy – Area Ulubleu	Energi PLTP	PEM	Tanggamus	Prov	Prov	KLHK	KLHK
4	PT. Bukit Asam (PTBA) – Unit Pelabuhan Tarahan	Stockpile Batubara	MPJ	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
5	PT. Sumber Indah Perkasa - Mill Sungai Buaya	CPO	Agro	Mesuji	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
6	PTPN VII Distrik Bunga Mayang (BUMA)	Gula	Agro	Lampung Utara	Prov	KLHK	KLHK	Prov
7	PT. Indo Lampung Perkasa (ILP)	Gula	Agro	Tulang Bawang	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
8	PT. Gula Putih Mataram (GPM)	Gula	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
9	PT. Gunung Madu Plantations (GMP)	Gula	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
10	PTPN VII Unit Usaha Kedaton (KEDA)	Karet	Agro	Lampung Selatan	Prov	KLHK	KLHK	Prov
11	PTPN VII Unit Usaha Way Berulu (WABE)	Karet	Agro	Pesawaran	Prov	KLHK	KLHK	Prov
12	PTPN VII Unit Usaha Bekri (BEKI)	CPO	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
13	PTPN VII Unit Usaha Pematang Kiwah (PEWA)	Karet	Agro	Lampung Selatan	Prov	KLHK	KLHK	Prov
14	PT. UJA-Terbanggi	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
15	PT. Tunas Baru Lampung (TBL) – PKS I Kekah	CPO	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
16	PT. Great Giant Pineapple (GGP)	Nanas	Agro	Lampung Tengah	KLHK	KLHK	KLHK	KLHK
17	PT. Budi Starch & Sweetener - Labuhanratu	Tapioka	Agro	Lampung Timur	Prov	KLHK	KLHK	Prov
18	PT. PLN (Persero) - UPK Tarahan	Energi PLTU	PEM	Lampung Selatan	Prov	KLHK	Prov	KLHK
19	PTPN VII Unit Usaha Tulungbuyut (TUBU)	Karet	Agro	Way Kanan	Prov	KLHK	KLHK	Prov
20	PT. Budi Starch & Sweetener (BSSw) – Ketapang	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Prov	KLHK	KLHK	Prov
21	PT. Florindo Makmur (FM) - Bumi Nabung	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
22	PT. Sari Segar Husada (SSH)	Tepung Kelapa	Agro	Lampung Selatan	KLHK	Prov	KLHK	Prov
23	PT. Nestle Indonesia – Panjang Factory	Kopi Instan	Agro	Bandar Lampung	KLHK	Prov	KLHK	KLHK
24	PT. Budi Starch & Sweetener – Giham	Tapioka	Agro	Way Kanan	KLHK	Prov	KLHK	Prov

No	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INDUSTRI	SEKTOR	LOKASI (Kab/Kota)	Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER 2014-2018			
					2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017- 2018
25	PT. Santosa Agrindo (SANTORI)	Ternak Sapi	Agro	Lampung Tengah	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
26	PT. Great Giant Livestock (GGL)	Ternak Sapi	Agro	Lampung Tengah	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
27	PT. Sorini Agro Asia Corp. – Way Bungur	Tapioka	Agro	Lampung Timur	Prov	Prov	KLHK	KLHK
28	PT. Sinar Pematang Mulia (SPM) I	Tapioka	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
29	PT. Sinar Pematang Mulia (SPM) II	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
30	PT. Fermentech Indonesia (ex PT. Kirin Miwon Food)	Nucleotide Seasoning	MPJ	Lampung Timur	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
31	PT. Semen Baturaja	Semen	MPJ	Bandar Lampung	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
32	PT. Coca Cola Amatil Lampung	Soft Drink	MPJ	Lampung Selatan	KLHK	KLHK	KLHK	KLHK
33	PT. Keong Nusantara Abadi (KNA)	Natadecoco	Agro	Lampung Selatan	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
34	PT. Huma Indah Mekar (HIM)	Karet	Agro	Tuba Barat	Prov	Prov	KLHK	KLHK
35	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Mi Instan	MPJ	Lampung Selatan	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
36	PT. Centralpertiwi Bahari (CPB) – Tanjungbintang	Pakan Udang	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
37	PT. Japfa Comfeed	Pakan Ternak	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
38	PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) – Ketibung	PKO	Agro	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
39	PT. Garuda Bumi Perkasa	CPO	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
40	PT. Tunas Baru Lampung (TBL) – PKS II Mesuji	CPO	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
41	PT. Sumber Indah Perkasa - Mill Sungai Merah	CPO	Agro	Tulang Bawang	Prov	Prov	KLHK	KLHK
42	PT. Budi Starch & Sweetener - Gunung Agung	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
43	PT. Budi Starch & Sweetener - Penumangan	Tapioka	Agro	Tuba Barat	Prov	Prov	KLHK	KLHK
44	PT. Florindo Makmur (FM) – Neglasari	Tapioka	Agro	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
45	PT. Teguh Wibawa BP (TWBP) – Gunungbatin	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
46	PT. Phillips Seafood Indonesia	Pengolahan Ikan	Agro	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
47	PT. AKR Corporindo Tbk.	Depo BBM	PEM	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
48	PT. Agro Bumi Mas (ABM) – PKS III	CPO	Agro	Lampung Utara	Prov	Prov	KLHK	KLHK
49	PT. Tunas Baru Lampung (TBL) – Way Lunik	Minyak Goreng	MPJ	Bandar Lampung	Prov	KLHK	Prov	KLHK
50	PT. Aman Jaya Perdana	PKO	Agro	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
51	PT. Budi Starch & Sweetener – Buyut Ilir	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
52	PT. Budi Starch & Sweetener – Gunungbatin	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
53	PT. Budi Starch & Sweetener – Agung Dalam	Tapioka	Agro	Tulang Bawang	Prov	Prov	KLHK	KLHK

No	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INDUSTRI	SEKTOR	LOKASI (Kab/Kota)	Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER 2014-2018			
					2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017- 2018
54	PT. Florindo Makmur (FM) – Tulungbuyut	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Prov	Prov	KLHK	KLHK
55	PT. Hamparan Bumi Mas Abadi	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
56	PT. Sugar Labinta	Gula Rafinasi	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	Prov
57	PT. Sumber Graha Sejahtera cabang Way Kanan	Kayu Lapis	Agro	Way Kanan	Prov	Prov	Prov	KLHK
58	PT. Silva Inhutani Lampung – Karet Remah	Karet	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
59	PT. So Good Food	Olahan Ayam	Agro	Pesawaran	Prov	Prov	KLHK	KLHK
60	PT. Teguh Wibawa BP (TWBP) – Kalicinta	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Prov	Prov	KLHK	KLHK
61	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. – Unit VI	Tapioka	Agro	Tuba Barat	Prov	Prov	KLHK	KLHK
62	PT. Muara Jaya	Tapioka	Agro	Lampung Timur	Prov	KLHK	Prov	Prov
63	PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI)	Gula	Agro	Way Kanan	Prov	Prov	Prov	Prov
64	PT. Konverta Mitra Abadi	Kemasan Kardus	MPJ	Lampung Selatan	KLHK	KLHK	Prov	Prov
65	PT. Pertamina – Depot LPG Panjang	Migas Distribusi	PEM	Bandar Lampung	Belum	Prov	Prov	KLHK
66	PT. Suri Tani Pemuka	Pakan ikan	Agro	Lampung Selatan	Belum	Prov	Prov	KLHK
67	PT. Japfa Comfeed Tbk - Poultry Breeding Division	Penetasan Ayam	Agro	Lampung Tengah	Belum	Prov	Prov	KLHK
68	PT. Florindo Makmur – Setiabumi	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Belum	Prov	Prov	Prov
69	PT. PLN Sektor Dalkit BDL - Unit PLTP Ulubelu	Energi PLTP	PEM	Tanggamus	Belum	Prov	Prov	KLHK
70	PT. Budi Lampung Sejahtera	Karet	Agro	Way Kanan	Belum	Prov	Prov	Prov
71	PT. Triteguh Manunggal Sejati	Makanan Minuman	MPJ	Bandar Lampung	Belum	Prov	Prov	KLHK
72	PT. Luhur Prakarsa Maju Dinamika	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Belum	Prov	Prov	Prov
73	PT. Natura Perisa Aroma (d/h PT.Neka Boga Perisa)	Pengolahan Rempah	Agro	Lampung Selatan	Belum	Prov	Prov	Prov
74	PT. Charoen Pokphand Ind. - Feedmill Lampung	Pakan ternak	Agro	Lampung Selatan	Belum	Prov	Prov	Prov
75	PT. Prabutirta Jaya Lestari (Tripanca)	AMDK	Agro	Bandar Lampung	Belum	Prov	KLHK	Prov
76	PT. Tirta Investama – pabrik Tanggamus	AMDK	Agro	Tanggamus	Belum	Belum	Prov	Prov
77	PT. CJ Cheiljedang Feed Lampung	Pakan ternak/ikan	Agro	Lampung Selatan	Belum	Belum	Prov	Prov
78	PT. Prima Alumga	Perkebunan	Agro	Mesuji	Belum	Belum	KLHK	KLHK
79	PT. Bangun Tata Lampung Asri	Perkebunan	Agro	Mesuji	Belum	Belum	KLHK	KLHK
80	PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) – Fish	Pakan ikan	MPJ	Lampung Selatan	Belum	Belum	Belum	Prov

No	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INDUSTRI	SEKTOR	LOKASI (Kab/Kota)	Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER 2014-2018			
					2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017- 2018
81	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Sebalang	Energi PLTU	PEM	Lampung Selatan	Belum	Belum	Belum	Prov
82	PT. Teguh Wibawa Bakti Persada (TWBP) Unit II	Tapioka	Agro	Tulang Bawang	KLHK	Prov	KLHK	KLHK
83	PT. Tanso Putra Asia	Karbon Aktif	MPJ	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
84	PT. Domus Jaya	Minyak Goreng	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	Prov	KLHK
85	PT. Palm Lampung Persada (PLP)	CPO	Agro	Wak Kanan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
86	CV. Sinar Laut	Minyak Goreng	Agro	Bandar Lampung	Belum	Prov	Prov	KLHK
				Belum dinilai	18	6	2	0
				Jumlah	68	80	84	86
				Hijau	4	5	4	4
				Biru	62	68	76	77
				Merah	2	7	4	5
				% ketaatan	97.06%	91.25%	95.24%	94.19%

Ket.
Belum = belum mengikuti proper saat tsb
KLHK = Penilaian langsung oleh KLHK
Prov = Penilaian langsung oleh Prov melalui tugas Dekonsentrasi
Peringkat Kinerja Proper dari terbaik hingga terburuk yaitu :
EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH dan HITAM
Ketaatan = Jml (Emas+Hijau+Biru) / Total Peserta

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

TABEL 2- 112 Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kinerja Perusahaan di Provinsi Lampung Peserta Proper KLHK Tahun 2014-2018

No	JENIS INDUSTRI	SEKTOR	LOKASI (Kab/Kota)	Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER 2014-2018			
				2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
1	Gula	Agro	Tulang Bawang	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
2	Depo BBM	PEM	Bandar Lampung	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
3	Energi PLTP	PEM	Tanggamus	Prov	Prov	KLHK	KLHK
4	Stockpile Batubara	MPJ	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
5	CPO	Agro	Mesuji	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
6	Gula	Agro	Lampung Utara	Prov	KLHK	KLHK	Prov
7	Gula	Agro	Tulang Bawang	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
8	Gula	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	KLHK
9	Gula	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
10	Karet	Agro	Lampung Selatan	Prov	KLHK	KLHK	Prov
11	Karet	Agro	Pesawaran	Prov	KLHK	KLHK	Prov
12	CPO	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
13	Karet	Agro	Lampung Selatan	Prov	KLHK	KLHK	Prov
14	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
15	CPO	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
16	Nanas	Agro	Lampung Tengah	KLHK	KLHK	KLHK	KLHK
17	Tapioka	Agro	Lampung Timur	Prov	KLHK	KLHK	Prov
18	Energi PLTU	PEM	Lampung Selatan	Prov	KLHK	Prov	KLHK
19	Karet	Agro	Way Kanan	Prov	KLHK	KLHK	Prov
20	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Prov	KLHK	KLHK	Prov
21	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	KLHK	KLHK	Prov
22	Tepung Kelapa	Agro	Lampung Selatan	KLHK	Prov	KLHK	Prov
23	Kopi Instan	Agro	Bandar Lampung	KLHK	Prov	KLHK	KLHK
24	Tapioka	Agro	Way Kanan	KLHK	Prov	KLHK	Prov
25	Ternak Sapi	Agro	Lampung Tengah	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
26	Ternak Sapi	Agro	Lampung Tengah	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
27	Tapioka	Agro	Lampung Timur	Prov	Prov	KLHK	KLHK
28	Tapioka	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
29	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
30	Nucleotide Seasoning	MPJ	Lampung Timur	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
31	Semen	MPJ	Bandar Lampung	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
32	Soft Drink	MPJ	Lampung Selatan	KLHK	KLHK	KLHK	KLHK
33	Natadecoco	Agro	Lampung Selatan	KLHK	KLHK	KLHK	Prov
34	Karet	Agro	Tuba Barat	Prov	Prov	KLHK	KLHK
35	Mi Instan	MPJ	Lampung Selatan	Prov	KLHK	KLHK	KLHK

No	JENIS INDUSTRI	SEKTOR	LOKASI (Kab/Kota)	Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER 2014-2018			
				2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
36	Pakan Udang	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
37	Pakan Ternak	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
38	PKO	Agro	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
39	CPO	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
40	CPO	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
41	CPO	Agro	Tulang Bawang	Prov	Prov	KLHK	KLHK
42	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
43	Tapioka	Agro	Tuba Barat	Prov	Prov	KLHK	KLHK
44	Tapioka	Agro	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
45	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
46	Pengolahan Ikan	Agro	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
47	Depo BBM	PEM	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
48	CPO	Agro	Lampung Utara	Prov	Prov	KLHK	KLHK
49	Minyak Goreng	MPJ	Bandar Lampung	Prov	KLHK	Prov	KLHK
50	PKO	Agro	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
51	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
52	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
53	Tapioka	Agro	Tulang Bawang	Prov	Prov	KLHK	KLHK
54	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Prov	Prov	KLHK	KLHK
55	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Prov	Prov	KLHK	KLHK
56	Gula Rafinasi	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	KLHK	Prov
57	Kayu Lapis	Agro	Way Kanan	Prov	Prov	Prov	KLHK
58	Karet	Agro	Mesuji	Prov	Prov	KLHK	KLHK
59	Olahan Ayam	Agro	Pesawaran	Prov	Prov	KLHK	KLHK
60	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Prov	Prov	KLHK	KLHK
61	Tapioka	Agro	Tuba Barat	Prov	Prov	KLHK	KLHK
62	Tapioka	Agro	Lampung Timur	Prov	KLHK	Prov	Prov
63	Gula	Agro	Way Kanan	Prov	Prov	Prov	Prov
64	Kemasan Kardus	MPJ	Lampung Selatan	KLHK	KLHK	Prov	Prov
65	Migas Distribusi	PEM	Bandar Lampung	Belum	Prov	Prov	KLHK
66	Pakan ikan	Agro	Lampung Selatan	Belum	Prov	Prov	KLHK
67	Penetasan Ayam	Agro	Lampung Tengah	Belum	Prov	Prov	KLHK
68	Tapioka	Agro	Lampung Tengah	Belum	Prov	Prov	Prov
69	Energi PLTP	PEM	Tanggamus	Belum	Prov	Prov	KLHK
70	Karet	Agro	Way Kanan	Belum	Prov	Prov	Prov
71	Makanan Minuman	MPJ	Bandar Lampung	Belum	Prov	Prov	KLHK

No	JENIS INDUSTRI	SEKTOR	LOKASI (Kab/Kota)	Kinerja Ketaatan Industri Peserta PROPER 2014-2018			
				2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
72	Tapioka	Agro	Lampung Utara	Belum	Prov	Prov	Prov
73	Pengolahan Rempah	Agro	Lampung Selatan	Belum	Prov	Prov	Prov
74	Pakan ternak	Agro	Lampung Selatan	Belum	Prov	Prov	Prov
75	AMDK	Agro	Bandar Lampung	Belum	Prov	KLHK	Prov
76	AMDK	Agro	Tanggamus	Belum	Belum	Prov	Prov
77	Pakan ternak/ikan	Agro	Lampung Selatan	Belum	Belum	Prov	Prov
78	Perkebunan	Agro	Mesuji	Belum	Belum	KLHK	KLHK
79	Perkebunan	Agro	Mesuji	Belum	Belum	KLHK	KLHK
80	Pakan ikan	MPJ	Lampung Selatan	Belum	Belum	Belum	Prov
81	Energi PLTU	PEM	Lampung Selatan	Belum	Belum	Belum	Prov
82	Tapioka	Agro	Tulang Bawang	KLHK	Prov	KLHK	KLHK
83	Karbon Aktif	MPJ	Bandar Lampung	Prov	Prov	KLHK	KLHK
84	Minyak Goreng	MPJ	Lampung Selatan	Prov	Prov	Prov	KLHK
85	CPO	Agro	Wak Kanan	Prov	Prov	KLHK	KLHK
86	Minyak Goreng	Agro	Bandar Lampung	Belum	Prov	Prov	KLHK
			Belum dinilai	18	6	2	0
			Jumlah	68	80	84	86
			Hijau	4	5	4	4
			Biru	62	68	76	77
			Merah	2	7	4	5
			% ketaatan	97.06%	91.25%	95.24%	94.19%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Ket:

1. Belum = belum mengikuti penilaian proper saat tsb
2. KLHK = Penilaian langsung oleh KLHK
3. Prov = Penilaian langsung oleh Prov melalui tugas Dekonsentrasi
4. Peringkat Kinerja Proper dari terbaik hingga terburuk yaitu :

EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH dan HITAM

5. Ketaatan = Jml (Emas+Hijau+Biru) / Total Peserta
6. PEM = Pertambangan, Energi & Migas
7. MPJ = Manufaktur, Prasarana & Jasa
8. Agro = Agro Industri

2.2.3.12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan/informasi kependudukan merupakan salah satu faktor pendukung dan strategi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan administrasi kependudukan sebagai langkah dalam pendataan penduduk dalam rangka pemerataan pembangunan daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat merasakan hasil dan pelayanan pembangunan.

Dalam proses pengadministrasian data kependudukan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki database kependudukan berskala provinsi berisi data by name by address by NIK untuk meminimalisir data penduduk ganda. Secara bertahap, proses pengadministrasian kependudukan dimulai dengan pendataan kelahiran. Berikut adalah data penduduk memiliki akta kelahiran.

GAMBAR 2- 128 Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Lampung Tahun 2015-2018

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, 2019

Dari data di atas terlihat bahwa persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran meningkat di tahun 2015-2018. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pendataan penduduk untuk menjadi base data dasar dalam pemberian pelayanan secara merata. Selanjutnya, penduduk yang menetap pada suatu daerah/wilayah harus

memiliki tanda bukti identitas sebagai bukti bahwa individu tersebut memang penduduk di daerah/wilayah yang bersangkutan.

TABEL 2- 113 Persentasi Penduduk Melakukan Perekaman E-KTP dan Memiliki E-KTP Tahun 2015-2018

Data Kependudukan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Persentase Penduduk Melakukan Perekaman E-KTP	78,69	80,93	81,89	84,25
Persentase Penduduk Memiliki E-KTP	75,65	77,25	78,57	85,96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk Provinsi Lampung yag telah melakukan perekaman E-KTP dan yang telah memiliki E-KTP mengalami peningkatan. Kepemilikan identitas penduduk selain sebagai base data pemberian pelayanan, juga sebagai base data pemberian hak suara dalam pemilihan umum daerah untuk mewujudkan negara Indonesia yang demokrasi terlebih di tahun 2019 akan diadakan pemilu pemilihan Presiden Republik Indonesia.

2.2.3.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Desa Tertinggal

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dikembangkan dalam 22 variabel dan 52 indikator. Adapun variabel dari IDM antara lain:

a. Ketahanan Sosial: Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, serta Permukiman
b. Ketahanan ekonomi: keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah.
c. Ekologi: kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana alam.

Provinsi Lampung memiliki 2.435 desa yang tersebar di 13 kabupaten dan berdasarkan IDM tahun 2017 masih terdapat 92 desa sangat tertinggal berkurang 59 desa dari tahun 2015 yang semula sebanyak 151 desa dan 1.110 desa tertinggal berkurang 196 desa dari tahun 2015 yang semula sebanyak 1.306 desa. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2- 114 Rekap Jumlah Status Desa Membangun (IDM) 2015- 2017

No	Kabupaten	Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat tertinggal		Jumlah Desa
		2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lampung Selatan	1	1	16	20	139	147	98	86	2	2	256
2	Lampung Tengah	0	0	12	23	159	177	127	100	3	1	301
3	Lampung Utara	0	0	2	4	46	76	163	146	21	6	232
4	Lampung Barat	0	0	1	3	32	58	72	61	26	9	131
5	Tulang Bawang	0	2	1	3	37	61	92	71	17	10	147
6	Tanggamus	0	0	4	7	74	81	177	174	44	37	299
7	Lampung Timur	0	0	14	8	119	159	129	96	2	1	264
8	Pesawaran	0	1	1	6	61	83	73	54	10	0	144
9	Pringsewu	0	1	4	5	63	68	58	50	1	2	126
10	Mesuji	0	0	1	5	27	45	68	50	9	5	105
11	Tulang Bawang Barat	0	0	1	2	29	54	61	37	2	0	93
12	Pesisir Barat	0	1	0	1	38	26	70	79	8	9	116
13	Way Kanan	0	0	2	2	95	103	118	106	6	10	221
	Jumlah	1	6	58	89	919	1.138	1.306	1.110	151	92	2.435

Sumber : Dinas PMD Provinsi Lampung, 2018

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki status desa mandiri hanya 5 kabupaten yaitu: Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesisir Barat. Dari 2.435 desa di Lampung hanya ada 6 desa mandiri atau hanya 0,25 %, 3,65 % desa maju, 46,73 % desa berkembang, 45,59 % desa tertinggal dan 3,78 % desa sangat tertinggal, sehingga bisa dikatakan hampir separuh dari desa di Lampung masih tertinggal.

GAMBAR 2- 129 Data Jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Lampung 2015 - 2017

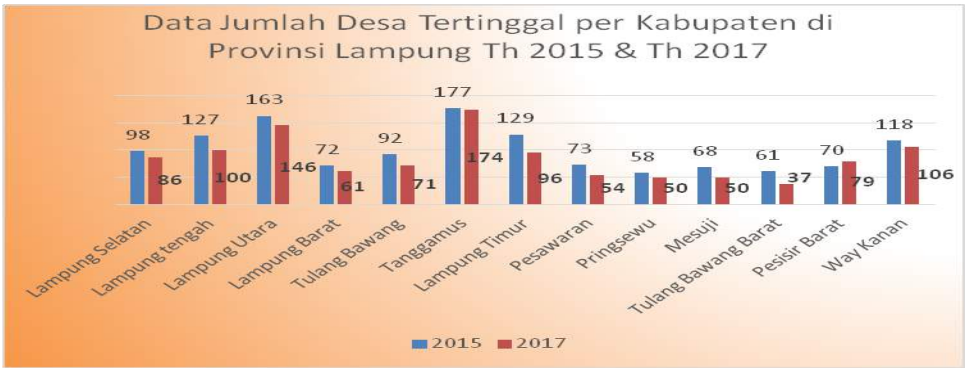

Sumber : Dinas PMD Provinsi Lampung,2018

Pada Grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan Kabupaten dengan desa tertinggal paling banyak yakni berjumlah 177 desa pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 berjumlah 174 desa, disusul dengan Kabupaten Lampung Utara yakni pada Tahun 2015 berjumlah 163 desa dan tahun 2017 berjumlah 146 desa. Berbagai upaya untuk mengentaskan desa tertinggal sudah dilakukan, baik melalui program gerbang desa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang merupakan program unggulan Provinsi Lampung, serta berbagai program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung secara keseluruhan sebanyak 1.665 BUMDes, akan tetapi hanya 1.064 BUMDes yang aktif dan 601 BUMDes tidak aktif. Jenis usaha kegiatan BUMDes di Provinsi Lampung sebagian besar adalah simpan pinjam, kemudian beberapa yang mengelola peternakan kambing, sapi, dan ayam, jasa penyewaan, wisata, perdagangan, pertanian dan pengelolaan pasar.

GAMBAR 2- 130 Jumlah BumDes Per Kabupaten Per Oktober 2018

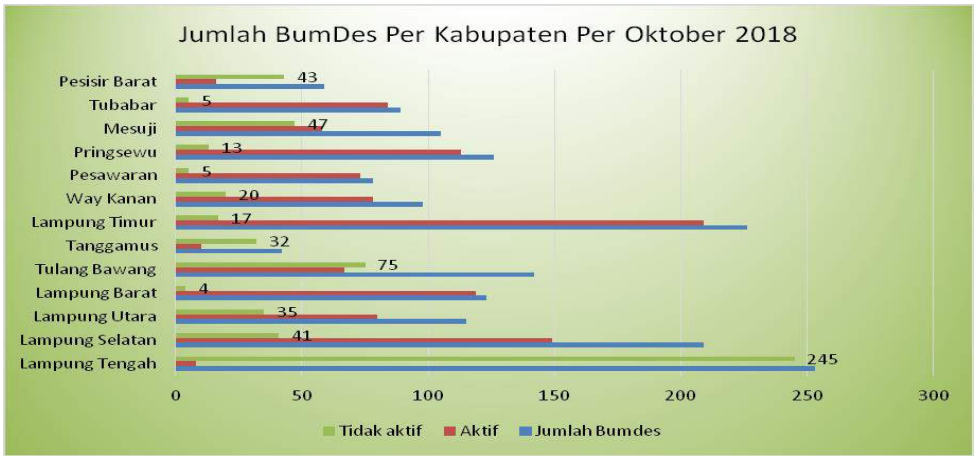

Sumber : Dinas PMD Provinsi Lampung,2018

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa dari 13 Kabupaten di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah BumDes Non Aktif terbanyak yakni 245 dari total keseluruhan 253 BumDes. Dan Kabupaten Lampung Timur memiliki Bumdes aktif terbanyak yakni 209 dari total keseluruhan 226 BumDes.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Keberadaan Dana Desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Maka, pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan. Dapat dilihat pada grafik, bahwa dana desa pada 4 Kabupaten yaitu Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur dan Lampung Selatan mempunyai dana desa terbanyak dibanding Kabupaten lain dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Dana desa Lampung Tengah Rp 241.434.963.033, Tanggamus Rp 233.594.239.000, Lampung Timur Rp 217.642.348.000 .

Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa dan untuk mengawal dana desa. Namun demikian, masih banyak

desa yang belum menggunakan aplikasi ini, bahkan belum tahu bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini.

GAMBAR 2- 131 Jumlah Desa yang sudah dan belum Siskeudes per Kabupaten

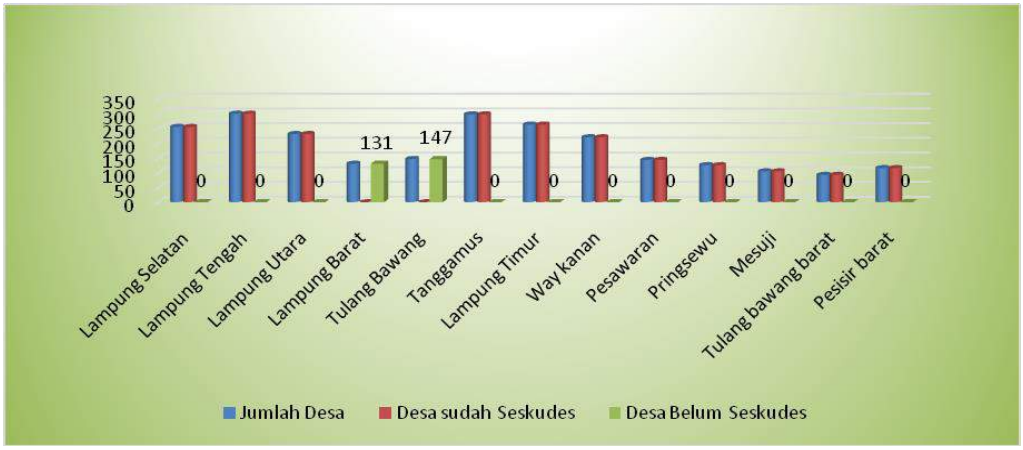

Sumber : Dinas PMD Provinsi Lampung,2018

Kabupaten yang belum Siskeudes yakni Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 147 desa dan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 131 desa, sedangkan Kabupaten yang lain sudah Siskeudes.

GAMBAR 2- 132 Jumlah Dana Desa Per Kabupaten

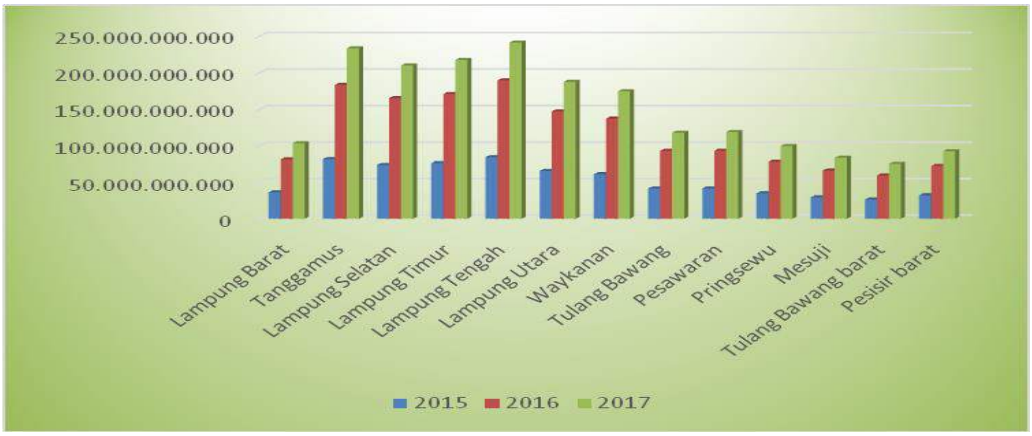

Sumber : Dinas PMD Provinsi Lampung,2018

2.2.3.14. Penanggulangan Bencana Daerah

Selama kurun waktu dari tahun 2014-2017 terdapat 4 macam bencana alam yang seringkali menimpa beberapa daerah di Provinsi Lampung, yaitu; kebakaran, puting beliung, tanah longsor dan banjir, akan tetapi di tahun 2018

Lampung juga mengalami tsunami yang tersebar di daerah pesisir. Di tahun 2018 kebakaran menempati posisi pertama sebanyak 98 kejadian yang kemudian di posisi kedua untuk bencana terbanyak adalah banjir sebnyak 58 kali, tanah longsor sebanyak 21 kali, puting beliung 11 kali, serta gempa bumi 4 kali dan tsunami 1 kali, seperti yang terlihat pada grafik berikut:

GAMBAR 2- 133 Data Kejadian Bencana di Provinsi Lampung Tahun 2018

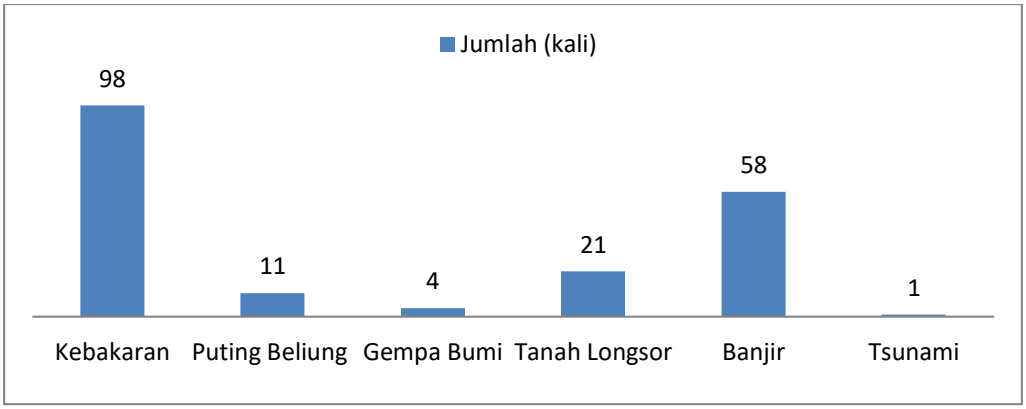

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

TABEL 2- 115 Data Kejadian Bencana se-Sumatera Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Kejadian Bencana se-Sumatera				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	57	90	83	91	160
2	Sumatera Utara	52	63	73	80	89
3	Sumatera Barat	58	89	69	61	91
4	Riau	29	18	25	37	54
5	Jambi	60	14	38	29	28
6	Sumatera Selatan	64	45	61	62	75
7	Bengkulu	15	31	19	11	11
8	Lampung	32	20	18	9	33
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	12	18	8	10
10	Kepulauan Riau	38	5	16	5	9
11	Indonesia	1965	1694	2308	2869	2573

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung memiliki kejadian bencana yang cenderung lebih kecil dari Provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Seperti pada tahun 2018 berada di urutan ke 5 terendah.

Kejadian Bencana Kebakaran

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan perumahan/permukiman penduduk pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan/elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meningggalkan sisa rangka fisik.

Kejadian kebakaran terbesar banyak terjadi di tahun 2014 yaitu 173 kali kejadian, kemudian menurun di tahun 2015 sebesar 139 kali dan terakhir di taahun 2018 dengan kejadian 98 kali. Beberapa data kejadian kebakaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

GAMBAR 2- 134 Kejadian Kebakaran di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

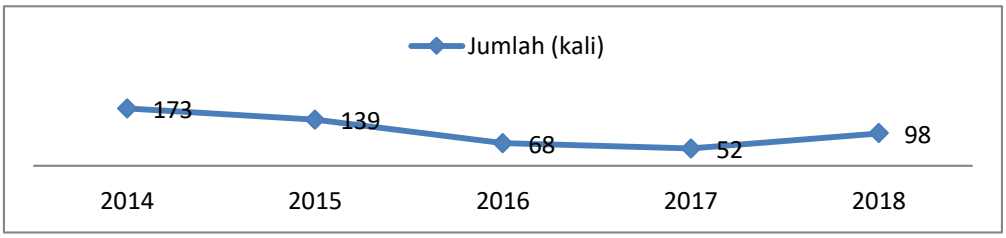

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Wilayah yang rawan bencana kebakaran adalah Kota Bandar Lampung yang di tahun 2017 mengalami kejadian kebakaran sebanyak 25 kali berbanding terbalik dengan Kabupaten Mesuji yang hanya mengalami 1 kali kejadian kebakaran. Selain Kota Bandar Lampung, kabupaten lainnya yang rawan mengalami bencana kebakaran tiap tahunnya adalah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Pringsewu.

TABEL 2- 116 Data Bencana Kebakaran Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

NO.	NAMA KABUPATEN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Bandar Lampung	54	103	36	25
2.	Metro	12	2	-	2
3.	Lampung Tengah	12	-	-	1
4.	Lampung Selatan	20	6	4	7
5.	Tulang Bawang Barat	1	3	9	1
6.	Pringsewu	5	5	2	4
7.	Tanggamus	11	11	-	3
8.	Lampung Utara	27	2	2	4
9.	Mesuji	-	-	-	1
10.	Pesawaran	-	3	-	-
11.	Lampung Barat	7	3	-	-
12.	Lampung Timur	2	1	-	1
13.	Pesisir Barat	5	-	-	1
14.	Tulang Bawang	6	-	-	1
15.	Way Kanan	11	-	15	2
	Jumlah	**173**	**139**	**68**	**52**

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Penyebab kebakaran sebagian besar akibat listrik, masih sering terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peralatan dan pemakaian listrik seperti jenis kabel yang tidak standar, penyambungan kabel yang tidak rapi dan lainnya. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi bencana kebakaran antara lain:

a. Menyusun RTRW berdasarkan analisis resiko bencana.
b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan bantuan modal usaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada sumber mata pencaharian yang tidak aman dan rawan bahaya.
c. Meningkatkan kemampuan masyarakat pada pasca bencana untuk membangun kembali dan memperbaiki rumah, gedung dan bangunan sejenisnya yang memenuhi standar teknis tata bangunan.

Kejadian Bencana Puting Beliung

Bencana selanjutnya yang rawan terjadi di Provinsi Lampung adalah putting beliung yang merupakan angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain-lain bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba.

Selama kurun waktu 5 tahun, puting belitung di Provinsi Lampung banyak terjadi di tahun 2014 yaitu sebanyak 35 kali kejadian dengan kejadian terbanyak ada di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 6 kali kejadian, terbanyak kedua adalah Kabupaten Lampung Timur dengan 5 kali kejadian. Kemudian menurun di tahun berikutnya, seperti terlihat pada grafik berikut:

GAMBAR 2- 135 Kejadian Puting Beliung di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

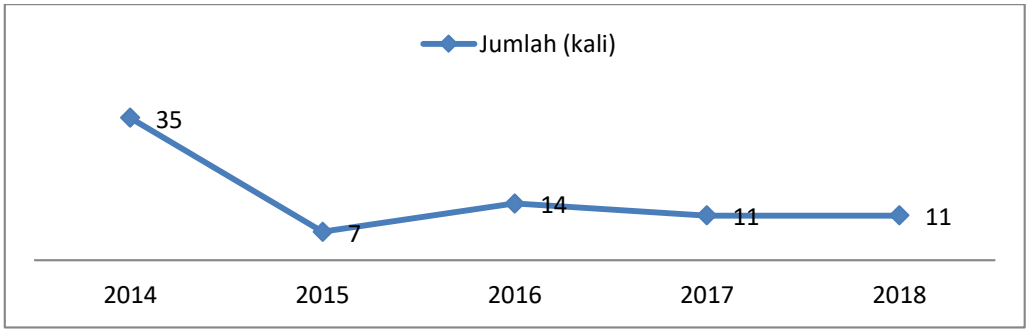

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Di tahun 2016, kejadian bencana putting beliung sebanyak 14 kali tersebar di 11 kabupaten/kota dengan kejadian terbanyak ada di Kabupaten Way Kanan sebanyak 4 kejadian. Wilayah yang sering terjadi putting beliung di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah kejadian 12 kali dari tahun 2014-2018, Lampung Utara sebanyak 11 kali kejadian, Lampung Selatan sebanyak 9 kali kejadian, dan Way Kanan sebanyak 9 kali kejadian, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

TABEL 2- 117 Data Bencana Puting Beliung Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

NO.	NAMA KABUPATEN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Bandar Lampung	-	-	1	1
2.	Metro	3	-	-	1
3.	Lampung Tengah	-	-	1	-
4.	Lampung Selatan	4	2	1	1
5.	Tulang Bawang Barat	2	-	1	1
6.	Pringsewu	3	1	2	-
7.	Tanggamus	-	2	-	-
8.	Lampung Utara	6	-	1	1
9.	Mesuji	-	-	-	1
10.	Pesawaran	2	-	1	-
11.	Lampung Barat	1	-	-	1
12.	Lampung Timur	5	1	1	3
13.	Pesisir Barat	3	-	1	1
14.	Tulang Bawang	3	1	-	-
15.	Way Kanan	4	0	4	0
	Jumlah	**35**	**7**	**14**	**11**

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Saat kejadian bencana tentunya BPBD di kabupaten/kota langsung menangani dan menolong korban yang terkena bencana. Untuk BPBD Provinsi selain melakukan pemantauan juga memberikan bantuan logistic dan peralatan yang dibutuhkan oleh para korban bencana.

Wilayah yang setiap tahun mengalami puting beliung adalah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan, sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya tidak mengalami kejadian serupa setiap tahunnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengurangan bencana di daerah rawan seperti:

a. Memiliki struktur bangunan dan standar bangunan yang dapat memenuhi syarat teknis serta dapat memperhitungkan beban angin sehingga mampu untuk bertahan terhadap angin besar.
b. Melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin.

c. Pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya.
d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelematan diri.
e. Pengamanan barang-barang disekitar rumah agar terikat/dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin.
f. Untuk para nelayan supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya.

Kejadian Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi yang terjadi di wilayah Lampung dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sebanyak 15 kali kejadian dengan gempa terbanyak di tahun 2016 sebanyak 6 kali kejadian dan di tahun 2018 sebanyak 4 kali kejadian yang tersebar di Kabupaten Pesawaran dan Pesisir Barat, seperti yang terlihat pada grafik dan tabel berikut:

GAMBAR 2- 136 Kejadian Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

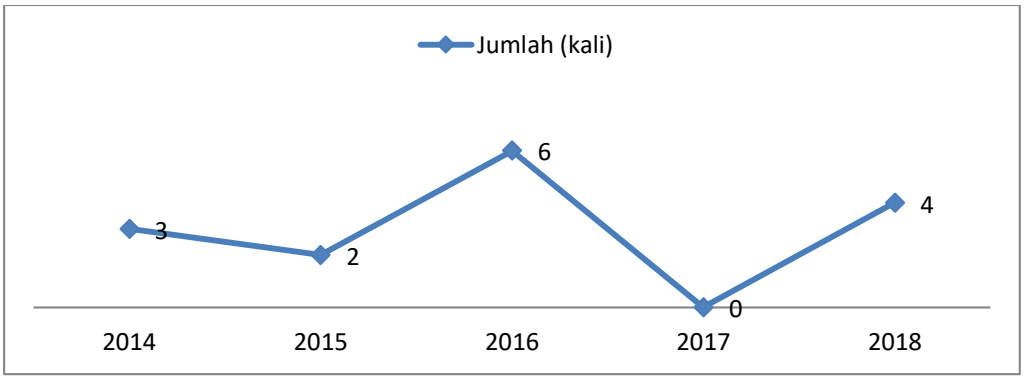

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Untuk daerah rawan gempa bumi di Provinsi Lampung terjadi di Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Dan Kabupaten Pesawaran adalah kabupaten

yang paling sering mengalami kejadian gempa bumi sebanyak 4 kali dalam waktu 5 tahun dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang hanya mengalami kejadian gempa sebanyak 2 atau 3 kali kejadian, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

TABEL 2- 118 Data Bencana Gempa Bumi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

NO.	NAMA KABUPATEN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Bandar Lampung	1	-	1	-
2.	Metro	-	-	-	-
3.	Lampung Tengah	-	-	-	-
4.	Lampung Selatan	-	1	1	-
5.	Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
6.	Pringsewu	-	-	-	-
7.	Tanggamus	-	-	2	-
8.	Lampung Utara	-	-	-	-
9.	Mesuji	-	-	-	-
10.	Pesawaran	1	-	1	-
11.	Lampung Barat	1	1	-	-
12.	Lampung Timur	-	-	-	-
13.	Pesisir Barat	-	-	1	-
14.	Tulang Bawang	-	-	-	-
15.	Way Kanan	-	-	-	-
	Jumlah	**3**	**2**	**6**	**-**

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Dari dari tabel dapat dilihat bahwa ada sebanyak 9 kabupaten/kota yang tidak rawan bencana gempa bumi. Dalam hal penanggulangan bencana gempa bumi, hal terpenting yang perlu dilakukan antara lain:

a. Pemetaan bangunan, dengan melakukan pengecekan pondasi bangunan di titik-titik yang rawan gempa untuk mengetahui bangunan manakah yang sekiranya beresiko roboh akibat gempa. Adapun bangunan-bangunan yang perlu diperhatikan adalah bangunan lama dan bangunan yang sekiranya menampung banyak orang.
b. Pemetaan lapisan tanah, yang perlu diperhatikan adalah tanah endapan karena tipe tanah tersebut dapat menyebabkan terulangnya kejadian

likuefaksi seperti yang terjadi di Palu. Tampak padat di atas namun sangat gembur di bawah.

c. Pemberdayaan masyarakat, pengenalan gempa kepada masyarakat dan tindakan apa yang harus dilakukan pada semua golongan umur, sehingga apabila bencana terjadi tidak akan ada gelombang kepanikan dan masyarakat dapat saling menolong.

d. Penelitian lebih lanjut, mencari kejelasan mengenai lokasi-lokasinya, seberapa besar kemiringan kepatahan, hingga seberapa besar kerusakan yang dapat dihasilkan. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat menghindari titik-titik rawan beresiko gempa dan meminimalisir akibatnya.

Kejadian Bencana Tanah Longsor

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Bencana longsor sering terjadi di musim penghujan, terutama di daerah bukit yang berlereng.

Kejadian tanah longsor di Provinsi Lampung dari tahun 2014-2018 sebanyak 82 kali dan terbanyak di tahun 2014 yaitu 25 kali kemudian di tahun 2018 sebanyak 21 kali kejadian, seperti yang terlihat pada grafik berikut:

GAMBAR 2- 137 Kejadian Bencana Tanah Longsor di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

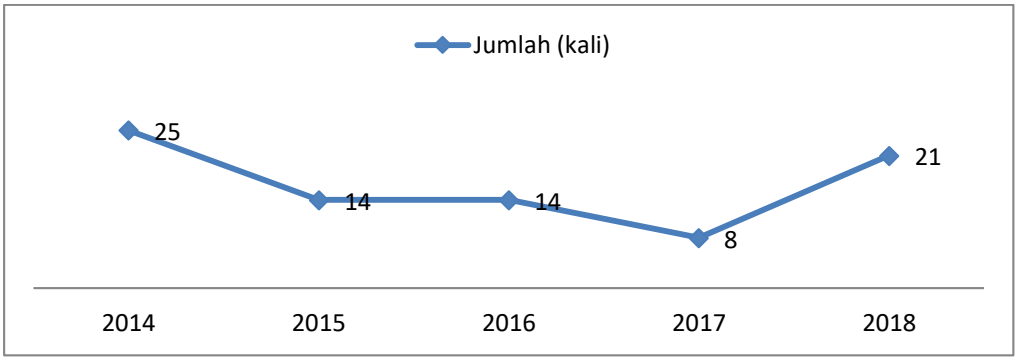

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 9 kabupaten/kota merupakan wilayah rawan longsor dan 6 wilayah tidak rawan longsor, yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pringsewu dan Mesuji,

Tahun 2014 yang mengalami tanah longsor terbesar adalah Kabupaten Tanggamus sebanyak 7 kali dan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 6 kali kejadian. Sedangkan tahun 2018 yang terbesar adalah Kota Bandar Lampung sebanyak 8 kali dan Kabupaten Tanggamus sebanyak 6 kali kejadian. Dalam kurun waktu 5 tahun, kabupaten yang setiap tahunnya mengalami kejadian longsor adalah Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

TABEL 2- 119 Data Bencana Tanah Longsor Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

NO.	NAMA KABUPATEN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Bandar Lampung	1	6	2	-
2.	Metro	-	-	-	-
3.	Lampung Tengah	-	-	-	-
4.	Lampung Selatan	2	-	1	1
5.	Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
6.	Pringsewu	-	-	-	-
7.	Tanggamus	7	3	2	1
8.	Lampung Utara	1	1	-	-
9.	Mesuji	-	-	-	-
10.	Pesawaran	1	2	2	-
11.	Lampung Barat	6	1	5	1
12.	Lampung Timur	-	-	-	-
13.	Pesisir Barat	4	1	1	5
14.	Tulang Bawang	-	-	-	-
15.	Way Kanan	3	-	1	-
	Jumlah	**25**	**14**	**14**	**8**

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Bencana tanah longsor yang terjadi sejauh ini hanya merusak jalan dan rumah, tidak ada korban yang meninggal. Dan pada saat kejadian, BPBD kabupaten langsung terjun ke lokasi untuk membantu korban dengan membersihkan material yang masuk rumah dan membersihkan badan jalan.

Beberapa cara antisipasi dan mencegah tanah longsor, diantaranya yakni:

a. Tidak membuka lahan pertanian di lereng yang curam.
b. Tidak membangun rumah di bawah tebing.
c. Tidak memotong pohon di daerah lereng.
d. Membuat terasering.

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung mengalami kejadian bencana longsor yang relatif kecil terjadi diantara provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera.

Kejadian Banjir

Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Banjir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa:

a. Rusaknya areal pemukiman penduduk.
b. Sulitnya mendapatkan air bersih.
c. Rusaknya sarana dan prasarana penduduk.
d. Rusaknya areal pertanian.
e. Timbulnya penyakit-penyakit,
f. Menghambat transportasi darat.

Banjir di wilayah Lampung banyak terjadi di Kota Bandar Lampung sebanyak 50 kali dari tahun 2014-2018, dan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 23 kali, serta Kabupaten Tanggamus sebanyak 20 kali. Ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah langganan banjir setiap tahunnya, seprti terlihat pada grafik dan tabel berikut:

GAMBAR 2- 138 Kejadian Bencana Banjir di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

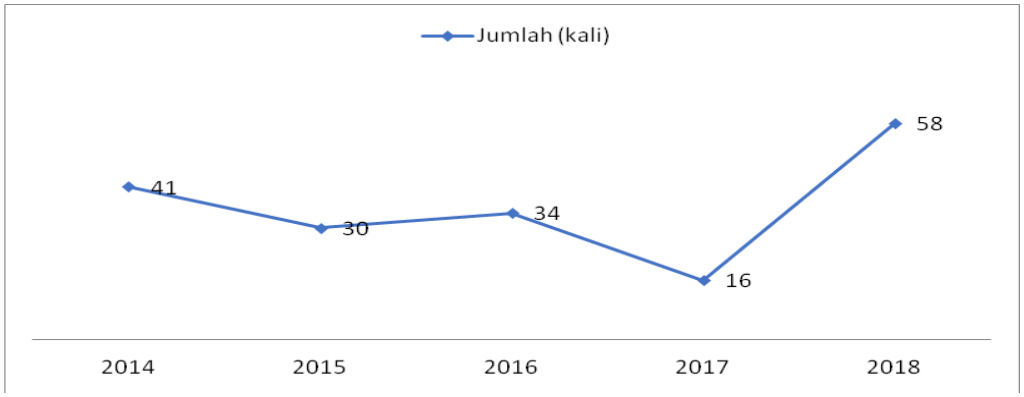

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Tahun 2018 hampir semua kabupaten/kota mengalami banjir hanya Kabupaten Mesuji yang tidak mengalami banjir sehingga jumlah kejadiannya terbesar dari tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 2- 120 Data Bencana Banjir Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

NO.	NAMA KABUPATEN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Bandar Lampung	5	19	10	6
2.	Metro	2	-	-	-
3.	Lampung Tengah	2	2	2	-
4.	Lampung Selatan	6	1	2	3
5.	Tulang Bawang Barat	1	-	2	-
6.	Pringsewu	2	1	-	-
7.	Tanggamus	6	1	6	1
8.	Lampung Utara	4	3	-	-
9.	Mesuji	-	-	2	1
10.	Pesawaran	5	2	2	-
11.	Lampung Barat	1	-	5	-
12.	Lampung Timur	1	-	1	1
13.	Pesisir Barat	1	-	1	2
14.	Tulang Bawang	3	-	1	1
15.	Way Kanan	2	1	-	1
	Jumlah	**41**	**30**	**34**	**16**

Sumber : BPBD Provinsi Lampung, 2018

Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan saluran pembuangan air yang mampet oleh tumpukan sampah, serta meluapnya air sungai. Hal yang dilakukan oleh BPBD kabupaten/kota setiap terjadinya banjir langsung ke lokasi untuk memantau dan membersihkan saluran-saluran air.

Untuk mengantisipasi bencana banjir banyak hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah:

a. Membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan terjadinya banjir.
b. Mengeruk sungai-sungai dari endapan-endapan untuk menambah daya tampung air.
c. Membangun rute-rute drainase alternatif (kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa) sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai.
d. Tidak mendirikan bangunan pada wilayah (area) yang menjadi daerah lokasi penyerapan air.
e. Tidak menebangi pohon-pohon di hutan, karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air, sehingga jika terjadi hujan lebat secara terus menerus air tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah bahkan akan menggerus tanah, hal ini pula dapat menyebabkan tanah longsor.
f. Membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai, tembok-tembok laut di sepanjang pantai-pantai dapat menjaga tingkat ketinggian air agar tidak masuk ke dalam daratan.

TABEL 2- 121 Data Kejadian Banjir se-Sumatera Tahun 2014-2018

No	Provinsi	Kejadian Bencana se-Sumatera				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	37	63	36	53	74
2	Sumatera Utara	20	29	22	45	29
3	Sumatera Barat	12	26	27	27	45
4	Riau	12	9	10	17	15
5	Jambi	17	9	24	18	7
6	Sumatera Selatan	32	26	47	24	31
7	Bengkulu	9	12	5	5	8

No	Provinsi	Kejadian Bencana se-Sumatera				
		2014	2015	2016	2017	2018
8	Lampung	18	12	3	5	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	2	11	3	7
10	Kepulauan Riau	4	1	3	0	4
11	Indonesia	589	523	823	978	679

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung masih berada dalam urutan 5 besar provinsi yang sering mengalami kejadian bencana banjir di Pulau Sumatera.

Kejadian Tsunami

Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi,longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau. Peristiwa tsunami tahun 1928 berkaitan dengan erupsi Krakatau dan tsunami tahun 1958 disebabkan gempa bumi.

Pada tanggal 22 Desember 2018 telah terjadi tsunami di wilayah Lampung tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran dan Tanggamus. Tsunami dengan ketinggian sekitar 1.500 m dengan puncak 1.838 m di atas permukaan laut, kedalaman 1 km dan magdinuto 3,4 skala richter. BMKG memprediksi tsunami terjadi disebabkan oleh longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang tinggi akibat bulan purnama. Akibat tsunami, 2 desa di pesisir Lampung Selatan yaitu Desa Kunjir dan Way Muli yang berada di Kecamatan Rajabasa, rata dengan tanah.

Beberapa hal yang perlu dilakukan setelah bencana tsunami antara lain:

a. Trauma healing masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung bencana tsunami serta akibat isu dan pemberitaan yang tidak benar (pemerintah daerah dan instansi terkait).

b. Sosialisasi, edukasi dan pelatihan mitigasi serta antisipasi bencana kepada masyarakat di zona rawan dan terancam bencana (koordinasi BMKG dan OPD terkait).
c. Bantuan permodalan tanpa agunan kepada UMKM terdampak sebanyak 319 UMKM. Dinas terkait akan melakukan upaya pembinaan, pelatihan dan temu konsultasi sebagai upaya pemulihan.
d. Rehabilitasi vegetasi dan penghijauan sepanjang pesisir yang berpotensi besar terdampak tsunami sebagai penghalang tsunami alami.
e. Mempercepat revisi APBDes pada desa terdampak untuk menangani dampak bencana baik korban maupun revitalisasi infrastruktur desa.

Adapun sebagai gambaran, Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung cenderung menurun seperti dapat dilihat pada gambar di bawah :

GAMBAR 2- 139 Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2015-2018

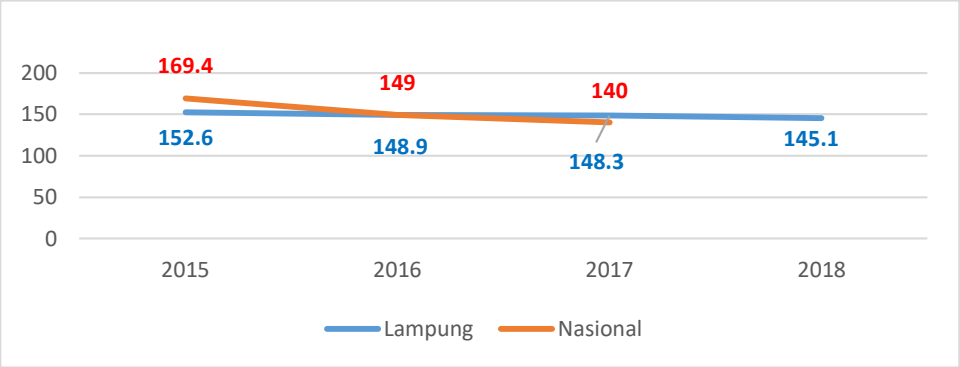

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRB ini dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Semakin besar nilai Indek Resiko Bencana maka semakin besar potensi kerugian akibat dari bencana yang terjadi.

2.2.3.15. Pengendalian Penduduk

Kondisi kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk produktif yang melimpah dan berkualitas jika dimanfaatkan dengan optimal akan mampu mendukung pembangunan suatu negara. Indikator utama dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2014-2017, dengan rata-rata penurunan >1% per tahun. Walaupun mengalami penurunan, namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi jumlah penduduk Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017.

GAMBAR 2- 140 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014-2017

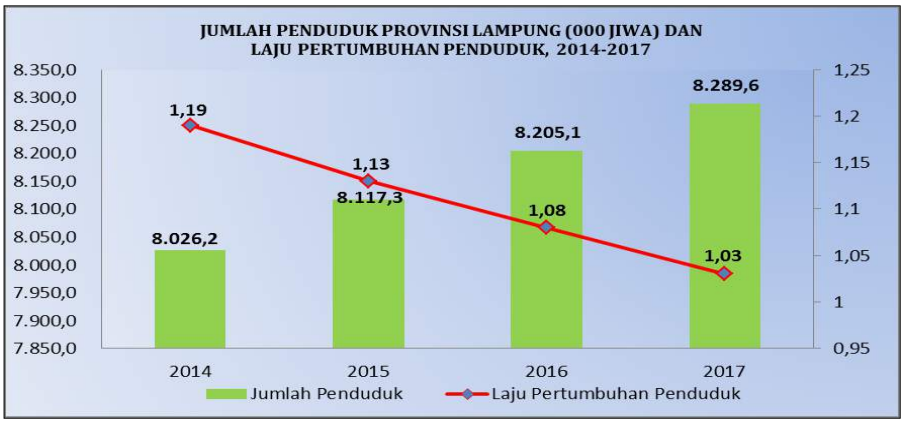

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Salah satu faktor penyebab perkembangan jumlah penduduk adalah kelahiran penduduk (Total Fertility Rate/angka kelahiran total). Penghitungan TFR adalah jumlah kelahiran hidup bayi berbanding tiap 1.000 penduduk yang hidup. Kondisi TFR Provinsi Lampung tahun 2015-2017 mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.

GAMBAR 2- 141 Perkembangan Total Fertility Rate Provinsi Lampung 2015-2017

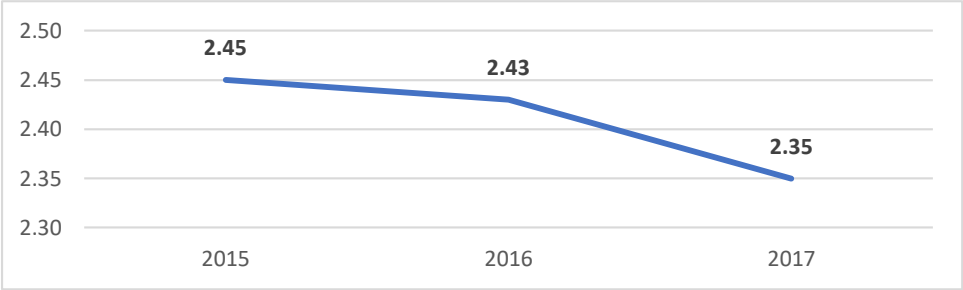

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung, 2018

Permasalahan kependudukan di Indonesia diwarnai juga dengan budaya pernikahan dini yang disebabkan beberapa faktor, yaitu ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pergaulan anak dan adat isitiadat. Berikut adalah jumlah angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun (menikah di bawah umur).

GAMBAR 2- 142 Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Provinsi Lampung 2015-2017

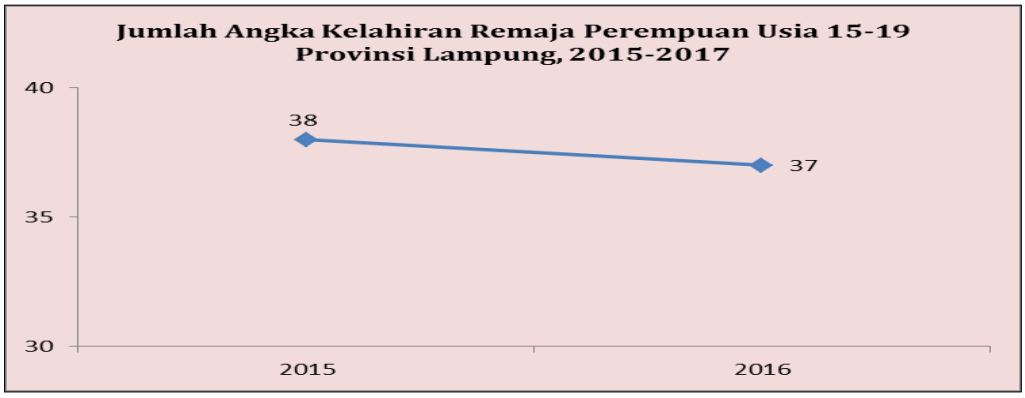

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung, 2018

Salah satu strategi dalam penurunan atau pengendalian kelahiran penduduk adalah melalui pemakaian alat kontrasepsi, terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Penggunaan alat kontrasepsi juga bertujuan untuk menekan tingkat kelahiran mengingat dalam kurun waktu 2020-2025 akan terjadi bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia non produktif. Berikut adalah persentase perkembangan angka pemakaian

kontrasepsi penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) Provinsi Lampung tahun 2015-2017.

TABEL 2- 122 Persentase Peserta KB se-Sumatera dan Nasional Tahun 2014-2018

No.	Provinsi	Persentase Peserta KB Aktif				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	76.21	75.99	76.26	54.75	55.5
2	Sumatera Utara	69.29	69.28	71.63	51.04	51.31
3	Sumatera Barat	73.73	72.5	63.73	57.17	57.45
4	Riau	72.7	72.99	71.62	52.15	52.28
5	Jambi	80.28	78.49	78.09	68.02	69.37
6	Sumatera Selatan	77.18	76.13	77.65	66.92	66.8
7	Bengkulu	89.13	88.02	79.64	71.98	71.15
8	Lampung	70.75	71.14	71.93	68.83	69.15
9	Kepulauan Bangka Belitung	81.83	81.6	83.92	67.47	68.21
10	Kepulauan Riau	72.91	80.25	79.83	46.49	46.86
11	Indonesia	74.87	75.1	74.8	63.22	63.27

Sumber :BPS, 2018 diolah

Berdasarkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung pada tahun 2014 berada di urutan 9 di Sumatera yang memiliki peserta KB aktif, akan tetapi pada akhirya pada tahun 2018 naik menjadi ke 3 di Pulau Sumatera. Dan untuk perbandingan Lampung dan Nasional selama tahun 2014-2016 Provinsi Lampung masih berada di bawah Nasional, akan tetapi mulai tahun 2017 sampai tahun terakhir 2018 Lampung berada di atas Nasional.

GAMBAR 2- 143 Perbandingan Persentase Peserta KB Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018

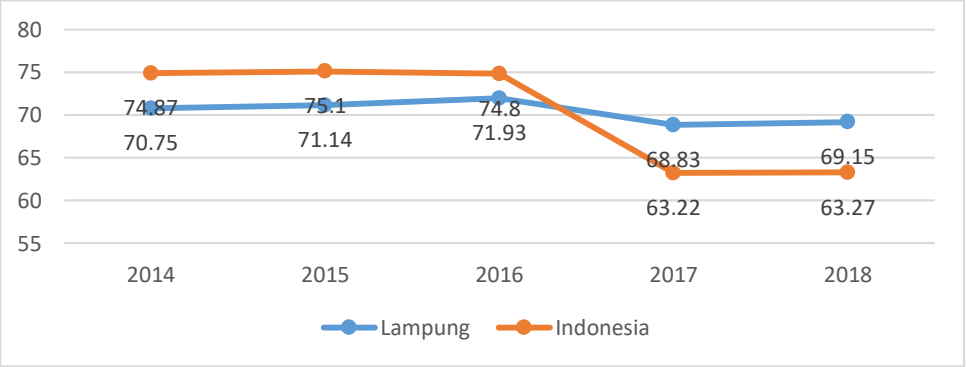

Sumber :BPS R.I, 2018

GAMBAR 2- 144 Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun Provinsi Lampung 2015-2016

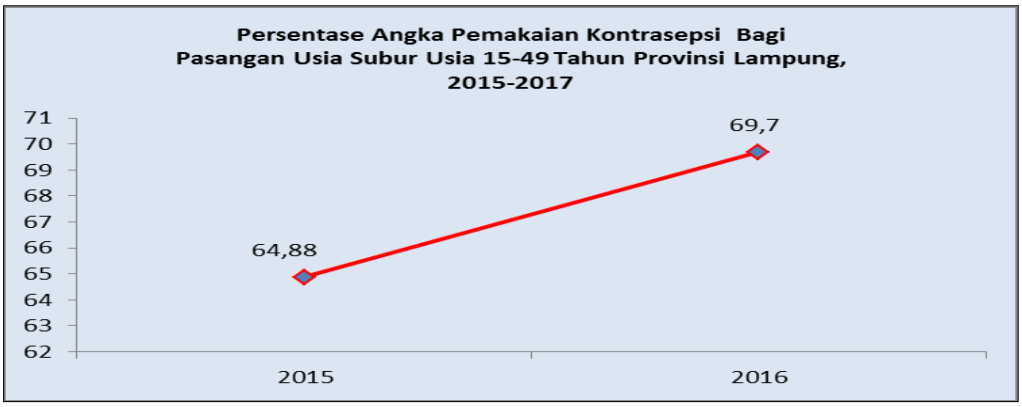

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung, 2017

Salah satu langka penggunaan alat kontrasepsi adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Manfaat penggunaan MKJP adalah mencegah kehamilan hingga 99%; merencanakan kehamilan dan masa depan anak; mencegah resiko kematian ibu saat melahirkan; jangka waktu pemakaian lebih lama; serta biaya terjangkau. Berikut adalah %tase pengguna MKJP Provinsi Lampung tahun 2015-2016.

GAMBAR 2- 145 Persentase Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Provinsi Lampung 2015-2016

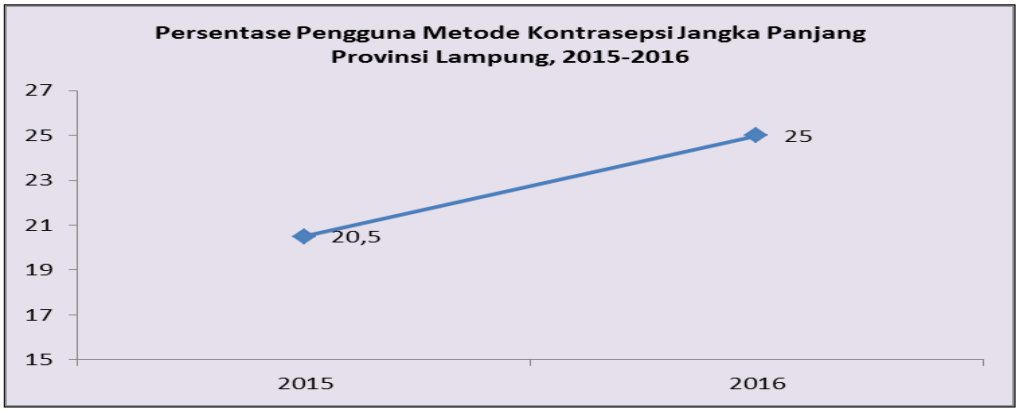

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung, 2017

Dari Grafik terlihat bahwa masih rendahnya penggunaan MKJP Provinsi Lampung. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan MKJP di Provinsi Lampung adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Program Keluarga Berencana; kurangnya sosialisasi MKJP terutama pada PUS;

ketersediaan tenaga penyuluh yang belum memadai; faktor usia; dan jumlah anak yang telah dimiliki.

2.2.3.16. Perhubungan

Permasalahan infrastruktur perhubungan lebih disebabkan masih minimnya konektivitas intermoda yang merupakan kunci utama efisiensi penyelenggaraan transportasi, baik darat, laut maupun udara. Salah satu kendala dalam integrasi moda transportasi tersebut adalah permasalahan keterbatasan kewenangan. Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk sektor perhubungan lebih ke fasilitasi, koordinasi dan mediasi serta mendorong percepatan pembangunan di sektor perhubungan. Kewenangan penanganan yang tegas terkait pemenuhan fasilitas rambu dan keselamatan jalan di jalan Provinsi.

Saat ini ketersediaan rambu dan fasilitas keselamatan jalan di jalan Provinsi masih jauh dari standar yang ditetapkan. Sementara fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, khususnya pada akses jalan menuju kawasan-kawasan strategis provinsi dan jalan pada wilayah dengan topografi curam/potensi kecelakaan lalu lintas. Selain itu minimnya layanan sektor perhubungan, khususnya terkait layanan uji kendaraan juga berkontribusi meningkatkan angka kecelakaan.

Terlebih lagi tantangan kedepan adalah dengan terbangunnya eksit tol yang menuntut integrasi dalam penanganan jalan eksit tol, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebagai satu kesatuan system jalan yang harus dilengkapi fasilitas rambu dan keselamatan jalan. Permasalahan lain adalah terkait overload kendaraan yang perlu penanganan, baik di jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya fungsi dan/atau ketersediaan jembatan timbang.

Upaya lain untuk mengurangi beban jalan adalah dengan menghidupkan kembali transportasi perairan (sungai dan laut). Provinsi Lampung pernah mengalami masa kejayaan pada jaman Kerajaan Tulang Bawang yang

mengandalkan transportasi sungai. Untuk itu diperlukan komitmen semua pihak untuk membangun kembali kejayaan maritime melalui pembangunan dan revitalisasi dermaga/pelabuhan sesuai kewenangannya.

Untuk infrastruktur kereta api perlu dilakukan percepatan pembangunan Double Track kereta api Cempaka – Tarahan dan Short Cut Tegineneng – Tarahan untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dan mengurangi laju kerusakan jalan. Pemerintah Provinsi perlu lebih proaktif mendorong Pemerintah Pusat berkomitmen untuk segera mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dirintis rencana pembangunan jalur kereta api perkotaan untuk mengantisipasi permasalahan transportasi di masa depan.

Untuk infrastruktur kebandarudaraan perlu terus didorong/ dimantapkan Bandara Raden Inten II menjadi Bandar Udara Internasional dan Embarkasi Haji, optimalisasi peran dan fungsi Bandar Udara Pekon Serai, rintisan bandara Gatot Subroto menjadi Bandar Udara Komersial.

2.2.3.17. Kominfo dan Statistik

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

Pengembangan teknologi menjadi instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Pemerintah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk

menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Salah satu bentuk motivasi dan apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang diadakan oleh Direktorat e-Government Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

TABEL 2- 123 Penilaian PeGI Provinsi Lampung Tahun 2014-2015

Tahun	Dimensi					Nilai Rata-Rata	Kategori
	Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan		
2014	1,92	2,00	1,95	1,97	1,60	1,89	KURANG
2015	1,93	1,53	1,73	1,87	1,73	1,76	KURANG

Sumber: Kementrian Kominfo RI, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa penilaian PeGI yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI terhadap Provinsi Lampung pada tahun 2014-2015 adalah untuk penerapan pemerintahan berbasik TIK masih rendah. Untuk penilaian tahun 2016-2017 ditiadakan dan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2018 dengan mengalami perubahan nama penilaian menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan E-Government sebesar 80 persen tahun 2017, Angka ini meningkat

dibanding Tahun 2016, sebesar 60 persen. Angka ini meningkat dibanding Tahun 2014 dan Tahun 2015 yaitu sebesar 20 persen dan 40 persen, (Grafik II-139).

GAMBAR 2- 146 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan *E-Government*

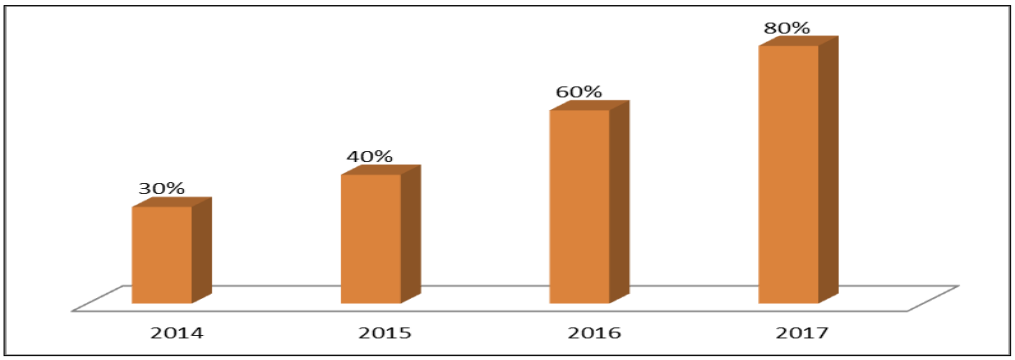

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

Di sektor penyebaran informasi melalui Media Komunikasi Informasi. Pada tahun 2014 persentase mencapai 30 %. Ada peningkatan sebesar 25 % menjadi 55 % di tahun 2015. Terus mengalami peningkatan di tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing sebesar 70 % dan 80 %.

GAMBAR 2- 147 Persentase Jumlah Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi Informasi

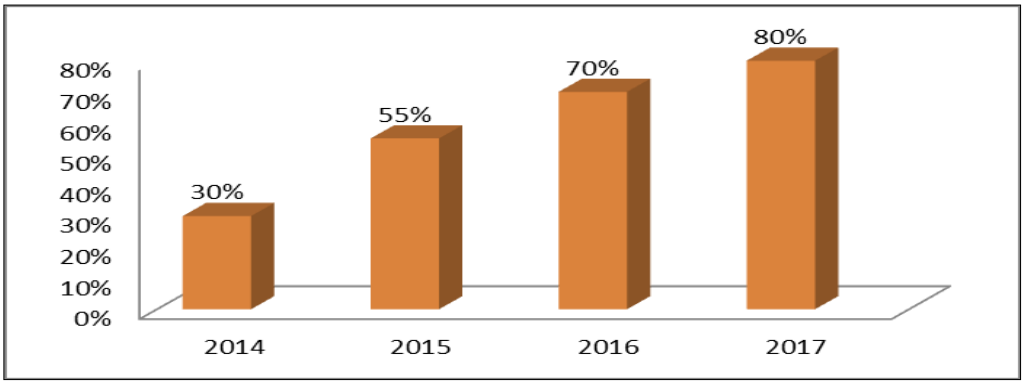

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

Persentase keterbukaan Informasi (Penghargaan Pengelolaan dan Pelayanan publik AWARD) sebesar 25 % tahun 2014, Angka ini tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2017 masih berada di angka 25 %.

GAMBAR 2- 148 Persentase Jumlah Keterbukaan Informasi

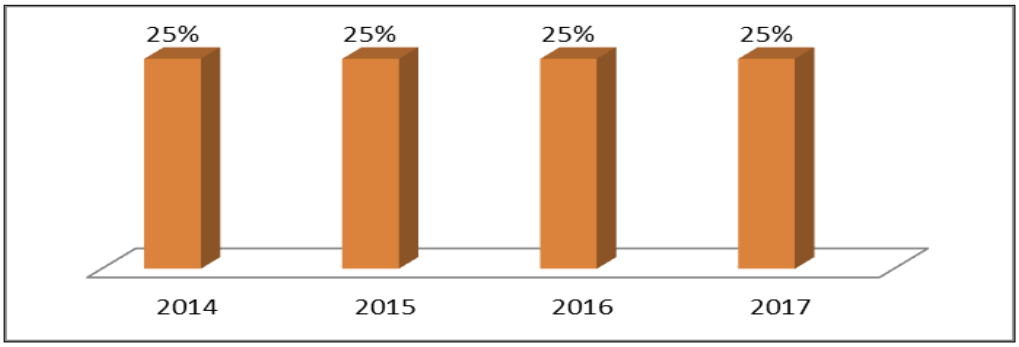

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

Jumlah penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi (KI) sebanyak 5 sengketa di tahun 2014, Angka ini tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2017 masih sejumlah 5 sengketa.

GAMBAR 2- 149 Jumlah Penyelesaian Sengketa Infromasi oleh KI

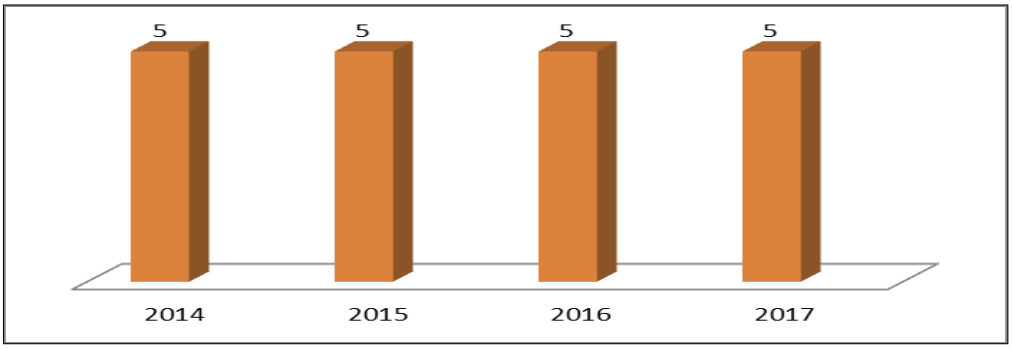

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat.

Dalam hal penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat, pada tahun 2014 persentase mencapai 85 %. Pada Tahun 2015 tidak terjadi peningkatan masih berada di angka 85 %. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan secara signifikan masing-masing sebesar 80 % dan 75 %.

GAMBAR 2- 150 Persentase Informasi Pembangunan yang Disampaikan Kepada Masyarakat

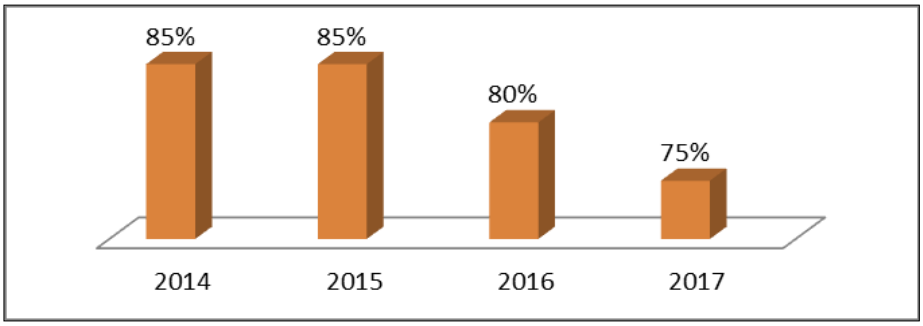

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

TABEL 2- 124 Persentase Layanan Pengaduan Secara Online yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Belum berjalan	Belum berjalan	Belum berjalan	Belum berjalan karena PPID belum dilaksakan secara maksimal

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

Jumlah pengamanan ruang pimpinan dan tempat startegis pada tahun 2014 belum ada data. Pada tahun 2015 sebanyak 21 ruang pimpinan dan tempat strategis yang dilakukan pengamanan. Namun pada tahun 206 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalamai peningkatan masih di 21 ruang pimpinan dan tempat startegis.

GAMBAR 2- 151 Jumlah Pengamanan Ruang Pimpinan dan Tempat Strategis

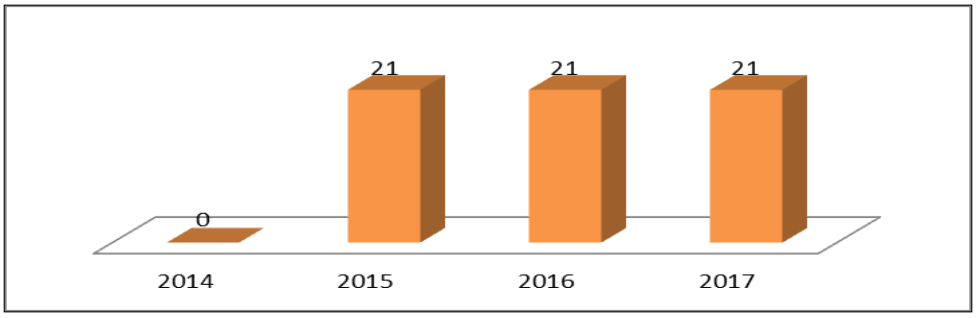

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

Jumlah penerimaan berita Provinsi Lampung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1.258, 1.222, 1.060 dan 1.084. Begitu pula dengan pengiriman berita dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan masing-masing sebesar 7.800, 7.550, 6.549 dan 6.720.

GAMBAR 2- 152 Jumlah Penerimaan dan Pengiriman Berita Provinsi Lampung

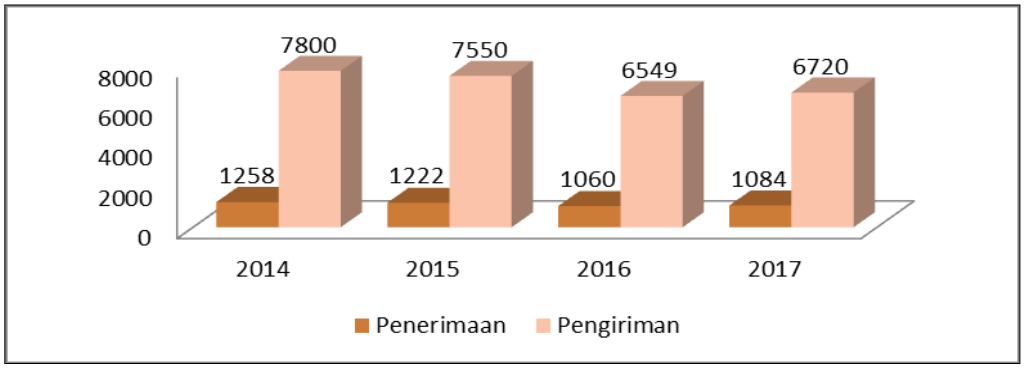

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

Di sektor pengamanan berita sandi, Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 hanya ada 1 (satu) satu berita sandi yang diamankan yakni sebesar 8,3 % seperti yang digambarkan pada grafik persentase berita sandi yang diamankan dibawah ini.

GAMBAR 2- 153 Persentase Berita Sandi yang Diamankan

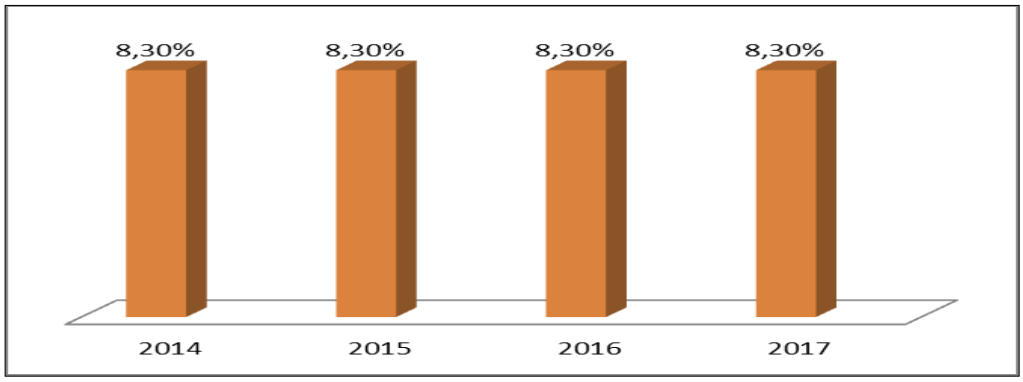

Sumber data : Diskominfotik Provinsi Lampung, Tahun 2018

2.2.3.18. Koperasi dan UMKM

Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjdi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2017 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 46,27 % dari total unit koperasi atau sebanyak 2.471 unit.

TABEL 2- 125 Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koperasi (unit)	4.751	4.932	5.099	5.325	5.340
Jumlah Anggota (orang)	412.617	683.523	586.937	887.537	681.026
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	1.940	2.095	2.246	3.121	2.471
Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT (unit)	370	548	583	791	643

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2018

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 61.947 UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Jumlah ini meningkat menjadi 95.158 UMKM pada 2016 dan 157.922 UMKM pada tahun 2017.

Berdasarkan jenisnya, 47 persen atau 2513 unit Koperasi di Provinsi Lampung merupakan Koperasi Konsumen yaitu Koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jenis koperasi lainnya, unit koperasi Jasa di Provinsi Lampung mulai berkembang. Seiring kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, koperasi akan terus didorong untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata terutama pada

community based tourism seperti desa wisata dan agro/ekowisata. Data koperasi berdasarkan jenisnya disajikan dalam Tabel berikut.

TABEL 2- 126 Data Koperasi Berdasarkan Jenis Tahun 2018

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	**Produsen**	1829	788	1041
2	**Pemasaran**	84	39	45
3	**Konsumen**	2513	1042	1471
4	**Jasa**	122	60	62
5	**Simpan pinjam**	793	547	246
Jumlah		**5341**	**2475**	**2865**

Sedangkan Wjumlah Wirasusaha Pemula yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung hingga Tahun 2018 sejumlah 128 Wirausaha Pemula. Beberapa UKM unggulan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut :

TABEL 2- 127 Data UKM Unggulan Di Provinsi Lampung

NO	NAMA UMKM	KOTA
KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS		
1	Aan Ibrahim	Bandar Lampung
2	Nabbila (Murni)	Lampung Selatan
3	Alfira (Yusuf)	Lampung Selatan
4	Rahayu	Bandar Lampung
5	Tapis Helau (Raswan)	Bandar Lampung
KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Robbani	Pringsewu
2	Panda Tirai (Juanda)	Pringsewu
3	Gusti Snack (Elva)	Bandar Lampung
4	Mirhan (Kopi Luwak)	Bandar Lampung
5	Ali (Kopi Bubuk)	Bandar Lampung
6	Jims (Kopi Luak)	Lampung Barat
7	Harowahyudi (kripik pisang)	Metro
KATEGORI BATIK		
1	Rumah Batik (Laila)	Bandar Lampung
2	Gabovira	Bandar Lampung
3	Ruwai Jurai (Zulkifli)	Bandar Lampung
KATEGORI FURNITURE		
1	Jati Indah Jaya	Pesawaran
2	Samadi (kerajinan Batok kelapa)	Lampung Selatan
3	Sarkun (kerajinan lidi)	Lampung Selatan
4	Ukir Lampung	Bandar Lampung

KATEGORI HANDICRAFT		
1	Sambordir (Samsidar)	Bandar Lampung
2	Karya Indah Tapis	Bandar Lampung
3	Yulli Art	Bandar Lampung
4	Yanti ART (Yanti Parida)	Bandar Lampung
5	Doniintau (kerajinan kaligrafi)	Bandar Lampung
KATEGORI SPA DAN HERBAL		
1	Rosa Delima (Madu)	Bandar Lampung
2	M. Hasby(VCO)	Bandar Lampung
3	Haeroni, STP (herbalist)	Bandar Lampung

Dalam rangka fasilitasi permodalan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPT Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menyalurkan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

TABEL 2- 128 Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui UPT Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Tahun	Volume Penyaluran (Rp)	Jumlah KUMKM
2013	2.885.000.000	128
2014	4.987.500.000	196
2015	3.885.000.000	146
2016	4.210.000.000	134
2017	4.105.000.000	159

Sumber: *Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2018*

Pada tabel di atas, terdapat data volume penyaluran dalam rupiah dan jumlah UMKM di Provinsi Lampung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah volume penyaluran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jumlah UMKM di provinsi lampung mengalami fluktuasi. Jumlah UMKM terbanyak ada pada tahun 2014 sebanyak 196 UMKM, sedangkan jumlah UMKM paling sedikit ada pada tahun 2013 yakni 128 UMKM.

2.2.3.19. Fokus Iklim Berinvestasi

Provinsi Lampung merupakan daerah potensi investasi dibuktikan dengan perbaikan realisasi investasi setiap tahun. Penanaman modal di Provinsi

Lampung terus meningkat dan pencapaiannya selalu melampaui target yang ditetapkan. Berikut adalah data target dan realisasi investasi Provinsi Lampung tahun 2013 – 2017.

GAMBAR 2- 154 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2014–2018 (Rp. Juta)

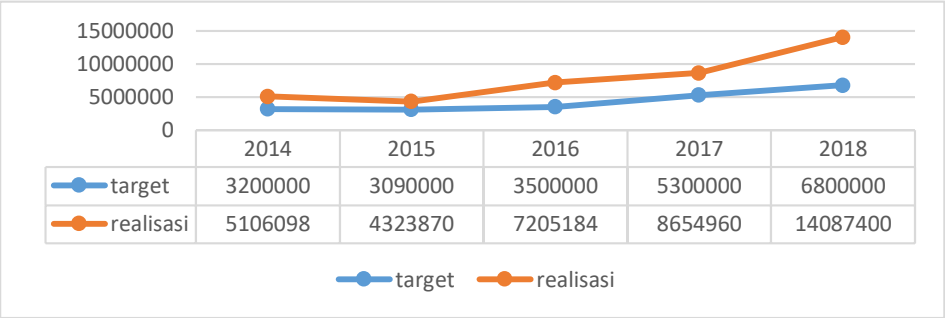

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung

Pertumbuhan PMDN

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung periode tahun 2013 – 2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, terendah tahun 2015 yaitu -68,47% dan tertinggi pada tahun 2016 mencapai 447,20%.

TABEL 2- 129 Tabel Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2013-2018

Tahun	PMDN		Pertumbuhan Nilai Investasi (%)
	Proyek	Nilai Investasi (Rp. Miliar)	
2013	23	1.325,3	-
2014	35	3.495,7	163,77
2015	31	1.102,3	-68,47
2016	72	6.031,8	447,20
2017	69	7.014,8	16,30
2018	91	12.314,71	75,55

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2018

Pertumbuhan PMA

Pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif, tertinggi tahun 2014 sebesar 234,40% dan terendah tahun 2016 sebesar -66,74%.

TABEL 2- 130 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Di Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2018

Tahun	PMA		Pertumbuhan Nilai Investasi (%)
	Proyek	Nilai Investasi (US$ Juta)	
2013	50	46,8	-
2014	50	156,5	234,40
2015	61	257,7	64,66
2016	129	85,7	-66,74
2017	133	120,6	40,72
2018	121	132,29	9,69

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2018

2.2.3.20. Pemuda dan Olah Raga

Organisasi Pemuda

Pemuda merupakan harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Saat ini presentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung terus menunjukan peningkatan, dari tahun 2014 sebesar 60 persen meningkat menjadi 85 persen di tahun 2017 atau rata-rata meningkat 8,3 % pertahunnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

GAMBAR 2- 155 Persentasi Organisasi Pemuda yang Aktif Dalam Pembangunan Di-Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

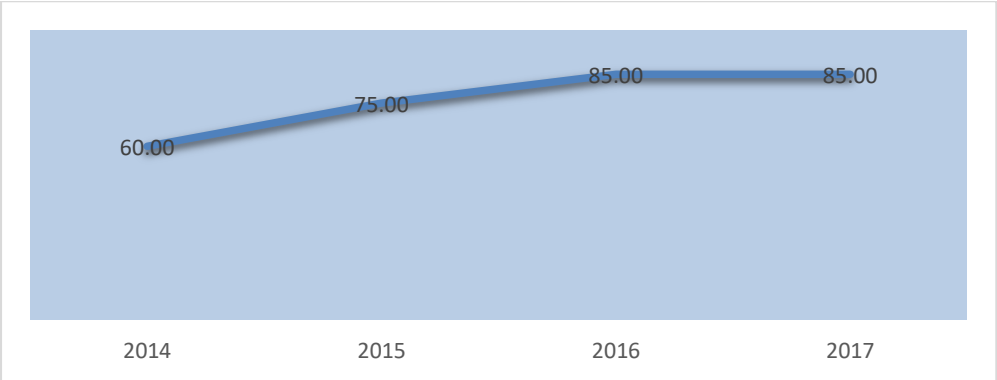

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung, 2018

Wirausaha Muda

Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina dan dilatih di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung dari tahun 2014-2017 cukup fluktuatif, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

GAMBAR 2- 156 Kelompok Pemuda Yang dibina dan dilatih Kewirausahaan muda Di Provinsi Lampung tahun 2014-2017

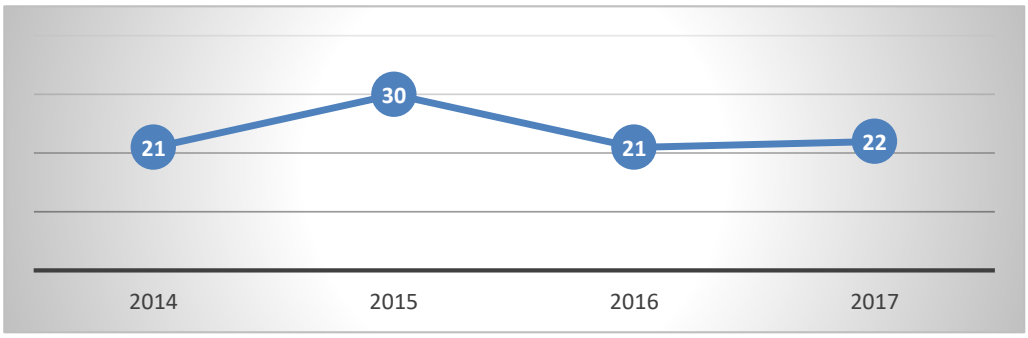

(Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, 2018)

Prestasi Olahraga Tingkat Nasional

Prestasi olahraga dilahirkan dari pembinaan yang berkelanjutan, pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga Provinsi Lampung diajang Nasional.

Prestasi Olahraga Provinsi Lampung pada ajang Nasional masih belum optimal, peringkat pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2016 belum dapat masuk di peringkat 10 besar, namun untuk ajang pekan olahraga pelajar Nasional (POPNAS) Provinsi Lampung menunjukan prestasi yang semakin baik dari tahun 2014 -2017, namun belum mencapai target untuk menjadi 5 besar diajang POPNAS 2017.

TABEL 2- 131 Prestasi Olah Raga Provinsi Lampung 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Peringkat prestasi olahraga pada event Nasional				
- **PON**	-	-	**14**	-
- **POPNAS**	-	**8**	-	**6**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung, 2018

Pembinaan Klub dan Pelatih Olah Raga

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan pembinaan terhadap klub dan pelatih dari 16 cabang olah raga seProvinsi Lampung di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung, namun di tahun 2017 hanya 14 cabang olah raga yang dilakukan pembinaan mengingat terdapatnya penurunan klub dan pelatih di setiap tahunnya.

Jumlah klub olah raga di tahun 2015 sebanyak 41 klub, menurun menjadi 32 klub pada tahun 2017. Demikian pula untuk jumlah pelatih olah raga dari 67 orang (2015) terus berkurang menjadi 48 orang di tahun 2017.

GAMBAR 2- 157 Cakupan Pembinaan Olahraga

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung, 2018

Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda, Atlet Berprestasi, serta Prestasi Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung sangat memprioritaskan pelatih dan atlet berprestasi dalam rangka mempersiapkan kejuaraan di berbagai level. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat progres pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.

Untuk jumlah pelatih yang bersertifikasi dari tahun 2015 sampai 2017 terus bertambah. Untuk pembinaan pada atlet muda cukup berfluktuatif dari

tahun 2015 sejumlah 125 orang, meningkat menjadi 150 orang di tahun 2016, dan menurun kembali menjadi 100 orang pada tahun 2017.

Demikian pula dengan jumlah atlet berprestasi dari tahun 2015 menurun dari 132 orang menjadi 85 orang di tahun 2016, pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 106 orang. Untuk jumlah prestasi olahraga mengalami penurunan dari 12 cabang olahraga pada tahun 2015 menjadi 8 cabang olahraga, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 14 cabang olahraga.

GAMBAR 2- 158 Pelatih Yang Bersertifikasi

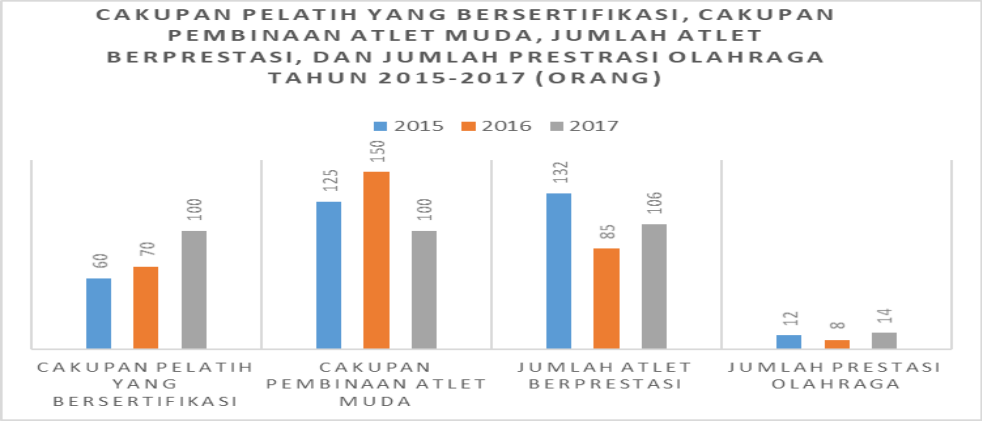

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.21. Kebudayaan

Pensertifikatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Penetapan Warisan Budaya Tak Benda adalah pemberian status Budaya Tak Benda menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di Provinsi Lampung jumlah persertifikatan warisan budaya tak benda yang tercatat menunjukan peningkatan mulai dari 5 warisan budaya ditahun 2014 menjadi 32 warisan budaya ditahun 2017.

GAMBAR 2- 159 Pensertifikatan WBTB Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

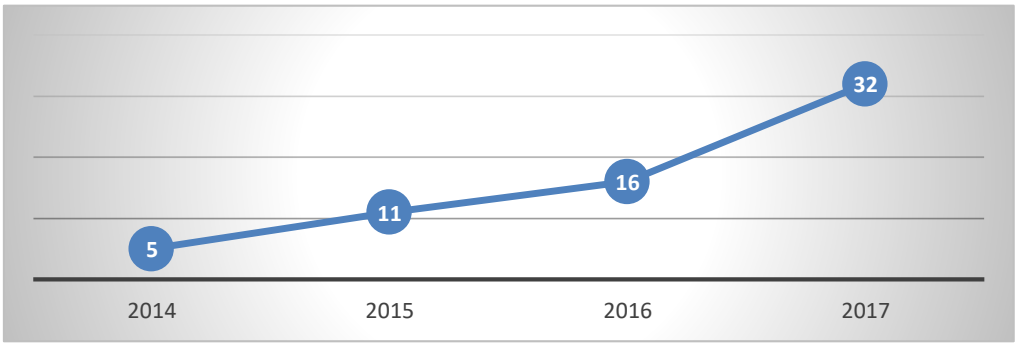

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2018

Pencatatan Peninggalan Budaya

Situs cagar budaya Provinsi Lampung adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya. Jumlah situs cagar budaya dari tahun 2015-2017 terus bertambah, pada tahun 2015 sebanyak 15 situs, tahun 2016 menjadi 90 situs dan tahun 2017 berjumlah 110 situs. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

GAMBAR 2- 160 Situs Cagar Budaya

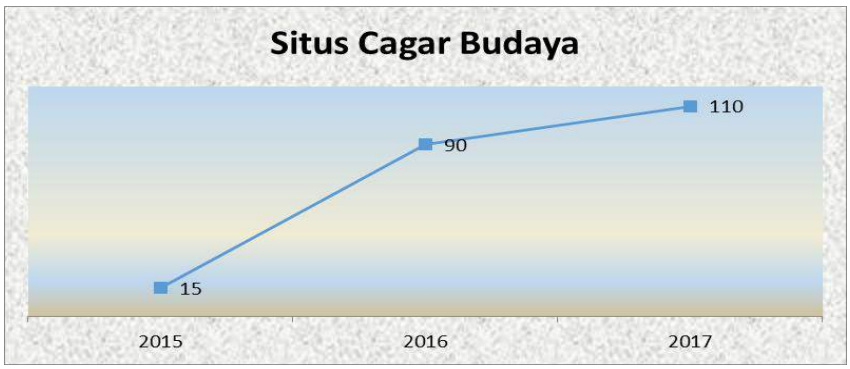

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.22. Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media

baca. Dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, masyarakat Lampung memiliki minat baca yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang mengalami kenaikan 67.119 pengunjung setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

TABEL 2- 132 Pengunjung Perpustakaan Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
	Orang	Orang	Orang	Orang
Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	155.244	182.778	208.968	356.841

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2018

Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Perbandingan jumlah perpustakaan dan jumlah penduduk dari tahun 2014 sampai tahun 2017 semakin naik. Hal ini terlihat pada grafik dibawah ini pada tahun 2014 sebesar 10,73% meningkat menjadi 12,63% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 14,45% menjadi 24,67% di tahun 2017. Kenaikan tercepat berada di tahun 2016 ke 2017 sebesar 10,22% hal ini dibuktikan dengan banyaknya perpustakaan desa yang dibangun dalam rangka meningkatkan minat baca penduduk.

GAMBAR 2- 161 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Tahun 2014-2017

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.23. Kearsipan

Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku secara terus menerus menunjukan peningkatan, secara rata-rata peningkatan presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 18,04 %.

GAMBAR 2- 162 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2014-2017

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2018

SDM Pengelola Kearsipan

Sumber daya pengelolaan kearsipan memegang peranan penting dalam pengelolaan arsip/dokumen. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2014 -2016 cendrung menurun, namun meningkat kembali di 2017 , hal ini tergantung dengan dukungan dari pemerintah daerah dalam proses penganggaran.

GAMBAR 2- 163 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2014-2017

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2018

Urusan Pilihan

2.2.3.24. Pariwisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung naik secara signifikan selama tahun 2013-2017. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan selama 5 (lima) tahun berjalan dengan rata-rata peningkatan 35,79 % setiap tahunnya menjadi 11,64 Juta total kunjungan pada Tahun 2017 yang terdiri dari 11,4 Juta Wisatawan Nusantara dan 245,4 ribu Wisatawan Mancanegara.

GAMBAR 2- 164 Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

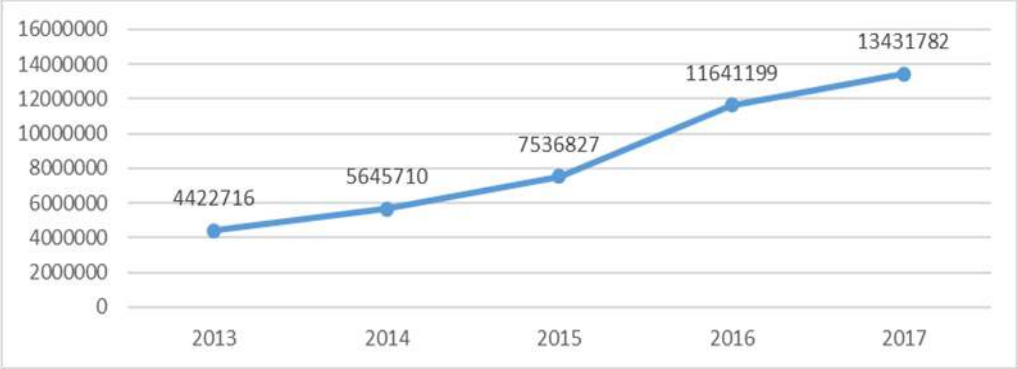

Wisnus	3.392.125	4.327.188	5.530.803	7.381.774	11.395.827
Wisman	75.590	95.528	114.907	155.053	245.372

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, 2018 diolah

Sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung yang terus meningkat, Jumlah hotel berbintang dan non bintang serta jasa akomodasi lainnya di Provinsi Lampung juga semakin bertambah selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2013, jumlah hotel/jasa akomodasi lainnya mengalami pertumbuhan negatif menjadi 183. Kondisi ini semakin membaik setiap tahunnya sehingga menjadi 282 hotel/jasa akomodasi lainnya pada tahun 2017 atau naik 12,35 % dari tahun 2016. Sebanyak 29 % hotel/jasa akomodasi lainnya berada di Kota Bandar Lampung sebagai hub Pariwisata Lampung.

GAMBAR 2- 165 Jumlah dan Pertumbuhan Hotel/Jasa Akomodasi Lainnya di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

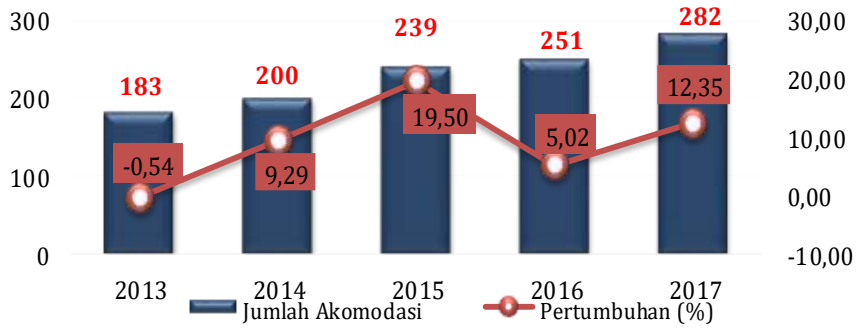

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018 (diolah)

Meskipun jumlah hotel dan jasa akomodasi lainnya di Provinsi Lampung terus bertambah, hal ini tidak berdampak pada penurunan Tingkat Penghunian Kamar pada hotel bintang dan non bintang di Provinsi Lampung selama tahun 2015-2017. Sempat mengalami trend penurunan sejak tahun 2013, Tingkat Penghunian Kamar di Provinsi Lampung kembali mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Tingkat Penghunian Kamar pada hotel bintang yang keseluruhannya berada di Kota Bandar Lampung tahun 2017 mencapai 55,11 %. Hal ini berarti rata-rata jumlah kamar yang dipakai setiap malam pada seluruh hotel berbintang pada tahun 2017 adalah sebanyak 55,11 %. Tidak jauh berbeda dengan hotel bintang, Tingkat Penghunian hotel non bintang di Provinsi Lampung mengalami trend peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2017, Tingkat Penghunian Hotel non bintang sebesar 46,28 %.

GAMBAR 2- 166 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya Provinsi Lampung (%)Tahun 2014-2018

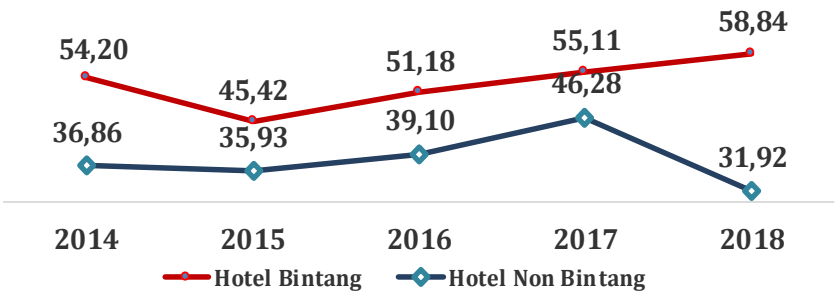

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

TABEL 2- 133 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang/Akomodasi Lainnya

No	Provinsi	Hotel Berbintang				Non-Bintang/Akomodasi lainnya			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Aceh	50,6	48	46	48,6	32,2	29,9	30,5	29,2
2	Sumatera Utara	50,6	56,1	54,2	55,2	37,2	41,4	40,7	36,5
3	Sumatera Barat	52,7	49,9	54,3	55	44,2	34,1	33,7	32,9
4	Riau	43,4	45,1	48,5	47,2	36,2	42	44,5	39,1
5	Jambi	46,6	44,1	48,2	46,1	31,9	27,3	30,8	30,2
6	Sumatera Selatan	46,9	51,6	52,8	60,2	36,3	33,5	35,3	36
7	Bengkulu	48,7	53,2	60,5	58,4	25,1	24	22,9	24,3
8	Lampung	57,1	48,8	50,4	56,1	37,4	35,7	40,7	44,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	40,2	39,2	40	39,4	28,1	27,4	28,2	27,3
10	Kepulauan Riau	48,2	49,4	49,4	52,8	42,8	34,4	37,6	42,8
11	Indonesia	52,6	53,9	54,3	56,7	35,9	33,2	34,9	33,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Provinsi Lampung mengalami kenaikan dan penurunan dalam tingkat penghunian kamar yang berbintang maupun tidak berbintang. Mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan walau tidak terlalu signifikan.

2.2.3.25. Transmigrasi

Transmigran (perKK) yang dikirim ke Luar Lampung

Pengiriman keluarga transmigran ke luar Provinsi Lampung jumlahnya berfluktuasi, hal ini tergantung kepada kuota yang diberikan oleh Kementrian serta efisiensi yang terjadi di pusat. Pada Tahun 2014 sebanyak 55 KK, 2015 sebanyak 85 KK dan ditahun 2017 sebanyak 15 KK, hal ini dapat dilihat pada Grafik seperti di bawah.

GAMBAR 2- 167 Jumlah Transmigran Per-KK yang Dikirim Ke Luar Lampung Tahun 2014-2018

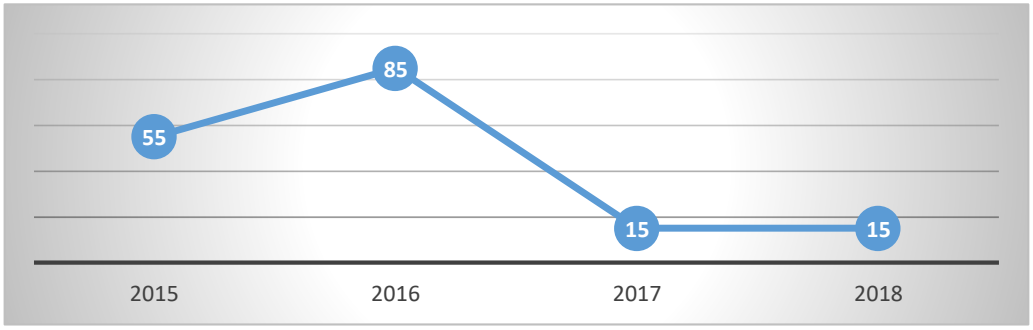

Sumber : Disnaker Provinsi Lampung, 2018

2.2.3.26. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Provinsi Lampung lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2- 134 Perkembangan Produksi Perikanan 2014-2018

NO.	Jenis Perikanan	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perikanan Budidaya	144.686,33	116.774,39	138.477,27	156.132,46	160.582,92
2.	Perikanan Tangkap	157.167,62	138.902,80	167.241,00	178.103,85	142.839,69

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2019

Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di wilayah perairan Provinsi Lampung sangat menjanjikan, yaitu sebesar 388.000 ton/tahun yang tersebar di wilayah pantai timur (Laut Jawa) sebesar 21.124 ton/tahun , Teluk Lampung dan Teluk

Semangka (Selat Sunda) sebesar 88.958 ton/tahun dan Wilayah Pantai Barat sebesar 277.918 ton/tahun.

TABEL 2- 135 Sebaran Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Laut Lampung 2018

Wilayah Perairan Laut	Potensi Lestari Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)		
	Pantai	Lepas Pantai dan ZEE	Total Kelimpahan
Wilayah Pantai Timur (Laut Jawa)	11.082	10.042	21.124
Teluk Lampung dan Teluk Semangka (Selat Sunda)	49.918	39.040	88.958
Wilayah Pantai Barat	154.000	123.918	277.918
Jumlah	**215.000**	**173.000**	**388.000**
Presentase (%)	**55,41**	**44,59**	**100,00**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2018

Dengan sumberdaya perikanan tangkap sebesar itu, Provinsi Lampung memiliki beberapa jenis sumberdaya yang dapat menjadi komoditas andalan antara lain ikan demersal, ikan pelagis, tuna dan cakalang, udang, ikan karang dan rajungan. Tuna dan rajungan merupakan komoditas perikanan tangkap yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekpor.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Lampung sebesar 388.000 ton/tahun, jumlah tangkapan diperbolehkan berdasarkan FAO 80 % dari potensi sehingga yang boleh dimanfaatkan sebesar 310.400 ton/tahun. Dari jumlah tersebut yang baru termanfaatkan sebesar 141.537 ton pada tahun 2018 oleh RTP di Provinsi Lampung yang berjumlah 12.431 RTP (One Data KKP, 2018). Belum termanfaatkannya potensi perikanan tangkap dikarenakan anatar lain:

1. SDM Nelayan di provinsi Lampung masih melakukan penangkapan secara tradisional, menggunakan armada-armada kecil dimana 9.702 kapal perikanan yang ada dilampung merupakan kapal ukuran <10 GT (One Data

KKP, 2018) dan melakukan penangkapan hanya satu malam dalam sekali trip (One Day Fishing). Ini dikarenakan ketidakmampuan SDM Nelayan di provinsi Lampung dalam alih armada penangkapan yang lebih besar, karena keterbatasan permodalan dan penggunaan API

2. Pendataan Produksi yang kurang optimal karena banyak nelayan perikanan tangkap yang tidak mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan atau tidak melaporkan produksi hasil tangkapannya sehingga data produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Tidak mendaratkannya nelayan ke pelabuhan perikanan karena hasil tangkapan harus dijual ke juragan/Pembina nelayan.
3. Penggunaan API yang tidak ramah lingkungan baik oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang mengakibatkan terjadinya overfishing di perairan pesisir timur provinsi Lampung dan rusaknya perairan provinsi Lampung yang akan mengakibatkan susahnya kegiatan penangkapan.
4. Kegiatan andon perikanan tangkap yang tidak dilaporkan ke instansi terkait juga mempengaruhi produksi perikanan tangkap, karena nelayan andon akan mendaratkan hasil tangkapannya ke pelabuhan asal mereka.

Perikanan Budidaya

Pengembangan perikanan budidaya menjadi alternatif yang penting untuk mengantisipasi tingkat permintaan sumber daya ikan yang akan meningkat pada masa yang akan datang. Beberapa komoditas unggulan perikanan budidaya Provinsi Lampung antara lain Lele, Nila, Mas, Patin, Gurame (budidaya ikan air tawar); Kerapu bebek, kerpau macan, kerang hijau, rumput laut (budidaya laut); udang windu, udang vanname, bandeng, mujair, nila, rumput laut (budidaya air payau). Komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekpor antara lain Udang dan Rumput Laut. Negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas perikanan Provinsi Lampung ini antara lain USA, Japan, China, Belanda, United Kingdom.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038 Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan memanfaatkan wilayah perairan laut sepanjang 0-12 mill dari bibir pantai menjadi 4 kawasan yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut.

Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi konservasi kawasan, jenis dan genetik. Provinsi Lampung memiliki 4 kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dengan luas 106.242 Ha di tahun 2018, dan masih ada ± 97.889,86 Ha yang belum terkelola. (Sebagaimana Amanat RZWP3K Provinsi Lampung).

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan perikanan di provinsi Lampung sebagian besar telah tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun Koperasi Perikanan. Pembentukan KUB dan Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan, yaitu dengan cara pemupukan modal bersama .

SDM Nelayan di Provinsi Lampung masih menggunakan armada kecil berupa kapal dengan ukuran <10 GT dikarena nelayan masih melakukan penangkapan secara tradisional dan *One Day Fishing* serta kurangnya pemahaman nelayan akan teknologi penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan juga dipengaruhi oleh musim dan cuaca ekstrim yang akan mengakibatkan berkurangnya produksi perikanan tangkap pada musim tertentu. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan menjaga pendapatan keluarga nelayan pada musim-musim paceklik dan cuaca ekstrim dilakukan pelatihan diversifikasi usaha, yang melibatkan keluarga nelayan terutama istri dan anak perempuan nelayan.

Pemerintah bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi menyiapkan asuransi khusus nelayan, yang akan melindungi nelayan dalam melakukan kegiatan usaha nya dan memberikan jaminan hari tua bagi nelayan. Peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan juga dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak nelayan supaya memperoleh pendidikan yang tinggi dan dapat melakukan usaha perikanan tangkap yang lebih baik daripada orang tuanya.

Produksi Garam

Pemanfaatan potensi garam di Provinsi Lampung sebesar 400 Km^2 garis pantai, terutama di Pesisir Barat dan Tanggamus. Adapun Produksi Tambak Percontohan Provinsi Lampung berada di Pesisir Barat dengan produksi sebesar 500 Kg di Tahun 2018. Pemerintah Provinsi Lampung kini melakukan pemberdayaan dan pembentukan Kelompok Masyarakat Garam di 4 Kabupaten yaitu Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan pesawaran dengan fokus peningkatan nilai ekonomis/nilai jual garam.

Perencanaan Pengelolaan Laut

Terdapat 3 (tiga) fokus utama dalam hal perencanaan pengelolaan laut di Provinsi Lampung, yang adalah :

1. Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut sesuai UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014
2. Memiliki kepastian hukum Investasi
3. Pemanfaatan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Dalam pelaksanaannya, pengawasan SDKP menekankan pada tindakan preventif (pembinaan, sosialisasi, koordinasi) dan penegakan hukum. Tugas tersebut dilaksanakan oleh petugas pengawas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan dibantu oleh kelompok Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) sebagai perpanjangan tangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, 20 Orang
2. PPNS, 13 Orang
3. Polsus, 3 Orang
4. Pokmaswas Aktif, 15 Kelompok

Pelaksanaan pengawasan didukung dengan sarana operasional pengawasan. Jumlah kapal pengawas sebanyak sepuluh kapal (status belum diserahterimakan oleh kabupaten/kota), satu searider, dan tiga speedboat.

2.2.3.27. Energi

Permasalahan dibidang energi adalah masih kurangnya penyediaan infrastruktur kelistrikan yang dapat dilihat dari rasio elektrifikasi. Disisi lain penyaluran subsidi listrik juga belum dinikmati masyarakat yang berhak sesuai tujuannya.

Potensi energi baru terbarukan (PLTA, panas bumi, dll) belum termanfaatkan secara optimal. Provinsi Lampung memiliki 13 titik potensi panas bumi sebesar 2.867 MWe atau 10 % dari potensi nasional. Untuk itu perlu terus dilakukan kajian, eksplorasi serta eksploitasi untuk mengoptimalkan potensi panas bumi di Provinsi Lampung. Selain itu perlu terus ditingkatkan upaya konservasi energi melalui pemanfaatan biogas serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Fungsi Penunjang dan Fungsi Pendukung

2.2.3.28. Kepegawaian

Diklat ASN

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi

kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi, Aparatur Sipil Nasional perlu mengikuti diklat baik dalam bentuk diklat teknis maupun diklat fungsional dan kepemimpinan.

Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis, Fungsional dan kepemimpinan di provinsi Lampung dari tahun 2015-2016 menunjukan peningkatan, namun menurun di tahun 2017, akan tetapi capaian dari tahun ketahun belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk persentase ASN yang mendapatkan izin belajar dan bantuan tugas belajar menunjukan peningkatan dari tahun 2015-2017, namun capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan.

TABEL 2- 136 Persentase Pegawai ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tahun 2015-2018

Indikator	2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pegawai ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	1,15	1.00	1,30	1,16	1,45	0,70
Persentase ASN yang mendapatkan izin belajar dan bantuan tugas belajar	96,5	61,54	97,00	76,41	97,5	91,28

Sumber : BKD Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika target-target yang ingin dicapai dengan dua indikator tersebut selama tahun 2015-2017 tidak terealisasi dengan sebagimana mestinya.

2.2.3.29. Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Yang Mengikuti Uji Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena itu ASN

yang lulus kompetensi harus memiliki predikat memuaskan dan post test minimal 70.

TABEL 2- 137 Persentase Aparatur Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Dengan Ketentuan Predikat Minimal Memuaskan Dan Hasil Post Test Minimal 70

Indikator	Satuan	Capaian		
		2015	2016	2017
Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi selama 1 tahun	Orang	-	240	124
(Jumlah aparatur pengembangan kompetensi yang lulus dengan predikat memuaskan dan Hasil post test minimal 70)	%	74	86,2	87,25

Sumber : BPSDM Provinsi Lampung, 2018

Pada tahun 2015, persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 70) sebesar 74,0 % selanjutnya terus meningkat hingga menjadi 87,25 pada tahun 2017. Kondisi tersebut mencerminkan jumlah Aparatur Sipil Negeri (ASN) di Provinsi Lampung yang professional dan berkualitas serta memiliki pengetahuan dan berwawasan luas sebagai pelayan masyarakat dari tahun ketahun semakin meningkat.

Kualifikasi akreditasi lembaga diklat

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi perlu adanya proses akreditasi. Proses akreditasi dijalankan dengan transparan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditujukan untuk memelihara pelaksanaan sistem sertifikasi yang benar. Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu A,B dan C.

TABEL 2- 138 Nilai Kualifikasi Akreditasi BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2015-2017

Indikator	Nilai		
	2015	2016	2017
Kualifikasi akreditasi lembaga diklat	B	B	B
Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori :			
a. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100;			
b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99; dan			
e. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.			

Sumber : BPSDM Provinsi Lampung, 2018

Berdasarkan hasil pengukuran akreditasi tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa lembaga diklat yang terakreditasi menunjukkan kondisi yang cukup baik. Meskipun kajian ini tidak secara langsung mengukur keterkaitan atau hubungan langsung antara status akreditasi dengan capaian kinerja lembaga diklat, namun dapat diasumsikan bahwa setidak-tidaknya status akreditasi memberikan kontribusi terhadap kinerja lembaga diklat Apalagi akreditasi tidak saja bertujuan untuk memberikan penilaian kelayakan lembaga diklat di dalam menyelenggarakan suatu program diklat, akan tetapi juga diharapkan dapat memicu lembaga diklat untuk meningkatkan kinerjanya.

2.2.3.30. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah lembaga. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kemakmuran masyarakat.

Rumusan Kebijakan (*Policy Paper*) dan Koordinasi SIDa

Policy Paper merupakan adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini, yang diharapkan mampu

memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Lampung ditahun 2015 -2018 jumlahnya berfluktuatif. Pada tahun 2015 mencapai 9 policy paper , meningkat ditahun 2016 menjadi 14 Policy Paper namun menurun ditahun 2017 dan 2018. Police Paper di tahun 2017 dan 2018 masih jauh dari pencapaian target.

Presentase Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa ditahun 2015-2018 menunjukan peningkatan, dan telah mencapai target yang diharapkan.

TABEL 2- 139 Kinerja Kelitbangan Provinsi Lampung Tahun 2015-2018

Indikator	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Policy Paper yang dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung	9	9	10	18	14	77,	28	9	32,	35	8	22,
Presentase Kab/Kota yang telah menerapkan SIDa	4	4	10	7	7	10	10	11	11	13	13	10

Sumber : Balitbangda Prov. Lampung, 2018

2.2.3.31. Pengawasan

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan aman turut meningkatkan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabilitas, Segenap jajaran penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki komitmen Bersama untuk menegakaan *good governnce* dan *clean government*.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka

kinerja atas penyelenggara organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui system pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan internal APIP tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai tujuan yang ditetapkan dan taat kepada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (oversight), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (insight) serta mampu mengidentifikasikan trend/perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*).

Pada tahun 2017, berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Pemerintah Provinsi Lampung, bahwa tingkat %tase tindak lanjut hasil temuan pemeriksanaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017 mencapai 85,8%. Hal ini mengindikasikan keseriusan dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Inisiasi Dewan

Dalam pembentukan kebijakan pembangunan daerah terdapat unsur Lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan membentuk, menyusun dan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainya serta kebijakan pemerintah daerah.

Selama tahun 2017, terdapat 28 Peraturan Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Tujuan dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut selain untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Lampung, adalah untuk mensinergikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun instansi swasta dalam koordinasi dan

sinergitas untuk mewujudkan Pemerintah Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera.

2.2.4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang di tetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meningggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM ysng terdiri dari:

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
f. Sosial

Pemerintah Daerah sendiri menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. pengumpulan data;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Proses pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangannya. Data ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima kebutuhan dasar sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar;
2. jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

4. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
5. Jumlah sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dengan menghitung selisih antara kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan OPD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilakukan oleh OPD melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi

TABEL 2- 140 JENIS LAYANAN SPM PROVINSI

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN	DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN	INDIKATOR	KET	DATA/TABEL
PENDIDIKAN	1. Pendidikan Khusus 2. Pendidikan Menengah	1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa 2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; 2. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;	1. Anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di sekolah negeri; 2. Anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di sekolah swasta 3. Anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah; 4. Anak usia 4 -18 tahun yang bersekolah di sekolah negeri; 5. Anak usia 4 -18 tahun yang bersekolah di sekolah swasta 6. Anak usia 4-18 tahun yang tidak bersekolah 7. Jumlah rombel/kelas/sekolah; 8. Jumlah guru;	1. Anak Tidak Sekolah 2. APM SMA/SMK/MA/Paket C 3. APK SMA/SMK/MA/Paket C 4. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 5. SMA/SMK yang memenuhi standar sapras 6. Sekolah SLB Terakreditasi		Tabel 2-53 Tabel 2- 126
KESEHATAN	1. pelkes bagi penddk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana nsi; dan 2. pelkes bagi penddk pd kondisi KLB	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; 2. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1. Jumlah Korban Bencana Alam 2. Jumlah penduduk pada area KLB 3. Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak akibat Bencana 4. Jumlah fasilitas kesehatan pada area klb	1. Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana 2. Persentase penanganan kesehatan pada saat KLB	1. meliputi: pelayanan kesehatan saat krisis, pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan dan pelayanan kesehatan saat pasca krisis kesehatan. • Pelayanan kesehatan ibu hamil; • Pelayanan kesehatan ibu bersalin; • Pelayanan kesehatan	Tabel 2-102 Tabel 2-103 Tabel 2-104 Tabel 2-105 Tabel 2-107 Gambar 2-107 Gambar 2-133 Gambar 2-134 Gambar 2-135

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN	DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN	INDIKATOR	KET	DATA/TABEL
						bayi baru lahir; • Pelayanan kesehatan balita; • Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; • Pelayanan kesehatan pada usia produktif; • Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; • Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; • Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; • Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; • Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan • Pelayanan kesehatan	

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN	DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN	INDIKATOR	KET	DATA/TABEL
						orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien Virus). 2. Sanitasi dan Air bersih 3. Surveilans dan pengawasan KLB 4. Mobil Klinik 5. RS Lapangan 6. Pelayanan RS 7. Logistik	
PEKERJAAN UMUM	1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota; dan 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/kota	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Setiap Warga Negara yang berdomisili pada kabupaten/kota kekurangan air curah dan akan dilayani oleh penyelenggaran SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan	1. Jumlah SPAM Lintas Kab/Kota 2. Data akses dan kondisi pelayanan SPAM lintas kabupaten kota melalui jenis SPAM Jaringan Perpipaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi 3. Data demand/kebutuhan air minum curah untuk setiap kabupaten/kota di provinsi ybs (Base on RISPAM Kab/Kota) 4. Data potensi air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota didasarkan Rencana Induk Pengembangan SPAM	1. Cakupan Pelayanan Air Minum 2. Persentase (%) jumlah penduduk yang sudah dapat terlayani melalui pemenuhan air curah lintas kabupaten/kota; 3. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik 4. Cakupan Pelayanan Persampahan	1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; • Pembangunan Baru SPAM Lintas Kab/Kota • Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan • Perluasan SPAM	Tabel 2 – 126

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN	DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN	INDIKATOR	KET	DATA/TABEL
				(RISPAM) lintas kabupaten/kota. 5. Data klasifikasi wilayah kabupaten/kota yang termasuk daerah rawan air di provinsi yang bersangkutan 6. Jumlah rumah dengan akses air limbah domestk 7. Jumlah penduduk dengan akses air limbah domestk		Jaringan Perpipaan 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;	
PERUMAHAN RAKYAT	1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	1. Jumlah korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan, mana kala terjadi bencana; 2. Estimasi Kerusakan material (rumah) 3. Jumlah korban relokasi; 4. Jumlah ketersediaan penampungan sementara, mana kala terjadi bencana 5. Jumlah penampungan yang dibutuhkan mana kala terjadi bencana.	1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 2. Presentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh 3. Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana 4. Jumlah PSU terbangun	1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi; 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerinta Daerah provinsi;	TABEL 2- 126 Tabel 2-102 Tabel 2-103 Tabel 2-104 Tabel 2-105 Gambar 2-107 Gambar 2-133 Gambar 2-134 Gambar 2-135

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN	DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN	INDIKATOR	KET	DATA/TABEL
TRANTIBUMLINMAS	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provins	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warganegara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi		1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada 2. Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 3. Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi	TABEL 2- 126 Tabel 2-79
SOSIAL	1. rehabsosdas penyandang disabilitas telantar 2. rehabsosdas anak telantar; 3. rehabsosdas lansia telantar 4. Rehabsosdas tuna sos khususnya gepeng; dan 5. perlinjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 2. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; 3. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; 4. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam; 5. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	1. Jumlah penyandang disabilitas; 2. Jumlah panti yang Disabilitas; 3. Jumlah anak penyandang masalah sosial; 4. Jumlah panti anak/rumah singgah 5. Jumlah lanjut usia terlantar (tidak ada keluarga); 6. Jumlah panti lansia/rumah singgah 7. Jumlah jumlah tenaga/relawan rehabilitasi 8. sarana dalam panti	1. Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	TABEL 2-126 GAMBAR 2-100 GAMBAR 2-101 GAMBAR 2-102 Gambar 2-103

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN	DATA POKOK YANG DIBUTUHKAN	INDIKATOR	KET	DATA/TABEL
			tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi				

2.2.5. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Lampung juga sangat konsen terhadap pencapaian target target SDGs. Berikut kami sajikan sandingan indikator SDGs dengan indikator RPJMD.

TABEL 2- 141 Integrasi Indikator SDGs ke Dalam RPJMD di Provinsi Lampung

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Sub Bab 2.2.1.6
		Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan	Sub Bab 2.2.3.2.16
		Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Penyandang Disabilitas Tertangani	Sub Bab 2.2.3.6.1
		Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Fakir Miskin Penerima Bantuan	Sub Bab 2.2.3.6.1

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
		Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak	Sub Bab 2.2.3.2.9
		Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap	Imunisasi (Cakupan Desa/Kelurahan UCI Di Provinsi Lampung)	Sub Bab 2.2.3.2.9
		Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara	Pemakaian Kontrasepsi Usia Subur	Sub Bab 2.2.3.15
		Meningkatnya akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Layak	Sub Bab 2.2.3.4
		Meningkatnya akses sanitasi layak	Proporsi Rumah Tangga terhadap Akses Sanitasi Layak	Sub Bab 2.2.3.4
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD-SMP	Angka Partisipasi Murni	Sub Bab 2.2.3.1.3
		Meningkatnya APK SMA	Angka Partisipasi Kasar	Subbab 2.2.3.1.2
		Kepemilikan akte lahir untuk penduduk	Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	Sub Bab 2.2.3.12
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial	Korban Bencana Sosial Tertangani	Sub Bab 2.2.3.6.1
		Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks Resiko Bencana	Sub Bab 2.2.3.14

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Sub Bab 2.2.3.2.5
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan	Sub Bab 2.2.1.15
			Ketersediaan Pangan Utama	Sub Bab 2.2.3.9
			Penguatan Cadangan Pangan	Sub Bab 2.2.1.16
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	Sub Bab 2.2.3.2.3
		Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi	Sub Bab 2.2.3.2.5
		Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persalinan	Sub Bab 2.2.3.2.9
		Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	Imunisasi (Cakupan Desa/Kelurahan UCI Di Provinsi Lampung)	Sub Bab 2.2.3.2.9
		Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa	Prevalensi HIV/AIDS Provinsi Lampung	Sub Bab 2.2.3.1.1
		Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB)	Angka Penemuan TB Semua Jenis (Case Notification Rate/CNR)	Sub Bab 2.2.3.2.10

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
		Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	Angka Kesakitan Malaria	Sub Bab 2.2.3.2.13
		Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk	Obesitas	Sub Bab 2.2.3.2.14
		Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Korban NAPZA tertangani	Sub Bab 2.2.3.6.1
		Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	Pemakaian Kontrasepsi Usia Subur	Sub Bab 2.2.3.15
		Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate	Sub Bab 2.2.3.15
		Menurunnya angka kelahiran pada remaja	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19	Sub Bab 2.2.3.15
		Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Jaminan Kesehatan	Sub Bab 2.2.3.2.16
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Akreditasi Sekolah	Subbab 2.2.3.1.13

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar	Subbab 2.2.3.1.2
		Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Sub Bab 2.2.3.1.7
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Murni	Sub Bab 2.2.3.1.3
		Meningkatnya angka melek aksara	Angka Melek Huruf	Sub Bab 2.2.3.1.6
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender	Anggaran Responsive Gender	Sub Bab 2.2.3.8
		Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	Kekerasan Terhadap Anak	Sub Bab 2.2.3.8
		Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan	Kekerasan Terhadap Perempuan	Sub Bab 2.2.3.8
		Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pemakaian Kontrasepsi Usia Subur	Sub Bab 2.2.3.15
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak	Proporsi Rumah Tangga terhadap Akses Air Minum Layak	Sub Bab 2.2.3.4
		Meningkatnya akses terhadap	Proporsi Rumah Tangga terhadap Akses Sanitasi Layak	Sub Bab 2.2.3.4

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
	berkelanjutan untuk semua.	sanitasi yang layak		
		Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sub Bab 2.2.3.11
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Sub Bab 2.2.3.27
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	Sub Bab 2.2.1.3
			Pertumbuhan Ekonomi	Sub Bab 2.2.1.1
			Inflasi	Sub Bab 2.2.1.2
		Terciptanya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Sub Bab 2.2.1.11
			Kelompuk Wirausaha Muda	Sub Bab 2.2.3.20
		Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung	Sub Bab 2.2.3.24
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Infrastruktur Tangguh	Jalan Mantap	Subbab 2.2.3.3
			Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Subbab 2.2.3.3
		Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	PDRB Industri Pengolahan	Sub Bab 2.2.1.1

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Koefisien Gini	Koefisien Gini	Gambar 2-16
		Tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Sub Bab 2.2.1.6
		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Daerah Tertinggal	Sub Bab 2.1.8
		Berkurangnya Desa Tertinggal	Desa Tertinggal	Sub Bab 2.2.3.13
		Meningkatnya Desa Mandiri	Jumlah Status Desa Membangun (IDM)	Sub Bab 2.2.3.13
		Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Demokrasi	Sub Bab 2.2.3.5
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak	Rumah Layak Huni	Sub Bab 2.2.3.4
			Kawasan Kumuh	Sub Bab 2.2.3.4
		Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Resiko Bencana	Sub Bab 2.2.3.14
		Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan	Akses Pelayanan Persampahan	Sub Bab 2.2.3.11
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pola Konsumsi	Pengeluaran Konsumsi Per kapita	Sub Bab 2.1.8
		Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Sub Bab 2.2.3.11

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
		Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu	Akses Pelayanan Persampahan	Sub Bab 2.2.3.11
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah	Indeks Resiko Bencana	Sub Bab 2.2.3.14
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Bertambahnya luasan kawasan konservasi	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Sub Bab 2.2.3.26
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan	Sub Bab 2.2.3.26
		Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Sub Bab 2.2.3.26

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Sub Bab 2.2.3.11
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak	Kekerasan Terhadap Anak	Sub Bab 2.2.3.8
		Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian	Opini BPK	Sub Bab 2.2.1.14
		Meningkatnya persentase Skor atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	SAKIP	Sub Bab 2.2.1.14

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	2	3	4	5
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Sub Bab 2.3

2.3. Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2015-2017

TABEL 2- 142 Indikator Kinerja dan Target Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015-2017

Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian Target RPJMD Hingga 2017
Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan memperkuat Kemandirian Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah	1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,13%	5,15%	5,17	5,25	7,00 -7,50 %	73,86
			2. Indeks Gini	0,33	0,36	0,33	0,33	0,32	96,97
			3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	252.883.103	279.417.617	306.699.735	333.681.431	318.996.629	96,69
			4. PDRB atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	199.536.920	209.813.980	220.657.350	232.214.280	262.203.722	84,15
			5. PDRB per kapita (harga berlaku) (Juta rupiah)	31,15	34,14	37,21	39,86	39,45	94,32
			6. Lajupertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Persen)	3,45	3,16	0,83	1,33	4,48	70,54
			7. Nilai Tukar Petani (NTP)	103,17	103,9	105,16	105,84	104,84	100,24
			8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105,86	94,24	110,36	117,1	114,29	96,56
		2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1	78	90	-	92,5	97,3
		3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;	1. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,48%	3,89	6,18	9,08	7,46%	83

Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian Target RPJMD Hingga 2017
		4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung;	1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan	1,98%	6,65	6,31	-	5,24%	120,42
			2. Pertumbuhan ekspor non migas	17,40%	17,59%	21,36%	-	6,70%	318,81
		5. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah ;	1. Jumlah Koperasi Aktif	2.760 unit	3.024 unit	3.121 unit	-	3.250 unit	96,03
			2. Jumlah UMKM	382425 unit	173591 unit	96.548 unit	-	414398 unit	23,3
		6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah ;	1. Laju pertumbuhan investasi/PMTB (%)	5,43	9,26	8,07	-	14,56	55,43
		7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah.	1. *Jumlah wisatawan nusantara (orang)	5.530.803	7.381.774	10.381.566,00	-	7.155.495	145,09
			2. *Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	114.907	155.053	231.892	-	153,914	150,66
		8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).	1. Pertumbuhan PAD (%)	-1,2	5,4	16,12	-	3,28%	491.46
Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.	1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang;	1. Kemantapan jalan provinsi	67,02%	70,02%	77,04	79,89	85,00%	90,63
		2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;	1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Sesuai	100
		3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah	1. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara	65%	80%	75%	-	100%	80

Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian Target RPJMD Hingga 2017
		tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktusekarang maupun yang akan datang;	2. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan di bangun	12	14	16	-	20	80
		4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);	1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	55,06%	52,41%	53,79%	56,78%	100%	87,2
			2. Tingkat kawasan permukiman kumuh	-	2,94%	2,63	2,21	0%	78,74%
			3. Tingkat rumah tangga yang memilikiAkses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	44,83%	58,58%	52,89%	52,48%	100%	79,07%
			4. Tingkat rumah layak huni	-	93,12%	94,19%	96,03%	60%	137,23%
		5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	1. Laju Pertumbuhan sektor Per tambangan	4,2	4,36	6,46	-0,08	2,5	174,4
			2. Rasio elektrifikasi rumah tangga	80,46%	84,71	84,15	-	83,47%	99,19
Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK, dan inovasi, budaya masyarakat	1. meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat	1. Meningkatnya angka melek huruf	1. Angka melek huruf	96,67%	96,78%	96,89%	96,93%	98%	101,03
		2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	1. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	113,38	111,44	109,77	110,11	112,08	99,92
			2. APK SMP/MTs/Paket B	100,83	93,58	91,04	94,18	97,62	102,39
			3. Angka partisipasi murni (APM)SD/MI/Paket A	98,32	98,46	99,02	99,21	95,75	96,74
			4. APM SMP/MTs/Paket B	78,20	78,34	79,24	80,23	77,1	96,86
			5. Angka rata-rata lama sekolah	7,56	7,63	7,79	7,82	7,7	99,09

Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian Target RPJMD Hingga 2017
dan toleransi kehidupan beragama			6. Angka Kelulusan	100%	100%	100%	-	100%	100
			7. Angka Melanjutkan SMP ke SMA	79,23	72,06	96,32	-	100%	96,32
			8. Angka Melanjutkan SMA ke PT	72,06	55	-	-	75%	73,33
		3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menegah dan tinggi;	1. APK SMA/SMK/MA /Paket C	73,9	82,98	85,16	81,56	78%	99,76
			2. APM SMA/SMK /MA / Paket C	58,39	58,85	58,97	59,18	70%	84,54
	2. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	69,9	69,94	69,95	70,18	72	97,22
			2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,88	3,76	3,89	3	24	616,97
			3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	95,46	81,07	78,78	69	309	392,23
			4. Prevalensi Balita Kurang Gizi (*underweight*)	15,64	14,1	18,5	15,9	17	91,89
			5. Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan / *case notification rate*) per 100.000 penduduk	99	75	79,9	185	154	79,87
			6. Angka Kesakitan Positif Malaria (API) per 1000 penduduk	0.49	0,4	0,52	0.38	0,1	58,82
			7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun	0,01	0,01	0,03	0,34	0,49	163,33
			8. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	38,74	55,04	18,38	34,31	46	83,58
	3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya	1. Terinternali sasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	1. Cagar Budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara	1.576	1.546	1.576	-	3.267	48,24
			2. Jumlah pengunjung museum	137.987	154.722	103.760	-	225.000	46,12
			3. Jumlah sanggar kesenian	494	269	500	-	960	52,08

Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian Target RPJMD Hingga 2017
	4. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial	1. persentase penduduk miskin	14,35	13,86	13,04	13,01	11,10%	85,12
			2. Indeks kedalaman kemiskinan	2,36	1,92	2,11	2,06	1,4	72,92
			3. Indeks keparahan kemiskinan	0,6	0,41	0,53	0,48	0,34	64,15
			4. Jumlah PMKS yang ditangani (jiwa)	8.595	10.713	9.355	11.249	8.220	11.381
	5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja	1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;	1. Rasio ketergantungan	49,57	49,6	49,6	-	46,75	94,25
			2. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	69,95	68,63	71,63	72,84	66,46%	102,06
			3. Tingkat pengangguran terbuka	5,14	4,62	4,33	4,06	4,17	96,3
	6. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi	1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung (KK)	55	85	15	-	125	68
			2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru	3 lembaga	1	1	-	6 lembaga	16,67
	7. Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender	1. Jumlah SKPD Provinsi yang mengimple-mentasikan anggaran responsif gender	5,45	58,18	58,18	59,98	36,40%	62,56
			2. Jumlah perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif	450 orang	320 orang	320 orang	150 orang	300 orang	106,67
		2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	1. Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung	1 kab	-	0	3	3 Kab/Kota	33,33
			2. Penanganan kasus perempuan dan anak	95 kasus	220	75	118	200 Kasus	86,5
	8. Mewujudkan kreativitas pemuda dan atlet yang berprestasi dibidang olahraga	1. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;	1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional	8 besar	15 besar	6 besar	-	5 Besar	83,3
			2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan	20 kelompok		30 Kelompok	-	35 Kelompok	85,71

Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian Target RPJMD Hingga 2017
	9. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Kemsyarakatan dan Keagamaan yang Toleran	1.Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1. Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk		0,245138889	.1296	-	0,235416667	93,9
	10.Meningkatkan Inovasi	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi	1. Jumlah rumusan kebijakan *(policy paper)* pembangunan daerah yang aplikatif	9 policy paper	8 policy paper	8 policy paper	-	40	42,5
			2.Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa	5 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	-	15 kab/kota	80
Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Mewujudkan keseimbangan lingkungandan keberlanjutan pembangunan.	1.Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA;	1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar	D	C	C	-	B	75
			1. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta 2. 3. PROPER	70	110	80	- - -	140	50
		2.Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;	1. Tingkat pencemaran air pada sungai utama	45%	40%	35%	-	25%	40
		3.Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis	1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove	86364 hektar	106.953 hektar	129.892 hektar	-	175770 hektar	73,9
Misi Kelima: Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan	1. Mewujudkan keadilan,Kepastian, dan kemanfaatan hukum.	1. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat;	1. Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan	10 raperda 66 pergub	10 raperda 35 pergub		-	10 raperda 30 pergub	210/336,67
			2. Penyelesaian Kasus Tanah	6 kasus/thn	6 kasus/thn	6 kasus/thn	-	6 kasus/tahun	100

Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian Target RPJMD Hingga 2017
Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif	2. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif	1. Meningkatnya kinerja pemerintah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima	1. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	CC	B	B	-	BB	66,66
			2. Hasil Evaluasi Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	100
		2. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	- -	WTP	100
		3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	50,00%	41,70%	41,70%	-	90%	46,33
			2. %tase penurunan Pelanggaran terhadap Standar Atas Pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek dan Pembinaan dan Pengawasan	50%	14%	14%	-	10%	71,42
	3. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi	1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata	1. Konsistensi antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	-	100%	100
			2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)	6,23	6,23	6,23	-	7	89
			3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat	B	B	B	-	A	67
	4. Merealisasikan pembangunan politik	1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.	1. Indeks demokrasi	71,62	65,95	61	68,67	73,5	89,73

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perUndang-Undangan (*money follow function*). Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan maupun belanja daerah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan memiliki pengaruh terhadap ekuitas dana lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya khususnya dalam konteks keuangan daerah. Sementara pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis APBD Provinsi Lampung dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2014 – 2017. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun yang tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di

masa depan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

TABEL 3- 1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 - 2018

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2015	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2018 (un-audited)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	**PENDAPATAN**	**4.526.532.292.008,86**	**4.787.308.489.026,39**	**5.588.722.511.301,34**	**6.813.755.009.492,40**	**7.130.715.477.302,22**	12,27%
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.274.685.572.912,86**	**2.247.342.667.611,39**	**2.368.796.251.247,34**	**2.750.596.478.331,40**	**2.923.169.222.111,22**	6,65%
1.1.1.	Pajak Daerah	1.946.452.924.019,62	1.963.322.716.952,00	2.051.836.519.458,22	2.451.408.220.072,00	2.644.935.044.111,66	8,19%
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.253.336.152,00	10.376.053.695,00	7.184.465.984,00	7.322.619.001,00	7.844.961.892,00	-2,39%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	25.462.864.859,93	25.715.957.116,73	26.696.866.021,45	27.522.159.554,80	27.771.046.310,18	2,20%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	293.516.447.881,31	247.927.939.847,66	283.078.399.783,67	264.343.479.703,60	242.618.169.797,38	-4,05%
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.472.486.568.518,00**	**1.514.291.528.636,00**	**3.158.712.900.538,00**	**2.643.744.659.461,00**	**4.207.157.805.191,00**	38,57%
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	142.641.116.840,00	105.182.867.100,00	145.745.610.056,00	144.778.671.118,00	122.496.302.093,00	-0,94%
1.2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	144.940.790.678,00	66.912.822.536,00	39.730.387.355,00	104.561.372.263,00	93.544.761.457,00	14,55%
1.2.3.	DAU	1.136.053.041.000,00	1.097.129.439.000,00	1.321.679.032.000,00	1.851.595.354.000,00	1.854.701.094.160,00	14,33%
1.2.4.	DAK	48.851.620.000,00	245.066.400.000,00	1.651.557.871.127,00	542.809.262.080,00	2.136.415.647.481,00	300,51%
1.2.5	DAK Non Fisik						
1.3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**779.360.150.578,00**	**1.025.674.292.779,00**	**61.213.359.516,00**	**1.419.413.871.700,00**	**388.450.000,00**	514,10%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	22.926.122.478,00	19.264.124.919,00	10.426.215.516,00	10.374.402.200,00	388.450.000,00	-39,65%

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2015	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2018 (un-audited)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	748.609.106.100,00	1.006.209.812.500,00	40.671.144.000,00	7.500.000.000,00		-60,78%
1.3.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.824.922.000,00	200.355.360,00	10.116.000.000,00	1.401.539.469.500,00		4626,57%
2	**Belanja Daaerah**	**4.454.187.317.371,15**	**4.781.202.048.883,15**	**5.476.921.595.654,51**	**6.948.838.067.137,69**	**7.570.890.753.753,72**	14,43%
2.1	**Belanja Tak Langsung (Btl)**	**2.144.560.814.835,11**	**2.584.515.351.359,29**	**3.329.844.924.946,00**	**4.076.112.960.248,19**	**4.531.778.255.903,22**	20,74%
2.1.1	Belanja Pegawai	544.114.849.553,00	700.857.891.664,00	736.252.705.918,00	1.662.465.213.614,00	1.815.028.256.755,00	42,21%
2.1.2	Belanja Hibah	847.424.324.446,11	1.092.450.978.749,00	1.450.803.387.985,00	1.288.548.794.355,83	1.498.345.481.599,00	16,70%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	4.521.800.000,00	6.409.900.000,00	2.587.280.000,00	4.509.000.000,00	529.560.000,00	-7,97%
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota Dan Pemdes	723.095.812.552,00	762.543.531.454,29	1.089.846.007.459,00	1.018.147.805.682,36	1.128.477.614.768,22	13,16%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kabupaten/Kota/ Pemdes Serta Parpol	20.173.866.284,00	22.253.049.492,00	46.368.543.582,00	81.576.898.096	81.983.574.200	48,78%
2.1.6	Belanja Subsidi					1.852.030.960,00	100,00%
2.1.7	Belanja Bunga					1.784.056.321,00	100,00%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.230.162.000,00		3.987.000.000,00	20.865.248.500,00	3.777.681.300,00	85,36%

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2015	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2018 (un-audited)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
2.2	**Belanja Langsung (Bl)**	**2.309.626.502.536,04**	**2.196.686.697.523,86**	**2.147.076.670.710,51**	**2.872.725.106.889,50**	**3.039.112.497.850,50**	8,11%
2.2.1	Belanja Pegawai	109.214.896.332,00	90.380.434.285,00	103.053.242.520,00	54.011.945.529,00		-37,70%
2.2.3	Belanja Barang Dan Jasa	1.274.956.923.030,12	1.237.307.067.778,86	1.038.243.623.007,51	1.367.228.488.664,86	1.309.826.167.166,66	2,11%
2.2.4	Belanja Modal	925.454.683.173,92	868.999.195.460,00	1.005.779.805.183,00	1.451.484.672.695,64	1.729.286.330.683,84	18,27%
3	**PEMBIAYAAN**	**39.211.205.075,72**	**96.405.154.713,43**	**92.511.594.856,67**	**189.312.510.503,50**	**533.882.206.308,21**	107,12%
3.1	Penerimaan Pembiayan Daerah	41.141.205.075,72	111.474.702.213,43	102.511.594.856,67	204.312.510.503,50	534.042.206.308,21	105,90%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.930.000.000,00	15.069.547.500,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	160.000.000,00	149,56%

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdiri atas tiga kelompok sumber pendapatan utama yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama Periode tahun 2014-2018, proporsi kontribusi dari ketiga sumber tersebut memiliki perkembangan dengan trend yang berbeda sehingga terjadi pergeseran struktur pendapatan daerah. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada periode 2014-2018 terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,27%; PAD tumbuh dengan rata-rata sebesar 6,65 %, Dana Perimbangan tumbuh dengan rata-rata sebesar 38,57 %; lain-lain pendapatan yang sah 514,10 %.

TABEL 3- 2 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN 2015	PERTUMBUHAN 2016	PERTUMBUHAN 2017	PERTUMBUHAN 2018	RERATA
1	PENDAPATAN	5,76%	16,74%	21,92%	4,65%	14,81%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-1,20%	5,40%	16,12%	6,27%	6,77%
1.2	Dana Perimbangan	2,84%	108,59%	-16,30%	59,14%	31,71%
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	31,60%	-94,03%	2218,80%	-99,97%	718,79%

3.1.1.2 Belanja Daerah

Pada periode pengamatan tahun 2014-2018, rata-rata capaian realisasi belanja Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 91,80 %. Hal ini menunjukkan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja. Besarnya deviasi capaian relaisasi belanja perlu diperhatikan untuk setiap tahun anggaran. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan antara lain 1) penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya terkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2) optimalisasi realisasi belanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan.

Capaian yang baik adalah berada di sekitar 100 %, mengindikasikan capaian yang optimal. Capaian tertinggi belanja daerah Provinsi Lampung pada tahun 2014 sebesar 96,49 % dengan realisasi 4,454 triliun rupiah. Sedangkan capaian terendah pada tahun 2017 sebesar 87,80 % dengan realisaasi 6,948 triliun rupiah. Meskipun dengan persentase capaian bervariasi pada periode 2014-2018, realisasi belanja daerah maupun target yang ditetapkan terus meningkat. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel berikut.

TABEL 3- 3 Target dan Realisasi Belanja Daerah

No	Tahun Anggaran	Target	Realiasasi	Capaian (%)	Bertambah/berkurang
1	2014	4.615.977.560.125,85	4.454.187.317.371,15	96,49%	-161.790.242.754,70
2	2015	5.091.450.250.642,43	4.781.202.048.883,15	93,91%	-310.248.201.759,28
3	2016	5.918.418.737.017,28	5.476.921.595.654,51	92,54%	-441.497.141.362,77
4	2017	7.914.428.855.785,50	6.948.838.067.137,69	87,80%	-965.590.788.647,81
5	2018	8.579.986.296.817,41	7.570.890.753.753,72	88,24%	-1.009.095.543.063,69

Belanja daerah dibedakan menjadi dua, yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen belanja daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan komponen belanja daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2014 belanja tidak langsung sebesar 48 %; pada tahun 2015 sebesar 54 %; pada tahun 2016 sebesar 61 %; pada tahun 2017 sebesar 59 %. Sedangkan Belanja Langsung pada tahun 2014 sebesar 52 %; pada tahun 2015 sebesar 46 %; pada tahun 2016 sebesar 39 %; pada tahun 2017 sebesar 41 %; pada tahun 2018 sebesar 40 %. Perkembangan proporsi belanja daerah ditunjukan pada Grafik berikut:

Gambar 3- 1 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014-2018

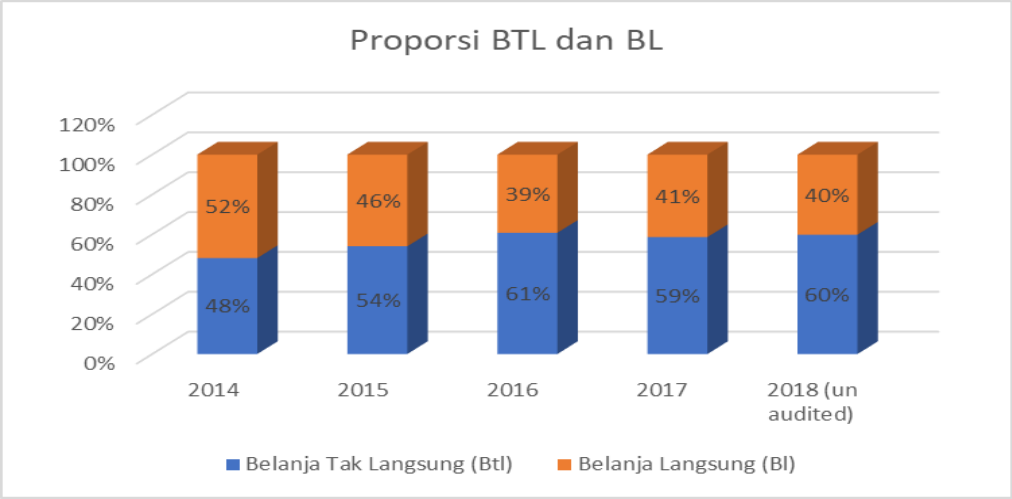

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pada periode pengamatan tahun 2014-2018, rata-rata capaian realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 100 % Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Capaian target pembiayaan Provinsi Lampung ditunjukkan pada Tabel di bawah.

TABEL 3- 4 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2014-2018

No	Tahun Anggaran	Target	Realiasasi	Capaian (%)	Bertambah/berkurang
1	2014	39.186.509.332,72	39.211.205.075,72	100,06%	24.695.743,00
2	2015	95.361.530.047,43	96.405.154.713,43	101,09%	1.043.624.666,00
3	2016	92.511.594.856,67	92.511.594.856,67	100,00%	-
4	2017	189.312.510.503,50	189.312.510.503,50	100,00%	-
5	2018	644.069.452.858,21	533.882.206.308,21	82,89%	-110.187.246.550,00

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nominal pembiayaan netto yang positif menunjukkan

bahwa daerah mampu mencukupi pengeluaran pembiayaan dikarenakan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, pembiayaan netto di Provinsi Lampung selama tahun 2014 hingga 2018 selalu menunjukan capaian positip. Capaian pembiayaan netto mencapai 100 % atau lebih. Selanjutnya nilai realisasi juga meningkat dari 39,211 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 553,882 miliar rupiah pada tahun 2018.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

3.1.2.1. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (current asset) dan aset non lancar/ tetap (long-term asset). Jumlah Aset Lancar sebesar 669,06 miliar rupiah pada tahun 2014 menurun menjadi 214,77 miliar rupiah pada tahun 2017, dengan rata - rata pertumbuhan -26,92; jumlah investasi jangka panjang meningkat yang semula sebesar 271,50 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 401,48 miliar rupiah pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan 14,27 %; jumlah aset tetap juga meningkat yang semula 5,05 triliun rupiah pada tahu 2014 menjadi 6,41 triliun rupiah pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan 15,69 %; jumlah aset lainnya juga meningkat yang semula sebesar 117,09 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 197,77 miliar rupiah pada tahun

2017, dengan rata-rata pertumbuhan 32,88 %. Secara keseluruhan jumlah aset Provinsi Lampung meningkat yang semula sebesar 6,109 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 7,230 triliun rupiah pada tahu 2017, dengan rata-rata pertumbuhan 10,58 %.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jumlah total kewajiban Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang semula sebesar 578,26 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 863,91 miliar rupiah pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan 20,05 %.

3.1.3. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Jumlah ekuitas dana Provinsi Lampung yang semula sebesar 5,53 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 6,36 triliun rupiah pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan 10,55 %.

TABEL 3- 5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah 2014-2017

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
1	**ASET**					
1.2	**ASET LANCAR**					
	Kas di Kas Daerah	56.415.688.674,62	85.298.337.708,41	188.805.756.517,77	45.791.031.971,12	32,00%
	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.727.281.789,00	1.097.632.619,00	1.781.738.707,00	7.675.774,00	-36,00%
	Kas di Bendahara Penerimaan'				84.976.050,00	33,00%
	Kas di BLUDs	54.091.101.785,81	16.551.523.888,26	13.725.015.278,73	7.581.349.972,09	-44,00%
	Kas di Bendahara BOS				405.173.060,00	33,00%
	Investasi Jangka Pendek					
	Piutang Pajak	89.151.270.632,00	662.056.674.953,09	125.685.139,00	171.368.366,00	193,00%
	Penyisihan Piutang Pajak		(315.756.786.442,34)	(628.425,70)	(856.841,83)	-55,00%
	Piutang Pajak Netto	**89.151.270.632,00**	**346.299.888.510,75**	**125.056.713,30**	**170.511.524,17**	**75,00%**
	Piutang Retribusi	19.620.758.503,50	339.172.694,00	25.205.200,00	3.390.000,00	-92,00%
	Penyisihan Piutang Retribusi			(126.026,00)	(16.950,00)	-62,00%
	Piutang Retribusi Netto	**19.620.758.503,50**	**339.172.694,00**	**25.079.174,00**	**3.373.050,00**	**-92,00%**

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
	Beban Dibayar Dimuka		313.284.509,17	247.418.650,00	137.154.661,25	11,00%
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	34.550.620.169,00	12.262.378.987,04	7.962.457.873,60	8.287.649.992,37	-32,00%
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(6.918.038,18)	(14.768.335,71)	(16.581.796,85)	9,00%
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	**34.550.620.169,00**	**12.255.460.948,86**	**7.947.689.537,89**	**8.271.068.195,52**	**-31,87%**
	Bagian Lancar TPTGR	305.353.799,33	318.203.666,00	232.770.610,67	93.378.152,67	-27,51%
	Penyisihan Bagian Lancar TPTGR		(776.771,04)	(814.247,29)	(349.605,76)	-50,75%
	Bagian Lancar TPTGR Netto	**305.353.799,33**	**317.426.894,96**	**231.956.363,38**	**93.028.546,91**	**-27,62%**
	Piutang Lainnya	999.515.963,00	16.509.032.953,00	14.250.977.643,00	5.957.295.430,00	493,28%
	Penyisihan Piutang Lainnya		(96.295.912,27)	(87.666.580,72)	(46.686.513,06)	-51,90%
	Piutang Lainnya Netto	**999.515.963,00**	**16.412.737.040,73**	**14.163.311.062,28**	**5.910.608.916,94**	**490,03%**
	Persediaan	410.206.626.537,61	187.327.733.864,76	45.921.427.205,56	146.315.659.719,45	29,60%
	Jumlah Aset Lancar	**669.068.217.853,87**	**666.213.198.678,90**	**272.974.449.209,91**	**214.771.611.441,45**	**-26,92%**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**					
	Investasi Non Permanen	14.763.259.612,00				-33,33%

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
	Dana Bergulir	14.763.259.612,00	14.705.177.112,00	14.593.193.612,00	14.462.216.079,00	-0,68%
	Investasi Permanen	256.743.610.617,50				-33,33%
	Penyertaan Modal Pemerintah	253.927.413.617,50	327.056.520.727,82	353.746.125.921,71	384.206.968.748,00	15,19%
	Investasi Permanen Lainnya	2.816.197.000,00	2.816.197.000,00	2.816.197.000,00	2.816.197.000,00	0,00%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**271.506.870.229,50**	**344.577.894.839,82**	**71.155.516.533,71**	**401.485.381.827,00**	**14,27%**
1.3	**ASET TETAP**					
	Tanah	477.725.440.330,00	475.906.241.354,62	540.023.870.298,60	821.535.005.961,60	21,74%
	Peralatan dan Mesin	646.554.635.967,00	735.841.468.721,19	854.134.368.601,19	1.243.106.329.531,04	25,14%
	Gedung dan Bangunan	635.251.113.378,00	712.041.562.622,81	959.592.334.728,81	2.365.893.824.377,73	64,47%
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.791.064.393.417,92	3.556.803.539.472,92	4.208.085.873.691,92	4.776.634.141.654,92	19,75%
	Aset Tetap lainnya	15.805.725.553,00	20.211.263.780,00	26.654.054.590,00	121.603.130.853,00	138,66%
	Konstruksi dalam Pengerjaan	485.003.442.039,00	505.193.269.489,00	520.963.700.877,00	549.111.821.847,00	4,23%
	Akumulasi Penyusutan		(2.777.570.278.640,92)	(2.959.077.427.327,00)	(3.461.607.038.356,91)	-25,49%
	Jumlah Aset Tetap	**5.051.404.750.684,92**	**3.228.427.066.799,62**	**4.150.376.775.460,52**	**6.416.277.215.868,38**	**15,69%**
1.4	**DANA CADANGAN**					
	Dana Cadangan					

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
	Jumlah Dana Cadangan					
1.5	**ASET LAINNYA**					
	Tagihan Penjualan Angsuran					
	Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah		32.779.066.620,01	32.092.535.362,51	26.574.310.722,90	26,90%
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	534.356.471,99	114.880.402,67	44.959.250,00	21.502.250,00	-63,85%
	Aset Tidak Berwujud		5.350.517.000,00	6.381.468.000,00	10.784.527.500,00	62,76%
	Amortisasi		(201.070.616,33)	(1.279.749.200,00)	(2.629.427.125,00)	180,64%
	Aset Tidak Berwujud Netto		**5.149.446.383,67**	**5.101.718.800,00**	**8.155.100.375,00**	**52,97%**
	Aset Lain Lain	116.559.422.253,00	60.905.504.953,60	70.527.215.655,19	214.106.518.783,02	57,21%
	Penyisihan Piutang Aset Lain Lain		(10.013.864.391,00)	(19.040.207.077,98)	(51.079.126.889,62)	52,80%
	Aset Lain lain Netto		**50.891.640.562,60**	**51.487.008.577,21**	**163.027.391.893,40**	**105,94%**
	Jumlah Aset Lainnya	**117.093.778.724,99**	**88.935.033.968,95**	**88.726.221.989,72**	**197.778.305.241,30**	**32,88%**
	JUMLAH ASET	**6.109.073.617.493,28**	**4.328.153.194.287,29**	**4.883.232.963.193,86**	**7.230.312.514.378,13**	**10,58%**
2	**KEWAJIBAN**					
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**					

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
	Utang PFK	3.293.074.702,00	437.971.874,00			-62,23%
	Utang Bunga					0,00%
	Pendapatan diterima di muka					0,00%
	Beban yang masih harus dibayar			1.930.840.328,00	1.722.986.299,00	29,75%
	Utang Jangka Pendek Lainnya	574.975.057.411,09	689.787.395.461,40	522.141.060.722,80	862.196.650.348,27	20,26%
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**578.268.132.113,09**	**690.225.367.335,40**	**524.071.901.050,80**	**863.919.636.647,27**	**20,05%**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**					
	Utang Dalam Negeri					0,00%
	Utang Dalam Negeri					0,00%
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang					**0,00%**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**578.268.132.113,09**	**690.225.367.335,40**	**524.071.901.050,80**	**863.919.636.647,27**	**20,05%**
	EKUITAS	**5.530.805.485.380,19**	**3.637.927.826.951,89**	**4.359.161.063.143,05**	**6.366.392.877.730,86**	**10,55%**
	JUMLAH EKUITAS	**5.530.805.485.380,19**	**3.637.927.826.951,89**	**4.359.161.063.143,05**	**6.366.392.877.730,86**	**10,55%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**6.109.073.617.493,28**	**4.328.153.194.287,29**	**4.359.161.063.143,05**	**7.230.312.514.378,13**	**10,58%**

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Provinampung, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembengunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Tabel berikut menunjukkan proporsi belanja kebutuhan aparatur di Provinsi Lampung.

TABEL 3- 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2015-2017

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	%tase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun anggaran 2015	791.238.325.949,00	4.796.271.596.383,15	16,50%
2	Tahun anggaran 2016	839.305.948.438,00	5.486.921.595.654,51	15,30%
3	Tahun anggaran 2017	1.716.477.159.143,00	6.963.838.067.137,69	24,65%

Pada tahun 2015, jumlah Belanja Aparatur sebesar 791,23 miliar rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 4,79 triliun rupiah; di tahun 2016 belanja aparatur sebesar 839,30 triliun rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 5,48 triliun rupiah; di tahun 2017 belanja aparatur sebesar 1,71 triliun rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran

pembiayaan sebesar 6,96 triliun rupiah. Rata-rata belanja aparatur Provinsi Lampung dibandingkan total belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berada pada kisaran 18,81 %. Pada tahun 2015 proporsi belanja aparatur sebesar 16,50 %; ditahun 2016 proporsi belanja aparatur sebesar 15,30 %; di tahun 2017 proporsi belanja aparatur sebesar 24,65 %. Perkembangan proporsi belanja aparatur ditunjukan pada Grafik:

GAMBAR 3- 2 Proporsi Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan 2015-2017

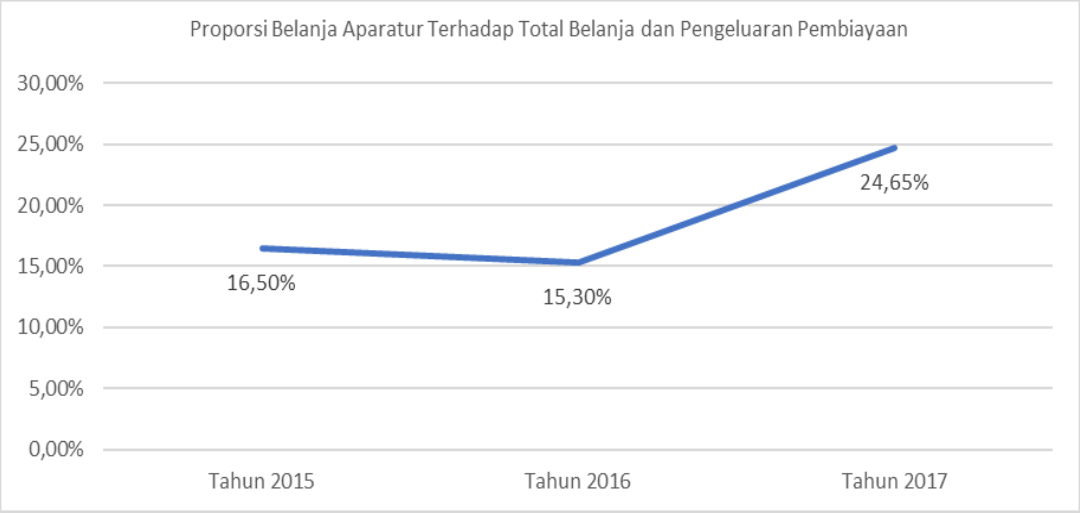

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Provinsi Lampung ditinjau berdasarkan surplus atau pun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit riil.

Kondisi keuangan daerah Provinsi Lampung periode 2015-2017 mengalami 1 (satu) kali surplus riil dan dua kali defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2016 sebesar 101,80 miliar rupiah,

sedangkan defisit anggaran terjadi pada tahun 2015 dan 2017 masing-masing sebesar -8,96 miliar rupiah dan -150,08 mliar rupiah. Seperti digambarkan pada Tabel dan Grafik di bawah.

TABEL 3- 7 Defisit Riil Anggaran 2015-2017

NO	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	4.787.308.489.026,39	5.588.722.511.301,34	6.813.755.009.492,40
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	4.781.202.048.883,15	5.476.921.595.654,51	6.948.838.067.137,69
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.069.547.500,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Defisit riil	-8.963.107.356,76	101.800.915.646 ,83	-150.083.057.645,29

GAMBAR 3- 3 Surplus/Defisit Riil 2015-2017

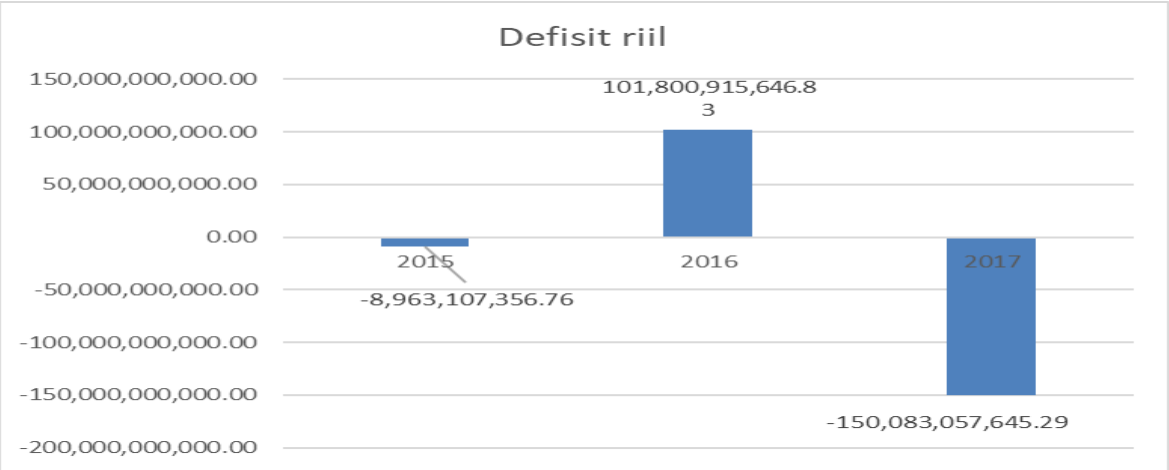

Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-

komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pada tahun 2015 Provinsi Lampung mengalami defisit riil sebesar 8,96 miliar rupiah tetapi dapat ditutupi dengan SiLPA sebesar 111,47 miliar rupiah dengan proporsi mencapai 1243,71 %; ditahun 2016 surplus sebesar 101,80 miliar rupiah dengan nilai SiLPA sebesar 102,51 miliar rupiah; ditahun 2017 Provinsi Lampung mengalami defisit riil sebesar 150,08 miliar rupiah ditutupi dengan SiLPA sebesar 204,31 miliar rupiah dengan proporsi sebesar 136,13 %. Tabel dibawah menunjukan komposisi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat digunakan sebagai penutup defisit riil.

TABEL 3- 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran 2015-2017

Uraian	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	111.474.702.213,43 (1243,71)	102.511.594.856,67 (surplus)	204.312.510.503,50 (136,13)
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Lampung terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan

berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Terkait dengan peroyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2019-2024 dirumuskan beberapa kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/ wajib pajak
b. Meningkatkan dan mengembangkan inovasi sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komuniaksi (TIK)
c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi.
d. Menyempurnakan dan mengevaluasi dasar hukum pungutan.
e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembentukan PAD dengan mendorong BUMD untuk menjalankan bisnis yang lebih profitable (transformasi bisnis).
f. Meningkatkan Koordinasi internal maupun eksternal.
g. Meningkatkan Pengawasan pada system dan prosedur serta pelaksanaaan pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan PAD yang telah dikemukakan di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Provinsi Provinsi Lampung 2019-2024 menggunakan asumsi sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi pendapatan memperhatikan kondisi penerimaan PAD selama periode 2010-2015. Namun demikian dari angka target yang telah ditetapkan pada periode 2019-2024 sebagaimana terlampir harus diimbangi dengan FAKTOR KOREKSI di sektor mata pajak sebagai akibat dari :

1. Fluktuasi realisasi pendapatan pada pos PKB dan BBN-KB sebagai akibat pengaruh perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal yang bersifat mengganggu perekonomian regional
2. *Trend* pendapatan pajak BBN-KB mengalami penurunan dari tahun ke Tahun

3. *Trend* Pajak PKB mengalami kenaikan namun pada Triwulan ke-IV mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan III
4. Realisasi dari target sangat dipengaruhi oleh situasi kondisi perekonomian di tingkat Global, Nasional dan Regional khususnya pada berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh Pemerintah di Tingkat Pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

Pajak daerah

Merupakan komponen PAD yang memiliki kontribusi terbesar dalam periode 2015-2019 yang menyumbang ± 86% dari total PAD. Pajak daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Subsektor PKB dan BBN-KB

Penerimaan pada subsektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun yang dipengaruhi dari inovasi Pemerintah daerah yang telah mengupayakan sistem informasi pendapatan yang menyesuaikan perkembangan teknologi. Pada oktober 2018 telah diresmikan ***e-Salam*** yaitu Pembayaran PKB melalui ATM-Samsat pada ATM Bank Lampung; ***i-Samsat*** yaitu Aplikasi Pengelolaan PKB dan BBN-KB yang terintegrasi dengan system regident Kepolisian Daerah (BPKB & ERI) dan E-Budgeting; ***Samsat-Link*** yang merupakan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terintegrasi sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dilakukan di seluruh daerah tidak tergantung pada domisili alamat kendaraan, namun demikian bila dilihat dari potensi kendaraan yang ada di Provinsi Lampung, didapati masih banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang registrasi atau menunggak pada setiap tahunnya. Langkah startegis yang dilakukan untuk terus meningkatkan pendapatan Pajak kendaraan pada lima tahun kedepan antara lain dengan mengoptimalkan penerimaan dari potensi tunggakan pajak kendaraan

bermotor. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain kegiatan *door to door* yaitu pendataan dan penagihan potensi pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan pada periode 2015-2019 akan terus dilakukan dengan bersinergi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan melibatkan aparatur sampai tingkat desa/kelurahan, mengingat bahwa terdapat bagi hasil pajak kendaraan kepada kabupaten/Kota. Sedangkan terdapat peluang kebijakan terkait Penunggakan Pajak kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) selama dua tahun, sejak masa berlaku lima tahunan STNK habis, maka data registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor) akan terhapus. sebagaimana peraturan ini telah diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan dimana peraturan ini belum dilakukan dan diharapkan dapat dilaksanakan pada lima tahun kedepan sehingga merupakan alat kebijakan yang strategis untuk memaksa wajib pajak melaksanakan kewajibannya selain itu peningkatan sosialisasi serta operasi simpatik razia kendaraan cukup efektif untuk mengoptimalkan pendapatan. Sedangkan disisi pemenuhan Sarana dan Prasarana pelayanan pada 5 tahun kedepan masih harus ditingkatkan. Baik dari kualitas maupun kuantitas. Pada pemenuhan hak pembayar pajak juga perlu untuk terus ditingkatkan seperti halnya kemudahan dalam klaim asuransi Kecelakaan sehingga semakin menyadarkan masyarakat pentingnya membayar pajak kendaraan.

Sedangkan Penerimaan pada Pajak Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) pada periode 2014-2019 mengalami capaian realisasi yang fluktuatif bahkan cenderung menurun, mengingat BBN-KB sangat bergantung dengan kondisi ekonomi masyarakat baik dalam pembelian kendaraan baru (BBN-1) maupun bea balik nama kendaraan ke-2 (BBN-2), sehingga faktor eksternal sangat berpengaruh, namun demikian potensi BBN-KB diharapkan masih dapat terus ditingkatkan dengan melakukan perbaikan system dan prosedur serta

peningkatan koordinasi pada seluruh stakeholder termasuk dunia usaha otomotif sehingga didapat formula yang lebih baik seperti halnya pemangkasan birokrasi pengurusan pembelian kendaraan baru. Sedangkan peluang yang dimungkinkan dalam peningkatan pendapatan di subsektor ini adalah adanya peningkatan infrastruktur seperti halnya jalan tol serta naiknya destinasi wisata provinsi Lampung sehingga diharapkan terjadi *multiflier effect* yang positif seperti tumbuhnya industri yang berimbas pada naiknya kebutuhan akan pemenuhan kendaraan baru. Atas pertimbangan di atas maka proyeksi pendapatan di sektor Pajak BBN-KB diharapkan dapat berkembang pada setiap tahunnya dalam periode 2019-2024.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pada periode Tahun 2020–2024 Pendapatan Asli Daerah dari subsektor PBBKB diharapkan akan terus mengalami perkembangan. Hal ini berkorelasi dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Pembatasan penjualan BBKB bersubsidi, terutama premium, secara tidak langsung menambah pemasukan PBBKB karena peralihan penggunaan BBKB dari premium ke pertalite, pertamax, pertamina dex, dan dexlite. PT. Pertamina merupakan penyumbang PBBKB sebesar 90-95 % dari pendapatan pajak PBB-KB di Provinsi Lampung. Perubahan harga bahan bakar minyak nonsubsidi, di sektor pertambangan/kehutanan/perkebunan dan industri sangat bergantung pada harga yang ditetapkan oleh PT. Pertamina yang biasanya berubah-ubah setiap dua minggu. Fluktuasi harga minyak dunia memengaruhi PT. Pertamina dalam menentukan harga minyak. Hingga saat ini PT. Pertamina menjadi rujukan bagi Wajib Pungut (WAPU) PBBKB dalam menentukan harga yang dilepas ke pasaran. Meskipun beberapa WAPU membeli Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) dari luar negeri. Hal ini untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat antar - WAPU PBBKB.

Dengan telah selesainya proses pembangunan infrastruktur jalan tol seksi Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung diperkirakan akan mengurangi permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun di sisi lain, akan

memicu percepatan pembangunan dalam distribusi barang yang mendongkrak perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung tetap optimis terkait peningkatan PBBKB seiring dengan kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol seksi Terbanggi Besar-Palembang, pembangunan kawasan industri maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus, dan infrastruktur pendukung area sekitar jalan tol seperti tempat perisitirahanan (rest area), pembangunan fisik sekitar jalan tol, dan lain-lain, walaupun dari nilai PBBKB di sektor industri cenderung lebih kecil dibanding sektor lainnya. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengaplikasikan sistem pelaporan PBBKB daring yang selanjutnya terkoneksi dengan aplikasi e-budgeting. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pungut PBBKB untuk mendaftar sebagai WAPU, melaporkan pembelian dan penjualan PBBKB, serta mengonfirmasi pembayaran.

Pajak Air Permukaan

Pajak Air permukaan merupakan subsektor pajak daerah yang memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah, hal ini dikarenakan investasi maupun kegiatan yang menggunakan Air permukaan di Provinsi Lampung belum tergali secara maksimal. Upaya inovasi yang telah dilakukan adalah pembayaran Pajak air permukaan secara online dengan aplikasi e-PAP. Peluang peningkatan pendapatan di subsektor ini diharapkan dari upaya intensifikasi yang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pengelolaan air pada Wajib Pajak aktif sehingga pencatatan pengambilan air menjadi lebih akurat, dan juga upaya ekstensifikasi, dimana dari hasil pendataan lapangan yang secara kontinyu dilakukan, masih banyak Perusahaan-perusahaan pengguna air permukaan di sektor perkebunan dan agroindustri, khususnya skala menengah ke atas, yang belum terdaftar menjadi Wajib Pajak Air Permukaan. Pemberlakuan Keputusan Menteri PU-PR tentang Penetapan Harga Dasar Air sebagai revisi Kepmen PUPR No. 568 Tahun 2017 yang direncanakan akan terbit dan disahkan pada tahun 2019 juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di subsektor ini.

Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pajak yang bersifat transfer daerah yang bergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Pusat. Sebagaimana dengan adanya kebijakan pada Jaminan Kesehatan Nasional yang berimbas pada pengurangan dana Pajak Rokok ke daerah, sehingga pada Proyeksi pendapatan di subsektor ini diproyeksikan tetap pada setiap tahunnya.

Retribusi Daerah.

Kontribusi Retribusi daerah dalam periode 2015-2019 masih relative rendah hal ini juga karena masih terbatasnya objek retribusi yang menjadi kewenangan pada Provinsi sebagaimana UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Realisasi retribusi daerah mengalami kecenderungan yang fluktuatif bahkan cenderung menurun hal ini juga sebagai akibat banyaknya pengalihan kewenangan pemerintah Provinsi yang beralih ke Pemerintah Pusat sebagaimana UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu diharapkan akan terjadi peningkatan setiap tahunnya, karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi pola tarif yang berlaku, jenis pelayanan yang diberikan serta penambahan sarana dan prasarana, sebagaimana di Tahun 2018 sedang dilakukan revisi Perda Retribusi sehingga diharapkan pada periode 5 Tahun kedepan Retribusi daerah dapat meningkat setiap tahunnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dikontribusikan oleh bagian laba dari penyertaan modal Perusahaan milik Daerah (BUMD) maupun Bagian Laba dari Perusahaan Milik Swasta. Pada Periode 2015-2019 perkembangan pendapatan di sektor ini cenderung flat, kontribusi BUMD terbesar berasal dari Bagian Laba Bank Lampung sedangkan PD Wahana Raharja belum dapat

berkontribusi secara signifikan pada pendapatan provinsi Lampung. Seperti halnya BUMD Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta antara lain PT. Sarana Lampung Ventura, Asuransi Bangun Askrida serta PT. Lampung Jasa Utama belum berkontribusi secara signifikan pada pendapatan Provinsi Lampung. Pada Periode 2019-2024 pendapatan Laba atas penyertaan modal ini diharapkan dapat dioptimalkan mengingat pada periode 5 Tahun kedepan terdapat banyak peluang atas berlakunya jalan tol serta peningkatan distinasi wisata Provinsi Lampung sehingga diharapakan manajemen pengelolaan pendapatan pada sektor ini dapat disesuaikan dengan adanya peluang yang terjadi di provinsi Lampung atas peningkatan infrastruktur secara Nasional serta industri pariwisata yang memiliki peluang untuk dapat dikembangkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan daerah.

Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah terdiri atas Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan denda, BLUD serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain. Dalam periode 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan khususnya dikontribusi oleh BLUD Rumah sakit Abdul Moeluk. Pada periode Tahun 2019-2024 diharapkan dapat mengalami perkembangan seiring dengan peningkatan status Rumah Sakit Abdul Moeluk menjadi type A. Dari penerimaan Jasa Giro pemerintah diharapkan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan nilai pengelolaan Keuangan daerah.

B. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

Dana Bagi Bagi Hasil Pajak

Dihitung dengan memperhatikan capaian periode 2015-2019. Bagi hasil Pajak ditopang oleh bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil Cukai Hasil Tembakau dan bagi hasil pajak WPOPDN dan PPh Psl 21. Upaya peningkatan bagi hasil pajak pada periode Tahun 2019-2024 salah satunya adalah dengan mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang

melakukan kegiatan di provinsi lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak WPOPDN dan PPh Psl 21, juga diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.

Dana Bagi Hasil Non Pajak/SDA

Kecenderungan mulai berkurangkan kontribusi sumber daya alam seperti Minyak Bumi, Gas dan panas bumi sehingga pada sektor ini diproyeksikan tetap pada setiap tahunnya dalam periode 5 Tahun ke depan.

Dana Alokasi Umum

Dihitung dengan memperhatikan capaian periode 2015-2019 dimana pada periode ini telah terjadi perubahan kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota sehingga diasumsikan pada periode 5 Tahun kedepan perkembangan DAU akan dikontribusikan oleh adanya penambahan PNS maupun kenaikan gaji, serta persentase dan formula perhitungan DAU oleh pemerintah Pusat diharapkan akan terus disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dihitung dengan mempertimbangkan bahwa pada periode 2015-2019 pemerintah pusat menitikberatkan prioritas pembangunan nasional di sektor infrastruktur sehingga pada periode 5 (lima) tahun ke depan akan ditindaklanjuti dengan upaya pembangunan manusia sehingga diharapkan pada DAK Non Fisik akan mengalami perkembangan. Berkaitan dengan itu, perlu disusun perencanaan yang matang sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyerapan DAK.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Komponen Lain-lain pendapatan yang sah antara lain adalah Pendapatan Hibah, Dana darurat, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta, Bantuan

Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada Periode Tahun 2015-2019 perkembangan realisasi di sektor ini mengalami fluktuatif bahkan cenderung menurun. Diharapkan pada Periode Tahun 2020-2024 dapat mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu kontribusi pada sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus adalah Dana Insentif daerah, dimana Kinerja pengelolaan Keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah. Diharapkan kinerja serta sistem Pengelolaan APBD pada 5 Tahun kedepan dapat berlangsung secara optimal. Tabel proyeksi pendapatan Provinsi Lampung 2019-2024 ditunjukkan pada Tabel dibawah :

TABEL 3- 9 Proyeksi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
	PENDAPATAN TOTAL (APBD)	**7.772.923.449.832**	**7.817.737.259.761**	**8.253.378.330.247**	**8.735.992.319.301**	**9.254.904.377.541**	**9.812.677.922.103**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.423.635.941.615**	**3.166.144.125.582**				
	JUMLAH A+B+C+D			**3.291.132.326.040**	**3.428.565.609.181**	**3.573.383.181.233**	**3.725.537.262.449**
A	**JUMLAH PAJAK DAERAH**	**2.910.000.000.000**	**2.756.282.822.321**	**2.860.414.732.396**	**2.976.589.019.016**	**3.099.092.951.217**	**3.227.826.266.278**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	750.000.000.000	814.155.449.414	854.863.221.884	897.606.382.979	942.486.702.128	989.611.037.234
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	767.000.000.000	718.470.268.769	754.393.782.207	792.113.471.318	831.719.144.883	873.305.102.128
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	640.000.000.000	683.578.104.139	710.921.228.304	746.467.289.720	783.790.654.206	822.980.186.916
4	Pajak Air Permukaan	3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	4.167.450.000	5.000.940.000
5	Pajak Rokok	535.470.000.000	536.929.000.000	536.929.000.000	536.929.000.000	536.929.000.000	536.929.000.000
B	**JUMLAH RETRIBUSI DAERAH**	**13.049.446.772**	**13.440.930.175**	**13.844.158.080**	**14.259.482.823**	**14.687.267.308**	**15.127.885.327**
C	**JUMLAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**	**31.825.503.773**	**33.416.778.962**	**35.087.617.910**	**36.841.998.805**	**38.684.098.745**	**40.618.303.683**
D	**JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**683.290.991.069**	**363.003.594.124**	**381.785.817.654**	**400.875.108.537**	**420.918.863.964**	**441.964.807.162**
II	**DANA PERIMBANGAN**	**4.290.453.091.700**	**4.592.751.948.635**	**4.903.398.046.252**	**5.248.571.976.368**	**5.622.659.683.370**	**6.028.272.364.141**
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	126.277.707.700	132.591.593.085	139.221.172.739	146.182.231.376	153.491.342.945	161.165.910.092
2	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA	20.072.187.000	78.072.187.000	20.072.187.000	20.072.187.000	20.072.187.000	20.072.187.000
3	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.906.780.297.000	1.952.119.311.850	2.102.225.277.443	2.207.336.541.315	2.317.703.368.380	2.433.588.536.799
4	DANA ALOKASI KHUSUS	2.237.322.900.000	2.429.968.856.700	2.641.879.409.070	2.874.981.016.677	3.131.392.785.045	3.413.445.730.249
	- DAK FISIK	310.863.333.000	310.863.333.000	310.863.333.000	310.863.333.000	310.863.333.000	310.863.333.000
	- DAK NON FISIK	1.926.459.567.000	2.119.105.523.700	2.331.016.076.070	2.564.117.683.677	2.820.529.452.045	3.102.582.397.249
II	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH**	**58.834.416.517**	**58.841.185.544**	**58.847.957.955**	**58.854.733.753**	**58.861.512.938**	**58.868.295.513**
1	PENDAPATAN HIBAH	13.538.053.517	13.544.822.544	13.551.594.955	13.558.370.753	13.565.149.938	13.571.932.513
2	DANA DARURAT		-	-	-	-	-
3	DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DR PROVINSI &PEMDA LAINNYA		-	-	-	-	-
4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	26.756.363.000	26.756.363.000	26.756.363.000	26.756.363.000	26.756.363.000	26.756.363.000
5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	18.540.000.000	18.540.000.000	18.540.000.000	18.540.000.000	18.540.000.000	18.540.000.000

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

3.3.2.1 Proyeksi Belanja Tidak Langsung

Proyeksi Belanja tidak langsung Provinsi Lampung tahun 2019-2024, didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, terdiri dari: belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai; belanja bunga diproyeksi berdasarakan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi Lampung; Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal.

3.3.2.2 Proyeksi Belanja Langsung

Belanja Langsung diperhitungkan dari Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, adapun kebijakan yang akan di tempuh untuk pengalokasian belanja langsung: untuk melaksanakan program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantu dalam visi-misi Gubernur terpilih; untuk memenuhi belanja terkait standar pelayanan minimal, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel.

3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Secara keseluruhan Proyeksi Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 mengalami surplus, surplus akan dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan guna membayar pokok utang kepada pihak ketiga (SMI) serta penyertaan modal pada BUMD Provinsi Lampung. Sedangakan Besarnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya), diproyeksikan tetap pada

kisaran 35 miliar. Secara keseluruhan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel.

TABEL 3- 10 Target dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2024

No	URAIAN	TARGET 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
2	**BELANJA**	**7.657.923.449.832**	**7.686.557.259.761**	**8.137.378.330.247**	**8.619.992.319.301**	**9.242.904.377.541**	**9.837.677.922.103**
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.666.030.795.632**	**4.808.171.357.824**	**4.707.612.469.302**	**4.873.924.603.481**	**5.059.232.442.650**	**5.280.404.838.057**
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.915.984.978.632	1.954.689.379.127	1.900.746.775.061,39	2.027.955.123.688,18	2.170.543.372.008,59	2.340.153.412.207,15
2 . 1 . 2	Belanja Bunga	37.000.000.000	32.000.000.000	22.000.000.000,00	12.000.000.000,00	2.900.150.394,00	0
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	1.852.030.960	-	1.852.030.960,00	1.852.030.960,00	1.852.030.960,00	1.852.030.960,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	1.394.951.211.640	1.364.951.211.640	1.393.274.077.840,00	1.393.274.077.840,00	1.393.274.077.840,00	1.393.274.077.840,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.279.429.000.000	1.415.717.192.657	1.357.926.011.040,59	1.407.029.796.592,62	1.458.849.237.047,25	1.513.311.742.649,61
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.813.574.400	19.813.574.400	14.813.574.400,00	14.813.574.400,00	14.813.574.400,00	14.813.574.400,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	19.000.000.000	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.991.892.654.200**	**2.878.385.901.937**	**3.429.765.860.945,34**	**3.746.067.715.820,50**	**4.183.671.934.891,65**	**4.557.273.084.045,95**
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	159.775.106.000	-	176.284.651.320,00	176.284.651.320,00	176.284.651.320,00	176.284.651.320,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.489.379.259.405	-	1.425.370.852.918,00	1.425.370.852.918,00	1.425.370.852.918,00	1.425.370.852.918,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	1.342.738.288.795	-	1.828.110.356.707,34	2.144.412.211.582,50	2.582.016.430.653,65	2.955.617.579.807,95

No	URAIAN	TARGET 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-115.000.000.000**	**-131.180.000.000**	**-116.000.000.000,00**	**-116.000.000.000,00**	**-12.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**150.000.000.000**	**166.180.000.000**	**151.000.000.000,00**	**151.000.000.000,00**	**47.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	25.000.000.000	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	140.000.000.000	141.180.000.000	141.000.000.000,00	141.000.000.000,00	37.000.000.000,00	0

3.3.4 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2019-2024 untuk mendanai pembangunan Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebesar Rp 4.557.273.084.047. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut :

TABEL 3- 11 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020-2024

Uraian	Proyeksi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	7.817.737.259.761	8.253.378.330.247	8.735.992.319.302	9.254.904.377.542	9.812.677.922.104
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
Total penerimaan	7.852.737.259.761	8.288.378.330.247	8.770.992.319.302	9.289.904.377.542	9.847.677.922.104
Dikurangi:					
Pengeluaran pembiayaan	166.180.000.000	151.000.000.000	151.000.000.000	47.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Tidak Langsung	4.808.171.357.824	4.707.612.469.302	4.873.924.603.481	5.059.232.442.650	5.280.404.838.057
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	**2.878.385.901.937**	**3.429.765.860.945**	**3.746.067.715.821**	**4.183.671.934.892**	**4.557.273.084.047**

3.3.5 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel Prioritas alokasi penggunaan

kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. **Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat
b. **Prioritas II,** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas gubernur dan wakil gubernur juga termasuk hal tersebut.
c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

TABEL 3- 12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020-2024

		Proyeksi				
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	**2.878.385.901.937**	**3.429.765.860.945**	**3.746.067.715.821**	**4.183.671.934.892**	**4.557.273.084.047**
PRIORITAS I		**104.021.772.863**	**123.948.051.969**	**135.378.861.049**	**151.193.407.198**	**164.694.951.189**
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD	32.828.574.937	39.117.175.188	42.724.661.987	47.715.626.850	51.976.623.721
2	Belanja Jasa Kantor (Listrik. Air. Telepon/Internet)	35.903.094.554	42.780.645.890	46.725.987.407	52.184.374.917	56.844.430.184
3	Belanja Premi Asuransi	599.126.106	713.893.944	779.731.085	870.816.895	948.580.687
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.392.372.923	29.064.944.996	31.745.389.197	35.453.788.859	38.619.805.809
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.324.413.098	9.919.027.132	10.833.785.400	12.099.355.208	13.179.825.446
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.974.191.244	2.352.364.820	2.569.305.971	2.869.444.468	3.125.685.342
PRIORITAS II		**1.742.753.537.611**	**2.076.593.198.749**	**2.268.101.980.170**	**2.533.054.744.268**	**2.759.256.076.031**
PRIORITAS III		**1.031.610.591.464**	**1.229.224.610.227**	**1.342.586.874.602**	**1.499.423.783.426**	**1.633.322.056.827**

3.3.6 Costing/Kebutuhan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal

Salah satu prioritas dama pembangunan daerah adalah penanganan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar bagi daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dan pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan perhitungan kebutuhan perencanaan dan penganggaran yang akurat dan tepat, sehingga penanganan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam tuntas dilaksanakan. Kunci pokok dalam hal ini adalah tersedianya data/pendataan yang baik, walaupun dalam hal ini bukanlah hal yang mudah untuk melakukan pendataan, perencanaan intervensi penaganan dan akhirnya penganggaran dan pelaksana, diperlukan koordinasi yang baik dari semua sektor terlibat.

Perhitungan SPM Bidang Pendidikan

SPM Bidang Pendidikan yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dalam menghitung kebutuhan penanganannya harus diketahui terlebih dahulu Data Anak Tidak Sekolah Usia 16-18 Tahun, Penduduk menurut kelompok umur 16-18 Tahun kemudian data ini disandingkan/overlay kan dengan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan pada Desil 1 dan 2 khususnya, maka irisan inilah yang menghasilkan prioritas utama penanganan, sebagaimana gambar berikut:

GAMBAR 3- 4 SKEMA PRIORITAS PENANGANAN SPM BID PENDIDIKAN

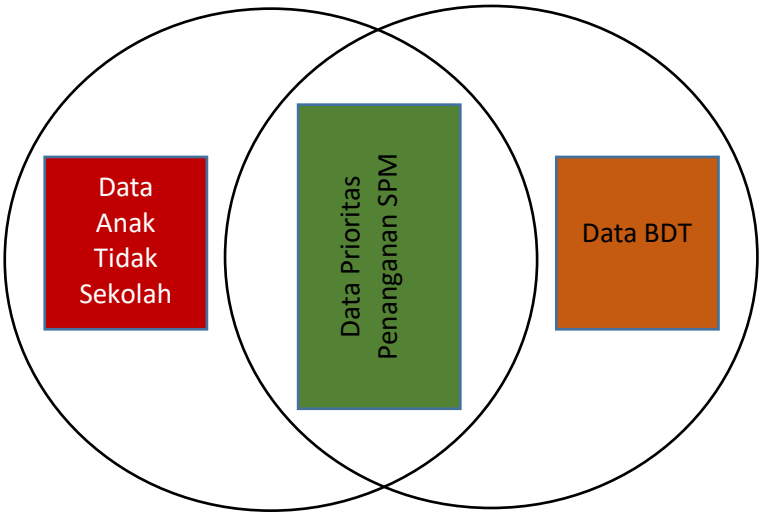

TABEL 3- 13 Model Perhitungan Target Penanganan SPM Pendidikan

No	Kabupaten/Kota	SMA/SMK/MA Se Derajat		Penduduk Usia 16-18 Tahun	Penduduk Tidak Pernah Sekolah USIA 16-18
		Angka Kelulusan	Siswa Putus Sekolah		
1	2	3	4	5	6= 5- (3+4)

TABEL 3- 14 Target Group SPM Pendidikan di Provinsi Lampung

No	KRITERIA	2017	2018
1.	Populasi Anak Sekolah Jenjang SMA/MA (16 – 18)	413,748	413,354
2.	Angka Kelulusan		
3.	Anak Putus Sekolah		
4.	ATS Tidak Sekolah Jenjang SMA/MA (16 – 18)	110,284	104,471
5.	ATS Penyandang Disabilitas Tidak Sekolah Jenjang SMA/MA (16 – 18)	2,814	
6.	Pernikahan Usia SMA/MA (16 – 18)	12,912	
	Total ATS 4+5+6	**126,010**	

Sumber: Dirjen Bangda Kemendagri, 2019

Dari Tabel diatas, maka penghitungan kebutuhan penanganan **SPM Bidang Pendidikan untuk pendidikan menengah = Jumlah Total ATS x Standar Per siswa.**

Sesuai dengan Permendikbud 3 Tahun 2019 tentang Juknis Bos 2019 maka standar alokasi Bos Reguler untuk pendidikan menengah (SMA/SMK) yang merupakan kewenangan Provinsi adalah sebesar Rp. 1.400.000,- s.d 1.600.000,- , maka kebutuhan penanganan SPM bidang pendidikan untuk Anak tidak Sekolah Jenjang SMK/SMA adalah sebesar 126.010 anak x Rp. 1.400.000,- = **Rp. 176.414.000.000,-.**

Kemudian memperhatikan data peserta didik pada SLB di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam tabel 2.67, maka perhitungan SPM untuk Pendidikan Khusus SLB adalah sebagai berikut:

TABEL 3- 15 Penghitungan SPM Bidang Pendidikan Khusus

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah Peserta Didik Tahun 2017	Jumlah Disabilitas Usia 4-18 Tahun	ATS Khusus
1	2	3	4	5 =4-3
1	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	1162	9.111	
2	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB)	332		
3	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB)	216		
JUMLAH		1.710	9.111	7.410

SPM Bidang Pendidikan untuk pendidikan khusus = Jumlah Total ATS x Standar Per siswa. Adapun Sesuai dengan Permendikbud 3 Tahun 2019 tentang Juknis Bos 2019 maka standar alokasi Bos Reguler untuk pendidikan khusus per anak didik adalah sebesar Rp.2.000.000,-.

Sehingga didapati SPM untuk Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung adalah sebesar= 7.410 x Rp. 2.000.000,- = **Rp. 14.820.000.000,-**

Perhitungan SPM Bidang Kesehatan

Selanjutnya terkait dengan SPM Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi, berikut disajikan pemodelan untuk penghitungan/costing kebutuhan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

TABEL 3- 16 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

TAHAP PRA KRISIS		
Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana		
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bidang Kesehatan		
Jumlah paket layanan	**Harga Satuan**	**Jumlah Dana**
1	442.920.000	442.920.000

PELAYANAN SAAT BENCANA		
Pemantauan Kejadian Bencana Berpotensi Krisis Kesehatan		
Jumlah Lokasi	Harga Satuan per lokasi	Biaya Per Tahun
7	4.170.000	29.190.000
Mobilisasi		
Jumlah Paket	Harga Satuan per lokasi	Biaya Per Tahun
1	81.360.000	81.360.000
Rapat Koordinasi Kluster Kesehatan		
Frekuensi Rapat	Harga Satuan	Jumlah Dana
1	16.550.000	16.550.000
Pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan		
Jumlah Paket	Indeks Harga Per layanan lokasi	Jumlah Dana
1	25.000.000	25.000.000
Pelayanan kesehatan rujukan		
Jumlah Paket	Harga Satuan	Jumlah Dana
1	100.000.000	100.000.000
Kebutuhan Logistik Kesehatan		
Jumlah Paket Logistik Kesehatan	Harga per Paket	Jumlah Dana

PELAYANAN SAAT BENCANA		
1	490.964.400	490.964.400
ATK		
Jumlah Paket	Harga per paket	Jumlah Dana
1	1.105.600	1.105.600
Alat Pengolah Data		
Jumlah Paket	Harga per paket	Jumlah Dana
2	9.890.000	19.780.000
Kendaraan Operasional Bencana		
Jumlah Paket	Harga per paket	Jumlah Dana
1	331.230.000	331.230.000

Jumlah	TOTAL SPM BENCANA (PRA KRISIS & TANGGAP DARURAT)		
	Jumlah paket layanan	Unit cost	Jumlah dana
5.040	1	305.179	1.538.100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2019

TABEL 3- 17 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa/KLB Provinsi

Jenis Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi	Jumlah	SPM KLB		
		Jumlah Layanan	Unit Cost	Jumlah Dana
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa/KLB provinsi.	4400	1	488.205	2.148.102.000

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2019

Perhitungan SPM Bidang Perumahan

Berikut disajikan pendataan Rumah Rusak akibat Bencana Tsunami akhir 2018 lalu yang akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemenuhan SPM bidang Perumahan :

TABEL 3- 18 Rekapitulasi Rumah Terdampak Bencana Tsunami di Prov Lampung Tahun 2018

	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	JUMLAH	
LAMPUNG SELATAN	**558**	**87**	**144**	**789**	
1 BAKAUHENI	7	1	1	9	
A. DESA KELAWI	7	1	1	9	Belum Verifikasi
2 RAJABASA	486	39	88	613	
A. WAY MULI TIMUR	128	12	4	144	Sudah Verifikasi
B. WAY MULI INDUK	58	8	25	91	Sudah Verifikasi
C. RAJABASA	33	4	6	43	Belum Verifikasi
D. PANGKUL - SUKARAJA	20	3	4	27	Sudah Verifikasi
E. BANDING	13	6	9	28	Belum Verifikasi
F. CANTI	6	0	0	6	Belum Verifikasi
G. KUNJIR	137	5	38	181	Sudah Verifikasi
H. SEBESI	77	0	2	79	Belum Verifikasi
- Dusun 3 jt*	70	0	0	70	
- Dusun 4	7	0	2	9	
I. SEBUKU	14	0	0	14	Belum Verifikasi
3 KALIANDA	57	40	54	151	
A. MAJA	17	12	18	47	Sudah Verifikasi
B. KALIANDA	39	27	36	102	Sudah Verifikasi
C. MERAK BELANTUNG	0	1	0	1	Sudah Verifikasi
D. WAY URANG	1	0	0	1	
4 SIDOMULYO	2	4	1	7	
A. SUAK	2	4	1	7	Sudah Verifikasi
- Lebuhan	2	4	1	7	
5 KATIBUNG	0	3	0	9	
A. TARAHAN	0	3	0	9	Sudah Verifikasi

Sumber: BNPB, 2019

Berdasarkan data di atas, dapat disampaiakan, mengingat Kejadian ini merupakan Kejadian dengan Status Bencana Nasional, maka pelaksanaan penanganan pasca bencana dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Rumah dengan kondisi Rusak Parah, akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat
2. Rumah dengan kondisi Rusak Sedang, akan dilakukan penanganannya oleh Pemerintah Provinsi

3. Rumah dengan kondisi rusak ringan, aakan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Adapun besaran penanganan di Provinsi Lampung, untuk rumah dengan kondisi rusak sedang akan dibantu dengan pola swadaya masyaraka, dan Pemerintah Provinsi membantu pemberian bantuan material senilai @ Rp. 17.000.000,-. Dengan demikian total kebutuhan penanganan SPM Bidang Perumahan untuk kejadian Bencana Tsunami adalah = Total Rumah Terdampak dengan kondisi Rusak Sedang x Standar Per Rumah

Total Penanganan Rumah Terdampak = 87 x Rp. 17.000.000,- = Rp. 1.479.000.000

Demikian pula untuk kejadian bencana lain, maka akan dilakukan pemodelan penghitungan kebutuhan sebagaimana Tabel dibawah. Adapun skema pendanaan untuk pelaksanaan Tanggap Darurat akan dilakukan melalui Dana Tidak Terduga dalam Belanja Tidak Langsung.

TABEL 3- 19 Besaran Dana Tak Terduga Provinsi Lampung 2019-2024

URAIAN	TARGET 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	19.000.000.000	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

Perhitungan SPM Bidang Sosial

Adapun untuk Perhitungan Kebutuhan SPM Bidang Sosial, yang diperuntukan bagi penanganan PMKS khususnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandang dan Pengemis, di dalam Panti adalah sesuai dengan skema dalam tabel berikut:

TABEL 3- 20 Skema Perhitungan Kebutuhan Pendanaan SPM Bidang Sosial

No.	Penerima SPM Sosial Di Dalam Panti	Jumlah	Penyediaan Makanan			Penyediaan Sandang (sepatu/sendal, perlengkapan mandi, ibadah dll/pertahun	Penyediaan Alat Bantu (Kacamata, tongkat, reglet (alat tulis)	Biaya Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti	Biaya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual Dan Sosial				TOTAL
			Jumlah Hari Pemberian Layanan	Indeks Harga Per Orang/hari	Biaya Per Tahun				Honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	Alat Peraga	ATK	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9	10	11	12	13=10+11+12	16=6+7+8+9+13
1.	Penyandang disabilitas telantar	300	365	30.000	3.285.000.000								
	- UPTD Panti Rehab Sosial Disabilitas Indra Kusuma	300	365	30.000	3.285.000.000	300	300	23.100.000	216.000.000	262.500.000	42.679.250	521.179.250	3.806.179.850
2.	Anak telantar	775	365	30.000	8.486.250.000								
	- UPTD Panti Sosial Bina Remaja Raden Inten	250	365	30.000	2.737.500.000	250	250	56.033.500	420.950.000	150.000.000	31.390.750	602.340.750	3.339.841.250

No.	Penerima SPM Sosial Di Dalam Panti	Jumlah	Penyediaan Makanan			Penyediaan Sandang (sepatu/sendal, perlengkapan mandi, ibadah dll/pertahun	Penyediaan Alat Bantu (Kacamata, tongkat, reglet (alat tulis)	Biaya Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti	Biaya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual Dan Sosial				TOTAL
			Jumlah Hari Pemberian Layanan	Indeks Harga Per Orang/hari	Biaya Per Tahun				Honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	Alat Peraga	ATK	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9	10	11	12	13=10+11+12	16=6+7+8+9+13
	- UPTD Panti Sosial Anak Budi Asih	300	365	30.000	3.285.000.000	300	300	5.288.500	102.600.000	80.400.000	95.305.500	278.305.500	3.563.306.100
	- UPTD Panti Sosial Anak Harapan Bangsa	300	365	30.000	3.285.000.000	300	300	5.015.000	110.400.000	17.500.000	65.569.650	193.469.650	3.478.470.250
	- UPTD Penyelenggaraan Kessos Insan Berguna	125	365	30.000	1.368.750.000	125	125	10.625.000	587.250.000	70.000.000	33.965.000	691.215.000	2.059.965.250
3.	Lansia telantar	475	365	30.000	5.201.250.000								
	UPT Panti Sosial Lansia Tresna Werdha	475	365	30.000	5.201.250.000	475	475	45.000.000	54.000.000	349.250.000	34.845.750	438.095.750	5.639.346.700
4.	Gelandangan dan pengemis	175	365	30.000	1.916.250.000								
	UPTD Panti Spsial Tuna Sosial Mardiguna	175	365	30.000	1.916.250.000	175	175	93.750.000	521.250.000	52.500.000	16.752.500	590.502.500	2.506.752.850
TOTAL		1.725	365	30.000	18.888.750.000								

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2019 diolah

Seluruh pemodelan di atas akan dijabarkan secara utuh pada saat penyusunan dokumen RKPD setiap tahunnya, mengingat pada beberapa jenis SPM hanya bisa dihitung ketika bencana itu sudah terjadi, seperti SPM Bidang Kesehatan, dan SPM Bidang Perumahan.

3.3.7. Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Skema Pembiayaan di Provinsi Lampung

Secara prinsip terdapat tiga jenis proyek Infrastruktur Stragtegis. Pertama yang secara keuangan, dalam arti luas, tidak layak (*financially not feasible*), tetapi sangat diperlukan masyarakat, seperti pembangunan irigasi/bendungan, pendidikan, dan pembangunan fasilitas jalan jembatan, di daerah yang tengah berkembang Yang jadi pertimbangan utama adalah analisis biaya manfaat dan nilai tambah (*multiplier effect*) yang dapat diciptakan. Untuk jenis proyek jenis ini, sumber pembiayaan berasal dari APBN atau APBD. Namun, mengingat keterbatasan dana APBN, Pemerintah Daerah dapat melalukan upaya seperti penerbitan surat utang. Contoh proyek jenis ini adalah pembangunan MRT dan LRT.

Kedua adalah proyek yang sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk membangunnya sehingga tak dapat diserahkan seluruhnya kepada pihak swasta. Contoh jenis proyek ini (yang tidak layak dari aspek bisnis/komersial), misalnya pengadaan sarana transportasi, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Untuk kategori proyek kedua ini, pemerintah daerah dapat menggandeng investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri (investor asing) serta BUMN/BUMD. Pendanaan disiapkan melalui kerja sama pemerintah dengan investor swasta atau public private partnership. Pemerintah tetap akan memperoleh penghasilan berupa pajak dan setelah periode konsesi berakhir sesuai perjanjian, pemerintah berhak menguasai proyek itu.

Ketiga, berbagai proyek yang secara komersial menguntungkan, hal ini seperti halnya pembangunan kawasan industri dan sebagainya. Proyek seperti ini dapat diserahkan dan ditangani/dikelola investor swasta, akan tetapi aset

tetap dikuasai negara, dan investor memperoleh konsesi atau hak pengelolaan sampai jangka waktu tertentu. Proyek jenis ketiga ini, dapat dilakukan melalui skema pendanaan investor swasta sepenuhnya yang memungkinkan mekanisme direct lending. Investor harus menghitung dengan cermat besaran tingkat pengembalian modal proyek itu. Contohnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan bf-aya 5,9 miliar dollar AS, 25 persen dipenuhi oleh konsorsium BUMN dan 75 persen pinjaman dari Bank Pembangunan China Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah telah menciptakan berbagai terobosan dalam skema pembiayaan sehingga tidak tergantung dari anggaran pemerintah.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya percepatan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan telah menyiapkan beberapa Proyek Infrastruktur Strategis Jangka Menegah, yang pembiayaannya bisa dilakukan melalui tiga skema pembiayaan sebagaimana telah disebutkan dimuka, baik melalui APBN/APBD, KPBU, BUMN/BUMD, CSR, maupun Investasi Swasta, antara lain:

1. Pembangunan Terminal Type A Rajabasa (Kewenangan Pusat)
2. Pembangunan Jalan Provinsi melalui skema Pembiayaan Cost Sharing (Blue Book KPBU Bappenas)
3. Pembangunan Long Cut Rejosari-Tarahan (42 km) (Kewenangan Pusat)
4. Pembangunan Jalur Kereta Api Tegineneng-Bakauheni yang terintegrasi dengan jalan tol (mendukung pembangunan Trans Sumatera Railway) (Kewenangan Pusat)
5. Pembangunan jalan tol khusus Lematang – Pelabuhan Panjang
6. Pembangunan Dry Port Way Kanan (terintegrasi dengan Pel Panjang)
7. Pengembangan Bandara Gatot Subroto Way Kanan (Kewenangan Pusat)
8. Pengembangan Bandara Radin Inten II (Kewenangan Pusat)
9. Pengembangan Bandara Taufik Kiemas (Pekon Serai) (Kewenangan Pusat)
10. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Energi yang terintegrasi dengan Pelabuhan di Kecamatan Ketibung Lampung Selatan

11. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandar Lampung
12. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional Bandar Lampung
13. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Bandar Lampung
14. Pembangunan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara
15. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang Lampung Selatan
16. Pembangunan Kawasan Industri Maritim Tanggamus
17. Pembangunan Kawasan Industri Pesawaran
18. Pembangunan Politeknik Industri (Kewenangan Pusat)
19. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

GAMBAR 3- 5 Proyek Infrastruktur Strategis Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2019 diolah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015–2019 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demi pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi yang dirumuskan sebagai permasalahan pembangunan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

1. **Keamanan Wilayah** : Masih tingginya tingkat kriminalitas di Provinsi Lampung dimana terjadi 10.485 kejahatan dilaporkan di Tahun 2016 dan meningkat menjadi 11.089 kasus di Tahun 2017
2. **Tata Kelola Pemerintahan :** Reformasi Birokrasi telah berjalan di Provinsi Lampung tetapi belum optimal yang ditandai dengan rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2018 dengan Nilai CC
3. **Kualitas Pembangunan Manusia :** Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Lampung pada Tahun 2018 telah berjalan dengan realisasi sebesar 69,02 tetapi masih di bawah capaian Nasional sebesar 71,39 di tahun yang sama.
4. **Kelancaran Konektivitas :** Di Tahun 2018, Indeks Konektivitas Provinsi Lampung sebesar 6,01

5. **Akses masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar yang Layak :** Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman di Tahun 2018 adalah sebesar 71,19%. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi di Tahun 2018 adaah sebesar 64,63%. Persentase Rumah tidak Layak huni di Tahun 2018 adalah 5,02%.
6. **Pertumbuhan Ekonomi** : Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi di Tahun 2018 sebesar 5,25%, berada di atas Nasional (5,17%) dan rata-rata Sumatera (4,54%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang.
7. **Kemiskinan** : Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2019 sebesar 12,62 persen, menurun 1,73 poin dibanding Sept 2015 yang sebesar 14,35 persen tetapi masih berada di bawah Nasional sebesar 9,41 persen
8. **Ketimpangan antar Wilayah** : Indeks Williamson yang menjadi ukuran ketimpangan antar wilayah Provinsi Lampung di Tahun 2018 cenderung kecil yaitu sebesar 0,21. Meski begitu pada tataran realita terjadi ketimpangan yang cukup lebar antara daerah yang satu dengan yang lain sehingga diperlukan peran Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkecil gap yang ada
9. **Pendapatan per Kapita**: Di tahun 2018 Pendapatan per Kapita Provinsi Lampung hanya sebesar 39,86 Juta, masih jauh di bawah capaian Nasional yaitu sebesar 56 Juta
10. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :** Di tahun 2018 Indeks Kualitas Lingkunga Hidup Provinsi Lampung sebesar 56,62, menurun dari Tahun 2011 yaitu sebesar 57,13.

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Per Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya

permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Secara lebih rinci, Permasalahan Pembangunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4- 1 Permasalahan dan Indikator Penanganan Masalah

No.	Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan	Belum tercapainya program wajib belajar 12 tahun
		Masih kurangnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah
		Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan
		Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.
		Masih kurangnya partisipasi Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
		Belum terpenuhinya persyaratan Akreditasi Sekolah SMA/SMK
2.	Kesehatan	Masih rendahnya aksesibiltas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan
		Angka kematian ibu dan anak yang relatif masih tinggi
		Rendahnya perilaku hidup sehat dimasyarakat
		Kasus kematian ibu dan kematian bayi relative masih tinggi, Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor-faktor lainnya
		Masalah gizi balita yang masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah gizi buruk dan gizi kurang, stunting (pendek) merupakan masalah banyak terjadi , hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan bergizi, kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat
		Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, Tb, Malaria dll)

No.	Urusan	Permasalahan
		Masih tingginya angka kejadian penyakit tidak menular (PTM) terutama hiprertensi, Diabetes, jantung, dan paru
		Cakupan jaminan kesehatan yang masih rendah
		Akses dan mutu layanan kesehatan yang masih rendah (Ketersedian dan Akreditasi Fasilitas kesehatan)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap
		Belum optimalnya kondisi jaringan irigasi
		Masih kurangnya penyediaan infrastukur kelistrikan
		Penyaluran subsidi listrik belum dinikmati masyarakat yang berhak.
		Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang
		Inkonsistennya perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan ruang
		Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
		Masih kurangnya penyediaan sarana, prasarana dan utilitas dalam lingkungan perumahan dan permukiman.
		Terdapat wilayah permukiman kumuh dan daerah potensi tumbuhnya permukiman dan perumahan kumuh
		Proses Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan MBR
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Masih tingginya angka gangguan keamanan dan kriminalitas
		Masih tingginya potensi konflik sosial di masyarakat
		Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana
6.	Sosial	Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dkarenakan jumlah PMKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan, serta tingginya jumlah penduduk miskin
		Belum optimalnya kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mengimplementasikan Keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial PMKS
		Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;

No.	Urusan	Permasalahan
		Kurang optimalnya pemanfaatan panti sosial
7.	Tenaga Kerja	Masih tingginya angka pengangguran
		Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
		Revitalisasi BLK Kurangnya sarana, prasarana, dan instruktur di Balai Latihan Kerja
		Pekerja migran yang akan bekerja baik didalam negeri maupun luar negeri
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki.
		Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan
		Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak.
9.	Pangan	Masih terdapat wilayah miskin rawan pangan dan stunting
		Masih tingginya harga komoditi pangan
		Belum optimalnya diversifikasi penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis pangan lokal
10.	Pertanahan	Masih terdapatnya konflik sengketa tanah
11.	Kehutanan	Kerusakan kawasan hutan serta bertambahnya luas lahan kritis
12.	Lingkungan Hidup	Masih rendahnya angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
13.	Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya aparatur dalam rangka mengelola administrasi dan sistim informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
14	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Banyaknya jumlah desa tertinggal
		Masih banyaknya BumDes yang tidak aktif
		Masih banyaknya desa di Provinsi Lampung yang belum melaksanakan Siskeudes
		Kurangnya pemanfaatan dana Desa
15.	Penanggulangan Bencana Daerah	Tingginya kejadian bencana di Provinsi Lampung
		Kurangnya kesiapsiagaan petugas dalam menangani korban bencana

No.	Urusan	Permasalahan
16.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belum maksimal
		Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana
17.	Perhubungan	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perhubungan
		Tingkat kemacetan yang mulai mengkhawatirkan
		Rendahnya fasilitas keselamatan lalu lintas
		Minimnya layanan sektor perhubungan.
		Lambatnya penanganan infrastruktur perhubungan kewenangan Pusat di Provinsi Lampung.
18.	Komunikasi dan Infomatika	Belum maksimalnya penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah.
19.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif dan rendahnya jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
		Keterbatasan permodalan dan terbatasnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM
		Lemahnya daya saing produk dan rendahnya Rendahnya kopetensi manajerial pelaku UMKM
20.	Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi cenderung positif namun kecil atau lambat
21.	Pemuda dan Olahraga	Masih rendahnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berskala nasional
		Keterbatasan fasilitas dan SDM pelatih yang berkualitas
22.	Statistik	Referensi data statistik yang kurang memadai dan berbeda-beda serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik
23.	Kearsipan	Keterbatasan fasilitas dan SDM pengelolaan kearsipan
24.	Perpustakaan	Keterbatasan fasilitas dan SDM fungsional pengelolaan perpustakaan
25.	Kebudayaan	Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal yang menyebabkan terjadinya degradasi budaya lokal dalam lingkungan masyarakat
26.	Pariwisata	Belum optimalnya Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

No.	Urusan	Permasalahan
		Keterbatasan SDM Pariwisata serta kesiapan dan peran serta masyarakat disekitar destinasi wisata
27.	Pertanian	Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya Alih fungsi lahan pertanian
28.	Kelautan Perikanan	Keberlanjutan stok perikanan khusus nya komoditas perikanan tangkap dengan nilai ekonomis tinggi (rajungan), Belum adanya wilayah perlindungan ekosistem rajungan serta ketimpangan ekonomi antara nelayan sebagai pelaku utama dengan eksportir sebagai pelaku usaha, Belum maksimalnya produksi perikanan tangkap Lampung akibat banyaknya nelayan dari luar Lampung terutama pulau jawa yang menangkap ikan di perairan lampung. Penurunan kualitas lingkungan perairan yang disebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut
29.	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Lampung dan kesiapan menghadapi Revolusi Industri 4.0
30.	Perdagangan	Belum optimalnya fungsi Perlindungan Konsumen
		Ekspor komoditas Lampung masih sangat tergantung pada kondisi ekonomi negara tujuan dan harga komoditas sehingga bersifat fluktuatif

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi tetangga dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional (*global*), nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Provinsi Lampung.

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Beberapa isu strategis pembangunan Daerah Provinsi Lampung dirumuskan, sebagai berikut :

1. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia

Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia;

2. Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara temasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari *SDGs* yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target *SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.
3. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat beberapa isu sebagai berikut :
   A. Pilar Sosial
      - Tingginya persentase penduduk miskin
      - Keterlantaran
      - Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
      - Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

- Tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita dan baduta

B. Pilar Ekonomi

- Laju Pertumbuhan PDRB yang stagnan
- Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi belum mencapai target
- Keberadaan desa tertinggal
- Ketimpangan antar pendapatan
- Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Daerah

C. Pilar Lingkungan

- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dari Kebutuhan Yang Akan Dibangun
- Terdapatnya Kawasan Kumuh
- Luas Kawasan Lindung belum sebanding terhadap Luas Lampung
- Keberadaan kesatuan pengelolaan hutan
- Keberadaan lahan kritis

D. Pilar Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

- Peran Lembaga dalah kehidupan Demokrasi Masyarakat
- Kebebasan Masyarakat Sipil yang terjaga

4. Pelaksanaan Pemilu serentak yang seharusnya menjadi wahana pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai ajang pemilihan pemimpin berdasarkan program kerja dan visi misi. Namun dengan maraknya politik identitas akhir-akhir ini, menimbulkan berpotensi konflik ditengah masyarakat dan mengaburkan makna pemilu itu sendiri;
5. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain Ketidaksiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana

desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterlibatan dalam pembangunan desa;

6. Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS tahun 2017 berjumlah 8.289.577 jiwa, sebanyak 13,14 persen masih berada dalam kriteria miskin. angka kemiskinan tersebut masih berada diatas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional. Hal tersebut harus segera diatas melalui program-program pengentasan kemiskinan yang masif;
7. Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang pendudukan Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Memasuki tahun 2014 Lampung memasuki bonus demografi yang ditandai dengan jumlah persantase rasio ketergantungan (*depency ratio*) penduduk yang berada dibawah angka 50%. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersedian tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan; agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif;
8. Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan,

pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan bagi peningkatan perkonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

10. Pembangunan jalan tol trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak akan menurunnya biaya logistik yang berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk menambah dampak pembangunan tol terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bila disertai pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung yang diarahkan pada kawasan produksi dan pasar serta memperkuat infrastruktur pertanian;
11. Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor Lampung rentang terhadap fluktuasi. Hal ini harus segera diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara tujuan ekspor;
12. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan *e-commerce* pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk sutau produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya *e-commerce* berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan;
13. Sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor: 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penentuan dan penetapan daerah tertinggal ini, terdapat 6 (enam) indikator utama yang dipakai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI

sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta adaptasi mitigasi bencana.

14. Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang setiap tahun mengalami peningkatan disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, perempuan dan human human trafficking, belum optimalnya penanganan bencana sosial dan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta masih sering terjadinya konflik sosial dan belum memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara maksimal
15. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.
16. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.
17. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Provinsi Lampung dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan lumbung pangan nasional.
18. Masih benyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum termanfaatkan secara optimal.
19. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.

20. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.

4.2.2 Isu Isu Strategis Kewilayahan

4.2.2.1. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Lampung.

Terdapat ketimpangan wilayah Timur – Barat, Utara – Selatan dan Darat – Laut/Pesisir di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan Selatan Lampung berkembang cukup pesat dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi sedangkan wilayah utara lebih kepada masalah aksesibilitas yang kurang mendukung. Daerah pesisir dan pedesaan termasuk daerah produksi hasil pertanian maupun perikanan ternyata justru menjadi kantong-kantong kemiskinan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani. Secara teoritis, angka kesenjangan di Provinsi Lampung yang diukur melalui Indeks Williamson masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah yaitu sebesar 0,21 di Tahun 2017, tetapi kecenderungannya terjadi peningkatan ketimpangan dari Tahun 2014 yang hanya sebesar 0,19.

Disparitas pendapatan penduduk di Provinsi Lampung dilihat dari angka Gini Rasio, ketimpangan pendapatan menunjukkan 0,33 di tahun 2017. Apabila dibandingkan angka nasional sebesar 0,39 masih tergolong lebih rendah, namun Indeks Gini diatas 3 termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi. Indeks Gini Rasio Lampung selama 3 tahun terakhir *trend* positif cenderung menurun namun kurang signifikan penurunannya.

Apabila dilihat dari PDRB perkapita kabupaten/kota, PDRB per kapita kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata PDRB per kapita provinsi yaitu : Lampung Selatan, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Tulang Bawang dan Mesuji. Sementara 10 kabupaten/kota lainnya, PDRB per kapita dibawah rata-

rata provinsi antara lain : Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus dan Way Kanan.

4.2.2.2. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis di Provinsi Lampung

Berdasarkan Draft Revisi RTRW Provinsi Lampung, Provinsi Lampung memiliki 2 kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : Metropolitan Bandar Lampung dan Kawasan Pariwisata terintegrasi wilayah barat dengan pengembangan sub kawasan pendukung antara lain :

1. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung;
2. Kawasan pusat pemerintahan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kawasan Teluk Lampung di Kabupaten Lampung Selatan,
5. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran;
6. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
7. Kawasan pendidikan Universitas Lampung – ITERA– UIN Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
8. Kawasan pendidikan terpadu di Kota Metro.

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ada 2 kawasan strategis, yaitu : Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman di Kota Bandar Lampung dan Pesawaran; dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi di Tanggamus**.**

4.2.2.3. Percepatan Pengembangan Kawasan Industri

Selain kawasan strategis provinsi, pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung juga belum optimal. Terdapat 9 kawasan Indsutri yang akan dikembangkan, antara lain :

1. Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus

2. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang di Lampung Selatan
3. Pengembangan Kawasan Industri Mesuji
4. Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban di Lampung Tengah
5. Pengembangan Kawasan Industri Way Kanan
6. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat
7. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang
8. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL II) di Lampung Selatan
9. Pengembangan Kawasan Industri Ketibung di Lampung Selatan

4.2.2.4. Permasalahan Kewilayahan Kota Bandar Lampung

Rata-rata pertumbuhaan penduduk Kota Bandar Lampung saat ini sekitar 1,77% per tahun atau sekitar 14 ribu – 18 ribu penduduk Bandar Lampung per tahun bertambah. Pertumbuhan penduduk inilah yang harus diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah pemukiman, kemacetan dan menambah pengangguran. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Bandar Lampung sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Misalnya, Pengembangan sekitar Kawasan Perdagangan Way Halim (Transmart) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan Pembangunan Hotel Mercure di Jl. Raden Intan, kemudian pertumbuhan daerah Sukarame yang sangat cepat tentunya akan memberikan dampak bagi pembangunan perkotaan. Demikian juga kondisi yang terjadi di daerah pesisir Bandar Lampung yang saat ini menjadi kantong-kantong kawasan kumuh.

4.2.2.5. Daerah Rawan Bencana dan Penanganan SPM Kebencanaan di Provinsi Lampung

Isu strategis dan penanganan pada daerah rawan bencana adalah Melakukan mitigasi bencana dengan fokus pada daerah-daerah dengan potensi bencana, antara lain :

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, Pesisir Barat dan Lampung Selatan.

2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung.
4. Banjir tersebar di Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
5. Gempa Bumi tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung.
6. Puting Beliung tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Pringsewu, Pesawaran.
7. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik.

Melihat potensi kerawanan terhadap potensi bencana yang ada di Provinsi Lampung, maka penanganan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana baik Pra Bencana, Tanggap Darurat, hingga penanganan pasca bencana mutlak menjadi prioritas. Oleh sebab itu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dibidang Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan harus direncanakan dengan baik. Tabel Model Penanganan SPM pada daerah rawan bencana di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

TABEL 4- 2 Penanganan SPM Kebencanaan di Provinsi Lampung

No	Jenis Penanganan	OPD/Instansi Penanggungjawab/Pelaksana	Jenis Kegiatan	Jenis Belanja
1.	Pra Bencana	Dinas Kesehatan Dinas Perumahan BPBD	• Pendataan • Mapping • Sosialisasi • Pelatihan • Desa Tangguh Bencana • Pembentukan Tim Satgas • Pengadaan Logistik • Pembangunan Sheltering	Belanja Langsung OPD, APBN

No	Jenis Penanganan	OPD/Instansi Penanggungjawab/Pelaksana	Jenis Kegiatan	Jenis Belanja
			• Evakuasi kit • Unit Siaga Bencana • Personil • dll	
2.	Tanggap Darurat	BPBD (Koordinator) Dinas Kesehatan Dinas Perumahan Dinas Sosial	• Posko Komando • Pendataan Korban/Fasum/Fasos/ Rumah Terdampak • Pembangunan Huntara • Pengadaan Logistik • Distribusi Logistik • Pengadaan Dapur Umum • Konseling • Pelayanan Kesehatan • Bantuan Air Bersih • Pengadaan Makanan Pendamping • Pengadaan Hygiene/Family Kit/kid ware	Belanja Tidak Terduga/Tanggap Darurat (Belanja Tidak Langsung), APBN
3.	Pasca Bencana	Dinas Cipta Karya Dinas Perumahan Dinas Kesehatan Dinas Sosial	• Relokasi • Pembangunan Rumah Layak Huni • Pembangunan Rusunawa • Pengadaan Tanah • Pembangunan PSU • Pembangunan SPALD • Pembangunan SPAM • Bantuan Sosial	Belanja Langsung OPD, APBN

4.2.2.6. Pengembangan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung

Optimalisasi pengembangan Komoditi unggulan Provinsi Lampung berbasis potensi pengembangan kawasan, antara lain :

1. Komoditi pertanian : Padi lokasi pengembangan di 13 Kabupaten (Kecuali Kota Bandar Lampung dan Kota Metro); Jagung di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran; kedelai di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Mesuji; Ubi kayu di Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung

Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Waykanan, Mesuji, Metro; Nanas di Lampung Timur, Lampung Tengah; dan pisang di Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur.

2. Komoditi perkebunan : Kopi di Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan, Pesisir Barat; Lada di Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan; Tebu di Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan; kakao di Lampung Timur dan Pesawaran; Karet di Lampung Tengah dan Mesuji; Kelapa di lampung Selatan dan Kelapa swait di Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang, Mesuji
3. Komoditi Peternakan : Populasi Sapi potong di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Waykanan; Populasi Kambing di Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu; Populasi ayam pedaging di Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Metro; Populasi ayam buras di Lampung Selatan, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Timur.
4. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Provinsi Lampung harus dapat mendesign agar JTTS bermanfaat secara optimal bagi percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
5. Pengembangan Kawasan Industri Pertahanan di Tulang Bawang dan Tanggamus mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Industri Pertahanan yang saat ini masih berada di Pulau Jawa.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tinjauan terhadap RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025

5.1.1. Visi dan Misi RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025

Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stake hoders* dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dengan mendasarkan kepada : modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005-2025 adalah :

"LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025"

Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum).

Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi direction untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005- 2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

5.1.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis

7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik

5.1.3. Tahapan dan skala prioritas pembangunan 2005-2025

Tahapan Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 adalah:

1. RPJM Kesatu (2005 – 2009)
2. RPJM Kedua (2010 – 2014)
3. RPJM Ketiga (2015 – 2019)
4. RPJM Keempat (2020 – 2024)

5.2. Visi Pembangunan Daerah 2019-2024

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah teripilh yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

"Rakyat Lampung Berjaya".

Memperhatikan Visi pembangungan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

5.3. Misi Pembangunan Daerah 2019-2024

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan *"good govemance"* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

5.3.1. Misi 1

Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;

e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;

5.3.2. Misi 2

Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik

Komitmen dalam melaksanakan Misi-2, Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik:

a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokarsi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;

e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
f. Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan;
g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

5.3.3. Misi 3

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas:

a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;

d. Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

5.3.4. Misi 4

Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah

Komitmen dalam melaksanakan Misi-4, Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem permukiman:

a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
b. Mengembangakan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar

komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;

c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandarian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

5.3.5. Misi 5

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan

kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;

c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

5.3.6. Misi 6

Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;

b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahateraan masyarakat;
h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal loging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

5.4. Agenda Kerja Utama

Pencapaian Misi dengan dibarengi komitmen dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama tersebut antara lain :

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai

Agenda Kerja :

1. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukuanan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
4. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
    a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama
    b. memberatas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan
    c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi

Misi 2 : Mewujudkan "*Good Governance*" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

Agenda Kerja :

6. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
   a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetesi
   b. Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi
   c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan
   d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokerasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja
   e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi
   f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
   g. Meningatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
7. APBD Rakyat Berjaya :
   a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik
   b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
8. Smart Village
   a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa
   b. memfasilitasi digitaliasi administrasi desa

c. *e-participation* : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi

9. Pendampingan program pembangunan desa

   a. Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa
   b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberda Yaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas

Agenda Kerja :

10. Perempuan Berjaya :
    a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
    b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politk, sosial budaya dan ekonomi
    c. Memfasilitsi pendampingan hukum bagi perempuan.

11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :

    a. Mengembangkan fasiltas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
    b. Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
    c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak

d. Menyediakan dan menfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempt kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik
e. Memfasiltasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak
f. memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu

12. Anak Muda Berjaya :
    a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas
    b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda
    c. Mencetak wirausahawan muda
    d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota

13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada :
    a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga
    b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi
    c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten

14. Lampung Sehat :
    a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas
    b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
    c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit

15. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
    a. Menyediakan fasiltas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
    b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA.

c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatkan kapasitas lainnya

16. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
    a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha
    b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri
    c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

Agenda Kerja :

17. Infrastruktur Lampung Berjaya
    a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota.
    b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
    c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
    d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

18. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :
    a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermurah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.
    b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat

c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong

19. Lampung Terang Berjaya. Memproritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :
    a. Memepercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik
    b. mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi
    c. kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian

Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Agenda Kerja :

20. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
    a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani
    b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani
    c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani
    d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi
21. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
22. Mencegah dan memberatas peredaran pupuk palsu

23. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitiasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
24. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri
25. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :
    a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan
    b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengelolahan perikanan.
    c. Memberikan asurasi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia
    d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi
    e. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan
26. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
27. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
    a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
    b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
    c. Mempercepat pembangunan infrastrutur untuk mendukung pengembangan pariwisata

d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)

28. Mengembangkan industri pengelolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.

29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :

    a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasi sumber daya dan keunggulan lokal
    b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
    c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
    d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)

30. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembagan dunia usaha dengan :

    a. Menyederhanakan perizinan
    b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha
    c. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan
    d. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi

31. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanju Tan Untuk Kesejahtera An Bersama

Agenda Kerja :

32. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :

a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan
b. mengorentasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahtraan rakyat
c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan

33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional

Adapun Agenda Kerja Utama yang disandingkan dengan Misi Pembangunan dan Sektor Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada Tabel dibawah :

TABEL 5- 1 Agenda Kerja Utama berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan

MISI	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA
MISI 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya	Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan
		Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran

MISI	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA
		Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan
		Lampung Menuju Bebas Narkoba
MISI 2 : Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem penjenjangan karir berbasis kinerja dan kompetensi (*job fit assessment*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
		APBD Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
		Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan *e-participation*
		Pendampingan Program Pembangunan Desa
MISI 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan Berjaya : memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan
		Lampung Ramah Perempuan dan Anak : mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
		Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja
		Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta memperbaiki tata kelola organisasi olahraga

MISI	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA
	Pembangunan Bidang Kesehatan	Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
	Pembangunan Bidang Pendidikan	*Smart School* : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan
		Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)
MISI 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.	Pembangunan Bidang Infrastruktur	Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi
		Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT
		Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik
MISI 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	Pembangunan Bidang Pertanian Dan Perdesaan	Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)
		Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian
		Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
		Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper)
		Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri

MISI	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA
		Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak nelayan, SPBU untuk nelayan
		Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)
		Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
	Pembangunan Bidang Industri	Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
		Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi
		Lampung Ramah usaha : menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha
		Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan)
MISI 6 : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.	Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat
		Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara

5.5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat

tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan, yaitu :

TABEL 5- 2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KONDISI AKHIR	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)
								2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024		
Rakyat Lampung Berjaya																
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai																
1.	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	1.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	68	69	70	71	72	73	73	
							Tingkat kasus kriminalitas terselesaikan	68,88	72,20	78,85	82,18	85,50	88,83	92,15	92,15	
					1.1.2	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	72,01	68,67	72	73	74	75	76	76	
2.	Pelestarian Warisan Budaya	2.1	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	2.1.1	Meningkatnya pelestarian Budaya	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	18	33	60	70	80	90	100	100	
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik																
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	3.1	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	A	3.1.1	Meningkatnyan kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	C	CC	B	B	BB	BB	A	A	
					3.1.2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
							Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	A	A	A	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KONDISI AKHIR	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)
								2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024		
Rakyat Lampung Berjaya																
					3.1.3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A	
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas																
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	4.1	Indeks Pembangunan Manusia	72,72	4.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,95	70,23	72,1	72,19	72,29	72,39	72,48	72,48	
					4.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,46	12,48	12,64	12,71	12,78	12,85	12,92	12,92	
							Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,75	7,8	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,2	
					4.1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	90.49	90,57	91,03	91,26	91,49	91,72	91,95	91,95	
							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	66.00	63,82	64,24	64,45	64,66	64,87	65,08	65,08	
							Jumlah Kab/Kota Layak Anak	0	3	6	9	13	14	15	15	
							Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	0.59	1.60	2.18	2.6	3.12	3.74	4.49	4.49	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)
							2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024		
Rakyat Lampung Berjaya															
				4.1.5	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	4 (POPWIL)	6 (POPNAS)	4 (POPWIL)	6 (POPNAS)	3 (POPWIL)	5 (POPNAS)	3(POPWIL)	3 (POPWIL)	
		4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,1	4.2.1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	NA	4,06	3,85	3,26	3,66	3,57	3,48	3,48	
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah															
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	5.1 Capaian rata-rata peningkatan kondisi Infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)	91	5.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	NA	6,01	6,2	6,33	6,46	6,6	6,67	6,67	
				5.1.2	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	84,15	92,13	94	95	96	97	98	98	
				5.1.3	Meningkatnya kapasitas Jaringan Sumberdaya Air	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	30	30	37	40	45	50	55	55	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)
							2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024		
Rakyat Lampung Berjaya															
		5.2 Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)	83,65	5.2.1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	69,23	71,19	72,90	74,63	76,44	78,36	80,34	80,34	
						Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	65,35	64,63	69,31	71,37	73,53	75,99	78,68	78,68	
						Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	0,67	0,55	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37	0,37	
						Persentase Rumah tidak Layak huni	5,9	5,02	3,98	3,25	2,52	1,78	1.03	1.03	
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan															
6.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	6.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,8-6,1	6.1.1	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,83	1,33	1,63	2,3	2,92	3,09	3,19	3,19	
				6.1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	6,18	9,08	6,23	6,26	6,28	6,29	6,33	6,33	
						Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,57	6,87	7,26	8,2	9,08	9,87	10,73	10,73	
		6.2 Laju Inflasi	3,0-3,5	6.2.1	Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	3,02	2,73	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	
		6.3 Angka Kemiskinan	9,18	6.3.1	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,69	13,01	11,1	10,62	10,14	9,66	9,18	9,18	
		6.4 Indeks Williamson	0,19	6.4.1	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KONDISI AKHIR	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)
								2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024		
Rakyat Lampung Berjaya																
		6.5	Indeks Gini	0,3	6.5.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	PDRB perkapita (Juta)	37,21	39,86	45,54	48,2	50,8	53,41	56	56	
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama																
7.	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,32	7.1.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,02	56,62	59,63	61,15	61,92	62,57	63,32	63,32	
					7.1.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	148.3	145.1	144,7	144,3	143,9	143,5	143,1	143,1	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Lampung, tahapan pembangunan periode 2019-2024 adalah untuk mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tahapan pembangunan tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/ tema pembangunan dalam RKPD.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel dibawah ini.

TABEL 6- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Provinsi Lampung

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai					
1.	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	Penguatan toleransi, budaya gotong royong dan kerjasama masyarakat dalam pembangunan	Menghilangkan budaya primordialisme kesukuan
				Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan masyarakat
				Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya	Penanganan konflik sosial, Penyalahgunaan Narkoba dan masalah sosial lainnya
				Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan	Meningkatkan upaya kepatuhan hukum di masyarakat
		1.2	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	Penguatan peran lembaga dan partisipasi politik masyarakat	Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat
2.	Pelestarian Warisan Budaya	2.1	Meningkatnya pelestarian Budaya	Melestarikan warisan budaya asli Lampung	Pengembangan budaya lokal dan wisata di Provinsi Lampung

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik					
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3.1	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Membenahi dan meningkatkan kualitas birokarsi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
				Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas manajemen SDM ASN	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah
		3.2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja		Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah
				Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi	Peningkatan keterbukaan Informasi publik
					Laporan keuangan yang akuntabel
		3.3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik	Pengembangan sistem pelayanan publik
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas					
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Mengembangkan SDM Kesehatan	Penguatan Pengelolaan SDM Kesehatan dan pengembangan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
					pendidikan dan pelatihan kesehatan
				Penguatan kebijakan Manajemen pembangunan kesehatan	Pengembangan manajemen informasi dan libangkes, penguatan penyusunan rogram (perencanaan dan penganggaran) dan pengendalian program pembangunan kesehatan
				Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan status gizi masyarakt, peningkatan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga, penguatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan UKM Tersier
				Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Meningkatkan pelayanan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pelayanan kesehatan pada situasi KLB
				Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian, peningkatan mutu dan akses RSBNH, pelayanan labratorium kesehatan, pelayanan IFKA (Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan) dan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
					pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana
		4.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan lembaga terkait	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas
				Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan berkompeten yang merata di seluruh kabupaten/ kota.
				Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang	Penyediaan latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang melalui pendidikan kejuruan
		4.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik	Penyediaan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak
				Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik	Peningkatan peran perempuan dalam perekonomian dan kemasyarakatan
				Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (women trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan	Perlindungan anak dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
				Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas	Pengembangan lembaga advokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas
				Melaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas
				Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas	Penyediaan dukungan pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas
		4.4	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	Penguatan sistem pembinaan pemuda secara terpadu serta pengembangan prestasi olahraga	Peningkatan upaya pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi.
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah					
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	5.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata	Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan pengembangan jalan dan jembatan nasional dan Kab/Kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah.
				Mengembangakan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan	Pengembangan kualitas transportasi antar moda

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
				meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional	
		5.2	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandarian energi daerah serta pemerataan layanan listrik	Pengembangan enegi alternatif
		5.3	Meningkatnya kapasitas Jaringan Sumberdaya Air	Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air lainnya agar berkinerja baik	Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
		5.4	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan	Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional)
					Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional
					Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni yang Sehat, Nyaman, dan Terjangkau
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan					
6.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	6.1	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi,	Revitalisasi pertanian dan perikanan serta kehutanan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
				insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan	
		6.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam perekonomian	Mengembangkan Industri Pengolahan, ekonomi kreatif dan Koperasi UMKM
					Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negri
		6.3	Menjaga stabilitas harga	Meningkatkan ketersediaan akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam	Menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
					Menjaga ketersediaan pangan yang terjangkau
		6.4	Menurunnya Kemiskinan	Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial	Peningkatkan akses masyarakat miskin
		6.5	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Pemerataan pembangunan wilayah
		6.6	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan pemerataan pendapatan	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
		6.7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja	Meningkatkan pasar bagi tenaga kerja yang kompetitif dan produktif

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya					
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama					
7.	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	7.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan	Menurunkan tingkat pencemaran air sungai dan perusakan lingkungan
					Menambah luasan tutupan lahan untuk menjaga kualitas udara dalam kondisi baik serta sebagai daerah tangkapan air
					Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis
					Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal loging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat
		7.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat	Peningkatan kesadaran akan mitigasi bencana

6.2. Tema Pembangunan Tahunan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan arah pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Lampung, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2019-2024) adalah sebagai berikut:

Tahun 2020	:	Meningkatkan Kualitas SDM dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan
Tahun 2021	:	Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan
Tahun 2022	:	Memantapkan SDM Berkualitas dan Perekonomian yang Berdaya Saing, dengan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
Tahun 2023	:	Memperkokoh Perekonomian untuk Produktivitas dan Daya Saing yang Tinggi
Tahun 2024	:	Memantapkan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inovatif

6.3. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan Program Pendukung Prioritas

Mencermati Agenda Kerja Utama dan Sektor Prioritas yang telah disusun sebelumnya maka terdapat 2 (dua) Prioritas Pembangunan Jangka Menengah yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; dan
2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan

Kedua prioritas tersebut disusun berdasarkan pemikiran bahwa proses pembangunan khususnya di Provinsi Lampung membutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas, dimana IPM Provinsi Lampung di Tahun 2018 sebesar 69,02 masih berada di bawah IPM Nasional yaitu sebesar 71,39. Adapun untuk prioritas Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan juga melihat realita bahwa 30% perekonomian di Provinsi Lampung masih didominasi oleh Sektor Pertanian. Dibawah ini disajikan persandingan antara Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung denga Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah.

TABEL 6- 2 Prioritas Pembangunan Jangka Menengah

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	**Pendidikan**	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan RSBNH	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Kesehatan	

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan sarana dan prasara aparatur	Rumah Sakit Jiwa
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perasngkat daerah	Rumah Sakit Jiwa
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Jiwa
		Program Mutu Layanan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa
		Program Mutu Layanan Penunjang medis	Rumah Sakit Jiwa
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Jiwa
		Sosial	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Sosial
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial
		Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Tenaga Kerja	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Olahraga Prestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pembudayaan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan sarana prasarana dan kemitraan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Kebudayaan	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Keragaman Budaya	
		Perpustakaan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kearsipan	
		Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN WILAYAH PEDESAAN	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta aset Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Penatagunaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penegakan Peraturan Perundang undangan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pangan	

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Pertanahan	
		Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Lingkungan Hidup	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan , Evaluasi Kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pembinaan kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Perhubungan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Komunikasi dan Informatika	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
			Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayaan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Statistik	
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Persandian	
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Urusan Pilihan	
		Kelautan dan Perikanan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Ruang Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pariwisata	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perkebunan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perkebunan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)	Dinas Perkebunan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Produksi Hasil Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang ASUH	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kehutanan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	Dinas Kehutanan
		Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan DAS dan RHL	Dinas Kehutanan
		Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Kehutanan
		Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Derah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Perdagangan	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengujian Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		Perindustrian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Transmigrasi	
		Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Inspektorat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Inspektorat
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	Inspektorat
		Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Inspektorat
		Perencanaan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Keuangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK- BLUD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Keuangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pendapatan Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program peningkatan pelayanan pajak	Badan Pendapatan Daerah
		Program peningkatan pelayanan pendapatan non pajak	Badan Pendapatan Daerah

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan	Badan Pendapatan Daerah
		Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian Daerah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah
		Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaaan Kelembagaan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Penelitian dan Pengembangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penghubung	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penghubung
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Penghubung

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	Badan Penghubung
		Sekretariat Daerah	
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Biro Administrasi Pimpinan
		Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Biro Administrasi Pimpinan
		Program Pelayanan Administrasi Umum	Biro Administrasi Pimpinan
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	Biro Hukum
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Hukum
		Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Biro Umum
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Umum
		Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	Biro Perekonomian
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Perekonomian
		Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Biro Organisasi
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Organisasi
		Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Sekretariat DPRD	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD
		Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD
		Kesbangpol	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol
		Program Kewaspadaan Nasional	Badan Kesbangpol
		Program Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
		Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan	Badan Kesbangpol

6.4. Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama

Berdasarkan Agenda Kerja Utama yang telah disusun sebelumnya, maka untuk penerapannya di tingkat Perangkat Daerah perlu disandingkan dengan Program Prioritas pada Perangkat Daerah. Sandingan ini diperlukan untuk mengetahui dukungan Perangkat Daerah terhadap Agenda Kerja Utama, sehingga diharapkan kedepannya Agenda Kerja Utama tersebut dapat terukur keberhasilannya.

TABEL 6- 3 Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
1. Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai	• Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial & Keagamaan • Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan • Program Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan • Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	• Biro Kesejahteraan Rakyat • Badan Kesbangpol • Satuan Polisi Pamong Praja

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan		
2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	• Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial & Keagamaan • Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	▪ Biro Kesejahteraan Rakyat ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran	• Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial & Keagamaan	▪ Biro Kesejahteraan Rakyat
4. Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya	• Program Pengembangan Nilai Budaya • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Lokal • Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian • Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan • Program Peningkatan Kerjasama,Pengawasan dan Promosi Investasi Industri • Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan • Dinas Perkebunan • Dinas Perindustrian

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
kunjungan wisatawan	• Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Dalam Negeri dan luar Negeri	dan Perdagangan • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Lampung Menuju Bebas Narkoba	• Program Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan • Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	• Badan Kesbangpol • Rumah Sakit Jiwa Daerah
6. Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem penjenjangan karir berbasis kinerja dan kompetensi (*job fit assessment*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial • Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur • Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Program Peningkatan Pelayanan Pajak • Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak	• BPSDM • BKD • Dinas Penanaman Modal dan PTSP • Badan Pendapatan Daerah
7. APBD Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	• Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah • Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah • Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan • Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; • Badan Pendapatan Daerah
8. Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation	• Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya • Program Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama Perpustakaan • Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Kominfo dan Statistik
9. Pendampingan Program Pembangunan Desa	• Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Perempuan Berjaya : memandirikan	• Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan	• Dinas Pemberdayaan

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan	Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga • Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak : mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	• Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak • Program Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Dinas Kesehatan; • Dinas Sosial; • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
12. Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja	• Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Program Pengelolaan Keragaman Budaya • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Lokal • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pemuda dan Olahraga; • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Koperasi dan UKM
13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta	• Program Olahraga Prestasi • Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga • Program Pembudayaan Olahraga • Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	• Dinas Pemuda dan Olahraga (dan Hibah kepada KONI); • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
memperbaiki tata kelola organisasi olahraga		
14. Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	• Program Pelayanan Kesehatan • Program Pelayanan RSBNH • Program Kesehatan Masyarakat • Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata • Program Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	• Dinas Kesehatan • RSUD dr. Abdul Muluk • RS Jiwa Daerah
15. Smart School : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan	• Program Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan • Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kominfo dan Statistik
16. Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)	• Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Tenaga Kerja
17. Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi	• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi • Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan • Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya • Dinas Perhubungan • Dinas Kominfo dan Statistik
18. Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT	• Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah • Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	• Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Perhubungan • Dinas Kominfo dan Statistik

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
19. Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik	• Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan • Program Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	• Dinas ESDM
20. Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)	• Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian • Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat • Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura • Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan • Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ynag Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) • Program Peningkatan Produktivitas Peternakan • Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan; • Dinas Perkebunan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; • Biro Perekonomian; • BUMD
21. Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian	• Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan • Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan • Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan • Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan • Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	• Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan; • Dinas Perkebunan; • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; • Dinas Kelautan dan Perikanan; • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu	• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan • Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	• Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan; • Dinas Perkebunan;

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
	• Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan; • Biro Perekonomian
23. Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper)	• Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	• Dinas Perkebunan
24. Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri	• Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian • Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan • Program Peningkatan Produktivitas Peternakan • Program Pemberdayaan Industri • Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri • Program pengembangan budidaya perikanan	• Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan • Dinas Perkebunan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan • Dinas Perindustrian • Dinas Perdagangan • Dinas Kelautan dan Perikanan
25. Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak nelayan, SPBU untuk nelayan	• Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Program Pengembangan Budidaya Perikanan • Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Sosial • Dinas Energi Sumberdaya Mineral
26. Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat	• Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ▪ Dinas Bina Marga dan

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)	• Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan • Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian • Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan • Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan • Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Bina Konstruksi ▪ Dinas Perhubungan ▪ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan ▪ Dinas Kehutanan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Peternakan dam Kesehatan Hewan
27. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	• Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah • Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan • Program Peningkatan Produktivitas Peternakan • Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan • Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	• Biro Perekonomian • Dinas Perkebunan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan • Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan
28. Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	• Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi • Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	• Bappeda • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi	• Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi • Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah • Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Lokal	• Dinas Koperasi dan UKM; • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
30. Lampung Ramah usaha : menata	• Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	• Dinas Penanaman

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha	• Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayaan Perizinan dan Non Perizinan	Modal dan PTSP
31. Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan)	• Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi • Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	• Bappeda • Dinas Perindustrian dan Ketahanan Pangan
32. Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat	• Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup • Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim • Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 • Program Pengelolaan DAS dan RHL • Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kehutanan • BPBD
33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	• Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan	• Dinas Kehutanan

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti di dalam Program Pembangunan Daerah pada Dokumen RPJMD dan Program Perangkat Daerah/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah :

- Memastikan database kemiskinan yang mengacu pada basis data terpadu berdasarkan “by name by address”;
- Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan yang bersifat langsung yang difokuskan pada 4 Kabupaten tertinggi persentase kemiskinannya (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat

- Pemberian kartu petani untuk tiap kepala keluarga yang digunakan untuk subsidi pupuk serta beasiswa anak petani, penerbitan kartu nelayan yang digunakan untuk subsidi BBM dan beasiswa anak nelayan)
- Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan Melakukan kemitraan dengan dunia usaha di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat.
- Penyelenggaraan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan, Pembangunan Sumur Bor Komunal dan Pembangunan Jaringan Air Bersih Perpipaan;
- Pembangunan SPAM Regional Lampung yang mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Metro.
- Pembangunan drainase lingkungan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro serta 13 Ibukota kabupaten;
- Pembangunan MCK dan septic tank komunal;
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS-3R);
- Pembuatan sumur resapan/biopori; dan
- Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
- Pembangunan TPA Regional yang mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran;
- Pengolahan sampah pesisir Teluk Lampung
- Pembangunan IPAL Regional untuk domestik, rumah sakit, dan industri
- Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah;
- Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 4x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi (Fe).
- Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan.

- Pemberian makanan tambahan serta vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 tahun.
- Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan;
- Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pendapatan mayarakat melalui pelatihan wirausaha serta pengendalian tingkat inflasi;
- Meningkatkan iklim investasi, didukung oleh FIOLA (Forum Investasi Lampung) dan satgas monitoring dan percepatan berusaha. Selain itu, peningkatan pelayanan perijinan melalui reformasi regulasi dan integrase sistem perijinan dan kemudahan berusaha;
- Penyediaan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, penggunaan jalan tol (Bakauheni-Batas Sumatera Selatan), penataan 14 exit tol , peningkatan status bandar udara (Raden Inten II, Gatot Subroto, Taufik Kiemas, Benyamin), pemanfaatan jalur tol laut (Panjang-Tanjung Priok-Tanjung Emas-Tanjung Perak), pemanfaatan dermaga sungai (Sungai Sidang, Wiralaga, KTM Mesuji, Tulang Bawang), pemanfaatan jalur double track KA;
- Pengembangan sektor pariwisata pesisir Teluk Lampung, Pesisir Barat Lampung;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, kemudahan pemasaran serta penambahan negara/daerah tujuan ekspor;
- Perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban;
- pengalokasian belanja pemerintahan diutamakan untuk program prioritas.
- Peningkatan penganggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan yang diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional.
- Menyelenggarakan program-program untuk penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur

- Fokus pemerataan pendapatan masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan (upaya ada pada pilar sosial isu kemiskinan), sehingga perekonomian masyarakat meningkat;
- Peningkatan keterampilan masyarakat miskin untuk mendongkrak penambahan pendapatan; dan
- Kemitraan dengan dunia usaha dan UMKM.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/ wajib pajak
- Meningkatkan dan mengembangkan inovasi sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi.
- Menyempurnakan dan mengevaluasi dasar hukum pungutan
- Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembentukan PAD dengan mendorong BUMD untuk menjalankan bisnis yang lebih profitable (transformasi bisnis).
- Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal.
- Meningkatkan pengawasan pada sistem dan prosedur serta pelaksanaaan pengelolaan pendapatan daerah
- Memenuhi belanja terkait standar pelayanan minimal, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- Penambahan anggaran untuk pembangunan embung.
- Melakukan penambahan anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, MCK Komunal, sumur bor komunal, SPAM Perdesaan, penyediaan lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah 3R (TPS 3R).
- Pengawasan untuk menjaga kawasan lindung yang sudah ada agar tidak terjadi pembukaan lahan;
- Merehabilitasi hutan dan lahan yang fungsi ekologisnya menurun;
- Menambah luas kawasan lindung melalui konservasi sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, sempadan bendung/bendungan.

- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok/masyarakat pada perhutanan sosial.
- Menambahkan anggaran penataan 17 KPH yang ditujukan untuk pengadaan kantor KPH, patroli kawasan hutan, penegakkan hukum tipihut, pembinaan polisi hutan, serta penanganan konflik satwa.
- Rehabilitasi hutan dan lahan di Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.
- Penanaman mangrove di pesisir pantai timur Lampung (Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur).
- Menyelesaikan kejadian/pelaporan tentang keberpihakan KPUD dan kecurangan dalam perhitungan suara;
- Penyelesaian legalitas peraturan demokrasi oleh DPRD
- Kaderisasi partai politik peserta pemilu serta peningkatan persentase perempuan dalam kepengurusan parpol
- Melarang penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol dalam pemilu serta pelarangan pelibatan ASN pada pemilu
- Menghilangkan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
- Kebebasan berpendapat;
- Menghilangkan aturan tertulis yang membatasi kebebasan mejalankan agama;
- Menghilangkan tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah/masyarakat yang disikriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.6.1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai issu pembangunan yang berkembang di Provinsi Lampung, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Industri, Ketahanan Pangan dan Pariwisata

menuju Provinsi Lampung Berjaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui :
   - pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
   - pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
   - penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
   - percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisoliran wilayah yang memiliki potensi unggulan;
   - peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
   - menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
   - mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya; dan
   - mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui :

- penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
- pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
- pencegahan perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
- pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
- pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
- pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui :
   - pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
   - pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
   - pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
   - pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
   - pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.

4. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui :
   - perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
   - diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
   - peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
   - peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
   - pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
   - pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertical serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
   - penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui :
   - Peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
   - Pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut;
   - Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan, Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus, dan Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
   - Kawasan pendidikan Universitas Lampung – Institut Teknologi Sumatera – Universitas Islam Negeri Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;

- Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan di Kabupaten Way Kanan dan Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten Mesuji; dan
- Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pesawaran.

6. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung.

6.6.2. Rencana Kawasan Strategis

a. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu:

- Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antarPulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur

pelayaran nasional dan internasional. Di samping itu pada kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama pada kawasan krakatau yang merupakan *world heritage*.

- Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.
- Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

b. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi.

GAMBAR 6.1 Kawasan Strategis Provinsi Lampung

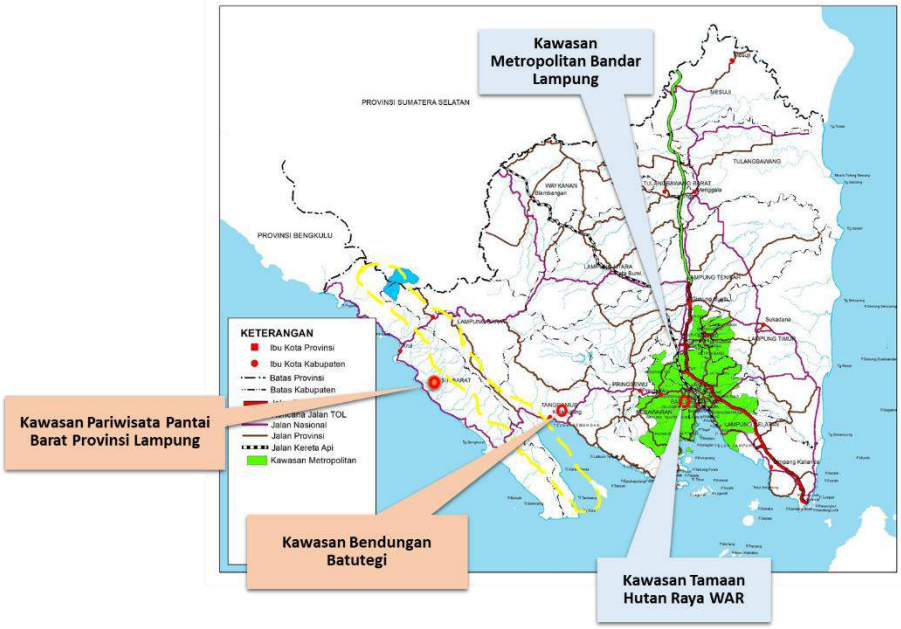

Beberapa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.

- Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan **Pertumbuhan Ekonomi** adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup:

  - **Kawasan Metropolitan Bandar Lampung,** yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Rencana deliniasi Kawasan Metropolitan Bandar Lampung meliputi seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way

Lima, Kecamatan Tri Murjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Katibung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Untuk mendukung arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung perlu dikembangkan sarana transportasi umum massal yang akan melayani pergerakan masyarakat yang berada di Kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Selain itu perlu disiapkan infrastruktur wilayah untuk mendukung kawasan khusus Natar – Jati Agung – Tanjung Bintang yang sudah bersifat kekotaan (*urbanized*).

GAMBAR 6.2 Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

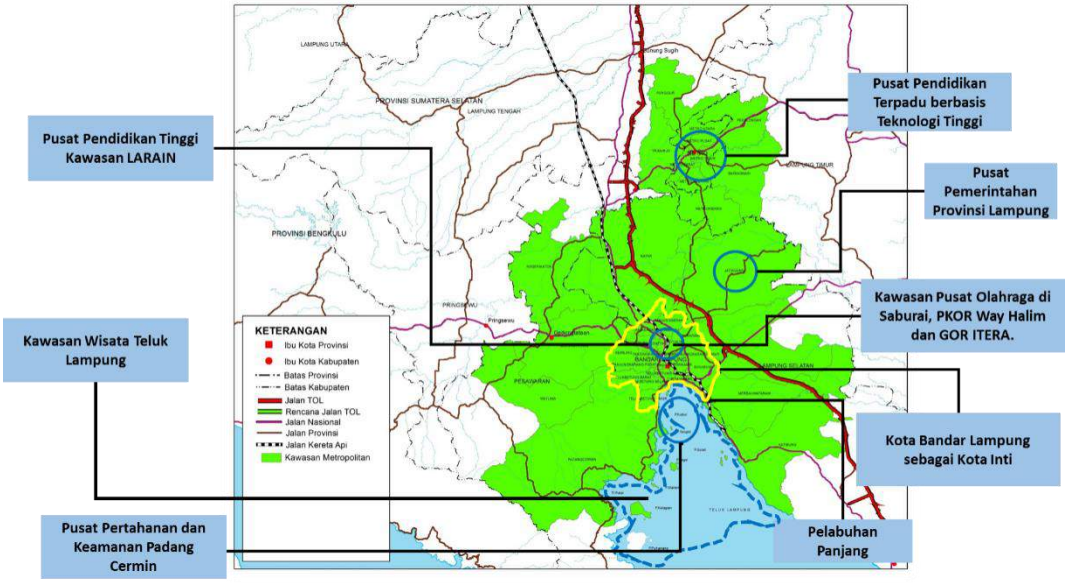

Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu:

Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.

Kawasan Pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan**.** Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan). Dalam rangka upaya mempertahankan/ pelestarian budaya Lampung, maka pembangunan kawasan ini akan dirancang berdasarkan arsitektur Lampung.

Kawasan Aeropolitan Natar di Kabupaten Lampung Selatan**.** Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan ***Aeropolitan* Natar** yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.

Kawasan Teluk Lampung**,** akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi. Kawasan Teluk Lampung sebagai kawasan wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR, kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam dan memiliki daya tarik bagi para wisatawan.

Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.

Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA – ITERA – UIN Raden Intan II (LARAIN). Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung, selain dikembangkan kawasan pendidikan LARAIN, juga akan dikembangkan **Pusat Pendidikan Terpadu Berbasis Potensi Lokal** di Kota Metro dan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya pusat pendidikan terpadu tersebut diharapkan akan dihasilkan sumberdaya manusia Provinsi Lampung terampil yang mampu menghasilkan berbagai inovasi untuk mengolah sumberdaya alam Provinsi Lampung yang potensial.

- **Kawasan Pariwisata Pantai Barat.** Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

➢ Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan **Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup:

- **Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman** meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawa-san pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli. Pada kawasan ini akan dikembangkan pusat penelitian *observatorium* yaitu Lampung Astronomical Observatory (LAO).

- **Kawasan Batutegi** di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

GAMBAR 6.3 Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

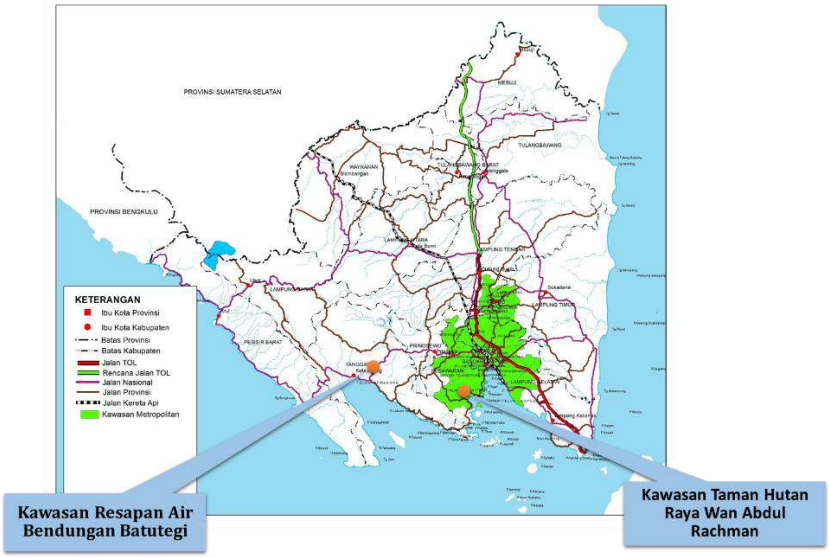

6.7. Program Pembangunan Daerah

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan diatas, maka untuk pelaksanaaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan Nomenklatur yang ada beserta pagu indikatif seperti tabel dibawah ini :

TABEL 6- 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Lampung

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
MISI 1 : MENCIPTAKAN KEHIDUPAN YANG RELIGIUS (AGAMIS), BERBUDAYA, AMAN DAN DAMAI													
Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**										73		
Sasaran 1.1. : Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	***Indeks Kerukunan Umat Beragama***	68	69		70		71		72		73		
	Tingkat kasus kriminalitas terselesaikan	72,2	78,85		82,18		85,5		88,83		92,15		
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	**Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif**		100	34.450.000.000	100	36.668.000.000	100	39.401.600.000	100	42.681.920.000	100	46.618.304.000	Biro Kesejahteraan Rakyat

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Prosentase penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung**		100	1.302.284.000	100	1.323.284.000	100	1.357.284.000	100	1.382.284.000	100	1.392.284.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**		100	286.650.000	100	286.650.000	100	286.650.000	100	286.650.000	100	286.650.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Prosentase peningkatan kapasitas ASN**		100	134.000.000	100	152.000.000	100	162.000.000	100	177.000.000	100	177.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Prosentase dokumen laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan**		100	475.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	**Prosentase jumlah masyarakat terhadap pembinaan idologi dan wawasan kebangsaan**		20	1.600.000.000	20	1.600.000.000	20	1.700.000.000	20	1.700.000.000	20	1.800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Program Kewaspadaan Nasional	**Persentase Pengendalian Kebijakan Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung**		100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan	**Prosentase lembaga dan orkemas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Prov. Lampung**		20	1.700.000.000	20	1.700.000.000	20	1.900.000.000	20	1.900.000.000	20	2.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**		100	16.469.631.600	100	21.747.086.000	100	18.914.817.000	100	14.835.865.000	100	13.917.756.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	**Tingkat Ketersediaan Saspras Kantor**		90	727.235.000	90	815.000.000	90	665.000.000	90	715.000.000	100	715.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur dan lembaga PD**		75	335.639.100	80	1.760.000.000	85	1.760.000.000	90	1.760.000.000	100	1.760.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase Anggota Satpol PP yang profesional**		35	1.097.293.900	40	1.125.000.000	50	1.160.000.000	60	1.160.000.000	75	1.210.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Subtansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		20	681.836.400	20	770.000.000	20	795.000.000	20	820.000.000	20	840.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penegakan Peraturan Perundang undangan	**Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada**		80	960.000.000	75	1.970.000.000	70	2.070.000.000	65	2.170.000.000	60	2.320.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	**Persentase Anggota Linmas Yang Dibina**		45	407.000.000	50	325.000.000	55	345.000.000	55	385.000.000	65	415.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	**Persentase Penyelenggaraan Trantibum**		90	4.321.364.000	90	5.450.000.000	90	5.725.000.000	90	5.700.000.000	100	5.980.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran 1.2. : Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	***Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)***	68, 67	72		73		74		75		76		
Program Politik Dalam Negeri	**Prosentase Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung**		74	1.600.000.000	75	1.600.000.000	76	1.600.000.000	76	1.600.000.000	77	2.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Tujuan 2 : Pelestarian Warisan Budaya	**Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan**										100		

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Sasaran 2.1. : Meningkatnya pelestarian Budaya	***Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian***	32	60		75		90		100		120		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**		90	2.696.200.000	93	3.188.467.067	96	3.523.243.145	98	3.988.208.997	100	4.411.040.696	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai**		90	305.000.000	93	360.686.320	96	398.556.917	98	451.154.864	100	498.986.504	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**presentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah**		90	190.000.000	93	224.689.839	95	248.281.358	98	281.047.292	100	310.844.052	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**presentase peningkatan nilai pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		70	449.800.000	73	531.923.628	75	587.773.447	77	665.342.485	80	735.882.391	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	**Presentase peningkatan penyelenggaraan event ekonomi kreatif**		70	1.875.000.000	75	2.217.333.933	80	2.450.144.981	85	2.773.493.016	90	3.067.539.983	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	**Presentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata**		70	3.900.000.000	75	4.612.054.581	80	5.096.301.560	85	5.768.865.474	90	6.380.483.166	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	**Presentase kawasan pengembangan pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya**		70	4.109.000.000	75	4.859.213.403	80	5.369.411.054	85	6.078.017.495	90	6.722.411.623	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Kemitraan	**Presentase Peningkatan Kompetensi SDM pariwisata**		70	1.100.000.000	75	1.300.835.907	80	1.437.418.389	85	1.627.115.903	90	1.799.623.457	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	**Presentase peningkatan penyelenggaraan event Menara Siger**		70	375.000.000	70	443.466.787	70	490.028.996	70	554.698.603	70	613.507.997	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Nilai Budaya	**Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang diakui nilai budayanya**		70	3.650.000.000	80	5.200.000.000	90	6.700.000.000	100	8.200.000.000	110	9.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	**Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum**		55	4.750.000.000	65	8.405.500.000	75	9.759.500.000	80	11.490.100.000	95	13.261.480.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Keragaman Budaya	**Persentase karya seni budaya yang berprestasi**		50	4.077.000.000	60	7.677.000.000	70	9.477.000.000	80	11.777.000.000	90	13.577.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	**Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum Transmigrasi**		55	450.000.000	65	750.000.000	75	900.000.000	80	1.050.000.000	95	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MISI 2 : MEWUJUDKAN "GOOD GOVERNANCE" UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK													
Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	**Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)**										A		
Sasaran 3.1. : Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	***Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai)***	CC	B		B		BB		BB		A		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	100	100	2.344.380.700	100	2.461.599.735	100	2.584.679.724	100	2.713.913.709	100	2.849.609.414	Badan Kepegawaian Daerah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**		4 dokumen	1.041.443.800	4 dokumen	1.093.515.490	4 dokumen	1.148.191.790	4 dokumen	1.205.601.379	4 dokumen	1.265.863.449	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**		5 dokumen	61.601.000	5 dokumen	64.681.050	5 dokumen	67.915.103	5 dokumen	71.310.858	5 dokumen	74.876.401	Badan Kepegawaian Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan**		45 dokumen	474.782.900	45 dokumen	498.522.045	45 dokumen	523.448.148	45 dokumen	549.620.554	45 dokumen	577.101.582	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	**Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ**		600	2.592.861.800	600	2.722.504.890	600	2.858.630.135	600	3.001.561.641	600	3.151.639.723	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	**Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung**		70	1.015.175.300	70	1.065.934.065	70	1.219.230.769	70	1.175.192.307	70	1.233.951.931	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerntah Provinsi Lampung**		60	100.370.600	60	0	60	0	60	0	60	0	Badan Kepegawaian Daerah
Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	**Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat**		70	453.020.900	70	475.671.945	70	499.455.542	70	524.428.319	70	550.649.736	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran**		100	1.376.762.900	100	1.482.000.000	100	1.601.000.000	100	1.725.215.000	100	1.780.957.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor**		100	342.505.800	100	365.000.000	100	413.730.000	100	392.000.000	100	418.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**		100	0	100	50.000.000	100	70.000.000	100	130.000.000	100	155.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	630.731.300	100	716.900.000	100	719.000.000	100	803.000.000	100	885.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	**Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**		2 dokumen	975.000.000	2 dokumen	1.210.000.000	2 dokumen	1.350.000.000	2 dokumen	1.525.000.000	2 dokumen	1.750.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		2dokumen	950.000.000	2dokumen	1.110.000.000	2dokumen	1.235.000.000	2dokumen	1.400.000.000	2dokumen	1.550.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	**Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya**		4 dokumen	750.000.000	4 dokumen	985.000.000	4 dokumen	1.125.000.000	4 dokumen	1.275.000.000	4 dokumen	1.500.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	**Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Penguatan Inovasi Daerah**		3 dokumen	975.000.000	3 dokumen	1.175.000.000	3 dokumen	1.325.000.000	3 dokumen	1.573.000.000	3 dokumen	1.775.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran**		100	2.669.322.000	100	3.428.738.197	100	3.788.755.708	100	4.288.871.461	100	4.743.491.837	BP SDM

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor		100	1.555.235.000	100	1.661.830.911	100	1.836.323.157	100	2.078.717.813	100	2.299.061.902	BP SDM
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah		100	570.883.000	100	675.126.236	100	746.014.491	100	844.488.403	100	934.004.174	BP SDM
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan		100	677.264.000	100	756.324.406	100	830.488.469	100	933.512.947	100	1.027.165.319	BP SDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Persentase aparatur yang lulus pengembangan		100	5.419.336.000	100	6.408.788.000	100	7.081.684.747	100	8.016.261.626	100	8.866.149.261	BP SDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70		100	1.380.000.000	100	1.631.957.775	100	1.803.306.706	100	2.041.290.860	100	2.257.709.428	BP SDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70		100	2.220.000.000	100	2.625.327.377	100	2.900.971.657	100	3.283.815.731	100	3.628.967.341	BP SDM
Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaaan Kelembagaan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar		100	507.960.000	100	600.702.370	100	663.773.677	100	751.372.540	100	831.033.391	BP SDM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran		100	3.731.389.100	100	4.086.063.767	100	4.471.874.705	100	4.633.483.101	100	5.429.208.049	Badan Penghubung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor		100	2.373.513.400	100	2.649.000.000	100	2.838.100.000	100	3.901.300.000	100	3.765.500.000	Badan Penghubung

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**		100	164.075.000	100	185.000.000	100	363.000.000	100	215.000.000	100	250.000.000	Badan Penghubung
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	503.917.900	100	525.100.000	100	553.900.000	100	562.800.000	100	855.200.000	Badan Penghubung
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	**% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah**		100	2.702.304.600	100	3.195.686.233	100	3.531.220.295	100	3.997.238.899	100	4.421.027.951	Badan Penghubung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**		100	2.091.149.600	100	2.472.947.716	100	2.732.597.172	100	3.093.220.700	100	3.421.165.339	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**		100	622.275.200	100	735.889.022	100	813.154.378	100	920.467.158	100	1.018.055.497	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan kualitas SDM**		100	283.800.000	100	335.615.664	100	370.853.944	100	419.795.903	100	464.302.852	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	552.775.200	100	653.699.844	100	722.335.670	100	817.663.017	100	904.352.015	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	**Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik**		21	4.950.000.000	42	5.853.761.583	62	6.468.382.749	83	7.322.021.563	100	8.098.305.557	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Penyelenggaraan statistik sektoral	**Persentase pengelolaan data statistik sektoral**		90	350.000.000	100	413.902.334	100	457.360.396	100	517.718.696	100	572.607.464	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	**Persentase layanan keamanan informasi daerah**		20	350.000.000	40	413.902.334	60	457.360.396	80	517.718.696	100	572.607.464	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan administrasi perkantoran**		100	1.980.000.000	100	2.115.000.000	100	2.268.000.000	100	2.430.000.000	100	4.730.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	**Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor**		100	986.000.000	100	1.077.500.000	100	1.144.250.000	100	1.205.675.000	100	1.272.242.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Jumlah Persentase Pemenuhan Aparatur dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**		100	350.000.000	100	375.000.000	100	428.000.000	100	505.600.000	100	535.620.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuain Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	1.005.000.000	100	981.500.000	100	1.121.100.000	100	1.221.020.000	100	1.375.824.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Jumlah Kab/Kota yang dibina**		15	923.000.000	15	982.500.000	15	1.003.125.000	15	1.066.100.000	15	1.135.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Tersedianya data kependudukan dan profile kab/kota**		15	2.639.000.000	15	2.928.000.000	15	3.018.000.000	15	3.158.000.000	15	3.295.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Persentase Aseptor KB Aktif**		74	1.000.000.000	74,87	1.040.000.000	75,59	1.070.000.000	76,21	1.100.000.000	77	1.120.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Prosentase kepuasan pelayanan internal**		100	1.710.000.000	100	1.897.000.000	100	2.004.000.000	100	2.101.000.000	100	2.208.000.000	Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal**		77	635.000.000	80	698.500.000	82	762.000.000	85	825.500.000	87	889.000.000	Inspektorat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Prosentase Aparatur Sipil Yang Mengikuti Diklat dan Memenuhi Standar Kompetensi**		34	435.000.000	37	445.000.000	40	455.000.000	44	565.000.000	47	475.000.000	Inspektorat
Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	**Prosentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan pelaporan Sesuai Peraturan**		100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.000.000	100	104.000.000	100	114.000.000	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan yang Berlaku**		80	6.760.000.000	82	7.465.000.000	84	8.179.500.000	86	8.894.000.000	88	9.608.500.000	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	**Rata-rata indeks Maturitas SPIP di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah**		3	970.000.000	3	1.022.500.000	3	1.095.000.000	3	1.167.500.000	3	1.220.000.000	Inspektorat
Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	**Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku**		100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	Inspektorat
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	**Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa**		88	2.900.000.000	89	3.480.000.000	92	4.176.000.000	93	5.011.200.000	94	6.013.440.000	Biro Administrasi Pimpinan
Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	**Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda**		90	2.380.000.000	92	2.856.000.000	94	3.427.200.000	95	4.112.640.000	96	4.935.168.000	Biro Administrasi Pimpinan
Program Pelayanan Administrasi Umum	**persentase dokumen ke tatausahaan yang tepat waktu**		100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	1.492.992.000	Biro Administrasi Pimpinan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu**		100	550.000.000	100	660.000.000	100	792.000.000	100	950.400.000	100	1.140.480.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	**Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan**		100	2.750.000.000	100	3.070.000.000	100	3.435.000.000	100	3.710.000.000	100	3.985.000.000	Biro Hukum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu**		100	350.000.000	100	385.000.000	100	420.000.000	100	455.000.000	100	490.000.000	Biro Hukum
Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase pelaporan capaian administrasi keuangan dan kerumahtanggaan yang tepat waktu**		100	52.910.000.000	100	60.846.500.000	100	69.973.475.000	100	80.469.496.250	100	92.539.920.688	Biro Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu**		100	7.300.000.000	100	8.395.000.000	100	9.654.250.000	100	11.102.387.500	100	12.767.745.625	Biro Umum
Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, IKK) Tepat Waktu**		100	1.800.000.000	100	5.567.156.000	100	5.555.627.000	100	5.904.672.000	100	6.923.006.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu**		100	400.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu**		100	400.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	Biro Perekonomian
Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	**Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran.**		100	2.185.000.000	100	2.775.000.000	100	3.375.000.000	100	3.975.000.000	100	4.450.000.000	Biro Organisasi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu**		100	515.000.000	100	618.000.000	100	741.600.000	100	889.920.000	100	1.067.904.000	Biro Organisasi
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Dokumen Verifikasi Administrasi Pemerintah yang sesuai dengan 5T (Tepat Waktu; Tepat Mutu; Tepat Sasaran; Teapat Administrasi; Tepat Kinerja)**		100	2.650.000.000	100	2.882.000.000	100	3.160.400.000	100	3.494.480.000	100	4.206.416.000	Biro Administrasi Pembangun an
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu**		100	525.000.000	100	603.000.000	100	696.600.000	100	808.920.000	100	943.704.000	Biro Administrasi Pembangun an
Program Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	**Persentase paket pekerjaan yang selesai di tenderkan**		100	3.950.000.000	100	4.779.000.000	100	5.256.900.000	100	5.940.297.000	100	6.534.326.700	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan administrasi perkantoran**		100	5.517.000.000	100	3.436.698.000	100	4.881.698.000	100	6.535.645.000	100	7.580.645.000	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	**Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor**		100	1.200.000.000	100	1.900.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Jumlah persentase pemenuhan aparatur dalam peningkatkan kapasitas kelembagaan**		100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuain Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	963.000.000	100	1.110.000.000	100	1.110.492.000	100	1.420.000.000	100	2.100.000.000	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	**Persentase dokumen arsip yang terpelihara**		100	1.550.000.000	100	1.640.000.000	100	1.680.000.000	100	1.720.000.000	100	1.785.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	**Persentase OPD yang tertib arsip**		30	1.345.000.000	50	1.470.000.000	60	1.560.000.000	80	1.665.000.000	100	1.780.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan administrasi perkantoran**		100	2.593.200.000	100	2.852.520.000	100	3.137.772.000	100	3.451.549.200	100	3.796.704.120	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		100	2.351.800.000	100	1.816.980.000	100	1.998.678.000	100	2.198.545.800	100	2.418.400.380	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Tingkat capaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah**		100	715.000.000	100	786.500.000	100	865.150.000	100	951.665.000	100	1.046.831.500	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	1.100.000.000	100	1.196.250.000	100	1.304.325.000	100	1.422.514.500	100	1.564.765.950	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah**		100	1.740.000.000	100	1.529.000.000	100	1.681.900.000	100	1.850.090.000	100	3.535.099.000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	**Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi**		100	2.700.000.000	100	2.970.000.000	100	3.267.000.000	100	3.593.700.000	100	3.953.070.000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia**		100	3.250.000.000	100	3.575.000.000	100	3.932.500.000	100	4.325.750.000	100	4.758.325.000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	**Persentase tingkat kesesuain hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**		100	3.200.000.000	100	3.520.000.000	100	3.872.000.000	100	4.259.200.000	100	4.685.120.000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	**Persentase capaian kinerja OPD dan Kabupaten/Kota**		100	1.300.000.000	100	1.430.000.000	100	1.573.000.000	100	1.730.300.000	100	1.943.925.500	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	**Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan**		100	1.050.000.000	100	1.155.000.000	100	1.270.500.000	100	1.397.550.000	100	1.537.305.000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan Administrasi Perkantoran**		100	14.293.660.400	100	16.523.069.856	100	18.110.754.567	100	19.921.830.023	100	21.914.373.024	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		100	4.448.437.700	100	7.701.800.285	100	7.001.980.314	100	6.997.178.346	100	7.241.896.180	Sekretariat DPRD

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Sumber Daya Manusia yang Terpenuhi**		400 Orang	4.038.488.500	400 Orang	8.777.633.042	400 Orang	9.655.396.346	400 Orang	10.620.935.981	400 Orang	11.683.029.580	Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	**Pesentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	3.612.066.100	100	4.125.303.655	100	4.537.834.019	100	4.991.617.421	100	5.490.779.165	Sekretariat DPRD
Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	**Persentase kegiatan-kegiatan pada alat kelengkapan dewan dalam rangka tugas dan fungsi**		70	4.472.403.900	70	12.646.484.991	70	13.911.133.490	70	15.302.246.840	70	16.832.471.522	Sekretariat DPRD
Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum	**Peraturan Daerah Yang Dihasilkan**		5	5.682.219.600	5	11.788.819.409	5	12.967.701.351	5	14.264.471.486	5	15.690.918.632	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	**Persentase anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Kunker, Koordinasi, dan konsultasi dalam rangka tugas dan fungsi**		100	31.660.159.200	100	57.552.434.485	100	63.307.677.935	100	69.638.445.728	100	76.602.290.300	Sekretariat DPRD
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan kehumasan, protokol dan aspirasi dalam rangka tugas dan fungsi**		70	11.792.564.600	70	28.987.090.108	70	31.885.799.339	70	35.074.379.273	70	38.581.817.199	Sekretariat DPRD

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Sasaran 3.2. : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	***Opini BPK/WTP (Opini)***	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Nilai SAKIP	B	BB		BB		A		A		A		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan Administrasi Perkantoran**		100	11.143.263.700	100	12.457.590.070	100	13.703.349.077	100	15.073.683.985	100	16.581.052.383	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**		100	3.055.402.400	100	4.435.686.962	100	4.970.893.074	100	6.115.977.912	100	6.865.702.892	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		100	623.031.000	100	685.334.100	100	753.867.510	100	829.254.261	100	912.179.687	Badan Pendapatan Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	**Pesentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	694.315.000	100	763.746.500	100	840.121.150	100	924.133.265	100	1.016.546.592	Badan Pendapatan Daerah
Program peningkatan pelayanan pajak	**Peresentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**		85	1.266.754.000	86	1.498.035.535	87	1.655.323.176	88	1.873.777.799	89	2.072.436.557	Badan Pendapatan Daerah
Program peningkatan pelayanan pendapatan non pajak	**Persentase Realisasi penerimaaan Pendapatan Non Pajak**		95	563.786.000	96	619.470.975	97	684.748.967	98	776.777.651	99	859.476.169	Badan Pendapatan Daerah
Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan	**Jumlah Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan yang Berbasis IT**		37	6.211.847.900	39	7.345.995.272	41	8.117.294.909	43	9.188.542.277	45	10.162.715.630	Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah	**Jumlah Pembinaan dan Pengedalian Pelayanan Pendapatan Daerah**		37	661.540.000	39	782.322.715	41	864.463.419	43	978.547.504	45	1.082.293.547	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	**Persentase Realisasi Penerimaaan Pajak Daerah Pada UPTD**		85	780.060.000	86	922.481.871	87	1.019.338.717	88	1.153.861.847	89	1.276.194.794	Badan Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran berbasis teknologi**		100	4.460.469.000	100	4.906.515.900	100	5.397.167.490	100	5.936.884.240	100	6.530.572.664	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor**		100	347.160.800	100	381.876.880	100	420.064.568	100	462.071.025	100	508.278.128	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas pegawai**		100	1.093.874.000	100	1.203.261.400	100	1.323.587.540	100	1.455.946.294	100	1.601.540.923	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	386.913.700	100	425.605.070	100	468.165.577	100	514.982.135	100	566.480.348	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan**		1 bulan	1.891.345.000	1 bulan	2.080.479.500	1 bulan	2.288.527.450	1 bulan	2.517.380.195	1 bulan	2.769.118.215	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	**Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku**		85	1.007.968.000	85	1.108.764.800	85	1.219.641.280	85	1.341.605.408	85	1.475.765.949	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD	**Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu**		12 bulan	2.079.851.000	12 bulan	2.287.836.100	12 bulan	2.516.619.710	12 bulan	2.768.281.681	12 bulan	3.045.109.849	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	**Terintegrasinya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel**		1 Aplikasi	3.500.662.500	1 Aplikasi	3.850.728.750	1 Aplikasi	4.235.801.625	1 Aplikasi	4.659.381.788	1 Aplikasi	5.125.319.966	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah	**Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu**		100	1.231.756.000	100	1.354.931.600	100	1.490.424.760	100	1.639.467.236	100	1.803.413.960	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Aset Daerah	**Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah**		90	12.255.000.000	90	13.480.500.000	90	14.828.550.000	90	16.311.405.000	90	17.942.545.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran 3.3. : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	CC	B		B		BB		BB		A		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Layanan adminstrasi perkantoran**		100	2.517.000.000	100	2.517.000.000	100	2.517.000.000	100	2.517.000.000	100	2.467.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		100	560.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah**		100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah**		100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	**Persentase izin yang diterbitkan tas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin A)**		100	540.000.000	100	520.000.000	100	540.000.000	1	520.000.000	100	520.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	**Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin B)**		100	703.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayaan Perizinan dan Non Perizinan	**Peringkat penilaian indeks pelayanan publik dari Kementrian PAN RB**		B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	**Persentase kulaitas informasi potensi dan peluang penanaman modal**		100	3.000.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Promosi Penanaman Modal	**Jumlah investment awards**		1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Jumlah realisasi investasi daerah terhadap target investasi nasional**		100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM, MENGEMBANGKAN UPAYA PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS													
Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**										73		
Sasaran 4.1. : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	***Angka Harapan Hidup (Tahun)***	70,23	72,1		72		72		72		72		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		100	6.502.000.000	100	9.753.000.000	100	14.629.500.000	100	21.944.250.000	100	32.916.375.000	Rumah Sakit Jiwa
Program peningkatan sarana dan prasara aparatur	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur**		100	2.910.000.000	100	4.365.000.000	100	6.547.500.000	100	9.821.250.000	100	14.731.875.000	Rumah Sakit Jiwa
Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	235.000.000	100	352.500.000	100	528.750.000	100	793.125.000	100	1.189.687.500	Rumah Sakit Jiwa
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perasngkat daerah	**Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah**		100	280.000.000	100	560.000.000	100	770.000.000	100	1.085.000.000	100	1.557.500.000	Rumah Sakit Jiwa
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat**		100	400.000.000	100	600.000.000	100	900.000.000	100	1.350.000.000	100	2.025.000.000	Rumah Sakit Jiwa
Program Mutu Layanan Keperawatan	**Persentase Mutu Layanan Keperawatan**		100	175.000.000	100	262.500.000	100	393.750.000	100	421.875.000	100	885.937.500	Rumah Sakit Jiwa
Program Mutu Layanan Penunjang medis	**Persentase Mutu Layanan Penunjang Medis**		100	4.753.585.937	100	7.130.378.906	100	10.695.568.358	100	16.043.352.537	100	24.065.028.806	Rumah Sakit Jiwa

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	**Persentase terpenuhinya Pelayanan BLUD**		100	14.000.000.000	100	15.400.000.000	100	16.940.000.000	100	18.634.000.000	100	20.497.400.000	Rumah Sakit Jiwa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Prosentase tingkat pelayanan administrasi rumah sakit**		100	11.400.000.000	100	10.600.000.000	100	13.700.000.000	100	14.800.000.000	100	13.900.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	**Prosentase peningkatan pendapatan BLUD**		100	250.000.000.000	100	260.000.000.000	100	270.000.000.000	100	280.000.000.000	100	300.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	**Prosentase terlayaninya pasien miskin dan terlantar**		100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	**Prosentase pemenuhan standar SDM**		85	400.000.000	88	400.000.000	91	700.000.000	95	800.000.000	100	800.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.	**Prosentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar**		91	95.500.000.000	93	82.394.000.000	96	106.136.000.000	98	146.560.000.000	100	174.397.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan administrasi perkantoran**		100	14.612.568.500	100	15.791.340.368	100	16.832.140.000	100	18.456.130.000	100	20.441.520.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor**		100	6.727.446.900	100	8.882.775.000	100	10.575.100.782	100	12.767.895.083	100	14.295.321.322	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Jumlah lembaga yang dibina**		5	197.617.849	5	715.860.000	5	672.400.000	5	631.400.000	5	590.400.000	Dinas Kesehatan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	900.000.000	100	1.108.710.000	100	1.201.300.000	100	1.289.750.000	100	1.332.000.000	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif**		30	8.729.140.800	35	1.655.609.337	35	1.829.441.586	40	2.070.874.785	45	2.290.429.854	Dinas Kesehatan
Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	**Persentase Bapelkes terakreditasi**		100	6.650.000.000	100	7.864.144.349	100	8.689.847.532	100	9.836.655.231	100	10.879.541.809	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	**Persentase Anggaran Kesehatan terhadap APBD**		10	1.650.000.000	10	2.010.382.766	10	2.221.464.783	10	2.514.633.668	10	2.781.236.252	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan	**Persentase FKTP terakreditasi**		50	67.800.000.000	55	81.834.404.354	60	90.426.684.093	65	102.360.382.254	70	113.212.675.663	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	**Pelayanan IFKA sesuai standar**		100	986.282.880	100	1.166.356.532	100	1.288.819.226	100	1.458.905.963	100	1.613.579.824	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan RSBNH	**Persentase RSBNH terakreditasi**		100	9.324.288.000	100	15.373.515.269	100	16.987.671.867	100	19.229.551.579	100	21.268.277.220	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	**Persentase Labkesda terakreditasi**		100	1.600.000.000	100	5.085.085.820	100	5.618.999.156	100	6.360.543.984	100	7.034.891.696	Dinas Kesehatan
Program Kesehatan Masyarakat	**Prevalensi wasting**		9,27	14.372.655.071	7,99	15.936.521.627	6,71	17.609.791.604	5,43	19.933.773.068	4,51	22.047.160.585	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit	**Penemuan Kasus (CDR) TBC**		58	2.450.000.000	65	3.370.347.578	70	3.724.220.371	75	4.215.709.385	80	4.662.660.775	Dinas Kesehatan
Sasaran 4.4. : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	***Harapan Lama Sekolah (Tahun)***	12,48	12,64		13		13		13		13		
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,8	7,8		8		8		8		8		

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan administrasi perkantoran**		100	8.403.900.000	100	8.290.367.000	100	8.539.077.000	100	8.795.244.000	100	9.059.095.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor**		70	3.823.000.000	75	2.552.340.000	80	2.628.910.000	85	2.707.776.000	90	2.789.008.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan kompetensi ASN**		35	800.000.000	45	824.000.000	55	848.720.000	65	874.180.000	75	900.404.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		88	5.000.000.000	90	4.635.000.000	92	4.774.050.000	94	4.917.270.000	96	5.064.786.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	**Persentase Satuan Pendidikan SMA berakreditasi minimal B**		60	327.094.222.000	70	346.500.000.000	76	363.000.000.000	78	379.500.000.000	80	401.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	**Persentase Program Keahlian SMK berakreditasi minimal B**		50	87.880.000.000	55	93.450.000.000	60	97.445.000.000	63	103.989.500.000	65	116.588.450.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	**Persentase sekolah umum yang menerapkan program pendidikan inklusi**		25	9.200.000.000	30	10.300.000.000	35	11.400.000.000	40	12.500.000.000	50	13.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi**		60	20.170.000.000	65	22.000.000.000	70	23.100.000.000	75	24.200.000.000	80	25.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi	**Persentase siswa berprestasi dan lembaga pendidikan yang dibina**		50	13.000.000.000	55	14.000.000.000	60	15.000.000.000	65	16.000.000.000	70	17.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	**Persentase Sekolah yang meningkat sarana dan prasarananya**		60	141.498.078.000	65	220.500.000.000	70	254.000.000.000	75	278.750.000.000	80	217.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	**Persentase sekolah di wilayah I yang meningkat level akreditasinya**		60	755.000.000	65	1.250.000.000	70	1.400.000.000	75	1.550.000.000	80	1.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II	**Persentase sekolah di wilayah II yang meningkat level akreditasinya**		60	479.000.000	65	1.100.000.000	70	1.250.000.000	75	1.400.000.000	80	1.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III	**Persentase sekolah di wilayah III yang meningkat level akreditasinya**		60	325.000.000	65	650.000.000	70	800.000.000	75	950.000.000	80	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV	**Persentase sekolah di wilayah IV yang meningkat level akreditasinya**		60	479.000.000	65	1.100.000.000	70	1.250.000.000	75	1.400.000.000	80	1.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V	**Persentase sekolah di wilayah V yang meningkat level akreditasinya**		60	518.000.000	65	1.120.000.000	70	1.320.000.000	75	1.510.000.000	80	1.580.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI	**Persentase sekolah di wilayah VI yang meningkat level akreditasinya**		60	572.000.000	65	1.160.000.000	70	1.330.000.000	75	1.480.000.000	80	1.610.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII	**Persentase sekolah di wilayah VII yang meningkat level akreditasinya**		60	370.000.000	65	500.000.000	70	650.000.000	75	800.000.000	80	950.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	**Persentase sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar dan management sekolah**		30	4.000.000.000	35	10.200.000.000	40	10.250.000.000	45	9.500.000.000	50	9.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan	**Jumlah kunjungan pemustaka**		375.000	2.800.000.000	385.000	2.850.000.000	395.000	3.600.000.000	415.000	3.650.000.000	425.000	3.650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka	**Persentase Penyediaan koleksi bahan pustaka**		8	1.800.000.000	8	2.000.000.000	10	2.150.000.000	11	2.500.000.000	13	2.916.226.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	**Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan**		160	2.525.000.000	320	2.575.000.000	480	2.934.000.000	640	3.129.000.000	800	3.630.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 4.3. : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Penyandang disabilitas (Perempuan dan Anak Berjaya)	***Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)***	90,57	91,03		91		91		92		92		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	63,82	64,24		64		65		65		65		
	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	3	6		9		13		14		15		
	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	1,6	2,18		3		3		4		4		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentae Pelayanan Administrasi Perkantoran**		100	1.534.870.900	100	1.831.000.000	100	2.007.000.000	100	2.276.000.000	100	2.504.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor**		100	595.026.600	100	699.000.000	100	763.000.000	100	858.000.000	100	943.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**		100	80.102.500	100	189.000.000	100	210.000.000	100	247.000.000	100	278.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan**		100	390.000.000	100	466.622.000	100	533.000.000	100	645.873.000	100	725.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG**		15	2.800.000.000	15	3.230.000.000	15	3.580.000.000	15	3.850.000.000	15	4.130.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	**Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak**		15	1.700.000.000	15	1.760.000.000	15	1.935.000.000	15	2.170.000.000	15	2.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat	**Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak**		100	1.000.000.000	100	1.410.000.000	100	1.558.000.000	100	1.775.000.000	100	1.960.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**		100	900.000.000	100	1.058.000.000	100	1.183.938.000	100	1.444.000.000	100	1.660.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date**		15	1.000.000.000	15	1.180.000.000	15	1.295.000.000	15	1.480.000.000	15	1.681.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Persentase Akseptor KB Aktif**		74	370.000.000	74.37	437.000.000	75.59	483.000.000	76.21	590.000.000	77	680.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran 4.4. : Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	***Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)***	6 (POPNAS)	4 (POPWIL)		6 (POPNAS)		3 (POPWIL)		5 (POPNAS)		3 (POPWIL)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan administrasi perkantoran (%)**		100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor (%)**		100	293.800.000	100	293.800.000	100	293.800.000	100	293.800.000	100	293.800.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Meningkatkan kapasitas Aparatur (%)**		100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan (%)**		100	604.400.000	100	604.400.000	100	604.400.000	100	604.400.000	100	604.400.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	**Jumlah peserta atau kelompok Peningkatan peran serta kepemudaan**		1345 orang/16 kelompok	3.225.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.335.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.465.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.600.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.740.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Olahraga Prestasi	**Jumlah Atlet Pelajar, pelatih, wasit, yang di tingkatkan standarisasi, pelaksanaan peningkatan Prestasi serta pelaksanaan promosi dan pembinaan olahraga**		900	3.700.000.000	960	4.905.000.000	1.120	4.511.000.000	1.180	5.949.300.000	1.240	4.627.126.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembudayaan Olahraga	**Jumlah Cabang olahraga pelajar, rekreasi dan tantangan yang dibina**		10	3.300.000.000	11	3.620.000.000	12	3.940.000.000	13	4.260.000.000	14	4.580.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan sarana prasarana dan kemitraan	**Persentase Peningkatan Sarana prasarana dan Kemitraan**		20	6.750.000.000	40	7.900.000.000	60	9.100.000.000	80	10.650.000.000	100	11.800.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	**Persentase Peningkatan fasilitasi olahraga yang terkelola dengan baik**		20	650.000.000	40	780.000.000	60	871.000.000	80	990.000.000	100	1.095.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Sasaran 4.5 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	***Tingkat Pengangguran Terbuka***	4,06	3,85		3		4		4		3		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**		12 Bulan	2.305.700.000	12 Bulan	2.714.200.000	12 Bulan	2.989.200.000	12 Bulan	3.219.200.000	12 Bulan	3.424.200.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**		255 unit	1.121.600.000	255 unit	1.295.400.000	255 unit	1.445.000.000	255 unit	1.520.000.000	255 unit	1.655.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kapasitas dan Kelembagaan Perangkat Daerah**		150 Orang	150.000.000	150 Orang	200.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	300.000.000	150 Orang	425.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	911.324.000	100	1.110.000.000	100	1.225.000.000	100	1.375.000.000	100	1.900.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi**		1939 orang	3.975.000.000	1939 orang	4.700.700.000	1939 orang	6.350.000.000	1939 orang	7.325.000.000	1939 orang	8.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pembinaan penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**		29000 orang	850.000.000	29000 orang	1.100.000.000	29000 orang	1.150.000.000	29000 orang	1.300.000.000	29000 orang	1.600.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**Jumlah Perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja**		240 orang	489.976.000	240 orang	700.000.000	240 orang	850.000.000	240 orang	1.000.000.000	240 orang	1.200.000.000	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	**Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3 yang dilakukan di perusahaan**		485 Perusahaan	800.000.000	485 Perusahaan	975.000.000	485 Perusahaan	1.300.000.000	485 Perusahaan	1.750.000.000	485 Perusahaan	2.150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
MISI 4 : MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN KONEKTIVITAS WILAYAH													
Tujuan 5 : Terwujudnya konektivitas antar wilayah	**Capaian rata-rata peningkatan kondisi Infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)**										91		
	Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)										84		
Sasaran 5.1. : Meningkatnya konektivitas antar wilayah	***Indeks Konektivitas***	6,01	6,2		6		6		7		7		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan administrasi perkantoran (%)**		100	3.142.000.000	100	3.575.000.000	100	3.700.000.000	100	3.690.000.000	100	3.675.000.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor (%)**		75	817.000.000	100	1.217.000.000	100	1.217.000.000	100	1.237.000.000	100	1.217.000.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Meningkatkan kapasitas Aparatur (%)**		65	310.000.000	100	310.000.000	100	332.049.000	100	373.332.000	100	310.000.000	Dinas Perhubungan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan (%)**		70	2.618.000.000	100	2.618.000.000	100	2.618.000.000	100	2.618.000.000	100	2.618.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	**Peningkatan Jaringan Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan (%)**		75	1.025.000.000	100	1.325.000.000	100	1.975.000.000	100	1.850.000.000	100	2.100.000.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	**Meningkatnya Kinerja Angkutan Umum dan Layanan Perizinan (%)**		65	500.000.000	100	795.000.000	100	920.000.000	100	1.005.000.000	100	1.055.000.000	Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ	**Meningkatnya pemeliharaan terminal, pelabuhan dan fasilitas LLAJ (%)**		70	450.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	937.945.000	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan	**Peningkatan pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan**		70	1.103.000.000	100	1.304.362.014	100	1.535.411.000	100	3.168.098.000	100	4.359.970.000	Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Administrasi Perkantoran Yang Tertib dan baik**		100	11.227.864.500	100	14.245.000.000	100	15.669.500.000	100	17.236.450.000	100	18.960.095.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Dinas BMBK**		100	6.497.044.200	100	3.931.000.000	100	4.654.100.000	100	4.679.510.000	100	4.972.461.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Yang Disiplin dan Profesional**		100	1.106.198.500	100	845.000.000	100	894.500.000	100	948.950.000	100	1.008.845.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	504.185.500	100	616.000.000	100	677.600.000	100	745.360.000	100	819.896.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	**Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Yang Memadai**		80	18.767.847.000	85	7.050.000.000	90	7.155.000.000	95	7.265.500.000	100	7.382.050.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	**Peresentase Administrasi Pelaporan**		100	1.439.901.500	100	2.139.000.000	100	2.352.900.000	100	2.588.190.000	100	2.847.009.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	**Persentase Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan**		100	2.555.905.000	100	2.617.500.000	100	2.879.250.000	100	3.167.175.000	100	3.483.892.500	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	**Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi**		79	489.753.747.756	80	633.746.330.000	81	689.718.136.000	82	768.451.630.000	83	809.280.439.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	**Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan dan Unit Jembatan Dalam Kondisi Baik, Untuk Mendukung Jalan dan Jembatan Non Status di Provinsi Lampung**		100	52.501.246.000	100	73.850.000.000	100	84.235.000.000	100	104.658.500.000	100	115.124.350.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Tingkat kondisi Kemantapan Jalan Provinsi**		79	84.502.375.422	80	54.645.000.000	81	69.125.500.000	82	82.644.550.000	83	130.586.505.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah	**Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Wilayah 1 sd 6 Yang Terpelihara**		79	55.370.301.022	80	62.810.000.000	81	69.091.000.000	82	79.176.350.000	83	90.746.672.500	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium	**Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran UPTD Laboratorium Yang Memadai**		75	1.777.718.600	80	2.090.000.000	85	2.299.000.000	90	2.528.900.000	95	2.781.790.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	**Penyedia Jasa dan SDM Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Profesional dan Berkualitas**		500 Sertifikat	3.356.862.500	600 Sertifikat	3.751.000.000	700 Sertifikat	4.126.100.000	800 Sertifikat	4.538.710.000	900 Sertifikat	4.992.581.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sasaran 5.2. : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	***Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)***	92,13	94		95		96		97		98		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Layanan adminstrasi perkantoran**		100	1.113.000.000	100	1.229.216.000	100	1.248.185.000	100	1.330.084.000	100	1.477.617.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		100	215.000.000	100	295.000.000	100	365.000.000	100	445.000.000	100	525.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Derah	**Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah**		100	90.000.000	100	150.000.000	100	210.000.000	100	230.000.000	100	290.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah	**Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah**		100	582.000.000	100	722.000.000	100	842.000.000	100	962.000.000	100	1.082.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	**Peningkatan Rasio Desa Berlistrik**		50	875.000.000	51	1.030.000.000	57	1.125.000.000	53	1.250.000.000	54	1.375.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM	**Peningkatan pelaksanaan program/kebijakan Nasional di Bidang ESDM**		80	125.000.000	81	150.000.000	82	175.000.000	83	200.000.000	84	225.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	**Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi**		15	1.000.000.000	15	1.180.000.000	15	1.300.000.000	15	1.450.000.000	15	1.600.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	**Jumlah Daerah terlaksananya Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi**		7	500.000.000	7	590.000.000	7	650.000.000	7	750.000.000	7	840.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	**Jumlah perusahaan yang menjadi Pelaksanaan Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara**		10	750.000.000	10	865.000.000	10	955.000.000	10	1.075.000.000	10	1.165.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	**Tersedianya data Administrasi dan Teknis pada Cabang Dinas ESDM**		21	1.750.000.000	21	2.065.000.000	21	2.275.000.000	21	2.660.000.000	21	2.870.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5.3. : Meningkatnya kapasitas Jaringan Sumberdaya Air	***Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2***	30	37		40		45		50		55		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**		100	10.365.000.000	100	11.919.750.000	100	13.707.712.500	100	15.763.869.375	100	18.128.449.781	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		100	1.020.000.000	100	1.173.000.000	100	1.348.950.000	100	1.551.292.500	100	1.783.986.375	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah**		100	400.000.000	100	460.000.000	100	529.000.000	100	608.350.000	100	699.602.500	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta aset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	175.000.000	100	201.250.000	100	231.437.500	100	266.153.125	100	306.076.094	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	**Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik**		100	39.890.000.000	100	45.873.500.000	100	52.754.525.000	100	60.667.703.750	100	69.767.859.313	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	**Persentase Mempertahankan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik**		100	5.600.000.000	100	6.440.000.000	100	7.406.000.000	100	8.516.900.000	100	9.794.435.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Penatagunaan Sumber Daya Air	**Persentase kesesuaian kelembagaan dan pemanfaatannya**		100	1.450.000.000	100	1.667.500.000	100	1.917.625.000	100	2.205.268.750	100	2.536.059.063	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	**Persentase ketersediaan dokumen teknis dan informasi untuk menunjang pengelolaan SDA**		100	3.450.000.000	100	3.967.500.000	100	4.562.625.000	100	5.247.018.750	100	6.034.071.563	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Pengembangan Sumber Daya Air	**Berkembang dan terkelolanya tiga wilayah sungai secara berkelanjutan**		100	2.250.000.000	100	2.587.500.000	100	2.975.625.000	100	3.421.968.750	100	3.935.264.063	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sasaran 5.4. : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	***Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman***	71,19	72,9		75		76		78		80		
	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	64,63	69,31		71		74		76		79		
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	0,55	0,49		0		0		0		0		
	Persentase Rumah tidak Layak huni	5,02	3,98		3		3		2		1		

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan adminitrasi perkantoran**		100	4.455.800.000	100	4.689.800.000	100	4.923.800.000	100	5.391.800.000	100	5.625.800.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor**		100	1.921.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Meningkatkan kapasitas Aparatur**		100	270.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian subtansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	680.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Pengembangan Perumahan	**Persentase peningkatan kualitas rumah**		100	38.216.000.000	100	51.143.000.000	100	52.999.000.000	100	58.166.000.000	100	63.486.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Pengembangan Kawasan Permukiman	**Persentase peningkatan akses dasar perumahan dan kawasan permukiman**		100	103.817.000.000	100	121.808.500.000	100	137.350.385.001	100	151.462.915.001	100	183.935.180.001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	**Persentase meningkatnya kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungan binaannya**		100	48.242.002.500	100	50.874.600.000	100	62.423.731.499	100	74.218.653.499	100	69.123.029.499	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Persentase pengendalian pemanfaatan ruang**		100	4.650.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	3.500.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan	**Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA**		100	1.400.000.000	100	5.300.000.000	100	1.400.000.000	100	5.300.000.000	100	5.300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
MISI 5 : MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN WILAYAH PEDESAAN YANG SEIMBANG DENGAN WILAYAH PERKOTAAN													
Tujuan 6 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	**Pertumbuhan Ekonomi**										5,8 - 6,1		
Sasaran 6.1. : Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian	***Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian***	1,33	1,63		2		3		3		3		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	**Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib (%).**		100	6.277.065.000	100	6.418.400.000	100	6.653.400.000	100	6.918.400.000	100	7.173.400.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	**Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%).**		100	3.400.000.000	100	3.630.000.000	100	3.890.000.000	100	3.890.000.000	100	4.230.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.	**Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah (%).**		100	820.000.000	100	847.500.000	100	1.030.000.000	100	1.090.000.000	100	1.260.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	**Peningkatan perencanaan, evaluasi dan keuangan, serta asset perangkat daerah (%).**		100	840.000.000	100	895.000.000	100	1.105.000.000	100	1.200.000.000	100	1.305.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan	**Pencapaian angka produktivitas Tanaman Pangan**		100	2.760.000.000	100	3.358.750.000	100	3.967.500.000	100	4.463.750.000	100	5.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	**Pencapaian produktivitas Tanaman Hortikultura (%).**		100	2.145.000.000	100	2.861.000.000	100	3.650.000.000	100	4.391.000.000	100	5.270.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.	**Jumlah komoditas TPH yang meningkat nilai tambahnya (jumlah komoditi/ buah).**		1	1.750.000.000	2	2.000.000.000	2	2.350.000.000	2	2.700.000.000	2	3.150.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	**Indeks Pertanaman (IP)**		2,13	16.535.000.000	2	17.920.000.000	2	19.250.000.000	2	20.150.000.000	2	21.500.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat.	**Penyediaan dan pengawasan benih Unggul Bermutu (%).**		100	800.000.000	100	900.000.000	100	950.000.000	100	1.120.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	**Luas areal yang menerapkan teknologi tanaman pangan dan hortikultura (Ha).**		20	1.200.000.000	25	1.225.000.000	30	1.500.000.000	35	1.525.000.000	40	1.800.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	**Jumlah kelompok yang mendapat akses permodalan (klpk)**		30	2.928.000.000	35	2.900.000.000	37	3.102.000.000	40	3.305.000.000	42	3.860.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	**Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)**		10	7.235.000.000	10	7.335.000.000	10	7.910.000.000	10	8.115.000.000	10	8.700.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.**		90	3.612.935.000	91	2.936.775.000	92	3.001.183.000	93	3.145.201.000	94	3.294.831.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)**		100	3.416.400.000	100	3.517.000.000	100	3.648.000.000	100	3.761.000.000	100	3.872.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)**		100	648.300.000	100	880.000.000	100	935.000.000	100	990.000.000	100	1.050.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)**		100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)**		100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	**Produksi Perikanan Tangkap (ton)**		188.790	10.779.800.000	193.510	10.040.000.000	198.348	10.140.000.000	203.306	10.240.000.000	208.389	10.590.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	**Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**		191.359	3.380.000.000	205.041	41.000.000.000	223.513	4.100.000.000	239.250	4.100.000.000	265.305	3.600.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	**Volume Ekspor Perikanan (kg)**		19.859.765	1.200.000.000	21.845.742	1.750.000.000	24.030.316	1.750.000.000	26.433.347	1.750.000.000	29.076.682	1.750.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	**Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai standar**		15	1.550.500.000	30	2.800.000.000	45	2.300.000.000	60	1.800.000.000	75	1.800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Ruang Laut	**Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)**		80	1.725.000.000	85	1.950.000.000	90	2.000.000.000	95	1.950.000.000	100	1.900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan**		100	2.200.000.000	100	3.000.000.000	100	3.100.000.000	100	3.150.000.000	100	3.300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	**Peningkatan produksi /pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Ha)**		299.656	1.640.000.000	301.377	2.132.000.000	303.116	2.771.600.000	304.871	3.603.080.000	306.645	4.684.004.000	Dinas Kehutanan
Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan	**Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak Unit KPH/Tahun**		17 Unit/Tahun	46.744.000.000	17 Unit/Tahun	60.767.200.000	17 Unit/Tahun	78.997.360.000	17 Unit/Tahun	102.696.568.000	17 Unit/Tahun	133.505.538.400	Dinas Kehutanan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)**		100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)**		100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)**		100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	Dinas Perkebunan
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)**		100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	Dinas Perkebunan
Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	**Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan**		100	2.120.000.000	100	2.120.000.000	100	2.225.000.000	100	2.225.000.000	100	2.725.000.000	Dinas Perkebunan
Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	**Persentase Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**		100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Perkebunan
Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)	**Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)**		100	2.400.000.000	100	2.130.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	Dinas Perkebunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	**Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan**		100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	Dinas Perkebunan
Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	**Persentase Peningkatan Kelembagaan Perkebunan**		100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	Dinas Perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)**		100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)**		100	271.925.000	100	271.925.000	100	271.925.000	100	271.925.000	100	271.925.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)**		100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)**		100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Produksi Hasil Ternak	**Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak**		100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang ASUH	**Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV (Nomor Veteriner Kontrol)**		100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	**Persentase menurunnya penyakit ternak menular**		100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	**Persentase peningkatan sarana & prasarana peternakan yang sesuai standar**		100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Kelembagaan Peternakan	**Persentase peningkatan kelas kelompok (pemula, madya dan mandiri)**		100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Sasaran 6.2. : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	***Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan***	9,08	6,23		6		6		6		6		
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,87	7,26		8		9		10		11		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)**		85	2.710.300.000	88	2.927.130.000	90	3.153.500.000	93	3.203.813.000	95	3.471.105.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)**		70	1.203.865.500	73	1.100.000.000	75	1.150.000.000	78	1.235.000.000	80	1.285.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)**		100	100.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)**		85	1.006.500.000	88	747.000.000	90	765.000.000	92	840.000.000	95	950.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Pengembangan Sumber Daya Industri	**Prosentase peningkatan akses pada Sumber Daya Industri**		50	1.015.000.000	50	1.190.000.000	50	1.555.000.000	50	2.000.000.000	50	2.350.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	**Prosentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri**		50	1.200.000.000	50	1.630.000.000	50	1.985.000.000	50	2.450.000.000	50	2.900.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Pemberdayaan Industri	**Prosentase peningkatan nilai ekspor produk Industri**		50	2.010.000.000	50	2.730.000.000	50	3.100.000.000	50	3.750.000.000	50	4.150.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	**Prosentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar**		50	2.075.000.000	50	2.765.000.000	50	3.325.000.000	50	3.900.000.000	50	4.400.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri	**Prosentasi peningkatan Jumlah IKM yang terlayani**		50	1.200.000.000	50	1.550.000.000	50	1.895.000.000	50	2.100.000.000	50	2.250.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa	**Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%)**		10	760.000.000	12,5	1.265.000.000	15	1.530.000.000	17,5	1.955.000.000	20	2.265.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Pengujian Mutu Barang	**Persentase Peningkatan Pengujian Mutu**		1	1.525.000.000	2	2.075.000.000	3	2.020.000.000	4	2.300.000.000	5	2.750.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah	**Pelaku usaha yang menjadi eksportir (UKM)**		5	1.533.164.500	10	2.750.000.000	10	3.500.000.000	15	4.625.000.000	20	5.750.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**		100	1.685.000.000	100	1.533.533.000	100	1.706.640.000	100	1.710.954.000	100	1.720.276.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor**		100	450.000.000	100	350.000.000	100	600.000.000	100	610.000.000	100	660.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**		100	215.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	255.000.000	100	255.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan**		100	600.000.000	100	610.000.000	100	625.000.000	100	640.000.000	100	640.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	**Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT**		27,2	350.000.000	27,5	525.000.000	28	555.000.000	29	900.000.000	29	1.075.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	**Jumlah Koperasi yang Meningkat Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha**		100	275.000.000	105	275.000.000	110	350.000.000	115	530.000.000	115	900.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti**		20	250.000.000	22	250.000.000	24	270.000.000	26	550.000.000	28	900.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	**Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkat kualitasnya**		100	2.725.000.000	100	3.475.000.000	100	3.560.000.000	100	3.550.000.000	100	3.650.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	**Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)**		250	400.000.000	250	870.000.000	250	1.215.000.000	250	1.405.000.000	250	1.455.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	**Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir**		145	750.000.000	150	930.000.000	155	930.000.000	160	930.000.000	160	930.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	**Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM**		150	300.000.000	150	400.000.000	150	400.000.000	150	750.000.000	150	900.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 6.3. : Menjaga stabilitas harga	***Laju Inflasi***	2,73	3,0 - 3,5		3,0 - 3,5		3,0 - 3,5		3,0 - 3,5		3,0 - 3,5		
Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	**Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)**		0 - 2,5	1.811.170.000	0 - 2,5	3.005.000.000	0 - 2,5	3.723.060.000	0 - 2,5	4.860.000.000	0 - 2,5	5.710.000.000	Dinas Perindustian dan Perdagangan
Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan	**Stabilitas harga pangan.**		< 10%	1.155.000.000	< 10%	2.115.000.000	< 10%	2.195.000.000	< 10%	2.275.000.000	< 10%	2.355.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	**Jumlah sektor ekonomi yang Ditindaklanjuti kebijakannya**		100	4.500.000.000	100	3.615.000.000	100	3.745.000.000	100	4.025.000.000	100	4.305.000.000	Biro Perekonomian
Sasaran 6.4. : Menurunnya Kemiskinan	***Angka Kemiskinan***	13,01	11,1		11		10		10		9		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, lengkap transparan dan tepat waktu (%)**		100	1.854.986.000	100	1.871.530.000	100	1.908.960.600	100	1.966.229.418	100	2.044.878.596	Dinas Sosial
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana rumah dinas, mobilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)**		100	402.000.000	100	324.890.700	100	330.588.514	100	339.306.169	100	351.278.416	Dinas Sosial

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (%)**		100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas Sosial
Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah (%)**		100	467.135.600	100	341.763.800	100	348.599.076	100	359.057.048	100	373.419.331	Dinas Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	**Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya**		0,7	700.000.000	0,7	1.259.500.000	0,7	1.328.690.000	0,7	1.408.050.700	0,7	1.548.372.728	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Persentasi PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosial**		35	9.665.878.400	35	24.971.565.826	35	25.470.997.140	35	26.215.437.669	35	27.257.491.759	Dinas Sosial

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentasi PMKS Penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya**		80	1.200.000.000	80	1.067.857.850	80	1.089.215.007	80	1.121.891.457	80	1.166.767.116	Dinas Sosial
Sasaran 6.5. : Mengurangi ketimpangan antar wilayah	***Indeks Williamson***	0,21	0,21		0,20		0,20		0,20		0,19		
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	**Peningkatan Kapasitas Jumlah penempatan transmigrasi ke luar lampung (KK)**		25	550.000.000	31	650.417.954	35	718.709.194	39	813.557.951	43	899.811.729	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
Sasaran 6.6. : Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	***PDRB perkapita (Juta)***	39,86	45,54		48		51		53		56		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**		100	1.145.375.211	100	1.354.000.000	100	1.399.000.000	100	1.525.000.000	100	1.545.000.000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat ketersediaan sarpras kantor**		100	387.000.000	100	450.000.000	100	460.000.000	100	500.000.000	100	510.000.000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**		100	261.163.450	100	310.000.000	100	340.000.000	100	370.000.000	100	390.000.000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	553.577.754	100	630.000.000	100	665.000.000	100	730.000.000	100	730.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	**Persentase desa yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi**		20,95	2.209.883.585	21	2.613.359.707	22	2.887.751.851	22	3.268.851.294	23	3.615.416.367	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	**Persentase lembaga ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang volume usahanya meningkat**		2,78	900.000.000	5,56	1.064.320.288	8,34	1.176.069.591	11,12	1.331.276.648	13,9	1.472.419.192	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	**Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif secara mandiri 2. Persentase lembaga adat yang berfungsi (aktif memberikan masukan dalam pembangunan desa)**		2,1	1.900.000.000	4,2	2.246.898.385	6,3	2.482.813.581	8,4	2.810.472.923	10,5	3.108.440.517	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	**Persentase Kader Pengelolaan SDA dan TTG Pedesaan yang aktif 2. Persentase Desa yang menerapkan TTG dalam pengelolaan SDA**		12,51	720.000.000	17	851.456.230	21	940.855.673	25	1.065.021.318	30	1.177.935.354	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA													
Tujuan 7 : Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**										63		

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Sasaran 7.1. : Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***	56,62	59,63		61		62		63		63		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)**		12	2.762.000.000	12	3.590.600.000	12	4.667.780.000	12	6.068.114.000	12	7.888.548.200	Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Jumlah penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (Bulan)**		12	6.448.200.000	12	8.382.660.000	12	10.897.458.000	12	14.166.695.400	12	18.416.704.020	Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Jumlah peningkatan kapasitas sumnberdaya aparatur (Bulan)**		12	1.285.000.000	12	1.670.500.000	12	2.171.650.000	12	2.823.145.000	12	3.670.088.500	Dinas Kehutanan
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	**TERSEDIANYA DOUMEN PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN, SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH (DOKUMEN)**		1	790.000.000	1	1.027.000.000	1	1.335.100.000	1	1.735.630.000	1	2.256.319.000	Dinas Kehutanan
Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	**penurunan laju kerusakan hutan (Ha)**		1.961	5.800.000.000	1.765	7.540.000.000	1.589	9.802.000.000	1.430	12.742.600.000	1.287	16.565.380.000	Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan DAS dan RHL	**Penurunan Luas Lahan Kritis (Ha)**		375.928	2.720.000.000	359.228	5.150.000.000	342.328	6.850.000.000	325.628	4.850.000.000	308.928	2.375.000.000	Dinas Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Tingkat Layanan administrasi perkantoran**		100	1.542.778.800	100	1.772.463.000	100	1.958.644.000	100	2.192.999.000	100	2.387.890.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor**		100	308.613.900	100	366.554.000	100	402.835.000	100	456.914.000	100	505.049.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah**		100	114.726.000	100	164.000.000	100	188.000.000	100	216.000.000	100	244.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Perencanaan , Evaluasi Kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	**Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan**		100	371.881.300	100	447.000.000	100	505.000.000	100	577.000.000	100	645.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	**Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**		20	557.000.000	40	731.080.000	60	824.194.000	80	926.868.000	100	1.031.567.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	**Persentase Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**		20	650.000.000	40	917.476.000	60	1.013.811.000	80	1.148.551.000	100	1.544.175.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	**Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Regional**		20	795.000.000	40	1.384.345.000	60	1.275.702.000	80	1.870.363.000	100	1.506.724.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas	**Persentase Penaatan para Pelaku Usaha/ Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan**		20	560.000.000	40	662.519.000	60	716.635.000	80	795.972.000	100	865.367.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	**Nilai Capaian PAD yang dihasilkan dari Kinerja Laboratorium Lingkungan**		853.000.000	1.100.000.000	900.000.000	1.664.530.000	940.000.000	2.103.282.000	990.000.000	2.568.781.000	1.100.000.000	2.772.072.000	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 7.2. : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	***Indeks Resiko Bencana***	145,1	144,7		144,3		143,9		143,5		143,1		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Berkualitas**		100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		100	273.351.400	100	273.351.400	100	273.351.400	100	273.351.400	100	273.351.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										OPD
Uraian	Indikator		2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA													
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM**		100	148.490.600	100	148.490.600	100	148.490.600	100	148.490.600	100	148.490.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	**Prosentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi**		100	289.643.700	100	289.643.700	100	289.643.700	100	289.643.700	100	289.643.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	**Peningkatan Prosentase kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**		100	1.209.586.000	100	2.121.169.000	100	2.541.861.000	100	3.103.932.000	100	3.637.883.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan Logistik	**Peningkatan Prosentase Penanganan Darurat dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik & Peralatan bagi Masyarakat Terdampak Bencana**		100	855.950.200	100	855.950.200	100	1.055.950.200	100	1.355.950.200	100	1.605.950.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	**Peningkatan Prosentase Pemulihan Rehabilitasi & Rekonstruksi pasca bencana**		100	934.049.400	100	934.049.400	100	934.049.400	100	934.049.400	100	934.049.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JUMLAH				**2.878.385.901.937**		**3.429.765.860.945**		**3.746.067.715.821**		**4.183.671.934.892**		**4.557.273.084.046**	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Rencana program perangkat daerah Provinsi Lampung untuk periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 berjumlah 153 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Provinsi Lampung, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Provinsi Lampung disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Dan anggaran tersebut disajikan pada Tabel.

TABEL 7- 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung

URAIAN	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	**2.878.385.901.937**	**3.429.765.860.945**	**3.746.067.715.821**	**4.183.671.934.892**	**4.557.273.084.047**
BELANJA	**7.657.923.449.832**	**7.686.557.259.761**	**8.137.378.330.247**	**8.619.992.319.301**	**9.242.904.377.541**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**4.666.030.795.632**	**4.808.171.357.824**	**4.707.612.469.302**	**4.873.924.603.481**	**5.059.232.442.650**
Belanja Pegawai	1.915.984.978.632	1.954.689.379.127	1.900.746.775.061,39	2.027.955.123.688,18	2.170.543.372.008,59
Belanja Bunga	37.000.000.000	32.000.000.000	22.000.000.000,00	12.000.000.000,00	2.900.150.394,00
Belanja Subsidi	1.852.030.960	-	1.852.030.960,00	1.852.030.960,00	1.852.030.960,00
Belanja Hibah	1.394.951.211.640	1.364.951.211.640	1.393.274.077.840,00	1.393.274.077.840,00	1.393.274.077.840,00
Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.279.429.000.000	1.415.717.192.657	1.357.926.011.040,59	1.407.029.796.592,62	1.458.849.237.047,25
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.813.574.400	19.813.574.400	14.813.574.400,00	14.813.574.400,00	14.813.574.400,00
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	19.000.000.000	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	**2.991.892.654.200**	**2.878.385.901.937**	**3.429.765.860.945,34**	**3.746.067.715.820,50**	**4.183.671.934.891,65**
Belanja Pegawai	159.775.106.000	-	176.284.651.320,00	176.284.651.320,00	176.284.651.320,00
Belanja Barang dan Jasa	1.489.379.259.405	-	1.425.370.852.918,00	1.425.370.852.918,00	1.425.370.852.918,00
Belanja Modal	1.342.738.288.795	-	1.828.110.356.707,34	2.144.412.211.582,50	2.582.016.430.653,65
PEMBIAYAAN DAERAH	**-131.180.000.000**	**-131.180.000.000**	**-116.000.000.000,00**	**-12.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**166.180.000.000**	**166.180.000.000**	**151.000.000.000,00**	**47.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	141.180.000.000	141.180.000.000	141.000.000.000,00	37.000.000.000,00	0,00

TABEL 7- 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**															
1.1	**Pendidikan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan administrasi perkantoran	90	100	8.403.900.000	100	8.290.367.000	100	8.539.077.000	100	8.795.244.000	100	9.059.095.000	100	9.059.095.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor	63	70	3.823.000.000	75	2.552.340.000	80	2.628.910.000	85	2.707.776.000	90	2.789.008.000	90	2.789.008.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN	31,5	35	800.000.000	45	824.000.000	55	848.720.000	65	874.180.000	75	900.404.000	75	900.404.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	79,2	88	5.000.000.000	90	4.635.000.000	92	4.774.050.000	94	4.917.270.000	96	5.064.786.000	96	5.064.786.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Satuan Pendidikan SMA berakreditasi minimal B	54	60	327.094.222.000	70	346.500.000.000	76	363.000.000.000	78	379.500.000.000	80	401.000.000.000	80	401.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Program Keahlian SMK berakreditasi minimal B	45	50	87.880.000.000	55	93.450.000.000	60	97.445.000.000	63	103.989.500.000	65	116.588.450.000	65	116.588.450.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	Persentase sekolah umum yang menerapkan program pendidikan inklusi	22,5	25	9.200.000.000	30	10.300.000.000	35	11.400.000.000	40	12.500.000.000	50	13.600.000.000	50	13.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi	54	60	20.170.000.000	65	22.000.000.000	70	23.100.000.000	75	24.200.000.000	80	25.300.000.000	80	25.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi	Persentase siswa berprestasi dan lembaga pendidikan yang dibina	45	50	13.000.000.000	55	14.000.000.000	60	15.000.000.000	65	16.000.000.000	70	17.000.000.000	70	17.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sekolah yang meningkat sarana dan prasarananya	54	60	141.498.078.000	65	220.500.000.000	70	254.000.000.000	75	278.750.000.000	80	217.250.000.000	80	217.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	Persentase sekolah di wilayah I yang meningkat level akreditasinya	54	60	755.000.000	65	1.250.000.000	70	1.400.000.000	75	1.550.000.000	80	1.700.000.000	80	1.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II	Persentase sekolah di wilayah II yang meningkat level akreditasinya	54	60	479.000.000	65	1.100.000.000	70	1.250.000.000	75	1.400.000.000	80	1.550.000.000	80	1.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III	Persentase sekolah di wilayah III yang meningkat level akreditasinya	54	60	325.000.000	65	650.000.000	70	800.000.000	75	950.000.000	80	1.100.000.000	80	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV	Persentase sekolah di wilayah IV yang meningkat level akreditasinya	54	60	479.000.000	65	1.100.000.000	70	1.250.000.000	75	1.400.000.000	80	1.550.000.000	80	1.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V	Persentase sekolah di wilayah V yang meningkat level akreditasinya	54	60	518.000.000	65	1.120.000.000	70	1.320.000.000	75	1.510.000.000	80	1.580.000.000	80	1.580.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI	Persentase sekolah di wilayah VI yang meningkat level akreditasinya	54	60	572.000.000	65	1.160.000.000	70	1.330.000.000	75	1.480.000.000	80	1.610.000.000	80	1.610.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII	Persentase sekolah di wilayah VII yang meningkat level akreditasinya	54	60	370.000.000	65	500.000.000	70	650.000.000	75	800.000.000	80	950.000.000	80	950.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar dan management sekolah	27	30	4.000.000.000	35	10.200.000.000	40	10.250.000.000	45	9.500.000.000	50	9.500.000.000	50	9.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	**Kesehatan**		0													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan administrasi perkantoran	90	100	14.612.568.500	100	15.791.340.368	100	16.832.140.000	100	18.456.130.000	100	20.441.520.000	100	20.441.520.000	Dinas Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor	90	100	6.727.446.900	100	8.882.775.000	100	10.575.100.782	100	12.767.895.083	100	14.295.321.322	100	14.295.321.322	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah lembaga yang dibina	4,5	5	197.617.849	5	715.860.000	5	672.400.000	5	631.400.000	5	590.400.000	5	590.400.000	Dinas Kesehatan
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	900.000.000	100	1.108.710.000	100	1.201.300.000	100	1.289.750.000	100	1.332.000.000	100	1.332.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	27	30	8.729.140.800	35	1.655.609.337	35	1.829.441.586	40	2.070.874.785	45	2.290.429.854	45	2.290.429.854	Dinas Kesehatan
	Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Persentase Bapelkes terakreditasi	90	100	6.650.000.000	100	7.864.144.349	100	8.689.847.532	100	9.836.655.231	100	10.879.541.809	100	10.879.541.809	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase Anggaran Kesehatan terhadap APBD	9	10	1.650.000.000	10	2.010.382.766	10	2.221.464.783	10	2.514.633.668	10	2.781.236.252	10	2.781.236.252	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	45	50	67.800.000.000	55	81.834.404.354	60	90.426.684.093	65	102.360.382.254	70	113.212.675.663	70	113.212.675.663	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	Pelayanan IFKA sesuai standar	90	100	986.282.880	100	1.166.356.532	100	1.288.819.226	100	1.458.905.963	100	1.613.579.824	100	1.613.579.824	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan RSBNH	Persentase RSBNH terakreditasi	90	100	9.324.288.000	100	15.373.515.269	100	16.987.671.867	100	19.229.551.579	100	21.268.277.220	100	21.268.277.220	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Persentase Labkesda terakreditasi	90	100	1.600.000.000	100	5.085.085.820	100	5.618.999.156	100	6.360.543.984	100	7.034.891.696	100	7.034.891.696	Dinas Kesehatan
	Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi wasting	8,343	9,27	14.372.655.071	7,99	15.936.521.627	6,71	17.609.791.604	5,43	19.933.773.068	4,51	22.047.160.585	4,51	22.047.160.585	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Penemuan Kasus (CDR) TBC	52,2	58	2.450.000.000	65	3.370.347.578	70	3.724.220.371	75	4.215.709.385	80	4.662.660.775	80	4.662.660.775	Dinas Kesehatan
	Kesehatan		0													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tingkat pelayanan administrasi rumah sakit	90	100	11.400.000.000	100	10.600.000.000	100	13.700.000.000	100	14.800.000.000	100	13.900.000.000	100	13.900.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Prosentase peningkatan pendapatan BLUD	90	100	250.000.000.000	100	260.000.000.000	100	270.000.000.000	100	280.000.000.000	100	300.000.000.000	100	300.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase terlayaninya pasien miskin dan terlantar	90	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Prosentase pemenuhan standar SDM	76,5	85	400.000.000	88	400.000.000	91	700.000.000	95	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.	Prosentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	81,9	91	95.500.000.000	93	82.394.000.000	96	106.136.000.000	98	146.560.000.000	100	174.397.000.000	100	174.397.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
	Kesehatan		0													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	100	6.502.000.000	100	9.753.000.000	100	14.629.500.000	100	21.944.250.000	100	32.916.375.000	100	32.916.375.000	Rumah Sakit Jiwa
	Program peningkatan sarana dan prasara aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	90	100	2.910.000.000	100	4.365.000.000	100	6.547.500.000	100	9.821.250.000	100	14.731.875.000	100	14.731.875.000	Rumah Sakit Jiwa
	Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	235.000.000	100	352.500.000	100	528.750.000	100	793.125.000	100	1.189.687.500	100	1.189.687.500	Rumah Sakit Jiwa
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perasngkat daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	90	100	280.000.000	100	560.000.000	100	770.000.000	100	1.085.000.000	100	1.557.500.000	100	1.557.500.000	Rumah Sakit Jiwa
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat	90	100	400.000.000	100	600.000.000	100	900.000.000	100	1.350.000.000	100	2.025.000.000	100	2.025.000.000	Rumah Sakit Jiwa
	Program Mutu Layanan Keperawatan	Persentase Mutu Layanan Keperawatan	90	100	175.000.000	100	262.500.000	100	393.750.000	100	421.875.000	100	885.937.500	100	885.937.500	Rumah Sakit Jiwa
	Program Mutu Layanan Penunjang medis	Persentase Mutu Layanan Penunjang Medis	90	100	4.753.585.937	100	7.130.378.906	100	10.695.568.358	100	16.043.352.537	100	24.065.028.806	100	24.065.028.806	Rumah Sakit Jiwa
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya Pelayanan BLUD	90	100	14.000.000.000	100	15.400.000.000	100	16.940.000.000	100	18.634.000.000	100	20.497.400.000	100	20.497.400.000	Rumah Sakit Jiwa

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		0													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran Yang Tertib dan baik	90	100	11.227.864.500	100	14.245.000.000	100	15.669.500.000	100	17.236.450.000	100	18.960.095.000	100	18.960.095.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Dinas BMBK	90	100	6.497.044.200	100	3.931.000.000	100	4.654.100.000	100	4.679.510.000	100	4.972.461.000	100	4.972.461.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Yang Disiplin dan Profesional	90	100	1.106.198.500	100	845.000.000	100	894.500.000	100	948.950.000	100	1.008.845.000	100	1.008.845.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	504.185.500	100	616.000.000	100	677.600.000	100	745.360.000	100	819.896.000	100	819.896.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Yang Memadai	72	80	18.767.847.000	85	7.050.000.000	90	7.155.000.000	95	7.265.500.000	100	7.382.050.000	100	7.382.050.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peresentase Administrasi Pelaporan	90	100	1.439.901.500	100	2.139.000.000	100	2.352.900.000	100	2.588.190.000	100	2.847.009.000	100	2.847.009.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	Persentase Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	90	100	2.555.905.000	100	2.617.500.000	100	2.879.250.000	100	3.167.175.000	100	3.483.892.500	100	3.483.892.500	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	71,1	79	489.753.747.756	80	633.746.330.000	81	689.718.136.000	82	768.451.630.000	83	809.280.439.000	83	809.280.439.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan dan Unit Jembatan Dalam Kondisi Baik, Untuk Mendukung Jalan dan Jembatan Non Status di Provinsi Lampung	90	100	52.501.246.000	100	73.850.000.000	100	84.235.000.000	100	104.658.500.000	100	115.124.350.000	100	115.124.350.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	71,1	79	84.502.375.422	80	54.645.000.000	81	69.125.500.000	82	82.644.550.000	83	130.586.505.000	83	130.586.505.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Wilayah 1 sd 6 Yang Terpelihara	71,1	79	55.370.301.022	80	62.810.000.000	81	69.091.000.000	82	79.176.350.000	83	90.746.672.500	83	90.746.672.500	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium	Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran UPTD Laboratorium Yang Memadai	67,5	75	1.777.718.600	80	2.090.000.000	85	2.299.000.000	90	2.528.900.000	95	2.781.790.000	95	2.781.790.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Penyedia Jasa dan SDM Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Profesional dan Berkualitas	500 Sertifikat	500 Sertifikat	3.356.862.500	600 Sertifikat	3.751.000.000	700 Sertifikat	4.126.100.000	800 Sertifikat	4.538.710.000	900 Sertifikat	4.992.581.000	900 Sertifikat	4.992.581.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Persentase meningkatnya kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungan binaannya	90	100	48.242.002.500	100	50.874.600.000	100	62.423.731.499	100	74.218.653.499	100	69.123.029.499	100	69.123.029.499	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	90	100	4.650.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	3.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	100	10.365.000.000	100	11.919.750.000	100	13.707.712.500	100	15.763.869.375	100	18.128.449.781	100	18.128.449.781	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	100	1.020.000.000	100	1.173.000.000	100	1.348.950.000	100	1.551.292.500	100	1.783.986.375	100	1.783.986.375	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	90	100	400.000.000	100	460.000.000	100	529.000.000	100	608.350.000	100	699.602.500	100	699.602.500	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta aset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	175.000.000	100	201.250.000	100	231.437.500	100	266.153.125	100	306.076.094	100	306.076.094	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	90	100	39.890.000.000	100	45.873.500.000	100	52.754.525.000	100	60.667.703.750	100	69.767.859.313	100	69.767.859.313	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Persentase Mempertahankan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	90	100	5.600.000.000	100	6.440.000.000	100	7.406.000.000	100	8.516.900.000	100	9.794.435.000	100	9.794.435.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	Persentase kesesuaian kelembagaan dan pemanfaatannya	90	100	1.450.000.000	100	1.667.500.000	100	1.917.625.000	100	2.205.268.750	100	2.536.059.063	100	2.536.059.063	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase ketersediaan dokumen teknis dan informasi untuk menunjang pengelolaan SDA	90	100	3.450.000.000	100	3.967.500.000	100	4.562.625.000	100	5.247.018.750	100	6.034.071.563	100	6.034.071.563	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Berkembang dan terkelolanya tiga wilayah sungai secara berkelanjutan	90	100	2.250.000.000	100	2.587.500.000	100	2.975.625.000	100	3.421.968.750	100	3.935.264.063	100	3.935.264.063	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan adminitrasi perkantoran	90	100	4.455.800.000	100	4.689.800.000	100	4.923.800.000	100	5.391.800.000	100	5.625.800.000	100	5.625.800.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor	90	100	1.921.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Aparatur	90	100	270.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian subtansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	680.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas rumah	90	100	38.216.000.000	100	51.143.000.000	100	52.999.000.000	100	58.166.000.000	100	63.486.000.000	100	63.486.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan akses dasar perumahan dan kawasan permukiman	90	100	103.817.000.000	100	121.808.500.000	100	137.350.385.001	100	151.462.915.001	100	183.935.180.001	100	183.935.180.001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.5	**Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Berkualitas	90	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	100	1.288.928.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	100	273.351.400	100	273.351.400	100	273.351.400	100	273.351.400	100	273.351.400	100	273.351.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM	90	100	148.490.600	100	148.490.600	100	148.490.600	100	148.490.600	100	148.490.600	100	148.490.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	Prosentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi	90	100	289.643.700	100	289.643.700	100	289.643.700	100	289.643.700	100	289.643.700	100	289.643.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Peningkatan Prosentase kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	90	100	1.209.586.000	100	2.121.169.000	100	2.541.861.000	100	3.103.932.000	100	3.637.883.000	100	3.637.883.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Kedaruratan dan Logistik	Peningkatan Prosentase Penanganan Darurat dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik & Peralatan bagi Masyarakat Terdampak Bencana	90	100	855.950.200	100	855.950.200	100	1.055.950.200	100	1.355.950.200	100	1.605.950.200	100	1.605.950.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Peningkatan Prosentase Pemulihan Rehabilitasi & Rekonstruksi pasca bencana	90	100	934.049.400	100	934.049.400	100	934.049.400	100	934.049.400	100	934.049.400	100	934.049.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	90	100	16.469.631.600	100	21.747.086.000	100	18.914.817.000	100	14.835.865.000	100	13.917.756.000	100	13.917.756.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tingkat Ketersediaan Saspras Kantor	81	90	727.235.000	90	815.000.000	90	665.000.000	90	715.000.000	100	715.000.000	100	715.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur dan lembaga PD	67,5	75	335.639.100	80	1.760.000.000	85	1.760.000.000	90	1.760.000.000	100	1.760.000.000	100	1.760.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Anggota Satpol PP yang profesional	31,5	35	1.097.293.900	40	1.125.000.000	50	1.160.000.000	60	1.160.000.000	75	1.210.000.000	75	1.210.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Subtansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	18	20	681.836.400	20	770.000.000	20	795.000.000	20	820.000.000	20	840.000.000	20	840.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penegakan Peraturan Perundang undangan	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	72	80	960.000.000	75	1.970.000.000	70	2.070.000.000	65	2.170.000.000	60	2.320.000.000	60	2.320.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase Anggota Linmas Yang Dibina	40,5	45	407.000.000	50	325.000.000	55	345.000.000	55	385.000.000	65	415.000.000	65	415.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	81	90	4.321.364.000	90	5.450.000.000	90	5.725.000.000	90	5.700.000.000	100	5.980.000.000	100	5.980.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.6	**Sosial**															

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, lengkap transparan dan tepat waktu (%)	90	100	1.854.986.000	100	1.871.530.000	100	1.908.960.600	100	1.966.229.418	100	2.044.878.596	100	2.044.878.596	Dinas Sosial
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah dinas, mobilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	90	100	402.000.000	100	324.890.700	100	330.588.514	100	339.306.169	100	351.278.416	100	351.278.416	Dinas Sosial
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (%)	90	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas Sosial
	Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah (%)	90	100	467.135.600	100	341.763.800	100	348.599.076	100	359.057.048	100	373.419.331	100	373.419.331	Dinas Sosial
	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya	90	100	700.000.000	100	1.259.500.000	100	1.328.690.000	100	1.408.050.700	100	1.548.372.728	1	1.548.372.728	Dinas Sosial
	Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial	Persentasi PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosial	31,5	35	9.665.878.400	35	24.971.565.826	35	25.470.997.140	35	26.215.437.669	35	27.257.491.759	35	27.257.491.759	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentasi PMKS Penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	72	80	1.200.000.000	80	1.067.857.850	80	1.089.215.007	80	1.121.891.457	80	1.166.767.116	80	1.166.767.116	Dinas Sosial

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**															
2.1	**Tenaga Kerja**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2.305.700.000	12 Bulan	2.714.200.000	12 Bulan	2.989.200.000	12 Bulan	3.219.200.000	12 Bulan	3.424.200.000	12 Bulan	3.424.200.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	255 unit	255 unit	1.121.600.000	255 unit	1.295.400.000	255 unit	1.445.000.000	255 unit	1.520.000.000	255 unit	1.655.000.000	255 unit	1.655.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kelembagaan Perangkat Daerah	150 Orang	150 Orang	150.000.000	150 Orang	200.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	300.000.000	150 Orang	425.000.000	150 Orang	425.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100	100	911.324.000	100	1.110.000.000	100	1.225.000.000	100	1.375.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1939 orang	1939 orang	3.975.000.000	1939 orang	4.700.700.000	1939 orang	6.350.000.000	1939 orang	7.325.000.000	1939 orang	8.400.000.000	1939 orang	8.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pembinaan penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	29000 orang	29000 orang	850.000.000	29000 orang	1.100.000.000	29000 orang	1.150.000.000	29000 orang	1.300.000.000	29000 orang	1.600.000.000	29000 orang	1.600.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja	240 orang	240 orang	489.976.000	240 orang	700.000.000	240 orang	850.000.000	240 orang	1.000.000.000	240 orang	1.200.000.000	240 orang	1.200.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3 yang dilakukan di perusahaan	485 Perusahaan	485 Perusahaan	800.000.000	485 Perusahaan	975.000.000	485 Perusahaan	1.300.000.000	485 Perusahaan	1.750.000.000	485 Perusahaan	2.150.000.000	485 Perusahaan	2.150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentae Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	100	1.534.870.900	100	1.831.000.000	100	2.007.000.000	100	2.276.000.000	100	2.504.000.000	100	2.504.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor	90	100	595.026.600	100	699.000.000	100	763.000.000	100	858.000.000	100	943.000.000	100	943.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	90	100	80.102.500	100	189.000.000	100	210.000.000	100	247.000.000	100	278.000.000	100	278.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan	90	100	390.000.000	100	466.622.000	100	533.000.000	100	645.873.000	100	725.790.000	100	725.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	13,5	15	2.800.000.000	15	3.230.000.000	15	3.580.000.000	15	3.850.000.000	15	4.130.000.000	15	4.130.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	13,5	15	1.700.000.000	15	1.760.000.000	15	1.935.000.000	15	2.170.000.000	15	2.400.000.000	15	2.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat	Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak	90	100	1.000.000.000	100	1.410.000.000	100	1.558.000.000	100	1.775.000.000	100	1.960.000.000	100	1.960.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	90	100	900.000.000	100	1.058.000.000	100	1.183.938.000	100	1.444.000.000	100	1.660.000.000	100	1.660.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date	13,5	15	1.000.000.000	15	1.180.000.000	15	1.295.000.000	15	1.480.000.000	15	1.681.000.000	15	1.681.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	**Pangan**															
	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	81	90	3.612.935.000	91	2.936.775.000	92	3.001.183.000	93	3.145.201.000	94	3.294.831.000	94	3.294.831.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan	Stabilitas harga pangan.	< 10%	< 10%	1.155.000.000	< 10%	2.115.000.000	< 10%	2.195.000.000	< 10%	2.275.000.000	< 10%	2.355.000.000	< 10%	2.355.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
2.4	**Pertanahan**															
	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	90	100	1.400.000.000	100	5.300.000.000	100	1.400.000.000	100	5.300.000.000	100	5.300.000.000	100	5.300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.5	**Lingkungan Hidup**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan administrasi perkantoran	90	100	1.542.778.800	100	1.772.463.000	100	1.958.644.000	100	2.192.999.000	100	2.387.890.000	100	2.387.890.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor	90	100	308.613.900	100	366.554.000	100	402.835.000	100	456.914.000	100	505.049.000	100	505.049.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	90	100	114.726.000	100	164.000.000	100	188.000.000	100	216.000.000	100	244.000.000	100	244.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan , Evaluasi Kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	371.881.300	100	447.000.000	100	505.000.000	100	577.000.000	100	645.000.000	100	645.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	18	20	557.000.000	40	731.080.000	60	824.194.000	80	926.868.000	100	1.031.567.000	100	1.031.567.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	Persentase Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	18	20	650.000.000	40	917.476.000	60	1.013.811.000	80	1.148.551.000	100	1.544.175.000	100	1.544.175.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Regional	18	20	795.000.000	40	1.384.345.000	60	1.275.702.000	80	1.870.363.000	100	1.506.724.000	100	1.506.724.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas	Persentase Penaatan para Pelaku Usaha/ Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	18	20	560.000.000	40	662.519.000	60	716.635.000	80	795.972.000	100	865.367.000	100	865.367.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Nilai Capaian PAD yang dihasilkan dari Kinerja Laboratorium Lingkungan	767700000	853.000.000	1.100.000.000	900.000.000	1.664.530.000	940.000.000	2.103.282.000	990.000.000	2.568.781.000	1.100.000.000	2.772.072.000	1.100.000.000	2.772.072.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran	90	100	1.980.000.000	100	2.115.000.000	100	2.268.000.000	100	2.430.000.000	100	4.730.000.000	100	4.730.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor	90	100	986.000.000	100	1.077.500.000	100	1.144.250.000	100	1.205.675.000	100	1.272.242.000	100	1.272.242.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Pemenuhan Aparatur dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	90	100	350.000.000	100	375.000.000	100	428.000.000	100	505.600.000	100	535.620.000	100	535.620.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuain Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	1.005.000.000	100	981.500.000	100	1.121.100.000	100	1.221.020.000	100	1.375.824.000	100	1.375.824.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dibina	13,5	15	923.000.000	15	982.500.000	15	1.003.125.000	15	1.066.100.000	15	1.135.300.000	15	1.135.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya data kependudukan dan profile kab/kota	13,5	15	2.639.000.000	15	2.928.000.000	15	3.018.000.000	15	3.158.000.000	15	3.295.000.000	15	3.295.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	90	100	1.145.375.211	100	1.354.000.000	100	1.399.000.000	100	1.525.000.000	100	1.545.000.000	100	1.545.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor	90	100	387.000.000	100	450.000.000	100	460.000.000	100	500.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	90	100	261.163.450	100	310.000.000	100	340.000.000	100	370.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	553.577.754	100	630.000.000	100	665.000.000	100	730.000.000	100	730.000.000	100	730.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi	18,855	21	2.209.883.585	21	2.613.359.707	22	2.887.751.851	22	3.268.851.294	23	3.615.416.367	23	3.615.416.367	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang volume usahanya meningkat	2,502	2,78	900.000.000	5,56	1.064.320.288	8,34	1.176.069.591	11,12	1.331.276.648	13,9	1.472.419.192	13,9	1.472.419.192	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pembinaan kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif secara mandiri 2. Persentase lembaga adat yang berfungsi (aktif memberikan masukan dalam pembangunan desa)	1,89	2,1	1.900.000.000	4,2	2.246.898.385	6,3	2.482.813.581	8,4	2.810.472.923	10,5	3.108.440.517	10,5	3.108.440.517	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	Persentase Kader Pengelolaan SDA dan TTG Pedesaan yang aktif 2. Persentase Desa yang menerapkan TTG dalam pengelolaan SDA	11,259	13	720.000.000	17	851.456.230	21	940.855.673	25	1.065.021.318	30	1.177.935.354	30	1.177.935.354	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**															
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB Aktif	66,6	74	370.000.000	74.37	437.000.000	75.59	483.000.000	76.21	590.000.000	77	680.000.000	77	680.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Aseptor KB Aktif	66,6	74	1.000.000.000	74,87	1.040.000.000	75,59	1.070.000.000	76,21	1.100.000.000	77	1.120.000.000	77	1.120.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.9	**Perhubungan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan administrasi perkantoran (%)	90	100	3.142.000.000	100	3.575.000.000	100	3.700.000.000	100	3.690.000.000	100	3.675.000.000	100	3.675.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor (%)	67,5	75	817.000.000	100	1.217.000.000	100	1.217.000.000	100	1.237.000.000	100	1.217.000.000	100	1.217.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Aparatur (%)	58,5	65	310.000.000	100	310.000.000	100	332.049.000	100	373.332.000	100	310.000.000	100	310.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan (%)	63	70	2.618.000.000	100	2.618.000.000	100	2.618.000.000	100	2.618.000.000	100	2.618.000.000	100	2.618.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	Peningkatan Jaringan Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan (%)	67,5	75	1.025.000.000	100	1.325.000.000	100	1.975.000.000	100	1.850.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Meningkatnya Kinerja Angkutan Umum dan Layanan Perizinan (%)	58,5	65	500.000.000	100	795.000.000	100	920.000.000	100	1.005.000.000	100	1.055.000.000	100	1.055.000.000	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ	Meningkatnya pemeliharaan terminal, pelabuhan dan fasilitas LLAJ (%)	63	70	450.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	937.945.000	100	937.945.000	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan	63	70	1.103.000.000	100	1.304.362.014	100	1.535.411.000	100	3.168.098.000	100	4.359.970.000	100	4.359.970.000	Dinas Perhubungan
2.10	**Komunikasi dan Informatika**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	90	100	2.091.149.600	100	2.472.947.716	100	2.732.597.172	100	3.093.220.700	100	3.421.165.339	100	3.421.165.339	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90	100	622.275.200	100	735.889.022	100	813.154.378	100	920.467.158	100	1.018.055.497	100	1.018.055.497	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas SDM	90	100	283.800.000	100	335.615.664	100	370.853.944	100	419.795.903	100	464.302.852	100	464.302.852	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	552.775.200	100	653.699.844	100	722.335.670	100	817.663.017	100	904.352.015	100	904.352.015	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	18,9	21	4.950.000.000	42	5.853.761.583	62	6.468.382.749	83	7.322.021.563	100	8.098.305.557	100	8.098.305.557	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2.11	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	90	100	1.685.000.000	100	1.533.533.000	100	1.706.640.000	100	1.710.954.000	100	1.720.276.000	100	1.720.276.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	90	100	450.000.000	100	350.000.000	100	600.000.000	100	610.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	90	100	215.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	255.000.000	100	255.000.000	100	255.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	600.000.000	100	610.000.000	100	625.000.000	100	640.000.000	100	640.000.000	100	640.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	24,48	27,2	350.000.000	27,5	525.000.000	28	555.000.000	29	900.000.000	29	1.075.000.000	29	1.075.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkat Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha	90	100	275.000.000	105	275.000.000	110	350.000.000	115	530.000.000	115	900.000.000	115	900.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti	18	20	250.000.000	22	250.000.000	24	270.000.000	26	550.000.000	28	900.000.000	28	900.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkat kualitasnya	90	100	2.725.000.000	100	3.475.000.000	100	3.560.000.000	100	3.550.000.000	100	3.650.000.000	100	3.650.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)	225	250	400.000.000	250	870.000.000	250	1.215.000.000	250	1.405.000.000	250	1.455.000.000	250	1.455.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir	130,5	145	750.000.000	150	930.000.000	155	930.000.000	160	930.000.000	160	930.000.000	160	930.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM	135	150	300.000.000	150	400.000.000	150	400.000.000	150	750.000.000	150	900.000.000	150	900.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12	**Penanaman Modal**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan adminstrasi perkantoran	90	100	2.517.000.000	100	2.517.000.000	100	2.517.000.000	100	2.517.000.000	100	2.467.000.000	100	2.467.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90	100	560.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah	90	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah	90	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Persentase izin yang diterbitkan tas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin A)	90	100	540.000.000	100	520.000.000	100	540.000.000	1	520.000.000	100	520.000.000	100	520.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Prosentase izin yang diterbitkan atas izin yang diajukan yang lengkap dan benar (atas izin B)	90	100	703.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayaan Perizinan dan Non Perizinan	Peringkat penilaian indeks pelayanan publik dari Kementrian PAN RB	B Grade	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	B Grade	2.325.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	Persentase kulaitas informasi potensi dan peluang penanaman modal	90	100	3.000.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Promosi Penanaman Modal	Jumlah investment awards	1 kali	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	1 kali	1.850.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah realisasi investasi daerah terhadap target investasi nasional	90	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**															

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan administrasi perkantoran (%)	90	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	100	4.599.700.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor (%)	90	100	293.800.000	100	293.800.000	100	293.800.000	100	293.800.000	100	293.800.000	100	293.800.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Aparatur (%)	90	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan (%)	90	100	604.400.000	100	604.400.000	100	604.400.000	100	604.400.000	100	604.400.000	100	604.400.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Jumlah peserta atau kelompok Peningkatan peran serta kepemudaan	1345 orang/16 kelompok	1345 orang/16 kelompok	3.225.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.335.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.465.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.600.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.740.000.000	1345 orang/16 kelompok	3.740.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Olahraga Prestasi	Jumlah Atlet Pelajar, pelatih, wasit, yang di tingkatkan standarisasi, pelaksanaan peningkatan Prestasi serta pelaksanaan promosi dan pembinaan olahraga	810	900	3.700.000.000	960	4.905.000.000	1.120	4.511.000.000	1.180	5.949.300.000	1.240	4.627.126.000	1.240	4.627.126.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pembudayaan Olahraga	Jumlah Cabang olahraga pelajar, rekreasi dan tantangan yang dibina	9	10	3.300.000.000	11	3.620.000.000	12	3.940.000.000	13	4.260.000.000	14	4.580.000.000	14	4.580.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan sarana prasarana dan kemitraan	Persentase Peningkatan Sarana prasarana dan Kemitraan	18	20	6.750.000.000	40	7.900.000.000	60	9.100.000.000	80	10.650.000.000	100	11.800.000.000	100	11.800.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	Persentase Peningkatan fasilitasi olahraga yang terkelola dengan baik	18	20	650.000.000	40	780.000.000	60	871.000.000	80	990.000.000	100	1.095.000.000	100	1.095.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14	**Statistik**															
	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase pengelolaan data statistik sektoral	81	90	350.000.000	100	413.902.334	100	457.360.396	100	517.718.696	100	572.607.464	100	572.607.464	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.15	**Persandian**		0													
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan keamanan informasi daerah	18	20	350.000.000	40	413.902.334	60	457.360.396	80	517.718.696	100	572.607.464	100	572.607.464	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16	**Kebudayaan**															
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang diakui nilai budayanya	63	70	3.650.000.000	80	5.200.000.000	90	6.700.000.000	100	8.200.000.000	110	9.700.000.000	110	9.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum	49,5	55	4.750.000.000	65	8.405.500.000	75	9.759.500.000	80	11.490.100.000	95	13.261.480.000	95	13.261.480.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase karya seni budaya yang berprestasi	45	50	4.077.000.000	60	7.677.000.000	70	9.477.000.000	80	11.777.000.000	90	13.577.000.000	90	13.577.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.17	**Perpustakaan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran	90	100	5.517.000.000	100	3.436.698.000	100	4.881.698.000	100	6.535.645.000	100	7.580.645.000	100	7.580.645.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor	90	100	1.200.000.000	100	1.900.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah persentase pemenuhan aparatur dalam peningkatkan kapasitas kelembagaan	90	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuain Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	963.000.000	100	1.110.000.000	100	1.110.492.000	100	1.420.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan	Jumlah kunjungan pemustaka	337.500	375.000	2.800.000.000	385.000	2.850.000.000	395.000	3.600.000.000	415.000	3.650.000.000	425.000	3.650.000.000	425.000	3.650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka	Persentase Penyediaan koleksi bahan pustaka	7,2	8	1.800.000.000	8	2.000.000.000	10	2.150.000.000	11	2.500.000.000	13	2.916.226.000	13	2.916.226.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan	144	160	2.525.000.000	320	2.575.000.000	480	2.934.000.000	640	3.129.000.000	800	3.630.000.000	800	3.630.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18	**Kearsipan**		0													
	Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen arsip yang terpelihara	90	100	1.550.000.000	100	1.640.000.000	100	1.680.000.000	100	1.720.000.000	100	1.785.000.000	100	1.785.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase OPD yang tertib arsip	27	30	1.345.000.000	50	1.470.000.000	60	1.560.000.000	80	1.665.000.000	100	1.780.000.000	100	1.780.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Urusan Pilihan**															
3.1	**Kelautan dan Perikanan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)	90	100	3.416.400.000	100	3.517.000.000	100	3.648.000.000	100	3.761.000.000	100	3.872.000.000	100	3.872.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)	90	100	648.300.000	100	880.000.000	100	935.000.000	100	990.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)	90	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)	90	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	169.911	188.790	10.779.800.000	193.510	10.040.000.000	198.348	10.140.000.000	203.306	10.240.000.000	208.389	10.590.000.000	208.389	10.590.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	172.223	191.359	3.380.000.000	205.041	41.000.000.000	223.513	4.100.000.000	239.250	4.100.000.000	265.305	3.600.000.000	265.305	3.600.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	Volume Ekspor Perikanan (kg)	17.873.789	19.859.765	1.200.000.000	21.845.742	1.750.000.000	24.030.316	1.750.000.000	26.433.347	1.750.000.000	29.076.682	1.750.000.000	29.076.682	1.750.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai standar	13,5	15	1.550.500.000	30	2.800.000.000	45	2.300.000.000	60	1.800.000.000	75	1.800.000.000	75	1.800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)	72	80	1.725.000.000	85	1.950.000.000	90	2.000.000.000	95	1.950.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	90	100	2.200.000.000	100	3.000.000.000	100	3.100.000.000	100	3.150.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2	**Pariwisata**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	81	90	2.696.200.000	93	3.188.467.067	96	3.523.243.145	98	3.988.208.997	100	4.411.040.696	100	4.411.040.696	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	81	90	305.000.000	93	360.686.320	96	398.556.917	98	451.154.864	100	498.986.504	100	498.986.504	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	presentase peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	81	90	190.000.000	93	224.689.839	95	248.281.358	98	281.047.292	100	310.844.052	100	310.844.052	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	presentase peningkatan nilai pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63	70	449.800.000	73	531.923.628	75	587.773.447	77	665.342.485	80	735.882.391	80	735.882.391	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	Presentase peningkatan penyelenggaraan event ekonomi kreatif	63	70	1.875.000.000	75	2.217.333.933	80	2.450.144.981	85	2.773.493.016	90	3.067.539.983	90	3.067.539.983	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Presentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata	63	70	3.900.000.000	75	4.612.054.581	80	5.096.301.560	85	5.768.865.474	90	6.380.483.166	90	6.380.483.166	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase kawasan pengembangan pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya	63	70	4.109.000.000	75	4.859.213.403	80	5.369.411.054	85	6.078.017.495	90	6.722.411.623	90	6.722.411.623	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Kemitraan	Presentase Peningkatan Kompetensi SDM pariwisata	63	70	1.100.000.000	75	1.300.835.907	80	1.437.418.389	85	1.627.115.903	90	1.799.623.457	90	1.799.623.457	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	Presentase peningkatan penyelenggaraan event Menara Siger	63	70	375.000.000	70	443.466.787	70	490.028.996	70	554.698.603	70	613.507.997	70	613.507.997	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.3	**Pertanian**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Pelayanan administrasi perkantoran yang tertib (%).	90	100	6.277.065.000	100	6.418.400.000	100	6.653.400.000	100	6.918.400.000	100	7.173.400.000	100	7.173.400.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%).	90	100	3.400.000.000	100	3.630.000.000	100	3.890.000.000	100	3.890.000.000	100	4.230.000.000	100	4.230.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah (%).	90	100	820.000.000	100	847.500.000	100	1.030.000.000	100	1.090.000.000	100	1.260.000.000	100	1.260.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	Peningkatan perencanaan, evaluasi dan keuangan, serta asset perangkat daerah (%).	90	100	840.000.000	100	895.000.000	100	1.105.000.000	100	1.200.000.000	100	1.305.000.000	100	1.305.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan	Pencapaian angka produktivitas Tanaman Pangan	90	100	2.760.000.000	100	3.358.750.000	100	3.967.500.000	100	4.463.750.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	Pencapaian produktivitas Tanaman Hortikultura (%).	90	100	2.145.000.000	100	2.861.000.000	100	3.650.000.000	100	4.391.000.000	100	5.270.000.000	100	5.270.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.	Jumlah komoditas TPH yang meningkat nilai tambahnya (jumlah komoditi/ buah).	1	1	1.750.000.000	2	2.000.000.000	2	2.350.000.000	2	2.700.000.000	2	3.150.000.000	2	3.150.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Indeks Pertanaman (IP)	2	2	16.535.000.000	2	17.920.000.000	2	19.250.000.000	2	20.150.000.000	2	21.500.000.000	2	21.500.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat.	Penyediaan dan pengawasan benih Unggul Bermutu (%).	90	100	800.000.000	100	900.000.000	100	950.000.000	100	1.120.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Luas areal yang menerapkan teknologi tanaman pangan dan hortikultura (Ha).	18	20	1.200.000.000	25	1.225.000.000	30	1.500.000.000	35	1.525.000.000	40	1.800.000.000	40	1.800.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	Jumlah kelompok yang mendapat akses permodalan (klpk)	27	30	2.928.000.000	35	2.900.000.000	37	3.102.000.000	40	3.305.000.000	42	3.860.000.000	42	3.860.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)	9	10	7.235.000.000	10	7.335.000.000	10	7.910.000.000	10	8.115.000.000	10	8.700.000.000	10	8.700.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
	Pertanian															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)	90	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	100	2.792.200.000	Dinas Perkebunan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)	90	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)	90	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)	90	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	Dinas Perkebunan
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	90	100	2.120.000.000	100	2.120.000.000	100	2.225.000.000	100	2.225.000.000	100	2.725.000.000	100	2.725.000.000	Dinas Perkebunan
	Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	90	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Perkebunan
	Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)	Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)	90	100	2.400.000.000	100	2.130.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	Dinas Perkebunan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	90	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	Dinas Perkebunan
	Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	Persentase Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	90	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	Dinas Perkebunan
	Pertanian															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)	90	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	100	1.998.520.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)	90	100	271.925.000	100	271.925.000	100	271.925.000	100	271.925.000	100	271.925.000	100	271.925.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)	90	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)	90	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Hasil Ternak	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak	90	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	100	4.060.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang ASUH	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV (Nomor Veteriner Kontrol)	90	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase menurunnya penyakit ternak menular	90	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Persentase peningkatan sarana & prasarana peternakan yang sesuai standar	90	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Persentase peningkatan kelas kelompok (pemula, madya dan mandiri)	90	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.4	**Kehutanan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	2.762.000.000	12	3.590.600.000	12	4.667.780.000	12	6.068.114.000	12	7.888.548.200	12	7.888.548.200	Dinas Kehutanan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (Bulan)	12	12	6.448.200.000	12	8.382.660.000	12	10.897.458.000	12	14.166.695.400	12	18.416.704.020	12	18.416.704.020	Dinas Kehutanan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan kapasitas sumnberdaya aparatur (Bulan)	12	12	1.285.000.000	12	1.670.500.000	12	2.171.650.000	12	2.823.145.000	12	3.670.088.500	12	3.670.088.500	Dinas Kehutanan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	TERSEDIANYA DOUMEN PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN, SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH (DOKUMEN)	1	1	790.000.000	1	1.027.000.000	1	1.335.100.000	1	1.735.630.000	1	2.256.319.000	1	2.256.319.000	Dinas Kehutanan
	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	penurunan laju kerusakan hutan (Ha)	1.765	1.961	5.800.000.000	1.765	7.540.000.000	1.589	9.802.000.000	1.430	12.742.600.000	1.287	16.565.380.000	1.287	16.565.380.000	Dinas Kehutanan
	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Penurunan Luas Lahan Kritis (Ha)	338.335	375.928	2.720.000.000	359.228	5.150.000.000	342.328	6.850.000.000	325.628	4.850.000.000	308.928	2.375.000.000	308.928	2.375.000.000	Dinas Kehutanan
	Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	Peningkatan produksi /pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Ha)	269.690	299.656	1.640.000.000	301.377	2.132.000.000	303.116	2.771.600.000	304.871	3.603.080.000	306.645	4.684.004.000	306.645	4.684.004.000	Dinas Kehutanan
	Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan	Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak Unit KPH/Tahun	17 Unit/Tahun	17 Unit/Tahun	46.744.000.000	17 Unit/Tahun	60.767.200.000	17 Unit/Tahun	78.997.360.000	17 Unit/Tahun	102.696.568.000	17 Unit/Tahun	133.505.538.400	17 Unit/Tahun	133.505.538.400	Dinas Kehutanan
3.5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan adminstrasi perkantoran	90	100	1.113.000.000	100	1.229.216.000	100	1.248.185.000	100	1.330.084.000	100	1.477.617.000	100	1.477.617.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90	100	215.000.000	100	295.000.000	100	365.000.000	100	445.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Derah	Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah	90	100	90.000.000	100	150.000.000	100	210.000.000	100	230.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah	Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah	90	100	582.000.000	100	722.000.000	100	842.000.000	100	962.000.000	100	1.082.000.000	100	1.082.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Peningkatan Rasio Desa Berlistrik	45	50	875.000.000	51	1.030.000.000	57	1.125.000.000	53	1.250.000.000	54	1.375.000.000	54	1.375.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM	Peningkatan pelaksanaan program/kebijakan Nasional di Bidang ESDM	72	80	125.000.000	81	150.000.000	82	175.000.000	83	200.000.000	84	225.000.000	84	225.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	14	15	1.000.000.000	15	1.180.000.000	15	1.300.000.000	15	1.450.000.000	15	1.600.000.000	15	1.600.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	Jumlah Daerah terlaksananya Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	6	7	500.000.000	7	590.000.000	7	650.000.000	7	750.000.000	7	840.000.000	7	840.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan yang menjadi Pelaksanaan Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	9	10	750.000.000	10	865.000.000	10	955.000.000	10	1.075.000.000	10	1.165.000.000	10	1.165.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	Tersedianya data Administrasi dan Teknis pada Cabang Dinas ESDM	21	21	1.750.000.000	21	2.065.000.000	21	2.275.000.000	21	2.660.000.000	21	2.870.000.000	21	2.870.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.6	**Perdagangan**															
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%)	9	10	760.000.000	13	1.265.000.000	15	1.530.000.000	17,5	1.955.000.000	20	2.265.000.000	20	2.265.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengujian Mutu Barang	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	1	1	1.525.000.000	2	2.075.000.000	3	2.020.000.000	4	2.300.000.000	5	2.750.000.000	5	2.750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah	Pelaku usaha yang menjadi eksportir (UKM)	5	5	1.533.164.500	10	2.750.000.000	10	3.500.000.000	15	4.625.000.000	20	5.750.000.000	20	5.750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)	0 - 2,5	0 - 2,5	1.811.170.000	0 - 2,5	3.005.000.000	0 - 2,5	3.723.060.000	0 - 2,5	4.860.000.000	0 - 2,5	5.710.000.000	0 - 2,5	5.710.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.7	**Perindustrian**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)	76,5	85	2.710.300.000	88	2.927.130.000	90	3.153.500.000	93	3.203.813.000	95	3.471.105.000	95	3.471.105.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)	63	70	1.203.865.500	73	1.100.000.000	75	1.150.000.000	78	1.235.000.000	80	1.285.000.000	80	1.285.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Etos Kerja SDM (%)	90	100	100.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%)	76,5	85	1.006.500.000	88	747.000.000	90	765.000.000	92	840.000.000	95	950.000.000	95	950.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	Prosentase peningkatan akses pada Sumber Daya Industri	45	50	1.015.000.000	50	1.190.000.000	50	1.555.000.000	50	2.000.000.000	50	2.350.000.000	50	2.350.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Prosentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri	45	50	1.200.000.000	50	1.630.000.000	50	1.985.000.000	50	2.450.000.000	50	2.900.000.000	50	2.900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pemberdayaan Industri	Prosentase peningkatan nilai ekspor produk Industri	45	50	2.010.000.000	50	2.730.000.000	50	3.100.000.000	50	3.750.000.000	50	4.150.000.000	50	4.150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Prosentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar	45	50	2.075.000.000	50	2.765.000.000	50	3.325.000.000	50	3.900.000.000	50	4.400.000.000	50	4.400.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri	Prosentasi peningkatan Jumlah IKM yang terlayani	45	50	1.200.000.000	50	1.550.000.000	50	1.895.000.000	50	2.100.000.000	50	2.250.000.000	50	2.250.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.8	**Transmigrasi**															
	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	Persentase Peningkatan Koleksi Cagar Budaya Museum Transmigrasi	49,5	55	450.000.000	65	750.000.000	75	900.000.000	80	1.050.000.000	95	1.200.000.000	95	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Jumlah penempatan transmigrasi ke luar lampung (KK)	22	25	550.000.000	31	650.417.954	35	718.709.194	39	813.557.951	43	899.811.729	43	899.811.729	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**															
4.1	**Inspektorat**															

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kepuasan pelayanan internal	90	100	1.710.000.000	100	1.897.000.000	100	2.004.000.000	100	2.101.000.000	100	2.208.000.000	100	2.208.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	69,3	77	635.000.000	80	698.500.000	82	762.000.000	85	825.500.000	87	889.000.000	87	889.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur Sipil Yang Mengikuti Diklat dan Memenuhi Standar Kompetensi	30,6	34	435.000.000	37	445.000.000	40	455.000.000	44	565.000.000	47	475.000.000	47	475.000.000	Inspektorat
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Prosentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan pelaporan Sesuai Peraturan	90	100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.000.000	100	104.000.000	100	114.000.000	100	114.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan yang Berlaku	72	80	6.760.000.000	82	7.465.000.000	84	8.179.500.000	86	8.894.000.000	88	9.608.500.000	88	9.608.500.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	Rata-rata indeks Maturitas SPIP di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah	3	3	970.000.000	3	1.022.500.000	3	1.095.000.000	3	1.167.500.000	3	1.220.000.000	3	1.220.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku	90	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	Inspektorat
4.2	**Perencanaan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan administrasi perkantoran	90	100	2.593.200.000	100	2.852.520.000	100	3.137.772.000	100	3.451.549.200	100	3.796.704.120	100	3.796.704.120	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90	100	2.351.800.000	100	1.816.980.000	100	1.998.678.000	100	2.198.545.800	100	2.418.400.380	100	2.418.400.380	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Tingkat capaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah	90	100	715.000.000	100	786.500.000	100	865.150.000	100	951.665.000	100	1.046.831.500	100	1.046.831.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	1.100.000.000	100	1.196.250.000	100	1.304.325.000	100	1.422.514.500	100	1.564.765.950	100	1.564.765.950	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah	90	100	1.740.000.000	100	1.529.000.000	100	1.681.900.000	100	1.850.090.000	100	3.535.099.000	100	3.535.099.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi	90	100	2.700.000.000	100	2.970.000.000	100	3.267.000.000	100	3.593.700.000	100	3.953.070.000	100	3.953.070.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	90	100	3.250.000.000	100	3.575.000.000	100	3.932.500.000	100	4.325.750.000	100	4.758.325.000	100	4.758.325.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase tingkat kesesuain hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	90	100	3.200.000.000	100	3.520.000.000	100	3.872.000.000	100	4.259.200.000	100	4.685.120.000	100	4.685.120.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja OPD dan Kabupaten/Kota	90	100	1.300.000.000	100	1.430.000.000	100	1.573.000.000	100	1.730.300.000	100	1.943.925.500	100	1.943.925.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan	90	100	1.050.000.000	100	1.155.000.000	100	1.270.500.000	100	1.397.550.000	100	1.537.305.000	100	1.537.305.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.3	**Keuangan**															

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran berbasis teknologi	90	100	4.460.469.000	100	4.906.515.900	100	5.397.167.490	100	5.936.884.240	100	6.530.572.664	100	6.530.572.664	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	90	100	347.160.800	100	381.876.880	100	420.064.568	100	462.071.025	100	508.278.128	100	508.278.128	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Pemahaman dan Peningkatan Kapasitas pegawai	90	100	1.093.874.000	100	1.203.261.400	100	1.323.587.540	100	1.455.946.294	100	1.601.540.923	100	1.601.540.923	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	386.913.700	100	425.605.070	100	468.165.577	100	514.982.135	100	566.480.348	100	566.480.348	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai peraturan	1 bulan	1 bulan	1.891.345.000	1 bulan	2.080.479.500	1 bulan	2.288.527.450	1 bulan	2.517.380.195	1 bulan	2.769.118.215	1 bulan	2.769.118.215	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Persentase Realisasi Belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) sesuai dengan aturan dan Persyaratan yang berlaku	85	85	1.007.968.000	85	1.108.764.800	85	1.219.641.280	85	1.341.605.408	85	1.475.765.949	85	1.475.765.949	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD	Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu	12 bulan	12 bulan	2.079.851.000	12 bulan	2.287.836.100	12 bulan	2.516.619.710	12 bulan	2.768.281.681	12 bulan	3.045.109.849	12 bulan	3.045.109.849	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terintegrasinya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3.500.662.500	1 Aplikasi	3.850.728.750	1 Aplikasi	4.235.801.625	1 Aplikasi	4.659.381.788	1 Aplikasi	5.125.319.966	1 Aplikasi	5.125.319.966	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah	Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu	90	100	1.231.756.000	100	1.354.931.600	100	1.490.424.760	100	1.639.467.236	100	1.803.413.960	100	1.803.413.960	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah	81	90	12.255.000.000	90	13.480.500.000	90	14.828.550.000	90	16.311.405.000	90	17.942.545.500	90	17.942.545.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Keuangan															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan Administrasi Perkantoran	90	100	11.143.263.700	100	12.457.590.070	100	13.703.349.077	100	15.073.683.985	100	16.581.052.383	100	16.581.052.383	Badan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	100	3.055.402.400	100	4.435.686.962	100	4.970.893.074	100	6.115.977.912	100	6.865.702.892	100	6.865.702.892	Badan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90	100	623.031.000	100	685.334.100	100	753.867.510	100	829.254.261	100	912.179.687	100	912.179.687	Badan Pendapatan Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Pesentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	694.315.000	100	763.746.500	100	840.121.150	100	924.133.265	100	1.016.546.592	100	1.016.546.592	Badan Pendapatan Daerah
	Program peningkatan pelayanan pajak	Peresentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	76,5	85	1.266.754.000	86	1.498.035.535	87	1.655.323.176	88	1.873.777.799	89	2.072.436.557	89	2.072.436.557	Badan Pendapatan Daerah
	Program peningkatan pelayanan pendapatan non pajak	Persentase Realisasi penerimaaan Pendapatan Non Pajak	85,5	95	563.786.000	96	619.470.975	97	684.748.967	98	776.777.651	99	859.476.169	99	859.476.169	Badan Pendapatan Daerah
	Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan yang Berbasis IT	33,3	37	6.211.847.900	39	7.345.995.272	41	8.117.294.909	43	9.188.542.277	45	10.162.715.630	45	10.162.715.630	Badan Pendapatan Daerah
	Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengedalian Pelayanan Pendapatan Daerah	33,3	37	661.540.000	39	782.322.715	41	864.463.419	43	978.547.504	45	1.082.293.547	45	1.082.293.547	Badan Pendapatan Daerah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	Persentase Realisasi Penerimaaan Pajak Daerah Pada UPTD	76,5	85	780.060.000	86	922.481.871	87	1.019.338.717	88	1.153.861.847	89	1.276.194.794	89	1.276.194.794	Badan Pendapatan Daerah
4.4	**Badan Kepegawaian Daerah**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100	100	2.344.380.700	100	2.461.599.735	100	2.584.679.724	100	2.713.913.709	100	2.849.609.414	100	2.849.609.414	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4 dokumen	4 dokumen	1.041.443.800	4 dokumen	1.093.515.490	4 dokumen	1.148.191.790	4 dokumen	1.205.601.379	4 dokumen	1.265.863.449	4 dokumen	1.265.863.449	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	61.601.000	5 dokumen	64.681.050	5 dokumen	67.915.103	5 dokumen	71.310.858	5 dokumen	74.876.401	5 dokumen	74.876.401	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan	45 dokumen	45 dokumen	474.782.900	45 dokumen	498.522.045	45 dokumen	523.448.148	45 dokumen	549.620.554	45 dokumen	577.101.582	45 dokumen	577.101.582	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase Jabatan Sesuai Dengan SKJ	600	600	2.592.861.800	600	2.722.504.890	600	2.858.630.135	600	3.001.561.641	600	3.151.639.723	600	3.151.639.723	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	70	70	1.015.175.300	70	1.065.934.065	70	1.219.230.769	70	1.175.192.307	70	1.233.951.931	70	1.233.951.931	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerntah Provinsi Lampung	60	60	100.370.600	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	Badan Kepegawaian Daerah
	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat	70	70	453.020.900	70	475.671.945	70	499.455.542	70	524.428.319	70	550.649.736	70	550.649.736	Badan Kepegawaian Daerah
4.5	**Pendidikan dan Pelatihan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran	90	100	2.669.322.000	100	3.428.738.197	100	3.788.755.708	100	4.288.871.461	100	4.743.491.837	100	4.743.491.837	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor	90	100	1.555.235.000	100	1.661.830.911	100	1.836.323.157	100	2.078.717.813	100	2.299.061.902	100	2.299.061.902	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	90	100	570.883.000	100	675.126.236	100	746.014.491	100	844.488.403	100	934.004.174	100	934.004.174	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	90	100	677.264.000	100	756.324.406	100	830.488.469	100	933.512.947	100	1.027.165.319	100	1.027.165.319	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Persentase aparatur yang lulus pengembangan	90	100	5.419.336.000	100	6.408.788.000	100	7.081.684.747	100	8.016.261.626	100	8.866.149.261	100	8.866.149.261	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70	90	100	1.380.000.000	100	1.631.957.775	100	1.803.306.706	100	2.041.290.860	100	2.257.709.428	100	2.257.709.428	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70	90	100	2.220.000.000	100	2.625.327.377	100	2.900.971.657	100	3.283.815.731	100	3.628.967.341	100	3.628.967.341	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaaan Kelembagaan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar	90	100	507.960.000	100	600.702.370	100	663.773.677	100	751.372.540	100	831.033.391	100	831.033.391	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.6	**Penelitian dan Pengembangan**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran	90	100	1.376.762.900	100	1.482.000.000	100	1.601.000.000	100	1.725.215.000	100	1.780.957.000	100	1.780.957.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor	90	100	342.505.800	100	365.000.000	100	413.730.000	100	392.000.000	100	418.000.000	100	418.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	90	100	0	100	50.000.000	100	70.000.000	100	130.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	630.731.300	100	716.900.000	100	719.000.000	100	803.000.000	100	885.000.000	100	885.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 dokumen	2 dokumen	975.000.000	2 dokumen	1.210.000.000	2 dokumen	1.350.000.000	2 dokumen	1.525.000.000	2 dokumen	1.750.000.000	2 dokumen	1.750.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen	950.000.000	2 dokumen	1.110.000.000	2 dokumen	1.235.000.000	2 dokumen	1.400.000.000	2 dokumen	1.550.000.000	2 dokumen	1.550.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	4 dokumen	4 dokumen	750.000.000	4 dokumen	985.000.000	4 dokumen	1.125.000.000	4 dokumen	1.275.000.000	4 dokumen	1.500.000.000	4 dokumen	1.500.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Penguatan Inovasi Daerah	3 dokumen	3 dokumen	975.000.000	3 dokumen	1.175.000.000	3 dokumen	1.325.000.000	3 dokumen	1.573.000.000	3 dokumen	1.775.000.000	3 dokumen	1.775.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.7	**Penghubung**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perrkantoran	90	100	3.731.389.100	100	4.086.063.767	100	4.471.874.705	100	4.633.483.101	100	5.429.208.049	100	5.429.208.049	Badan Penghubung
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor	90	100	2.373.513.400	100	2.649.000.000	100	2.838.100.000	100	3.901.300.000	100	3.765.500.000	100	3.765.500.000	Badan Penghubung
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	90	100	164.075.000	100	185.000.000	100	363.000.000	100	215.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Badan Penghubung

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	503.917.900	100	525.100.000	100	553.900.000	100	562.800.000	100	855.200.000	100	855.200.000	Badan Penghubung
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah	90	100	2.702.304.600	100	3.195.686.233	100	3.531.220.295	100	3.997.238.899	100	4.421.027.951	100	4.421.027.951	Badan Penghubung
5	**Urusan Pendukung**															
5.1	**Sekretariat Daerah**															
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terciptanya Kerjasama Informasi dan Media Massa	79,2	88	2.900.000.000	89	3.480.000.000	92	4.176.000.000	93	5.011.200.000	94	6.013.440.000	94	6.013.440.000	Biro Administrasi Pimpinan
	Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah Pelayanan Keprotokolan dan Tamu Pemda	81	90	2.380.000.000	92	2.856.000.000	94	3.427.200.000	95	4.112.640.000	96	4.935.168.000	96	4.935.168.000	Biro Administrasi Pimpinan
	Program Pelayanan Administrasi Umum	persentase dokumen ke tatausahaan yang tepat waktu	90	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	1.492.992.000	100	1.492.992.000	Biro Administrasi Pimpinan
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan yang aktif	90	100	34.450.000.000	100	36.668.000.000	100	39.401.600.000	100	42.681.920.000	100	46.618.304.000	100	46.618.304.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu	90	100	550.000.000	100	660.000.000	100	792.000.000	100	950.400.000	100	1.140.480.000	100	1.140.480.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	90	100	2.750.000.000	100	3.070.000.000	100	3.435.000.000	100	3.710.000.000	100	3.985.000.000	100	3.985.000.000	Biro Hukum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu	90	100	350.000.000	100	385.000.000	100	420.000.000	100	455.000.000	100	490.000.000	100	490.000.000	Biro Hukum
	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan capaian administrasi keuangan dan kerumahtanggaan yang tepat waktu	90	100	52.910.000.000	100	60.846.500.000	100	69.973.475.000	100	80.469.496.250	100	92.539.920.688	100	92.539.920.688	Biro Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu	90	100	7.300.000.000	100	8.395.000.000	100	9.654.250.000	100	11.102.387.500	100	12.767.745.625	100	12.767.745.625	Biro Umum
	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, IKK) Tepat Waktu	90	100	1.800.000.000	100	5.567.156.000	100	5.555.627.000	100	5.904.672.000	100	6.923.006.000	100	6.923.006.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu	90	100	400.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	Jumlah sektor ekonomi yang Ditindaklanjuti kebijakannya	90	100	4.500.000.000	100	3.615.000.000	100	3.745.000.000	100	4.025.000.000	100	4.305.000.000	100	4.305.000.000	Biro Perekonomian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu	90	100	400.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Biro Perekonomian
	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Persentase Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran.	90	100	2.185.000.000	100	2.775.000.000	100	3.375.000.000	100	3.975.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	Biro Organisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu	90	100	515.000.000	100	618.000.000	100	741.600.000	100	889.920.000	100	1.067.904.000	100	1.067.904.000	Biro Organisasi
	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Verifikasi Administrasi Pemerintah yang sesuai dengan 5T (Tepat Waktu; Tepat Mutu; Tepat Sasaran; Teapat Administrasi; Tepat Kinerja)	90	100	2.650.000.000	100	2.882.000.000	100	3.160.400.000	100	3.494.480.000	100	4.206.416.000	100	4.206.416.000	Biro Administrasi Pembangunan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu	90	100	525.000.000	100	603.000.000	100	696.600.000	100	808.920.000	100	943.704.000	100	943.704.000	Biro Administrasi Pembangunan
	Program Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pekerjaan yang selesai di tenderkan	90	100	3.950.000.000	100	4.779.000.000	100	5.256.900.000	100	5.940.297.000	100	6.534.326.700	100	6.534.326.700	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5.2	**Sekretariat DPRD**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan Administrasi Perkantoran	90	100	14.293.660.400	100	16.523.069.856	100	18.110.754.567	100	19.921.830.023	100	21.914.373.024	100	21.914.373.024	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90	100	4.448.437.700	100	7.701.800.285	100	7.001.980.314	100	6.997.178.346	100	7.241.896.180	100	7.241.896.180	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Sumber Daya Manusia yang Terpenuhi	400 Orang	400 Orang	4.038.488.500	400 Orang	8.777.633.042	400 Orang	9.655.396.346	400 Orang	10.620.935.981	400 Orang	11.683.029.580	400 Orang	11.683.029.580	Sekretariat DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Pesentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	90	100	3.612.066.100	100	4.125.303.655	100	4.537.834.019	100	4.991.617.421	100	5.490.779.165	100	5.490.779.165	Sekretariat DPRD
	Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan-kegiatan pada alat kelengkapan dewan dalam rangka tugas dan fungsi	70	70	4.472.403.900	70	12.646.484.991	70	13.911.133.490	70	15.302.246.840	70	16.832.471.522	70	16.832.471.522	Sekretariat DPRD
	Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum	Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	5	5	5.682.219.600	5	11.788.819.409	5	12.967.701.351	5	14.264.471.486	5	15.690.918.632	5	15.690.918.632	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Kunker, Koordinasi, dan konsultasi dalam rangka tugas dan fungsi	90	100	31.660.159.200	100	57.552.434.485	100	63.307.677.935	100	69.638.445.728	100	76.602.290.300	100	76.602.290.300	Sekretariat DPRD
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan kehumasan, protokol dan aspirasi dalam rangka tugas dan fungsi	63	70	11.792.564.600	70	28.987.090.108	70	31.885.799.339	70	35.074.379.273	70	38.581.817.199	70	38.581.817.199	Sekretariat DPRD
6	**Urusan Pemerintah Lainnya (yang diatur Perundang undangan)**															
6.1	**Kesbangpol**															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	90	100	1.302.284.000	100	1.323.284.000	100	1.357.284.000	100	1.382.284.000	100	1.392.284.000	100	1.392.284.000	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	90	100	286.650.000	100	286.650.000	100	286.650.000	100	286.650.000	100	286.650.000	100	286.650.000	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas ASN	90	100	134.000.000	100	152.000.000	100	162.000.000	100	177.000.000	100	177.000.000	100	177.000.000	Badan Kesbangpol

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021		2022		2023		2024				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Prosentase dokumen laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan	90	100	475.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Badan Kesbangpol
	Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase jumlah masyarakat terhadap pembinaan idologi dan wawasan kebangsaan	18	20	1.600.000.000	20	1.600.000.000	20	1.700.000.000	20	1.700.000.000	20	1.800.000.000	20	1.800.000.000	Badan Kesbangpol
	Program Kewaspadaan Nasional	Persentase Pengendalian Kebijakan Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung	90	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Badan Kesbangpol
	Program Politik Dalam Negeri	Prosentase Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	66,6	74	1.600.000.000	75	1.600.000.000	76	1.600.000.000	76	1.600.000.000	77	2.000.000.000	77	2.000.000.000	Badan Kesbangpol
	Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan orkemas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Prov. Lampung	20	20	1.700.000.000	20	1.700.000.000	20	1.900.000.000	20	1.900.000.000	20	2.100.000.000	20	2.100.000.000	Badan Kesbangpol
		JUMLAH		**2.878.385.901.937**		**3.429.765.860.945**		**3.746.067.715.821**		**4.183.671.934.892**		**4.557.273.084.046**				

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 8.1 dan Indikator kinerja daerah per urusan penyelenggaran pemerintah daerah disajikan pada

TABEL 8- 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			(2018)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	68	69	70	71	72	73
2	Tingkat Kasus Kriminalitas Terselesaikan	Persen	72,20	78,85	82,18	85,50	88,83	92,15
3	Indeks Demokrasi Indonesia (TPB)	Indeks	68,67	72	73	74	75	76
4	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	Jumlah	33	60	70	80	90	100
5	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	CC	B	B	BB	BB	A
6	Opini BPK (TPB)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			(2018)	2020	2021	2022	2023	2024
7	Nilai SAKIP (TPB)	Nilai	B	BB	BB	A	A	A
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	CC	B	B	BB	BB	A
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,23	72,1	72,19	72,29	72,39	72,48
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,64	12,71	12,78	12,85	12,92
11	Rata-rata Lama Sekolah (TPB)	Tahun	7,8	7,8	7,9	8	8,1	8,2
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,57	91,03	91,26	91,49	91,72	91,95
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,82	64,24	64,45	64,66	64,87	65,08
14	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	Kab/Kota	3	6	9	13	14	15
15	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Persen	1.60	2.18	2.6	3.12	3.74	4.49
16	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	Peringkat	6 (POPNAS)	4 (POPWIL)	6 (POPNAS)	3 (POPWIL)	5 (POPNAS)	3(POPWIL)
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPB)	Persen	4,06	3,85	3,76	3,66	3,57	3,48
18	Indeks Konektivitas	Nilai	6,01	6,2	6,33	6,46	6,6	6,67
19	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (TPB)	Persen	92,13	94	95	96	97	98
20	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	Persen	30	37	40	45	50	55
21	Persentase Rumah Tangga	Persen	71,19	72,90	74,63	76,44	78,36	80,34

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			(2018)	2020	2021	2022	2023	2024
	yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman (TPB)							
22	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi (TPB)	Persen	64,63	69,31	71,37	73,53	75,99	78,68
23	Persentase penurunan Luasan Kawasan Kumuh (TPB)	Persen	0,55	0,49	0,46	0,43	0,4	0,37
24	Persentase Rumah tidak Layak huni (TPB)	Persen	5,02	3,98	3,25	2,52	1,78	1.03
25	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,33	1,63	2,3	2,92	3,09	3,19
26	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (TPB)	Nilai	9,08	6,23	6,26	6,28	6,29	6,33
27	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,48	7,26	8,2	9,08	9,87	10,73
28	Laju Inflasi	Persen	2,73	3.0 -3.5	3.0 - 3.5	3.0 - 3.5	3.0 - 3.5	3.0 - 3.5
29	Angka Kemiskinan (TPB)	Persen	13,01	11,1	10,62	10,14	9,66	9,18
30	Indeks Williamson	Indeks	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19
31	PDRB Perkapita (Juta)	Rupiah	39,86	45,54	48,2	50,8	53,41	56
32	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,62	59,63	61,15	61,92	62,57	63,32
33	Indeks Resiko Bencana (TPB)	Indeks	145.1	144,7	144,3	143,9	143,5	143,1

TABEL 8- 2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan PDRB/LPE (TPB)	Persen	5,25	5.4 -5.7	5.5 - 5.8	5.6 - 5.9	5.7 - 6.0	5.8 - 6.1	5.8 - 6.1
2	Indeks Wiliamsom	Indeks	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
3	Persentase Penduduk Miskin (TPB)	Persen	13,01	11,1	10,62	10,14	9,66	9,18	9,18
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,02	70,23	70,86	71,49	72,11	72,72	72,72
5	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,57	90,78	91,07	91,36	91,65	91,94	91,94
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06	3,85	3,76	3,66	3,57	3,48	3,48
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	Indeks	56,62	59,63	61,15	61,92	62,57	63,32	63,32
8	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	B	BB	BB	A	CC
9	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	68	69	70	71	72	73	73
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	**Pendidikan**								
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,64	12,71	12,78	12,85	12,92	12,92
1.2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7,8	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,2
1.3	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	71,93	73,43	74,23	75,42	76,6	77,8	77,8
1.4	Persentase Peserta Didik Disabilitas yang Bersekolah	Persen	10	20	25	30	35	40	40
1.5	Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Persen	67	80	85	90	95	100	100

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Persentase Lulusan SMK yang Bekerja	%	NA	47,4	49,4	51,4	53,4	55,4	55,4
2	**Kesehatan**								
2.1	Prevalensi Stunting (TPB)	Persen	27,28	25,18	23,08	20,98	18,88	16,78	16,78
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu (TPB)	Kasus	102	130	125	120	115	110	110
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi (TPB)	Kasus	511	600	580	560	540	520	520
2.4	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate)	Persen	87	90	90	90	90	90	90
2.5	Prevalensi Wasting	Persen	10,64	9,27	7,99	6,71	5,43	4,51	4,51
2.6	% Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	26	30	35	35	40	45	45
2.7	Bapelkes terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.8	% FKTP Terakreditasi	Persen	67,8	50	55	60	65	70	70
2.9	RSBNH Terakrditasi	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
2.10	Labkesda Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Persen Anggaran Kesehatan terhadap APBD	Persen	13	10	10	10	10	10	10
2.12	Penemuan kasus (CDR) TBC	Persen	44,39	58	65	70	75	80	80
2.13	Pelayanan IFKA sesuai standar	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase Jumlah Pelayanan yang memenuhi standar akreditasi	Persen	NA	27	80	80	100	100	100
2.15	Persentase layanan yang minimal memenuhi 80% dari indikator SPM masing-masing layanan	Persen	NA	71	91	91	100	100	100
2.16	Klasifikasi Rumah Sakit pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	Nilai	80	80	80	100	100	100	100

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Akreditasi Rumah Rakit SNARS di RSUAM	Nilai	Paripurna KARS Versi	Paripurna SNARS	Paripurna SNARS	Paripurna SNARS	Paripurna SNARS	Paripurna SNARS	Paripurna SNARS
	Pelayanan sup spesialis di RSUAM	Jumlah	9	11	14	17	20	22	24
	Pencapainan SPM di RSUAM	Nilai rata-rata capaian	72	80	82	85	88	92	95
	Survey kepuasan pasien/penerima layanan di RSUAM	Hasil Survey	82	83	84	85	86	88	90
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi	Persen	73,23	79	80	81	82	83	83
3.2	Jumlah Unit Jembatan Untuk mendukung Terkonektivitasnya Jembatan Non Status di Provinsi Lampung	Unit	4	4	4	4	4	4	20
3.3	Persentase Penanganan Gangguan Infrastruktur Jalan/Jembatan Akibat Bencana Alam yang Cepat dan Tanggap	Persen	10	100	100	100	100	100	100
3.4	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persen	80	80	83	86	90	95	95
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
4.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak (Persen) (TPB)	Persen	71,19	72,90	74,63	76,44	78,36	80,34	80,34
4.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak (Persen) (TPB)	Persen	64,63	69,29	72,55	76,25	80,6	85,06	85,06
4.3	Jumlah Kawasan Kumuh Provinsi (persen)	Persen	0,55	0,53	0,42	0,34	0,27	0,2	0,2

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Rumah Tidak Layak Huni (persen) (TPB)	Persen	5,02	3,9	2,92	1,82	0,83	0	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Pelanggaran Trantibum Linmas yang Terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**								
6.1	Persentase penurunan PMKS	Persen	NA	0.25	0.3	0.3	0.35	0.4	0.4
6.2	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Persen	1.60	2.18	2.6	3.12	3.74	4.49	4.49
6.3	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar anak	Persen	20	20	23	23.8	23	23.5	23.5
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1	**Tenaga Kerja**								
1.1	Persentase Pencanri Kerja yang Ditempatkan	Persen	50,53	60	65	70	75	80	80
1.2	Persentase Tenaga Kerja di Perusahaan yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Persen	76,54	80	82	84	86	88	88
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD (TPB)	Persen	0,4	0.80	0.90	1.00	1.01	1.02	1.02
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Kab/Kota	3	6	9	13	14	15	15
2.3	Persentase Terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TPB)	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Pangan**								
3.1	Capaian Indek Ketahanan Pangan	Indeks	74,1	76	77	78	79	80	80
3.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	NA	cv ≤ 10%	cv ≤ 10%	cv ≤ 10%	cv ≤ 10%	cv ≤ 10%	cv ≤ 10%
3.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	Persen	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)	Persen	88	90	91	92	93	94	94
3.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	90	90	100	100	100	100	100
4	**Pertanahan**								
4.1	Penanganan konflik pertanahan	Persen	NA	40	50	50	50	50	50
4.2	Penataan lahan bagi pembangunan dan relokasi	Lokasi	2	0	2	0	2	0	0
5	**Lingkungan Hidup**								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	Indeks	56,62	59,63	61,15	61,92	62,57	63,32	63,32
5.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	60,71	62.53	64.41	66.34	68.33	70.38	70.38
5.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,39	86.24	87.11	87.98	88.86	89.75	89.75
5.4	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persen	20	20	40	60	80	100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Persentase penduduk ber KTP	Persen	85,96	100	100	100	100	100	100
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1	Persentase Peningkatan jumlah Desa menggunakan sistem aplikasi pemerintahan desa sebanyak 250 Desa/ Tahun	Desa/ Tahun	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
7.2	Menurunkan jumlah Desa Tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri (TPB)	Desa	NA	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
7.3	Pengembangan Ekonomi Desa	Persen	NA	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	NA	0,87	1,33	1,03	1,02	1,01	1,01
8.2	Cakupan KB Aktif (TPB)	Persen	NA	15,9	18,8	23,5	29,7	32,8	32,8
9	**Perhubungan**								
9.1	Persentase konektivitas angkutan penumpang dan barang (yang menjadi kewenangan provinsi)	Persen	15	16,67	25	33	41,6	50	50
9.2	Indeks Kepuasan masyarakat pengguna jasa transportasi darat	Indeks	65	70	75	80	85	90	90
10	**Komunikasi dan Informatika**								
10.1	Persentase Integrasi Sistem Informasi antar OPD	Persen	15	19	39	57	88	100	100
10.2	Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan konumikasi publik	Persen	15	10	20	30	40	50	50
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
11.1	Persentase Koperasi yang memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer Provinsi)	Persen	16,67	21,76	25	28,70	32,87	37,50	37,50
11.2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat Kompetensi (%)	Persen	3,81	5,03	5,64	6,24	6,85	7,46	7,46

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.3	Jumlah Wirausaha Pemula (orang)	Orang	128	150	300	450	600	750	750
11.4	Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya (UMKM)	UMKM	654	680	1.365	2.055	2.750	3.450	3.450
12	**Penanaman Modal**								
12.1	Nilai Investasi	Triliun	14,087	15,691	17,61	19,53	21,449	23,368	23,368
13	**Kepemudaan dan Olahraga**								
13.1	Persentase pemuda yang berprestasi tingkat Nasional	Persen	NA	40	60	80	100	120	120
13.2	Jumlah atlet pelajar berprestasi	Orang	NA	116	150	116	200	116	698
14	**Statistik**								
14.1	Persentase pengelolaan statistik sektoral	Persen	NA	68	70	75	85	90	90
15	**Persandian**								
15.1	Persentase informasi yang diamankan	Persen	20	20	40	60	80	100	100
16	**Kebudayaan**								
16.1	Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Memenuhi Standar untuk Ditetapkan oleh Kementerian	Persen	32	60	75	90	100	120	120
17	**Perpustakaan**								
17.1	Persentase Penduduk gemar membaca	Persen	30	30	35	40	45	50	50
17.2	Jumlah pengelola Perpustakaan Desa dan Sekolah	Orang	NA	160	320	480	640	800	800
18	**Kearsipan**								
18.1	Jumlah OPD tertib Arsip Provinsi Lampung	OPD	NA	20	20	20	20	22	22

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.2	Jumlah Dokumen Arsip yang diakuisisi	Dokumen	NA	100	200	300	400	500	500
	Layanan Urusan Pilihan								
1	**Pariwisata**								
1.1	Jumlah kunjungan Wisatawan	Orang	12.250.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	14.000.000
1.22	Rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan (spending of Money)	Rupiah	1.200.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	900.000
1.3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	3,25	1,875	2,125	2,375	2,625	2,875	2,875
2	**Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan dan Peternakan)**								
2.1	Jumlah produksi Padi	Ton	4.556.378	4.384.652	4.426.130	4.468.021	4.510.332	4.553.066	4.553.066
2.2	Jumlah Produksi Jagung	Ton	2.581.224	2.473.506	2.498.241	2.523.224	2.548.456	2.573.940	2.573.940
2.3	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	NA	105.844	106.902	107.971	109.051	110.142	110.142
2.4	Jumlah Produksi Daging Sapi	Ton	13.475	13.484	13.631	13.777	13.924	14.070	14.070
3	**Kehutanan**								
3.1	Persentase penurunan kerusakan hutan	Persen	NA	63.84	65.11	66.42	67.74	69.10	69.10
3.2	Produksi hasil hutan kayu	M3	NA	726,342	740,869	755,686	770,8	786,216	786,216
3.3	Produksi hasil hutan non kayu	Ton	NA	520,742	531,157	541,78	552,616	563,668	563,668
3.4	Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak (Unit KPH/Tahun)	Unit	17	17	17	17	17	17	17
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
4.1	Pemutakhiran data dan pengembangan potensi PLTMH/PLTS/PLTB/PLTBG/PLTBM dan pemasangan sambungan listrik	Lokasi	1	1	3	5	7	9	9

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Jumlah LTSHE,PLTS, PJUTS dan pembangkit listrik berbasis EBT yang terawasi	Unit	1000	1500	1000	1000	1000	1000	1000
5	**Perdagangan**								
5.1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	11,15	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4	11,4
5.2	Nilai Ekspor Non Migas	Milliar US$	3,45	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8	3,8
5.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Persen	NA	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55	0,10 – 0,55
6	**Perindustrian**								
6.1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (TPB)	Persen	19,44	20,15	20,50	20,85	21,20	21,56	21,56
7	**Transmigrasi**								
7.1	Jumlah penempatan calon transmigran ke luar Lampung	Orang	76	25	30	35	40	45	45
8	**Kelautan dan Perikanan**								
8.1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ribu Ton	142,84	188,79	193,51	198,348	203,306	208,389	208,389
8.2	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	Ribu Ton	160,58	171,746	182,05	192,973	204,552	216,825	216,825
8.3	Jumlah benih bermutu	(juta ekor)	NA	10,634.44	11,485.19	12,404.01	13,396.33	14,468.03	14,468.03
8.4	Konsumsi Ikan penduduk	(Kg/Kap/Thn)	NA	34.54	36.09	37.72	39.41	41.19	41.19
8.5	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	Persen	75	80	85	90	95	95	95
8.6	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil	Ribu Ha	106,24	223,68	341,36	459,04	576,72	694,4	694,4
	Penunjang Urusan								
1	**Perencanaan Pembangunan**								

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	75	75	80	85	90	95	95
1.3	Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase konsistensi Kegiatan KUA PPAS dengan Kegiatan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	80	80	85	90	95	95	95
2	**Keuangan**								
2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase peningkatan PAD	Persen	7,68	2,79	3,95	3.69	4,22	4,26	4,26
2.3	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Persen	NA	85	86	87	88	89	89
2.4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan non pajak	Persen	NA	95	96	97	98	99	99
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
3.1	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Persen	50	60	65	70	75	80	80
3.2	Jumlah aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	Aplikasi	2	4	5	6	7	8	8

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Managerial	Persen	NA	3.24	6.24	9.24	12.24	15.24	15.24
3.4	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Inti	Persen	NA	2.88	5.76	8.64	11.52	14.41	14.41
3.5	Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Umum dan Fungsional	Persen	NA	2.88	5.76	8.64	11.52	14.41	14.41
4	**Penelitian dan Pengembangan**								
4.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang dimanfaatkan	Persen	20	80	80	80	80	80	80
5	**Pengawasan**								
5.1	Indeks SPIP	Indeks		3.02	3.04	3.06	3.08	3.10	3.10
5.2	Persentase temuan selesai ditindak lanjuti	Persen	NA	80	82	84	86	88	88
5.3	Persentase Pengaduan Masyarakat Selesai	Persen	NA	80	85	90	95	100	100
C	**ASPEK DAYA SAING**								
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp)	Rp	922.638	1.302.458	1.369.671	1.436.884	1.504.097	1.571.310	1.571.310
1.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita	Persen	48	51,26	51,09	50,93	50,79	50,66	50,66
1.3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	105,84	106,98	107,48	107,98	108,48	108,98	108,98
1.4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	117,1	117,69	118,27	118,87	119,46	120,06	120,06
2	**Fokus Iklim Berinvestasi**								
2.1	Tingkat Kasus Kriminalitas Terselesaikan	Persen	72,20	78,85	82,18	85,50	88,83	92,15	92,15
2.2	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Persen	CC	B	B	BB	BB	A	A

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2018)	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Fokus Sumber daya Manusia**								
3.1	Rasio Ketergantungan	Persen	49,1	48,6	48,3	48,1	47,8	47,6	47,6

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJMN.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2025.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019-2024, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Lampung dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Lampung berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdaapat dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.

2. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengerahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
6. Penyusunan RKPD Provinsi Lampung pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang selanjutkan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung Tahun 2020 sampai dengan 2024.
7. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung berkewajban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
8. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Lampung berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Lampung.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Lampung. Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 dan RPJMN

Tahun 2020-2024. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung

Bandar Lampung, Lampung

(0721) 481166

https://www.lampungprov.go.id/